



EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Bupati Toba

AUDI MURPHY O. SITORUS

Wakil Bupati Toba

RPJMD

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH**

2025-2029



PEMERINTAH KABUPATEN TOBA



BUPATI TOBA
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TOBA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TOBA

dan

BUPATI TOBA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TOBA TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Toba.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati yang dibantu oleh Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba.

4. Bupati adalah Bupati Toba.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2045.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Toba, yang menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toba.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

FUNGSI RPJM DAERAH

Pasal 2

RPJM Daerah berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; dan
- b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahun 2026.

BAB III

SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 3

RPJM Daerah memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, serta program Perangkat Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dengan mendasarkan pada arah pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Pasal 4

- (1) RPJM Daerah merupakan dokumen perencanaan bagi Pemerintah Daerah untuk Tahun 2025-2029, yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Bab IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Bab V : Penutup

- (2) Rincian sistematika RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RPJM Daerah dituangkan dalam RKPD, yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan oleh Perangkat Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKPD.
- (3) Timbulnya nomenklatur program yang belum terakomodir dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan pada setiap penyusunan RKPD sepanjang untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

BAB IV

PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PENYESUAIAN DOKUMEN PERENCANAAN.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJM Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang bidang Perencanaan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan unsur penunjang bidang Perencanaan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah yang mengakibatkan berubahnya Perangkat Daerah pengampu suatu Urusan Pemerintahan atau Sub Urusan Pemerintahan, pengalihan Program Perangkat Daerah dan pendanaannya dari Perangkat Daerah pengampu sebelumnya kepada Perangkat Daerah pengampu yang baru dilaksanakan melalui penyesuaian dalam RKPD serta dilakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah terkait.
- (5) Dalam hal setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini muncul kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan perlunya dilakukan penyesuaian indikator kinerja dalam RPJM Daerah, penyesuaian indikator dimaksud dilakukan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah yang berkaitan.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur Program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, penyesuaian nomenklatur Program, kegiatan, dan subkegiatan Perangkat Daerah tersebut dilakukan dalam RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

- (1) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dapat dipergunakan sebagai pedoman penyusunan RKPD pada saat terjadi periodisasi Bupati/ Wakil Bupati.
- (2) Rumusan Rencana Program/Kegiatan yang terdapat di dalam RKPD 2026 yang disertai dengan target indikator kinerja dan pagu indikatif merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJM Daerah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Toba.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 19 Agustus 2025
BUPATI TOBA,

Cap/dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

Diundangkan di Balige
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOBA,

Cap/ dto

AUGUS SITORUS

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

U.b. Kepala Bagian Hukum



LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH

NIP. 19750804 200502 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA PROVINSI
SUMATERA UTARA: (2-63/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Keberhasilan penyelenggaraan program pembangunan daerah tidak terlepas dari perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan dan ditetapkan sebelumnya. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/ daerah dalam jangka waktu tertentu. Tahapan perencanaan daerah tersebut meliputi tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Salah satu bentuk perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah RPJMD. Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati terpilih yang berpedoman kepada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan kelanjutan dan pembaharuan dari tahap pembangunan di bawah kepemimpinan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. RPJMD tersebut diarahkan untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan. RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah serta mengacu kepada kebijakan RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025-2045.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 NOMOR 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses sistematis dalam menentukan arah dan tindakan masa depan secara tepat melalui serangkaian pilihan strategis yang mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah, perencanaan menjadi elemen fundamental untuk menjamin agar pelaksanaan pembangunan berlangsung secara efektif, efisien, serta tepat sasaran.

Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan yang selaras dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan bahwa pembentukan daerah otonom ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan peran serta masyarakat berdasarkan prinsip NKRI.

Sebagai implementasinya, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembangunan daerah dengan tetap mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional, serta mempertimbangkan karakteristik, potensi, dan tantangan daerah masing-masing. Dalam hal ini, pembangunan daerah menjadi wujud pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah dalam kerangka desentralisasi, untuk mendukung pemerataan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja dan usaha, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan bahwa setiap kepala daerah wajib menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu lima tahun, terhitung sejak pelantikannya. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih, dan menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Dalam konteks Kabupaten Toba, RPJMD Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi bagian dari pelaksanaan tahap awal pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2045.

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, yaitu Bupati Toba Bapak Effendi Sintong P. Napitupulu, SE dan Wakil Bupati Toba Bapak Audi Murphy O. Sitorus, SH, M.Si, untuk masa jabatan 2025–2030. Telah dilantik secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI (Purn) H.

Prabowo Subianto pada tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tanggal 27 November 2024.

Dokumen RPJMD ini memuat secara komprehensif tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, arah kebijakan keuangan daerah, serta program prioritas Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah, lengkap dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun. Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Toba dan RPJMN, serta menekankan pentingnya transformasi visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program nyata yang menjawab kebutuhan, harapan, serta aspirasi masyarakat.

Selain sebagai pedoman perencanaan pembangunan, RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah juga menjadi instrumen evaluatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dokumen ini menjadi dasar bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyempurnakan rancangan Rencana Strategis (Renstra) menjadi rancangan akhir. Penyempurnaan tersebut dilakukan guna memperjelas strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah agar sejalan dengan arah pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipasi, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah: pendekatan teknokratik; pendekatan partisipasi; pendekatan politis; pendekatan atas-bawah dan bawah-atas; pendekatan holistik-tematik; pendekatan integratif; dan pendekatan spasial. Hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 yaitu:

1. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2025-2029.
2. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029.
3. RPJMD Tahun 2025-2029 disusun secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra PD Provinsi Tahun 2025-2029.
4. Data capaian pembangunan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sebagai salah satu dasar proyeksi target capaian pembangunan RPJMD dan Renstra PD Tahun 2025-2029.
5. Kebijakan pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam serta kebijakan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), dan/atau tujuan pembangunan berkelanjutan, daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta isu-isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2025-2029.
6. Dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba dengan RPJMN Tahun 2025- 2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 tetap berpedoman pada RPJMN Tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Penyelarasan ini mencakup penyelarasan kinerja dan periodesasinya. Aspek penyelarasan dimaksud bermakna bahwa disamping RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah, dan wakil kepala daerah terpilih sekaligus juga merupakan bagian dari upaya mendukung secara seiring sejalan dengan pelaksanaan dan pencapaian 8 (delapan) Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan 8 (delapan) Proyek Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang dicanangkan oleh Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2025 – 2029.

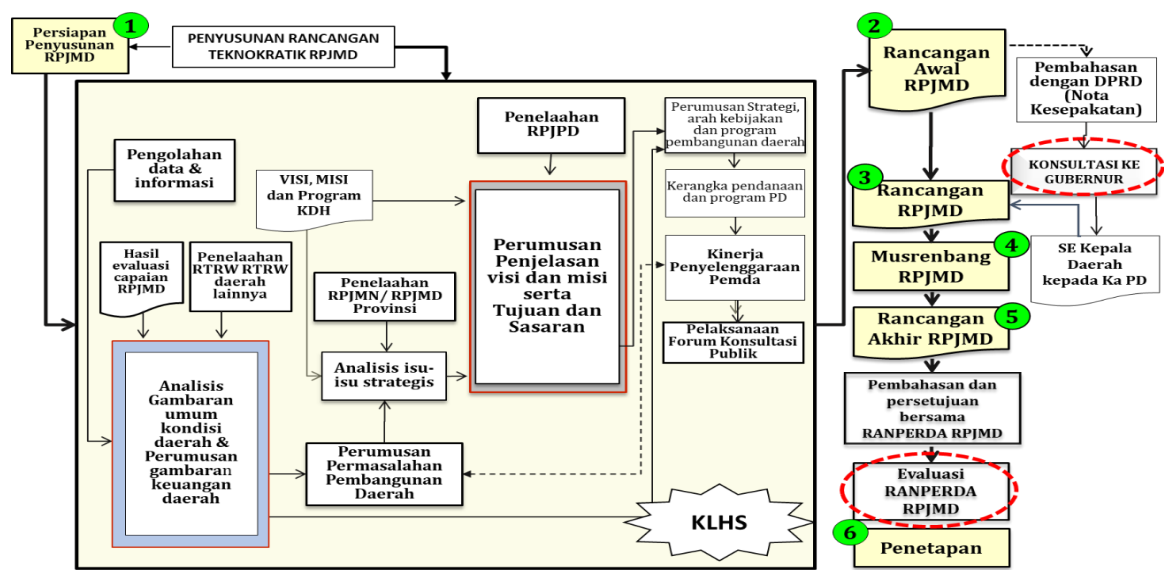
1.3.2 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2045, merupakan tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan tujuan dan sasaran masih mempedomani kebijakan yang diamanatkan dalam RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025-2045.

1.3.3 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029

Pengembangan isu-isu strategis daerah tahun 2025-2029 disusun dengan tetap memperhatikan isu-isu strategis dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029.

Gambar 1.1 Sistem Perencanaan Pembangunan



Gambar I-1 Proses Penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029

1.3.4 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara

Hubungan antara RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 dengan RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Tahun 2017-2037 adalah bahwa penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 berpedoman pada RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2029. Artinya Keseluruhan perencanaan pembangunan di Kabupaten Toba yang merupakan penjabaran RPJMD untuk hal-hal yang menyangkut aspek keruangan menyelaraskan arah dan kebijakan penataan ruang yang tertuang dalam RTRW Provinsi Sumatera Utara tahun 2017-2037.

1.3.5 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RTRW Kabupaten Toba

Dalam pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 memperhatikan dan mempedomani struktur, pola ruang serta kawasan strategis dalam RTRW Kabupaten Toba tahun 2017-2037 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037. Artinya keseluruhan perencanaan pembangunan Kabupaten Toba yang merupakan penjabaran RPJMD untuk hal – hal yang menyangkut aspek keruangan tetap berpedoman pada RTRW Kabupaten Toba Tahun 2017-2037. Dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta dinamika pemangku kepentingan tetap mempertimbangkan keselarasan dan keseimbangan dengan alam dan lingkungan.

1.3.6 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026

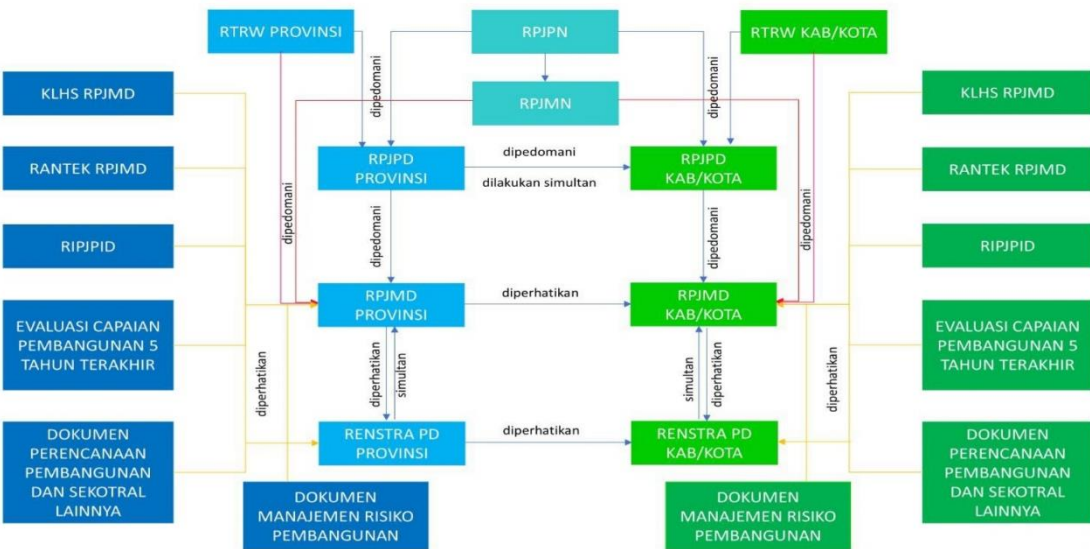
RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dijabarkan ke dalam RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026 sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD Kabupaten Toba sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah pasal 12 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 75 ayat (2) menyatakan bahwa RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD yang ditetapkan dengan peraturan menteri. Pasal 79 ayat (2) berbunyi, RKPD paling sedikit memuat gambaran umum kondisi daerah, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran dan prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan daerah, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penutup.

1.3.7 Hubungan Antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Toba.

1.3.8 Hubungan Antara RPJMD Kabupaten Toba dengan Dokumen Perencanaan lainnya

Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan, RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 mempunyai hubungan dan konsistensi dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sesuai dengan pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004. Untuk menjaga keselarasan dan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025-2045 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 serta RPJMN Tahun 2025-2029 yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di Kabupaten Toba serta dokumen lainnya yang relevan diantaranya RPJMD daerah lain yang berbatasan, RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Utara, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, KLHS RPJMD, dan Rencana Pembangunan Sektoral lainnya.



Gambar 1.2 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan sektoral lainnya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Toba sesuai dengan dengan visi, misi, dan program pembangunan Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2030, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi

satu dengan yang lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi landasan dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Toba Tahun 2026 yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Merumuskan isu-isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal.
4. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Toba 5 (lima) tahun kedepan.
5. Merumuskan program pembangunan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan.
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) beserta target untuk Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dan dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan RPJMD.

BAB II : GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab II RPJMD 2025-2029 berfokus pada analisis strategis yang mencakup kondisi daerah berdasarkan empat aspek pembangunan: geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dserta pelayanan umum. Analisis ini mencakup evaluasi capaian pembangunan lima tahun terakhir, potensi sumber daya, daya dukung lingkungan, ketahanan terhadap bencana, serta kondisi ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Daya saing daerah dianalisis melalui kualitas SDM, transformasi, digital, ekonomi hijau, dan integrasi ekonomi domestik dan global. Selain itu, bab ini juga mengidentifikasi permasalahan utama dan isu strategis, baik dari lingkungan global, nasional, maupun regional, serta potensi daerah untuk menjadi fondasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

BAB III : VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.

Bab III menguraikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Pasangan Kepala Daerah yang menjadi fondasi transformasi pembangunan tahap pertama untuk jangka panjang daerah.

Visi dan misi disusun dengan pendekatan teknokratik untuk memastikan keselarasan dengan kebijakan. Tujuan yang diturunkan dari visi dan misi mencakup fokus pembangunan seperti ekonomi inklusif, peningkatan infrastruktur, produktivitas daerah, kualitas lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran disusun untuk menggambarkan hasil konkret dari penyelenggaraan pembangunan selama lima tahun. Strategi pembangunan yang komprehensif, termasuk tahapan, lokus, dan program prioritas, dirancang untuk menghadapi tantangan lingkungan dinamis dan mencapai sasaran RPJMD, dengan penekanan pada pencapaian outcome dan output yang berkelanjutan dan menyeluruh serta terukur

BAB IV : PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab IV dirancang untuk alokasi program perangkat daerah yang mencakup rencana program dari tahun 2026 hingga 2030, dengan penekanan bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah, sebagai dasar penyusunan RKPD Tahun 2030 untuk kepala daerah periode 2030-2034. Program perangkat daerah ini mencakup seluruh program dalam Renstra Perangkat Daerah, termasuk program penunjang urusan pemerintahan daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja daerah (IKD) yang berlaku dari tahun 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 menjadi tahun transisi yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode berikutnya.

BAB V : PENUTUP

Bab V adalah penutup yang merangkum kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029, termasuk konsistensi perencanaan dan pendanaan, serta kaitannya dengan perencanaan pembangunan lainnya. Dibahas juga skema pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik untuk mendukung implementasi. Bab ini juga menjelaskan pembiayaan pembangunan dan diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum hasil dan rekomendasi untuk pelaksanaan RPJMD yang berkelanjutan dan terukur.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Toba Samosir dimekarkan dari Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal di Daerah Tingkat I Sumatera Utara. Pada tahun 2004 Kabupaten Toba Samosir dimekarkan menjadi Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Samosir. Setelah pemekaran Kabupaten Samosir, bahwa Kabupaten Toba Samosir berubah nama berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir Menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Toba terletak pada wilayah Dataran Tinggi Bukit Barisan dengan luas wilayah 2.081,80 km2 dan terdiri 16 kecamatan, 231 desa, dan 13 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah per-Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH KECAMATAN (Km ²)	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA
1	Balige	91,05	6	29
2	Tampahan	24,45	0	6
3	Laguboti	73,9	1	22
4	Habinsaran	408,7	1	21
5	Borbor	176,65	0	15
6	Nassau	335,5	0	10
7	Silaen	172,58	0	23
8	Sigumpar	25,2	1	9
9	Porsea	37,88	3	14
10	Pintu Pohan Meranti	277,27	0	7
11	Siantar Narumonda	22,2	0	14
12	Parmaksian	45,98	0	11
13	Lumban Julu	90,9	0	12
14	Uluan	109	0	17
15	Ajibata	72,8	1	9
16	Bonatua Lunasi	57,74	0	12
TOTAL		2.021,80	13	231

Sumber: BPS

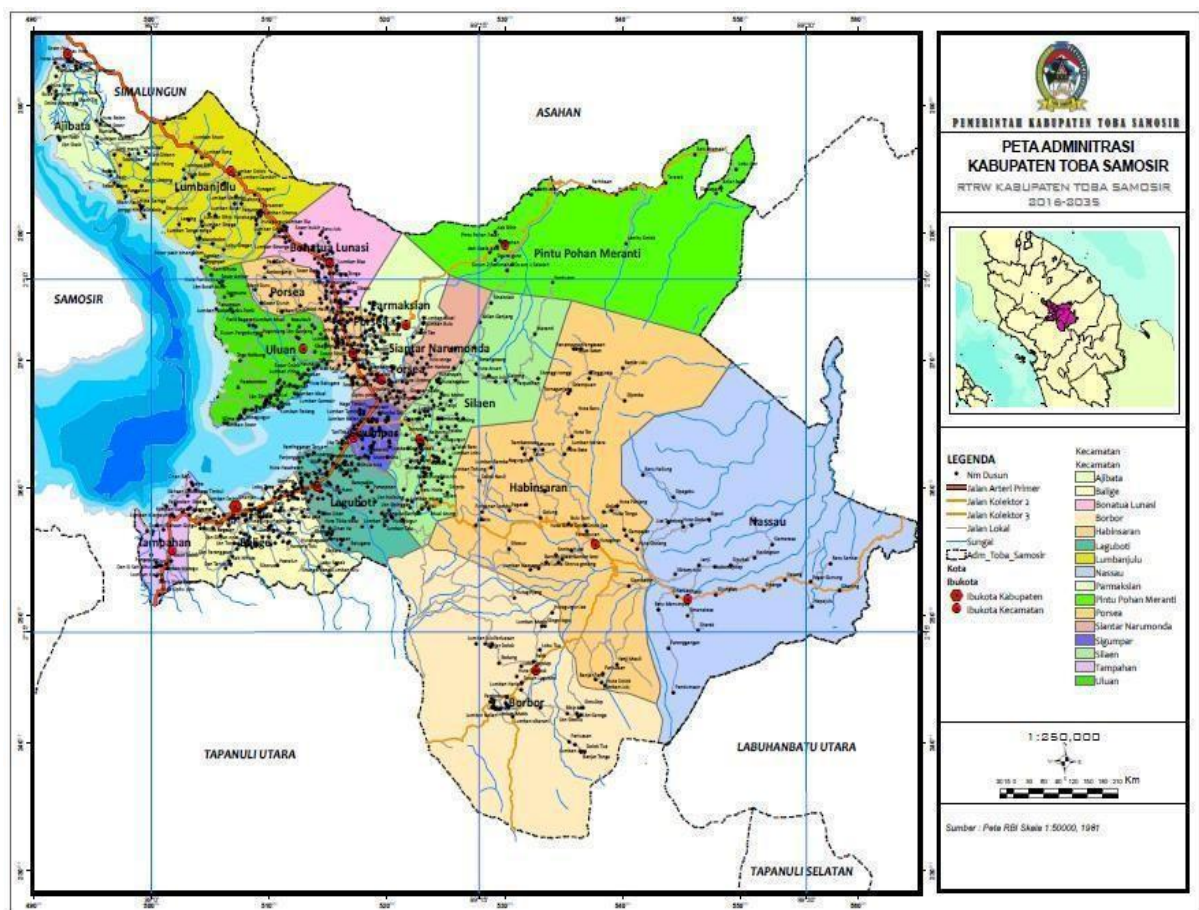
1. Batas Administrasi

Wilayah Kecamatan yang terluas merupakan Kecamatan Habinsaran dengan luas 408,70 km² dan wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Siantar Narumonda dengan luas 22,20 km². Kabupaten Toba berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kabupaten Simalungun
- Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Utara
- Sebelah Barat : Danau Toba dan Kabupaten Samosir
- Sebelah Timur : Kabupaten Labuhan Batu dan Kabupaten Asahan

Kabupaten Toba berada pada 2° 03' - 2° 40' Lintang Utara dan 98° 56' - 99° 40' Bujur Timur, secara umum Kabupaten Toba berada pada ketinggian antara 800-2.200 meter di atas permukaan laut, dengan topografi bergelombang dan berbukit yang diselingi oleh dataran yang relatif rata, serta berbagi Danau Toba dengan kabupaten-kabupaten lainnya di kawasan Danau Toba.

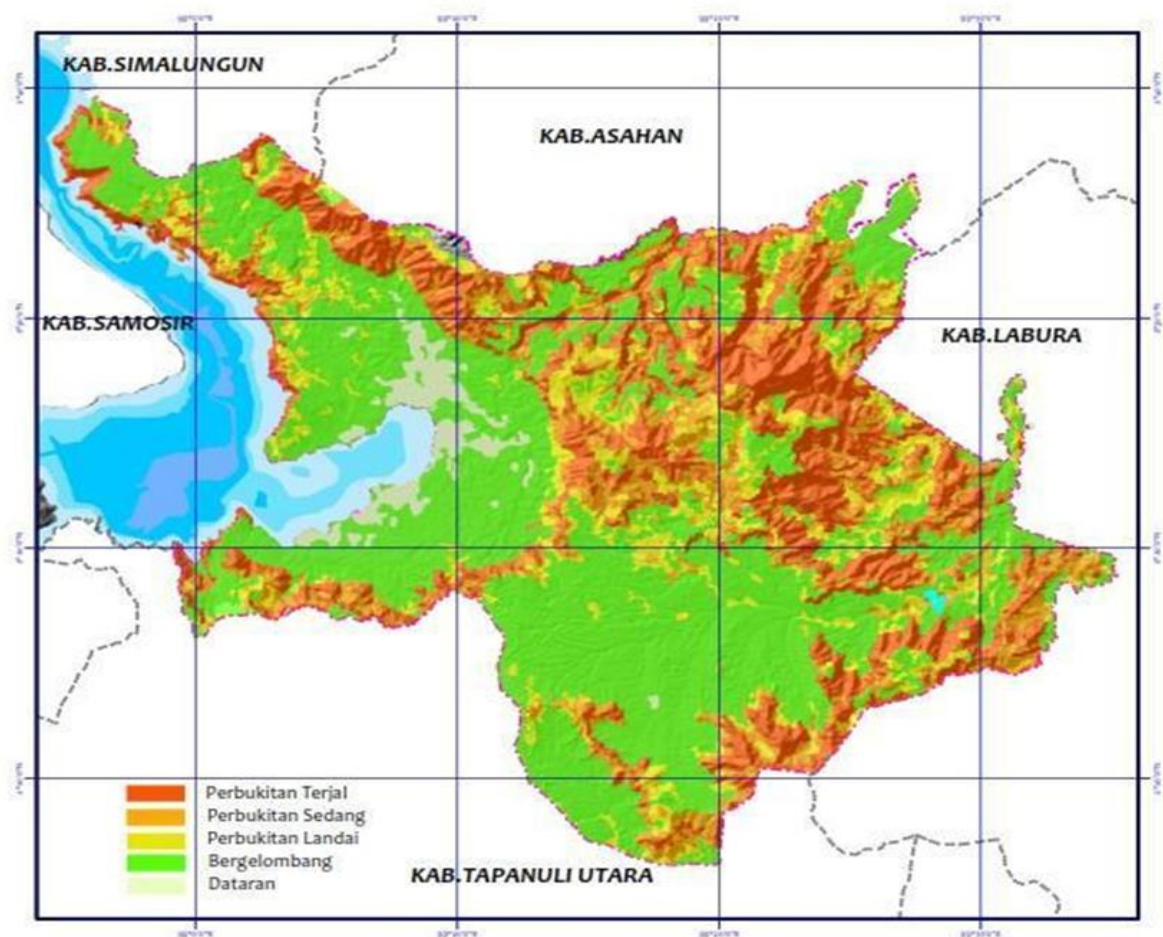
Gambar 2.1. Peta Wilayah Administrasi



2. Morfologi dan kemiringan lereng

Kondisi kewilayahan penting menjadi pertimbangan penting dalam pengembangan suatu wilayah karena lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki keterbatasan dalam menampung aktivitas manusia dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut. Sehingga mengenali dan menganalisis karakteristik fisik suatu wilayah maupun kawasan sangat diperlukan, baik potensi sumber daya alam, kondisi kerawanan bencana, dan kemampuan dan kesesuaian lahan, agar penggunaan lahan dalam pengembangan wilayah dan/ atau kawasan dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem. Salah satunya Adalah terkait tentang morfologi dan kondisi kemiringan lereng.

Gambar 2.2. Gambaran Morfologi Kabupaten Toba

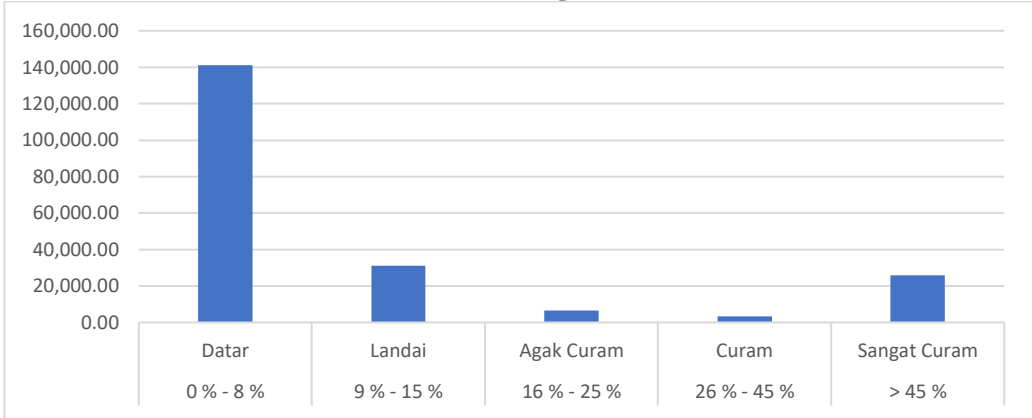


Sumber RTRW Kabupaten Toba 2017-2037

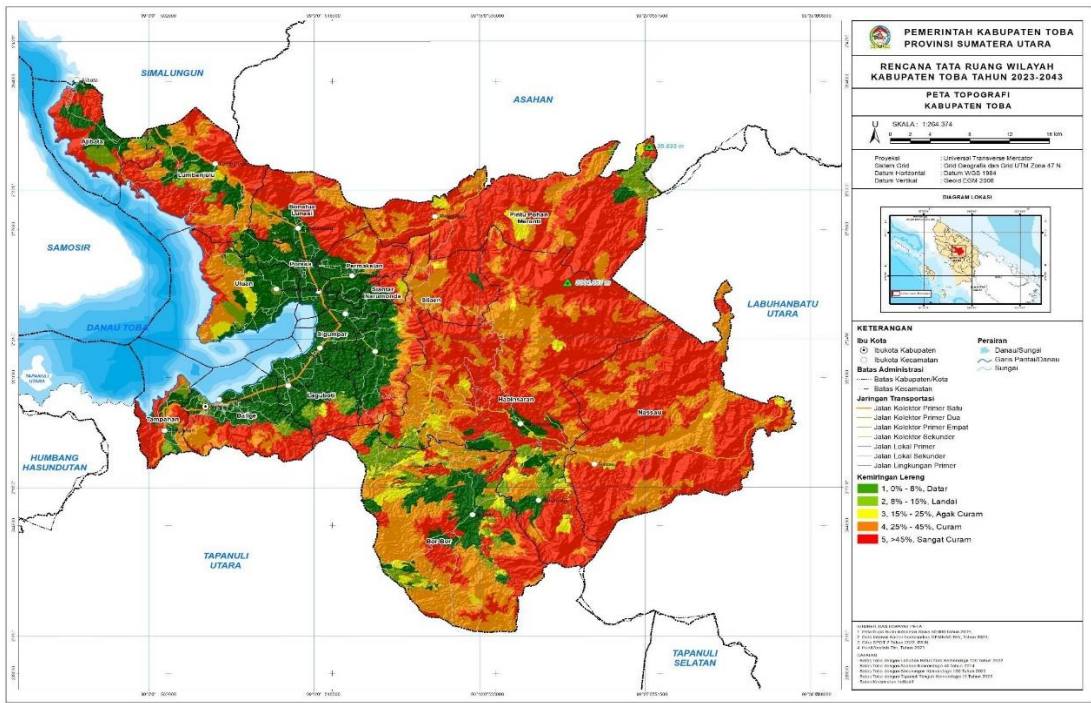
Pada Gambar 2.2 dapat dilihat kondisi morfologi Kabupaten Toba yang menggambarkan pengelompokan bentuk bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum, dan ketinggiannya. Satuan morfologi terdiri dari dataran dengan kemiringan 0%-2% dan satuan morfologi bergelombang dengan kemiringan 2%-5%, perbukitan dengan kemiringan 5%->40%. Morfologi perbukitan terbagi atas tiga kategori yaitu perbukitan landai (5%-15%), sedang (15%-25%) dan terjal (>40%).

Morfologi Kabupaten Toba didominasi kondisi morfologi bergelombang, sedang dan terjal, sedangkan kondisi dataran dan landai tidak terlalu dominan. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri karena kondisi morfologi dataran, bergelombang dan perbukitan landai akan lebih memudahkan dalam pengembangan suatu wilayah. Secara Kemiringan permukaan lahan kabupaten Toba memiliki lahan dengan permukaan datar seluas 141.212,93 ha atau sekitar 67,92% dan lahan dengan permukaan landai sebesar 31.046,57 ha atau sekitar 14,93% dari total luas Kabupaten Toba. Sedangkan lahan dengan permukaan agak curam terdapat seluas 6490,87 ha atau sekitar 3,12 % dan permukaan curam seluas 3341,01ha atau sekitar 1,61% dari total luas Kabupaten Toba terakhir lahan dengan permukaan sangat curam terdapat seluas 25.813,66 ha atau sekitar 12,42%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini.

Grafik 2.1. Luas Wilayah Kabupaten Toba Berdasarkan Kemiringan Lereng



Gambar 2.3. Peta Topografi dan kelereng Kabupaten Toba

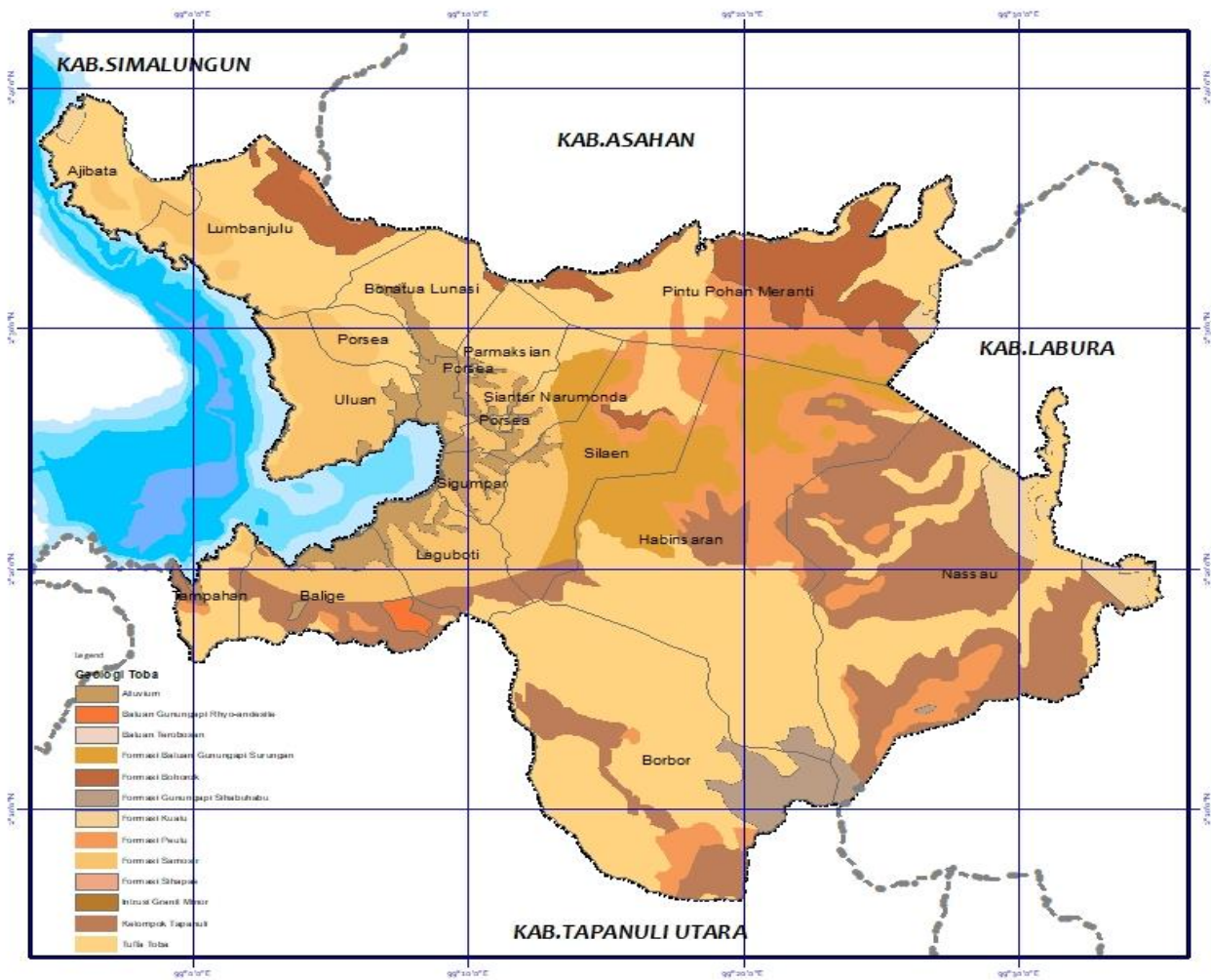


Sumber RTRW Kabupaten Toba 2017-2037

3. Geologi

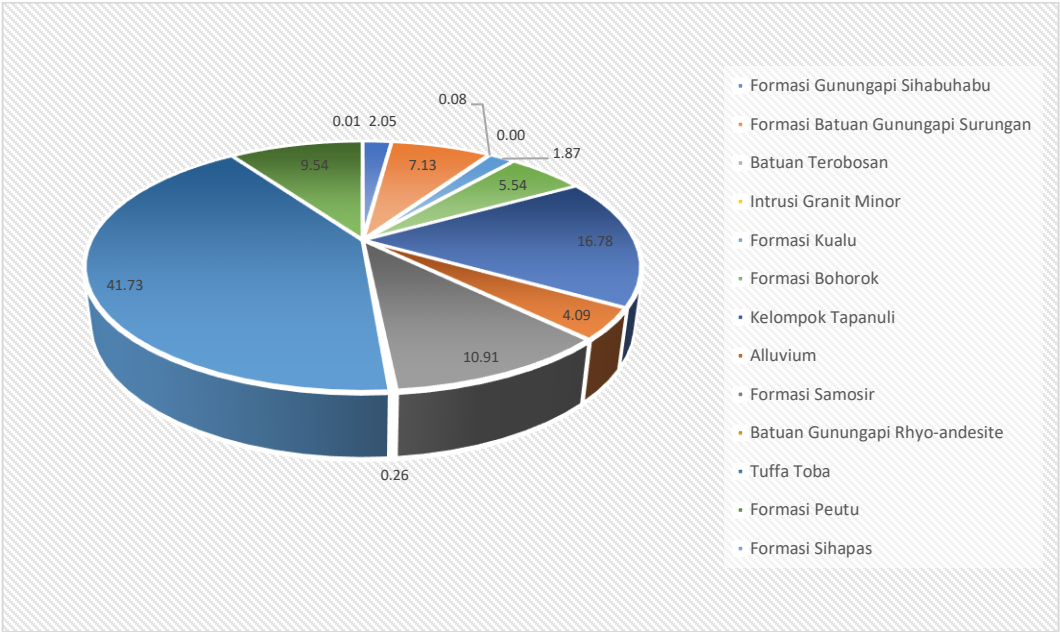
Wilayah Kabupaten Toba terdiri dari formasi geologi yang unik dan beragam dan berpengaruh terhadap kondisi dan potensi sumber daya alam kebencanaan dan tingkat kesuburan tanah untuk pertanian. Pada Gambar 2.4 Peta geologi Kabupaten Toba dapat dilihat sebaran formasi struktur geologi di Kabupaten Toba. dari luas wilayah. Kondisi struktur geologi di Kabupaten Toba terdiri dari berbagai jenis formasi seperti alluvium muda, formasi bohorok, formasi gunung api, formasi kuala, formasi puetu, formasi samosir, formasi sihapas, formasi telisa dan tufa . Pada Gambar 2.4 dapat dilihat jeni formasi yang dominan yaitu formasi Tuffa Toba degan luas sekitar 41,73% dari luas wilayah dan terkecil yaitu formasi kualu sebesar 1,87%.

Gambar 2.4. Peta Geologi Kabupaten Toba



Sumber Peta Badan Geologi EDM

Gambar 2.5. Persentase Jenis Geologi terhadap Luas Wilayah



4. Klimatologi

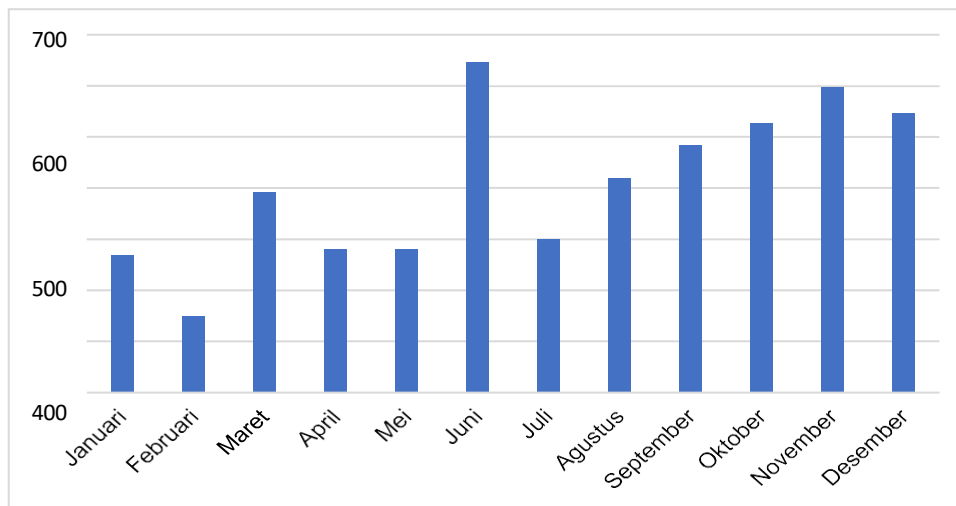
Berdasarkan pengolahan data dari Badan Pusat Statistik kabupaten Toba dalam Kabupaten Toba dalam Angka tahun 2024, rata-rata curah hujan tahunan di kabupaten Toba adalah 3.224,9 mm/tahun. Adapun pada bulan Juni merupakan bulan dengan curah hujan tertinggi sebesar 647,2 mm/bulan dengan hari hujan sebanyak 22 hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.2. Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Toba

Bulan	Curah hujan (mm)	Hari Hujan (hari)	Rata-rata curah hujan (mm)
Januari	268,8	15	134,4
Februari	150,3	16	80,2
Maret	391,7	18	235,0
April	281,1	16	149,9
Mei	280,2	15	140,1
Juni	647,2	22	474,6
Juli	300,0	13	130,0
Agustus	419,1	19	265,4
September	483,1	17	273,8
Oktober	526,7	23	403,8
November	598,3	26	518,5
Desember	546,8	23	419,2
Rata-rata Curah Hujan Tahunan			3.224,9

Sumber: Kabupaten Toba Dalam Angka Tahun 2024, BPS

Gambar 2.6. Rata-rata Curah Hujan di Kabupaten Toba



Sumber: Kabupaten Toba Dalam Angka Tahun 2024, BPS

5. Hidrologi

- Kabupaten Toba merupakan wilayah yang terdiri dari pegunungan dan memiliki potensi sumber daya air dengan keberadaan air permukaan seperti Danau Toba, sungai dan mata air, yang cukup banyak tersebar diseluruh wilayah Kabupaten Toba.
- Danau**
Danau Toba memiliki luas permukaan perairan sebesar 110.260 Ha, dengan luas Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba lebih kurang 369.854 Ha, yang terdiri dari 190.314 Ha daratan di pulau Sumatera (keliling luar danau), 69.280 Ha daratan pulau (di tengah danau).
- Sungai**
Sungai-sungai yang terdapat di DTA Danau Toba wilayah Kabupaten Toba dan mengalirkan airnya dari DTA ini ke dalam Danau Toba terdiri dari Sungai Halian, Sungai Simare, Sungai Aek Bolon, Sungai Mandosi, Sungai Gopgopan, Sungai Bah Tongguran, dan Sungai Silang. Sedangkan satu-satunya sungai yang merupakan pelepasan air dari Danau Toba menuju laut adalah Sungai Asahan yang hulunya ada di KabupatenToba dan bermuara di bermuara di Pantai Timur Sumatera Utara. Air yang mengalir ke Sungai Asahan ini dimanfaatkan sebagai sumber daya energi listrik.
- Daerah Aliran Sungai**
Jika dilihat dari daerah aliran sungai, kabupaten Toba terbagi atas tiga daerah aliran sungai yaitu DAS Asahan Toba, DAS Barumun Bilah dan DAS Kualuh. Lebih setengah luas wilayah kabupaten Toba berada di DAS Asahan Toba dengan luas 121.507,08 ha atau sekitar 53,2 persen dari total luas wilayah kabupaten Toba. Seluas 98.732,14 ha atau sekitar 43,08 persen berada di DAS Kualuh dan 3,89 persen lainnya berada di

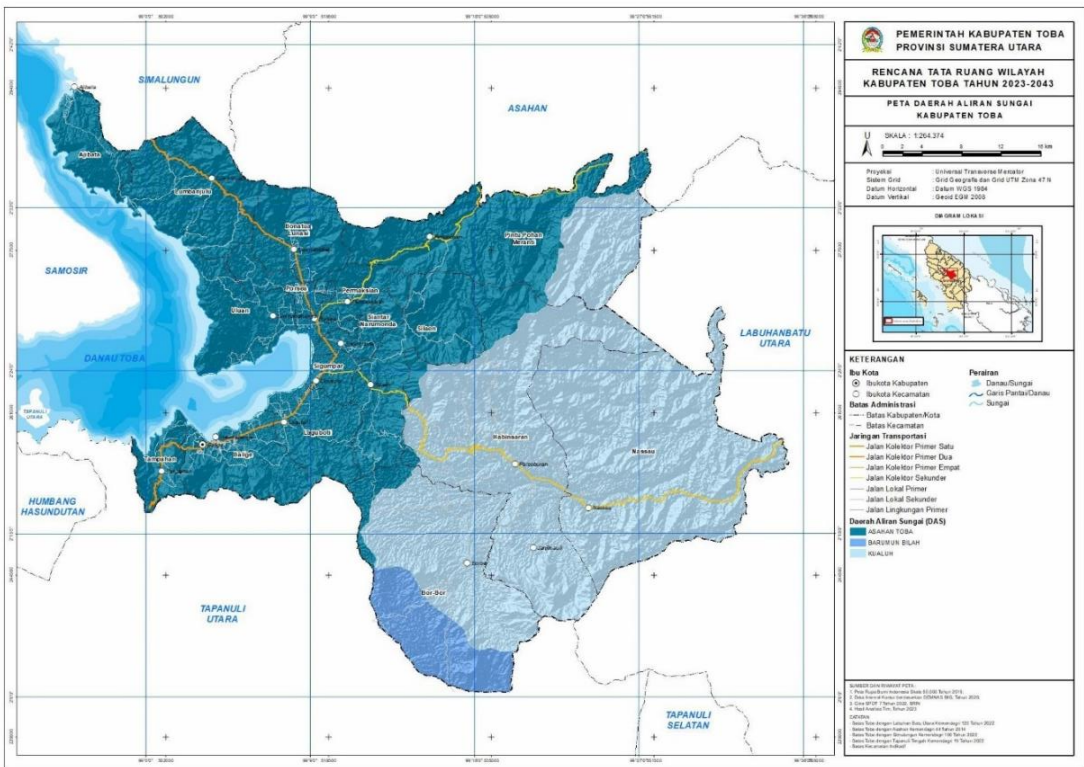
DAS Barumun Bilah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini. Dari ketiga DAS ini, DAS Toba Asahan masuk menjadi Wilayah Sungai Strategis Nasional dan DAS Barumuh Bilah dan Kualuh menjadi wilayah Sungai lintas Kabupaten/Kota.

Tabel 2.3. Luas Wilayah Kabupaten Toba Berdasarkan DAS

No.	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Asahan Toba	121.507,08	53,02
2	Barumun Bilah	8.922,39	3,89
3	Kualuh	98.732,14	43,08
Total		229.161,62	100,00

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029

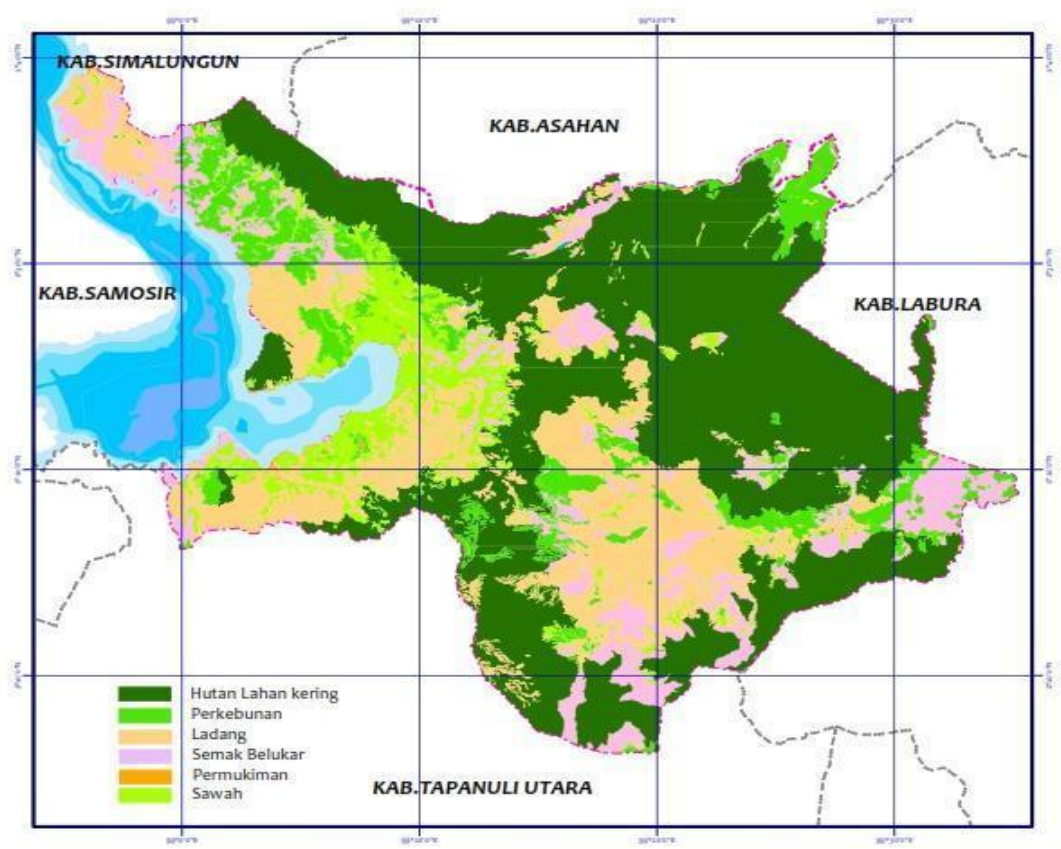
Gambar 2.7. Peta Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Toba



6. Penggunaan Lahan

Pada Gambar 2.8 tutupan lahan terlihat sebaran tutupan lahan yang terdiri dari hutan primer, hutan sekunder, Perkebunan, sawah, permukiman, hutan tanaman, pertanian lahan kering, Semak belukar, tanah terbuka dan tubuh air. Penggunaan lahan terbesar terdiri dari penggunaan lahan pertanian lahan kering sebanyak 79424.14 Ha, dan terkecil penggunaan lahan untuk tubuh air. Untuk lebih jelasnya luasan tiap jenis penggunaan lahan di Kabupaten Toba berdasarkan identifikasi tutupan lahan, dapat dilihat pada gambar 2.8 sebagai berikut.

Gambar 2.8. Peta Tutupan Lahan



Sumber Peta RBI Badan Informasi Geospasial 2024

Tabel 2.4. Luas Penggunaan Lahan Berdasarkan Jenisnya di Kabupaten Toba

No	Penggunaan lahan	Luas (Ha)	%
1	Hutan Primer	7180,89	3,47
2	Hutan Sekunder	57358,25	27,73
3	Hutan Tanaman	9803,98	4,74
4	Perkebunan	14,88	0,01
5	Permukiman	21,27	0,01
6	Pertanian Lahan Kering	79424,14	38,40
7	Sawah	12972,00	6,27
8	Semak/Belukar	34943,70	16,89
9	Tanah Terbuka	4689,72	2,27
10	Tubuh Air	425,72	0,21

Penggunaan Lahan di Kabupaten Toba selain berdasarkan identifikasi tutupan lahan, juga dapat dilihat dari penetapan Kawasan peruntukan hutan dan Areal Penggunaan Lainnya berdasar Sk Menteri Kehutanan no.6609/MENLHK-PKTL/PLA.2/10/2021 seperti yang diraikan dalam table berikut ini.

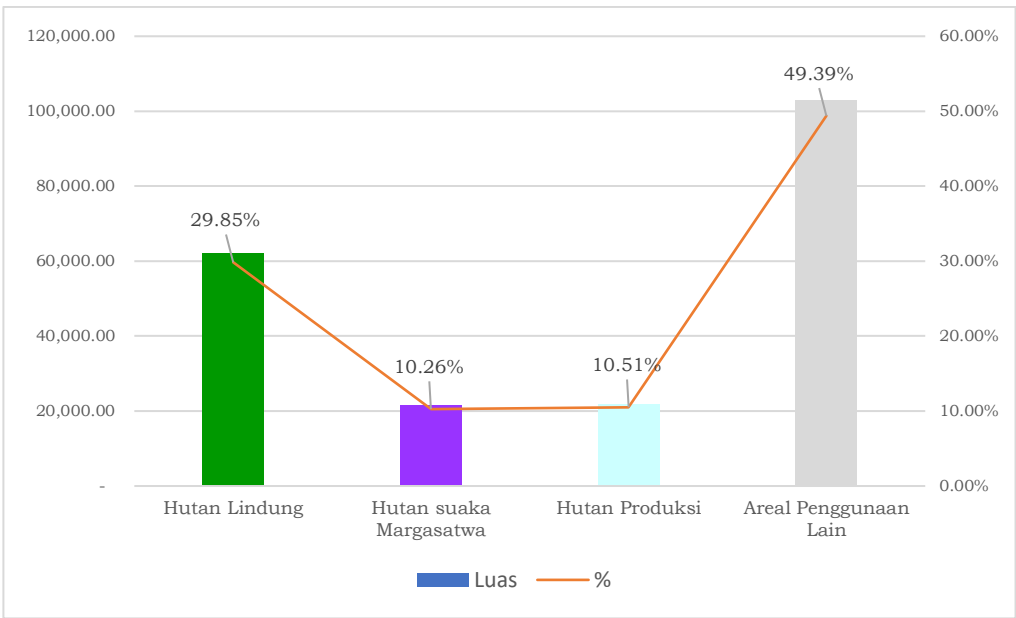
Tabel 2.5 Luas Peruntukan Kawasan Hutan di Kabupaten Toba

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	21.880,2
2	Kawasan Konservasi	21.361,0
3	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	62.141,5
Total		105.382,7

Sumber : SK.6609/MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/ 10/ 2021

Pada Tabel 2.5. tersebut dapat dilihat luas peruntukan kawasan hutan di Kabupaten Toba dengan luas total 105.382,7 ha yang terdiri dari kawasan hutan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahan atau hutan lindung, kawasan suaka margasatwa atau kawasan konservasi dan kawasan hutan produksi.

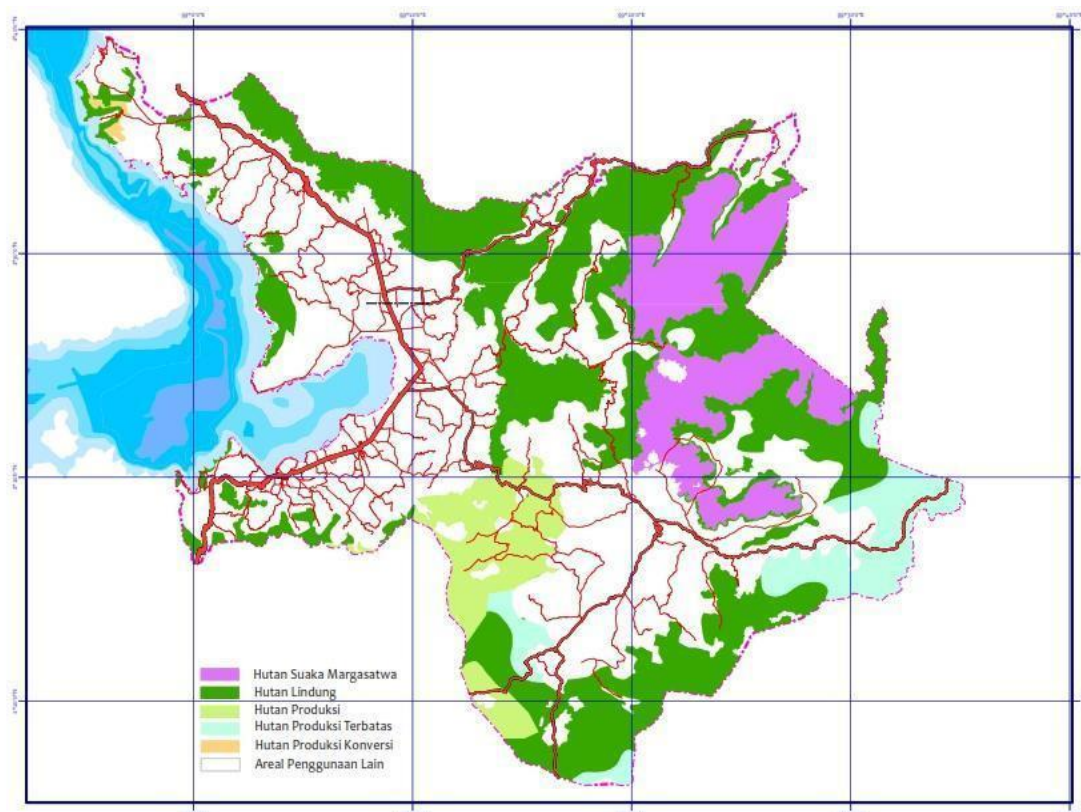
Grafik 2.2. Luas Peruntukan Hutan dan APL



Pada Gambar 2.9. dapat dilihat luas peruntukan Kawasan hutan dibanding luas wilayah Kabupaten Toba. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Toba luas peruntukan kawasan hutan 50,61% dari luas Kabupaten Toba dengan luas APL atau areal penggunaan lainnya hanya sekitar 49,39%, dan bila diperhatikan seperti yang disajikan pada gambar 2.9. sebaran peruntukan hutan ini cenderung berada di wilayah bagian Timur Kabupaten Toba.

Hal ini menggambarkan berdasarkan peruntukan lahan yang dapat dibangun atau diolah dengan kegiatan budidaya hanya sekitar 49,39% dari luas wilayah, dan sebarannya dominan di wilayah bagian Barat Kabupaten Toba. Kondisi tentunya berpengaruh terhadap perumusan kebijakan Pembangunan di Kabupaten Toba.

Gambar 2.9. Kawasan Hutan Kabupaten Toba



Sumber : SK.6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/ 10/2021

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota merupakan urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. Berdasarkan Pola Ruang dalam RTRW Kabupaten Toba, maka Kabupaten Toba dibagi menjadi 2 (dua) fungsi kawasan yaitu Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya, kemudian diklasifikasi menjadi:

1. Kawasan peruntukan Hutan Produksi
 - a) Kawasan Peruntukan hutan produksi terbatas seluas kurang lebih 10.670,73 ha meliputi Kecamatan Nassau dan Borbor
 - b) Kawasan peruntukan hutan produksi seluar kurang lebih 11.192,85 ha. (meliputi Balige, Laguboti, Habinsaran, Silaen dan borbor)
 - c) Kawasan peruntukan hutan produksi yang dapat di konversi seluar kurang lebih 386,76 ha yang berada di Ajibata.
2. Kawasan peruntukan Pertanian
 - a) Peruntukan pertanian lahan basah seluas 20.567,47 berlokasi di Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti, Ajibata, Habinsaran, Borbor, Tampahan, Siantar Narumonda, dan Nassau.

- b) Kawasan peruntukan lahan kering memiliki luas kurang lebih 61.954.01 ha tersebar di Kecamatan Balige, Laguboti, Sigumpar, Silaen, Porsea, Lumban Julu, Uluan, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti, Ajibata, Habinsaran, Borbor, Tampahan, Siantar Narumonda, Nassau.
 - c) Kawasan perkebunan memiliki luas lebih kurang 11.055,79 ha tersebar di Kecamatan Habinsaran, Nassau dan Pintu Pohan Meranti.
3. Kawasan Peruntukan Perikanan
- a) Perikanan budidaya meliputi kolam air tenang di seluruh kecamatan, kolam air deras di Kecamatan Balige, Laguboti, Habinsaran, Pintu Pohan Meranti, dan Lumban Julu; mina padi ada di Kecamatan Porsea, Uluan, Sigumpar, Silaen, Lumban Julu, dan Bonatua Lunasi serta perbenihan ada di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Silaen, Sigumpar, Porsea, Bonatua Lunasi, dan Ajibata.
 - b) Pengembangan kawasan perikanan tangkap memanfaatkan perairan danau, waduk, dan sungai berlokasi di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Sigumpar, Porsea, Uluan, Siantar Narumonda, Lumban Julu dan Ajibata.
4. Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan
- Wilayah Usaha pertambangan (WUP) radioaktif berada di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Borbor, Sigumpar, Silaen, Siantar Narumonda, Porsea, Parmaksian, Bonatua Lunasi, Pintu Pohan Meranti.
5. Kawasan Peruntukan Pariwisata
- a) Kawasan peruntukan Pariwisata Budaya :
 - ✿ Makam Sisingamangaraja XII di Balige
 - ✿ Gereja dan Makam DR.I.L Nomensen di Kecamatan Sigumpar.
 - ✿ Perkampungan tradisional di Nagatimbul Kecamatan Bonatua Lunasi, Hutatinggi, Jangga Dolok di Kecamatan Lumban Julu.
 - ✿ Tugu D.I. Panjaitan - Rumah adat Batak di Kompleks tugu D.I.Panjaitan dan Desa Meat.
 - ✿ Mual Sisingamangaraja XII di Dolok Tolong Balige, dan Partapaan SM.Raja XII di Simare Kecamatan Borbor.
 - ✿ Aek Mual di Desa Sibarani Sampulu Kecamatan Laguboti
 - ✿ Perkampungan Batak Talak Batu dan Desa Adat Hutagaol Sihujur di Kecamatan Silaen.

- ✿ Makam Raja Namora Paut Lubis di Desa Lumban Rau Barat Kecamatan Habinsaran.
 - ✿ Perkampungan tradisional di Naga Timbul Kecamatan Bonatua Lunasi
 - ✿ Huta Tinggi Pardomuan Nauli Kecamatan Laguboti, Jangga Dolok Kecamatan Lumban Julu.
 - ✿ Gereja HKBP Kota Balige.
- b) Kawasan Peruntukan Pariwisata Alam
- ✿ Kawasan wisata pantai dengan daerah pengembangan potensi pantai danau toba di Lumban Silintong, Lumban Bulbul, Sibola Hotang, Lumban Gaol, Janji Maria, Pakkodian, Lumban Binanga, Pantai Pasifik dan Pantai Pasir Putih, Pantai Sigaol Siregar Aek Nalas, Pantai Longbeach dan Pantai Lumban Binanga di Sigumpar.
 - ✿ Panorama Alam (pegunungan) Dolok Tolong Balige, Bukit Holong Silaen, Bukit senyum Motung ajibata, tarabunga dan gurgur tampahan.
 - ✿ Air terjun Siharimo Pintu Pohan, Sampuran Bonan Dolok, Air Terjun Siboruon di Kecamatan Balige.
 - ✿ Mual Sirambe di Kecamatan Balige.
 - ✿ Ekowisata Jangga Dolok di Kecamatan Lumban Julu, Ekowisata di Kecamatan Tampahan.
 - ✿ Kawasan yang merupakan hasil bentukan geologi alam seperti batu manumpak Kecamatan Nassau.
 - ✿ Wisata geopark kaldera danau toba meliputi Taman Eden 100 Kecamatan Lumbanjulu, Gua Liang Sipege, Batu Basiha Sibodjala, Air Terjun Situmurun Kecamatan Lumban Julu, sumber air panas, Siregar Aek Nalas Kecamatan Uluan.
 - ✿ Kawasan pengembangan wisata Sibodjala dan Bukit Pahoda.
 - ✿ Kawasan eko tourism yang merupakan cakupan wilayah kawasan pariwisata danau toba yang berada di Ajibata.
 - ✿ Kawasan peruntukan pariwisata buatan.
 - ✿ Museum TB Silalahi Center, Balige
 - ✿ Kawasan agrowisata Rest House Gurgur, Tampahan.
 - ✿ Kawasan agrowisata sionggang tengah, Lumban Julu.
 - ✿ Kawasan agrowisata tornagodang, Habinsaran.
 - ✿ Kawasan wisata Bukit Gibeon, Ajibata.

2.1.2. Potensi Sumber Daya Alam

Wilayah Kabupaten Toba memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan pertanian, perikanan, industri, pariwisata, permukiman, hutan rakyat dan peruntukkan lainnya dengan tetap berpedoman pada Rencana tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir.

2.1.3. Potensi Pertanian

Pertanian merupakan sektor utama penggerak perekonomian di Kabupaten Toba. Iklim tropis basah dengan curah hujan tinggi dan suhu berkisar antara 17-29°C membuat Kabupaten Toba sesuai untuk menjadi kawasan pertanian yang produktif. Komoditas pertanian yang banyak dikembangkan adalah padi, jagung, cabe dan lainnya, dengan potensi lahan yang luas. Surplus hasil pertanian dari Kabupaten Toba memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan untuk daerah lainnya. Besarnya produksi pertanian merupakan salah satu faktor yang membuat Kabupaten Toba termasuk kepada kelompok daerah dengan ketahanan pangan paling baik dengan predikat Sangat Tahan pada tahun 2023.

2.1.4. Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu penggerak perekonomian yang berpotensi memberikan kontribusi terhadap kemakmuran daerah, sehingga pembangunan sektor pariwisata bertujuan untuk menghasilkan manfaat sosial, budaya, dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan sektor pariwisata dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mendorong meningkatnya pendapatan daerah (PAD), meningkatnya pendapatan masyarakat, memperluas penciptaan kesempatan kerja seperti perhotelan, restoran, dan agen perjalanan. Tingkat keberhasilan pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Toba dapat dilihat dari perkembangan tingkat kunjungan wisatawan.

Sumber daya alam dan keindahan Danau Toba menjadi sumber potensial yang dapat menjadi andalan bagi Kabupaten Toba di masa mendatang. Perencanaan pengembangan pengelolaan dan penyediaan sarana dan prasarana yang baik akan menjadikan Kabupaten Toba sebagai tempat pariwisata yang indah. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung di Sumatera Utara melalui 3 (tiga) pintu masuk pada Desember 2024 mencapai 21.400 kunjungan atau mengalami kenaikan 10,75 persen bila dibandingkan wisatawan mancanegara yang datang pada November 2024 yang berjumlah 19.322 kunjungan. Kabupaten Toba memiliki berbagai potensi alam, budaya dan sejarah

yang dapat digali serta dilestarikan dan dijadikan sebagai aset dalam mendukung pengembangan sektor pariwisata. Potensi tersebut sangat berhubungan dengan daya tarik dan nilai objek wisata yang tersebar di beberapa kecamatan yang terdiri atas objek wisata rohani, wisata alam atau rekreasi, sejarah atau budaya serta objek wisata hutan atau kebun. Kawasan wisata di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6. Kawasan Wisata Kabupaten Toba

No	Nama Objek Wisata	Jenis Wisata	Lokasi Wisata
1.	Tugu D.I. Panjaitan	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
2	Museum T.B Silalahi Center	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
3	Museum Batak	Wisata Budaya	Kecamatan Balige
4	Pantai Lumban silintong	Wisata air	Kecamatan Balige
5	Mual Sirambe	Wisata Air	Kecamatan Balige
6	Kolam Renang Pagar Batu	Wisata Air	Kecamatan Balige
7	Rest House Gurgur	Wisata Alam/Rekreasi	Kecamatan Tampahan
8	Bukit Dolok Tolong	Wisata Alam/Rekreasi	Kecamatan Tampahan
9	Pantai Tarabunga	Wisata Air	Kecamatan Tampahan
10	Pantai Lintong Ni Huta	Wisata Air	Kecamatan Tampahan
11	Pantai Meat	Wisata Air dan Alam	Kecamatan Tampahan
12	Pantai Pasifik	Wisata Air	Kecamatan Porsea
13	Pantai Siregar Aek Na las	Wisata Air	Kecamatan Uluan
14	Rumah Adat Lumban Nabolon	Wisata Budaya	Kecamatan Uluan
15	Agrowisata Lumban julu	Wisata Alam	Kecamatan Lumban Julu
16	Taman Eden 100	Wisata Alam	Kecamatan Lumban Julu
17	Jangga Dolok	Wisata Budaya	Kecamatan Lumban Julu
18	Kawasan makam DR. I L Nommensen	Wisata sejarah	Kecamatan Sigumpar
19	Bukit senyum Motung	Wisata Alam	Kecamatan Ajibata
20	Pantai Ajibata	Wisata Air	Kecamatan Ajibata
21	Makam Raja Sisingamangaraja XII	Wisata Sejarah	Kecamatan Balige
22	Pasar Tradisional Balige	Wisata Budaya	Kecamatan Balige
23	Gereja Tua HKBP	Wisata Rohani	Kecamatan Balige dan Kecamatan Sigumpar
24	Pantai Lumban Binanga	Wisata Air	Kecamatan Laguboti
25	Pantai Pasifik	Wisata Air	Kecamatan Porsea
26	Pantai Sigaol	Wisata Air	Kecamatan Uluan
27	Pantai Lumban Bulbul	Wisata air	Kecamatan Balige
28	Pantai Lumban Gaol	Wisata air	Kecamatan Balige

2.1.5. Potensi Perkebunan

Sektor perkebunan rakyat Kabupaten Toba merupakan usaha kecil tanaman perkebunan rakyat atau usaha rumah tangga perkebunan rakyat sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat. Sektor perkebunan juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Toba. Berbeda dengan tanaman hortikultura yang memiliki siklus panen lebih singkat, tanaman perkebunan cenderung membutuhkan waktu tanam lebih Panjang, namun menghasilkan produksi yang stabil dan berkelanjutan. Kabupaten Toba dikenal dengan sejumlah komoditas perkebunan unggulannya, seperti kopi dan kelapa sawit, yang menjadi andalan bagi pendapatan masyarakat.

Berdasarkan data di bawah ini luas areal perkebunan kopi di Kabupaten Toba tercatat sebesar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 5.792,48 ha, 5.701,35 ha, 4.616,46 ha, 4.672,66 ha, dan 4.700,22 ha dengan total produksi sebesar 4.168,34 ton, 4.254,29 ton, 4.373,74 ton, 4.380,31 ton dan 4.320,49 ton. Pada tahun 2024, luas areal perkebunan kopi di Kabupaten Toba tercatat sebesar 4.700,22 ha dengan total produksi mencapai 4.320,49 ton, di mana produksi terbesar berasal dari Kecamatan Uluan. Berdasarkan data tersebut luas areal perkebunan kopi mengalami penurunan dan produksinya juga menurun tetapi tidak signifikan.

Sedangkan luas areal perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Toba tercatat sebesar dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 2.699,00 ha, 4.849,82 ha, 4.760,28 ha, 4.300,68 ha, dan 4.337,16 ha dengan total produksi sebesar 16.275,00 ton, 33.852,83 ton, 33.618,92 ton, 30.014,93 ton dan 30.012,3 ton. Berdasarkan data tersebut luas areal perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai tahun 2021 dan produksinya juga mengalami peningkatan, tetapi pada tahun 2022 sampai tahun 2024 luas areal perkebunan kopi mengalami penurunan dan produksinya juga menurun tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2024 tanaman kelapa sawit memiliki luas areal tanam sebesar 4.337,16 ha dengan total produksi mencapai 30.012,34 ton. Produksi kelapa sawit tertinggi terdapat di Kecamatan Nassau, yang menghasilkan sekitar 4.215,81 ton. Perkembangan luas tanaman dan produksi perkebunan rakyat di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.7. Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan Rakyat Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Tanaman Perkebunan Rakyat	Luas Tanaman Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman (Hektar)					Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat (ribu ton) (Ribu Ton)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Karet	1.344,50	1.418,10	1.316,73	1.266,70	704,90	1,30	1,40	1.168,41	1.127,60	742,94
Kemanyan	444,00	1.368,04	1.343,26	1.307,17	1.314,60	-	-	190,19	185,42	184,59
Kopi	5.792,48	5.701,35	4.616,46	4.672,66	4.700,22	5,70	5,70	4.373,74	4.380,31	4.320,49
Kelapa	150,35	137,35	129,97	123,86	123,86	0,10	0,10	42,36	46,04	47,64
Kemiri	576,18	412,19	407,56	414,51	442,55	-	-	280,23	280,00	284,67
Kelapa Sawit	2.699,00	4.849,82	4.760,28	4.300,68	4.337,16	2,60	4,80	33.618,92	30.014,93	30.012,34
Coklat/Kakao	366,39	353,71	329,71	296,60	330,07	0,30	0,30	62,60	62,50	66,37
Aren	561,00	560,95	545,95	525,51	521,66	-	-	101,42	90,91	102,62
Andaliman	133,00	260,36	259,76	261,11	312,68	-	-	110,17	110,17	129,66
Pinang	17,20	15,50	18,30	22,65	43,45	-	-	6,71	8,03	19,43
Nilam	158,00	67,97	64,10	66,00	75,00	-	-	109,80	112,20	115,55

Sumber: BPS, 2020-2024

2.1.6. Potensi Peternakan

Populasi ternak di Kabupaten Toba tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.8. Populasi Ternak Besar Menurut Jenis Ternak (Ekor) di Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Jenis Ternak	Populasi Ternak Besar (ekor)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sapi Perah	-	-	-	-	-
Sapi Potong	1.409	1.675	2.229	2.418	2.381
Kerbau	5.135	4.962	4.749	4.038	3.901
Kuda	3	3	-	-	-
Kambing	984	940	882	1.346	450
Domba	34	78	73	91	16
Babi	7.685	6.209	7.671	10.186	11.146

Sumber: BPS 2020-2023

Populasi sapi potong menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 (1.409 ekor) hingga mencapai puncak pada tahun 2023 (2.418 ekor), kemudian sedikit menurun pada tahun 2024 (2.381 ekor). Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan selama empat tahun pertama, meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun terakhir. Jumlah kerbau mengalami penurunan konsisten setiap tahun, dari 5.135 ekor pada 2020 menjadi 3.901 ekor pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemeliharaan atau minat terhadap ternak kerbau yang terus menurun selama periode tersebut. Populasi kuda stabil di angka 3 ekor dari 2020 hingga 2022, namun data untuk tahun 2023 dan 2024 tidak tersedia, sehingga tidak dapat dianalisis lebih lanjut untuk dua tahun terakhir. Populasi kambing sempat

menurun dari 984 ekor (2020) menjadi 882 ekor (2022), lalu melonjak tajam pada 2023 menjadi 1.346 ekor, namun kembali turun drastis di 2024 menjadi hanya 450 ekor. Fluktuasi ini menunjukkan adanya dinamika yang cukup tinggi dalam populasi kambing, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pasar atau penyakit. Jumlah domba cenderung fluktuatif dengan angka yang relatif kecil, dari 34 ekor (2020) naik ke 91 ekor (2023), namun turun drastis menjadi 16 ekor di 2024. Hal ini mengindikasikan populasi domba belum stabil dan masih sangat terbatas. Populasi babi mengalami penurunan tajam dari 7.685 ekor (2020) ke 6.209 ekor (2021), namun kemudian meningkat signifikan hingga mencapai 11.146 ekor di 2024. Ini merupakan pertumbuhan terbesar di antara semua jenis ternak besar yang tercatat, menunjukkan adanya peningkatan produksi atau permintaan terhadap babi dalam beberapa tahun terakhir.

Secara umum, populasi ternak besar menunjukkan dinamika yang beragam. Sapi potong dan babi mengalami tren pertumbuhan positif, sedangkan kerbau dan kambing cenderung menurun atau fluktuatif. Populasi domba masih sangat kecil dan tidak stabil, sementara data kuda tidak lengkap untuk dua tahun terakhir. Perubahan populasi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti permintaan pasar, kebijakan pemerintah, ketersediaan pakan, serta kondisi kesehatan ternak.

2.1.7. Potensi Perikanan

Kawasan Peruntukan Perikanan adalah kawasan budidaya sumber daya perikanan air tawar. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037 kawasan peruntukan perikanan terdiri dari: a. perikanan budidaya; dan b. perikanan tangkap. Pengembangan kawasan perikanan budidaya meliputi Kolam Air Tenang di seluruh kecamatan, Kolam Air Deras di Kecamatan Balige, Laguboti, Habinsaran, Tampahan, Pintu Pohan Meranti dan Lumban Julu, Mina Padi di Kecamatan Porsea, Uluan, Sigumpar, Silaen, Lumban Julu dan Bonatua Lunasi, serta perbenihan berlokasi di Kecamatan Tampahan, Balige, Laguboti, Silaen, Sigumpar, Porsea, Bonatua Lunasi dan Ajibata. Sedangkan pengembangan kawasan perikanan tangkap diarahkan dengan memanfaatkan potensi perairan danau, waduk dan sungai berlokasi di Kecamatan Tampahan, Kecamatan Balige, Kecamatan Laguboti, Kecamatan Sigumpar, Kecamatan Porsea, Kecamatan Uluan, Kecamatan Siantar Narumonda, Kecamatan Lumban Julu dan Kecamatan Ajibata.

Populasi perikanan di Kabupaten Toba tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.9. Produksi Perikanan Menurut Jenis Usaha Perikanan dan Jenis Budidaya Tahun 2020-2024

No	Jenis	Produksi Perikanan (ton)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Menurut Jenis Usaha Perikanan						
1	Budidaya	1.511,756	1.368,455	1.263,697	1.575,641	1.526,882
2	Tangkap	579,651	591,244	608,642	593,869	592,704
Menurut Jenis Budidaya						
1	Tambak	-	-	-	-	-
2	Kolam	534,41	355,51	354,57	653,91	652,87
3	Keramba	-	-	-	-	-
4	Jaring Apung	628,30	472,80	354,62	661,52	611,95
5	Sawah	343,60	540,09	554,51	260,22	262,07

Sumber: Dinas Ketapang dan Perikanan Kab. Toba

Produksi perikanan menurut usaha budidaya tahun 2024 mencapai 1.526,882 ton meningkat sebesar 15,126 ton dibandingkan dengan produksi perikanan menurut usaha budidaya tahun 2020 yang mencapai 1.511,756 ton, dan hasil tangkap ikan mencapai 592.704 ton meningkat sebesar 592.124 ton dibanding produksi hasil tangkap ikan tahun 2020 mencapai 13,053 ton.

2.1.8. Potensi Udara

Jumlah Menara telekomunikasi di Kabupaten Toba Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Jumlah Menara Menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	TAMPAHAN	3	3	4	4	27
2	BALIGE	22	24	26	27	4
3	LAGUBOTI	10	10	12	12	12
4	SIGUMPAR	3	3	2	2	4
5	SILAEN	7	9	9	9	2
6	HABINSARAN	3	4	4	4	2
7	BORBOR	2	2	2	2	9
8	NASSAU	2	2	2	2	2
9	SIANTAR NARUMONDA	1	1	1	1	12
10	PORSEA	11	11	12	12	6
11	PARMAKSIAN	7	7	6	6	1
12	PINTU POHAN MERANTI	5	5	5	6	6
13	ULUAN	3	4	4	4	11
14	LUMBAN JULU	11	11	11	11	4
15	BONATUA LUNASI	5	5	5	5	14
16	AJIBATA	8	12	14	14	5
TOTAL		103	113	119	121	121

Sumber: Kabupaten Toba dalam angka tahun 2025.

Menara telekomunikasi di Kabupaten Toba tahun 2024 sebanyak 121 menara meningkat sebanyak 18 menara dibandingkan dengan tahun 2024, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun pertambahan menara telekomunikasi berada di Kecamatan Ajibata sebanyak 6 menara, Kecamatan Balige sebanyak 5 menara, Kecamatan Silaen dan Kecamatan Laguboti masing-masing sebanyak 2 menara, Kecamatan Habinsaran, Pintu Pohan Meranti, Tampahan dan Uluan masing-masing sebanyak 1 menara, sedangkan Kecamatan Parmaksian berkurang 1 (satu) menara.

Tabel 2.11. Jumlah Desa yang Blankspot Menurut Kecamatan di Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Kecamatan		2020	2021	2022	2023	2024
1	Uluan	3	3	3	2	3
2	Silaen	3	3	3	3	3
3	Habinsaran	11	11	11	7	7
4	Pintu Pohan Meranti	4	4	4	3	1
5	Borbor	2	2	2	1	2
6	Ajibata	1	1	1	1	0
7	Siantar Narumonda	4	4	3	3	0
8	Nassau	6	6	6	4	5
9	Balige	1	1	1	1	2
10	Porsea			1	3	2
TOTAL		35	35	35	28	25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab.Toba (diolah)

Adapun desa yang belum memiliki akses jaringan internet atau yang dinamakan *blankspot* di Kabupaten Toba antara lain pada tahun 2021 sebanyak 35 (tiga puluh lima) desa, tahun 2022 sebanyak 35 (tiga puluh lima) desa, tahun 2023 sebanyak 28 (dua puluh delapan) desa, tahun 2024 sebanyak 25 (dua puluh lima) desa.

2.1.9. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Toba dilihat dari terlampaui/belum terlampaui daya dukung maupun status jasa lingkungan hidup, yaitu:

1. Daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Toba dalam status belum terlampaui (surplus). Ketersediaan pangan tahun 2023 adalah 1.299.451.453.578,1 Kkal/tahun, sedangkan kebutuhan pangan 163.916.025.000 Kkal/tahun.
2. Daya dukung penyediaan air di Kabupaten Toba dalam status belum terlampaui (surplus). Ketersediaan air tahun 2023 adalah 467.646.777,78m3/tahun sedangkan kebutuhan air adalah 394.898.815 m3/tahun.

3. Risiko dampak bencana di Kabupaten Toba adalah rawan bencana gempa bumi, rawan longsor, kebakaran hutan/lahan.
4. Timbulan sampah di kabupaten Toba bila dianalisis berdasarkan timbulan sampah yang dihasilkan oleh rata-rata setiap orang (2 liter/orang/hari), untuk sarana umum (0,5 liter/orang/hari) dan kegiatan komersial (0,25 liter/orang/hari). Dari total jumlah penduduk yang ada maka jumlah timbulan sampah domestik adalah sebanyak 773.790,0 liter, untuk sarana umum 193.447,5 liter dan kegiatan komersial sebesar 96.723,8 liter. Maka secara keseluruhan timbulan sampah di kabupaten Toba untuk setiap harinya adalah 1.063.961,3 liter/hari atau 1.064 m³/hari dan/atau 388.345,9 m³/tahun. Pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun akan mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah timbulan sampah, diperkirakan akan mengalami peningkatan menjadi 1.326.470,75 liter/hari atau 1.326,47 m³/hari.
5. Jasa lingkungan penyedia pangan secara umum adalah sedang (57,86%), sedangkan kategori tinggi hanya 10,48% dan sangat tinggi 8,81%; Jasa lingkungan penyedia air secara umum adalah sangat tinggi (48,24%), kategori tinggi 16,32%, sedangkan kategori sedang 29,26%; Jasa lingkungan pengatur tata aliran air dan banjir secara umum kategori tinggi (49,64%) dan sangat tinggi 19,15%; Jasa lingkungan pengatur iklim secara umum sangat tinggi (44,54%) dan tinggi 8,45%; Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam secara umum tinggi (26,13%) dan sangat tinggi 34,62%.
6. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam terdiri dari Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dengan total luas 10.662,78 Ha, Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (PPHKm) seluas 4.031,66 Ha.
7. Kabupaten Toba merupakan kabupaten dengan tingkat kerentanan perubahan iklim rendah hingga sangat rendah. Berdasarkan data PIPPIB tahun 2023, terdapat tiga jenis PIPPIB di kabupaten Toba yaitu PIPPIB Gambut seluas 848,31 Ha, PIPPIB Kawasan seluas 59.358,39 Ha dan PIPPIB Primer seluas 1,74 ha.
8. Rencana kehutanan tingkat Nasional (RKTN), rencana kawasan hutan yang berada di Kabupaten Toba terdapat seluas 106.018,19 ha yang terdiri dari hutan lindung 62.174,93 ha, hutan produksi 11.171,46 ha, hutan produksi konversi 387,07 ha, hutan produksi terbatas 10.914,76 ha, dan hutan suaka alam seluas 21.369,96 ha.

Tabel 2.12. Indikator Indeks Kualitas Lahan dan Air Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Indikator Pembangunan Utama	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lahan	NA	61,76	61,41	62,42	65,08
Indeks Kualitas Air	70,14	64,05	64,05	51,92	64,33

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Toba

2.1.10. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan daerah yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi mengakibatkan kurangnya ruang untuk air, untuk mengatasi kurangnya ruang untuk air perlu dilakukan tata kelola sumber daya air untuk mencapai tingkat ketahanan air. Ketahanan Energi merupakan pemasokan energi yang teratur dan andal serta tindakan darurat yang diterapkan jika terjadi Pemadaman listrik. Permasalahan ketahanan energi yang timbul diakibatkan oleh lonjakan daya, cuaca, bencana alam, dan lain-lain. Ketahanan pangan memberikan kecukupan komoditas dan harga pangan yang stabil. Ketahanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan memberi keberlangsungan kehidupan. Pangan, energi, dan air memiliki keterkaitan yang kuat, termasuk dampaknya terhadap Perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan pangan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas sumber daya pertanian, peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan, serta konservasi sumber daya air dan pembangunan jaringan irigasi untuk ketahanan air. Selain ketersediaan beras sebagai makan pokok, ketersediaan protein hewani terus ditingkatkan.

1. Konsumsi listrik perkapita

Listrik merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan aktivitas manusia. Dijaman yang semakin maju dengan teknologi yang berkembang pesat kebutuhan listrik menjadi sumber energi utama bagi masyarakat khususnya untuk penerangan. Jumlah pelanggan listrik yang tercatat pada PT. PLN Ranting Balige dan Ranting Porsea tahun 2023 sebanyak 60.076 pelanggan. Berdasarkan jumlah pelanggan menurut ranting, ranting Balige merupakan ranting pelanggan terbanyak dengan jumlah 39.918 pelanggan (66,45 persen). Sedangkan jumlah listrik yang terjual di tahun 2021 sekitar 5.205.402.511 Kwh.

Daya Terpasang, Produksi, dan Distribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Ranting, 2023, dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.13. Daya Terpasang, Produksi, dan istribusi Listrik PT. PLN (Persero) pada Cabang/Ranting PLN Menurut Ranting, 2024

No	Ranting	Daya Terpasang (KVA)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
1	Balige	56.060,00	4.700.000	4.700.000	-	15.000
2	Porsea	288.646,75	36.793.383	35.695.685	353.575	744.123
	Kab. Toba	344.706,75	41.493.383	40.395.685	353.575	759.123

Sumber: Toba Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Ranting, 2020-2024, dapat dilihat pada tabel dibawah ini;

Tabel 2.14. Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Ranting 2020-2024

No	Ranting	2020	2021	2022	2023	2024
1	Balige	34.500	36.679	38.167	39.918	41.381
2	Porsea	16.360	18.960	19.623	20.158	20.753
	Kab. Toba	50.860	55.639	57.790	60.076	62.134

Sumber: Toba Dalam Angka Tahun 2025

2. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Tabel 2.15 menyajikan data prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Toba selama lima tahun terakhir, dari tahun 2020 hingga 2024. Prevalensi ini menunjukkan persentase penduduk yang konsumsi pangannya berada di bawah kebutuhan minimum energi harian, yang ditetapkan sebagai indikator ketahanan pangan individu. Pada tahun 2020, prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan di Kabupaten Toba tercatat sebesar 4,74%, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 6,73% dan rata-rata nasional sebesar 8,34%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pada awal periode, Kabupaten Toba relatif lebih baik dalam hal kecukupan konsumsi pangan dibandingkan dengan rata-rata daerah lainnya di provinsi maupun nasional.

Angka ini terus mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 4,16%, mencerminkan adanya perbaikan dalam akses dan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Namun demikian, tren tersebut berbalik arah pada tahun 2022 hingga 2024, di mana prevalensi meningkat berturut-turut menjadi 5,56% pada tahun 2022, 6,91% pada tahun 2023, dan mencapai 7,72% pada tahun 2024.

Meskipun angka tahun 2024 di Kabupaten Toba masih berada di bawah rata-rata nasional (8,27%), namun telah melampaui angka rata-rata Provinsi Sumatera Utara (7,54%) pada tahun yang sama. Hal ini menunjukkan adanya

tantangan baru dalam upaya menjaga ketahanan pangan di tingkat lokal. Peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dalam tiga tahun terakhir perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Toba. Strategi penguatan ketahanan pangan perlu difokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bergizi dan terjangkau, pemberdayaan ekonomi rumah tangga, serta optimalisasi program intervensi gizi, khususnya bagi kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menurunkan kembali angka ketidakcukupan konsumsi pangan, mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Toba secara berkelanjutan yang dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.15. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara (2020-2024)

Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen) Per Kabupaten/kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Toba	4,74	4,16	5,56	6,91	7,72
Sumatera Utara	6,73	6,33	8,7	8,60	7,54
Nasional	8,34	8,49	10,21	8,53	8,27

Sumber: BPS Indonesia

3. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup, baik dari jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Pilar ketahanan pangan merupakan ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan.

a) Skor pola pangan harapan (%)

Pola Pangan Harapan yang selanjutnya disingkat PPH adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan Pangan. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan salah satu indikator capaian target kualitas konsumsi pangan masyarakat secara nasional. Skor PPH merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebutuhan konsumsi pangan. Skor PPH maksimal adalah 100. Semakin tinggi skor PPH, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk. Capaian skor PPH tersebut akan terwujud apabila setiap wilayah memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA). PPH mengelompokkan pangan menjadi 9 kelompok yaitu padi-padian, umbi-

umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, minyak dan lemak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, serta aneka bumbu dan bahan minuman. Sasaran Skor PPH ideal yaitu 100% sesuai dengan bobot masing-masing.

Tabel 2.16. Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
SKOR POLA PANGAN HARAPAN	80,50%	80,75%	85,00%	85,70%	85.80%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Toba

Pada tahun 2024, skor PPH Kabupaten Toba mencapai 85,8%, lebih tinggi dari tahun 2023 sebesar 85,7%. Pencapaian ini menunjukkan kualitas konsumsi pangan penduduk Kabupaten Toba semakin baik dan mengarah pada komposisi yang beragam, dan bergizi seimbang.

b) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan cut off point IKP. Menurut Badan Pangan Nasional, bahwa kelompok IKP untuk Kabupaten yaitu Kelompok/Prioritas 1 (Sangat Rentan) dengan IKP lebih kecil atau sama dengan 41,52, Kelompok/Prioritas 2 (Rentan) dengan IKP antara 41,52 sampai 51,42, Prioritas 3 (Agak Rentan) dengan IKP antara 51,42 sampai 59,58, Prioritas 4 (Agak Tahan) dengan IKP antara 59,58 sampai 67,75, Prioritas 5 (Tahan) dengan IKP 67,75 sampai 75,68, Prioritas 6 (Sangat Tahan) dengan IKP diatas 75,68. IKP Kabupaten Toba Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks ketahanan pangan	80,80	81,27	82,79	83,09	84.33
Kelompok IKP	6	6	6	6	6

Sumber: Badan Pangan Nasional

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Toba selama lima tahun terakhir. Indeks ini merupakan ukuran komposit yang mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan akses pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi seluruh penduduknya. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik tingkat ketahanan pangan suatu wilayah. Pada tahun 2020, IKP Kabupaten Toba berada di angka 80,80 dan

mengalami tren peningkatan secara konsisten setiap tahunnya, yaitu menjadi 81,27 (2021), 82,79 (2022), 83,09 (2023), dan mencapai 84,33 pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan yang berkelanjutan dalam aspek-aspek ketahanan pangan seperti ketersediaan pangan, stabilitas pasokan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan.

Berdasarkan pengelompokan oleh Badan Pangan Nasional, Kabupaten Toba secara konsisten berada pada Kelompok IKP 6 selama periode 2020 hingga 2024. Kelompok ini menunjukkan bahwa Kabupaten Toba berada dalam kategori ketahanan pangan "Sangat Tahan" . Tren peningkatan IKP sejalan dengan upaya yang mungkin telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba dalam penguatan sistem pangan lokal, peningkatan produksi pertanian, distribusi yang lebih efisien, serta edukasi gizi kepada masyarakat. Hal ini juga didukung oleh data dari Tabel 2.11, di mana prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Toba relatif rendah dibandingkan dengan provinsi dan nasional, khususnya pada awal periode. Namun, adanya peningkatan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dalam tiga tahun terakhir (2022–2024) meskipun IKP juga meningkat, mengindikasikan bahwa dimensi akses dan pemanfaatan pangan masih memerlukan perhatian khusus. Peningkatan IKP belum sepenuhnya menurunkan kerentanan konsumsi pangan kelompok tertentu. Oleh karena itu, meskipun capaian indeks menunjukkan arah yang positif, evaluasi program pangan dan gizi perlu dilakukan secara lebih terarah agar hasilnya benar-benar tercermin dalam peningkatan kesejahteraan dan kecukupan konsumsi pangan masyarakat.

Tabel 2.18. Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

URAIAN	2020	2021	2002	2023	2024
Indeks Ketersediaan (IK)	96,84	96,32	96,66	95,83	95,83
Indeks Keterjangkauan (IA)	78,32	78,97	78,67	78,12	78,12
Indeks Pemanfaatan (IP)	70,64	71,7	75,47	77,26	77,26
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	80,80	81,27	82,79	83,09	84.33

Sumber: Badan Pangan Nasional

Indeks ketersediaan pangan (hasil produksi dan cadangan pangan) di Kabupaten Toba tahun 2024 mencapai 95,83, hal ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan indeks ketersediaan pangan tahun 2020 mencapai 96,84. Indeks keterjangkauan pangan (kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan) Kabupaten Toba tahun 2024 mencapai 78,12, hal ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan indeks keterjangkauan pangan tahun 2020 mencapai 78,32. Indeks pemanfaatan

pangan (penggunaan pangan oleh rumah tangga) Kabupaten Toba tahun 2024 mencapai 77,26, hal ini menunjukkan penurunan bila dibandingkan dengan Indeks pemanfaatan pangan tahun 2020 mencapai 70,64.

Air minum merupakan kebutuhan dasar yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemenuhan kebutuhan air minum harus dijamin oleh pemerintah. Sistem penyediaan air minum merupakan masalah penting bila dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari.

Penyediaan air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar dan sosial ekonomi masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah, baik itu Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Ketersediaan air minum dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan dapat mendorong peningkatan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penyediaan sarana dan prasarana air minum menjadi salah satu kunci dalam pengembangan ekonomi wilayah.

Pelayanan air minum di Kabupaten Toba saat ini disediakan oleh PDAM Tirtanadi Cabang Balige, yang merupakan BUMD milik Provinsi Sumatera Utara. Gambaran umum SPAM Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19. Produksi Air Bersih (PDAM) yang Disalurkan Menurut Kategori Pelanggan (m3)

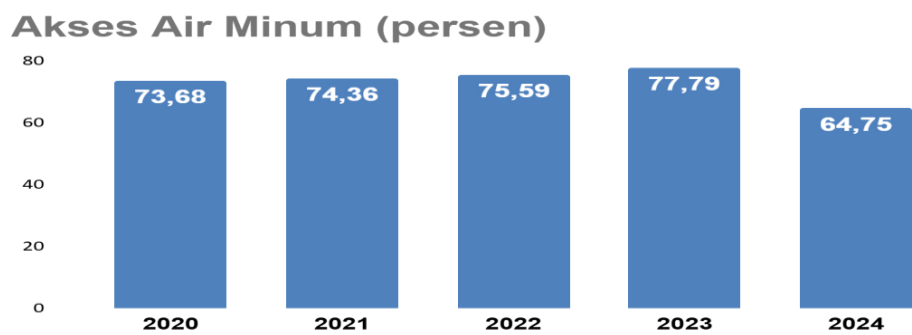
Kategori Pelanggan PDAM	Produksi Air bersih (PDAM) Yang Disalurkan menurut Kategori Pelanggan (m3)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tempat Tinggal	1.057.462	1.163.823	1.128.409	1.153.385	1.128.972
Hotel / Obyek Wisata/ Hotel	24.290	25.147	25.120	25.810	78.624
Badan Sosial dan Rumah Sakit	45.214	46.001	45.801	45.915	130.548
Tempat Peribadatan	27.622	28.612	28.322	29.004	32.568
Sarana Umum	55.110	57.147	57.112	58.870	70.644
Toko dan Industri	305.510	325.012	320.001	321.910	492.693
Instansi Pemerintah	70.114	71.224	71.002	72.210	87.120
Susut/Hilang Dalam Penyaluran	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
JUMLAH	1.585.322	1.716.966	1.675.767	1.707.104	2.021.169
<i>Sumber: PDAM Tirtanadi Cabang Toba</i>					

Sedangkan Nilai Air bersih (PDAM) yang disalurkan menurut Kategori Pelanggan (Ribu Rupiah), 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.20. Nilai Air Bersih (PDAM) yang disalurkan menurut Kategori Pelanggan (ribu rupiah)

Kategori Pelanggan PDAM	Nilai Air bersih (PDAM) Yang Disalurkan menurut Kategori Pelanggan (Ribu Rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tempat Tinggal	3.444.134	5.037.557	3.950.826	4.045.579	3.363.704
Hotel / Obyek Wisata/ Hotel	54.442	55.452	55.310	55.514	499.969
Badan Sosial dan Rumah Sakit	1.702.355	187.450	187.221	188.103	29.179
Tempat Peribadatan	120.541	122.569	122.401	122.518	41.120
Sarana Umum	125.213	126.300	126.125	126.312	126
Toko dan Industri	472.100	480.200	472.129	474.160	1.434.769
Instansi Pemerintah	318.500	350.120	348.221	351.110	289.433
Susut/Hilang Dalam Penyaluran	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-
JUMLAH	4.705.245	6.359.648	5.262.233	5.363.296	5.658.300
Sumber: PDAM Tirtanadi Cabang Toba					

Grafik 2.3. Akses Air Minum di Kabupaten Toba



Sumber: Evaluasi IKK

Akses air minum di Kabupaten Toba tahun 2024 mencapai 64,75%, hal ini menunjukkan penurunan akses air minum dibandingkan dengan akses air minum tahun 2020 mencapai 73,68%. Akses rumah tangga terhadap air minum layak adalah proporsi rumah tangga di suatu wilayah yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan layak konsumsi. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sumber Air Minum Layak Kabupaten Toba mencapai 96,04 pada tahun 2023.

2.1.11. Lingkungan Hidup Berkualitas

Lingkungan hidup yang berkualitas dapat dilihat dari sejauh mana pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kualitas hidup, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam suatu daerah. Strategi dalam rangka pencapaian lingkungan hidup yang berkualitas adalah pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pola konservasi sumber daya alam secara berkesinambungan, melakukan pengembangan dan penetapan instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjadi kualitas lingkungan.

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Toba sudah semakin baik hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator yang semakin meningkat yaitu indeks kualitas lingkungan hidup, timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Indeks kualitas lingkungan hidup menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu dan merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL), indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 semakin meningkat dari tahun ke tahun. Indeks kualitas lingkungan hidup tahun 2022 sebesar 66,93%, tahun 2023 sebesar 68,99% dan tahun 2024 sebesar 71,92%. Sedangkan timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah mengalami peningkatan dari tahun 2022, 2023, dan 2024 yaitu 97,80%, 147,80% dan 149,29%, hal ini dikarenakan pengolahan sampah dilakukan dengan cara pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, daur ulang energi, setiap pelaku usaha wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R, pemerintah daerah menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman berupa: TPS 3R; stasiun peralihan antara; TPA; dan/atau; TPST. Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan metode: metode lahan urug terkendali; metode lahan urug saniter; dan/atau teknologi ramah lingkungan. Hal itu juga didukung dengan adanya bank sampah “tarhilala” yang mana pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang ditabung bukan uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan dan dapat meminjam uang yang nantinya dikembalikan dengan sampah seharga uang yang dipinjam. Sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. Sedangkan plastik kemasan dibeli ibu-ibu PKK setempat untuk didaur ulang menjadi barang-barang kerajinan. Tujuan dibangunnya bank sampah sebenarnya bukan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah

strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat ‘berkawan’ dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah. Sehingga dengan demikian bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan gerakan 4R sehingga manfaat langsung yang dirasakan tidak hanya ekonomi, namun pembangunan lingkungan yang bersih, hijau dan sehat.

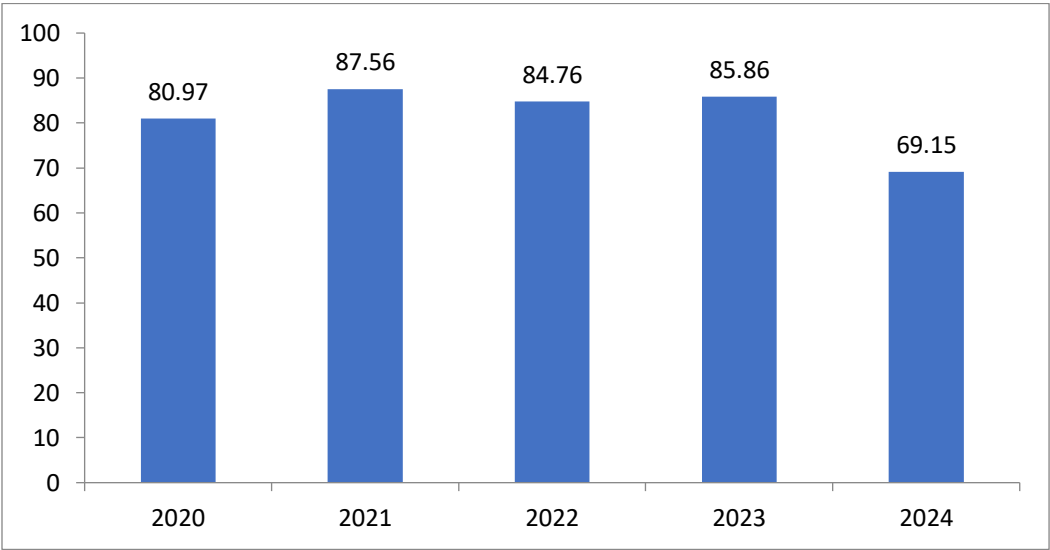
Tabel 2.21. Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Indikator Pembangunan Kualitas Lingkungan Hidup:	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,14	68,51	66,93	68,99	71,92
Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah		56,36	97,80	147,80	149,29
Data sampah yang diangkut ke TPA (ton)	9.320	10.124	12.350	13.395	14.005

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Toba

Pengelolaan sampah di Kabupaten Toba dengan sampah yang diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan pengelolaan dan pengolahan persampahan di Kabupaten Toba diperlukan perhatian yang lebih baik kedepan.

Grafik 2.4. Akses Pengolahan Limbah dan Domestik di Kabupaten Toba Tahun 2020-2024



Sumber: LPPD Kabuapten Toba Tahun 2020-2024

Akses pengolahan limbah domestik di Kabupaten Toba Tahun 2024 mencapai 69,15%, hal ini menunjukkan penurunan akses pengolahan limbah domestik bila dibandingkan akses pengolahan limbah domestik tahun 2020 mencapai 80,97%.

2.1.12. Resiliensi terhadap Bencana

Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim merupakan solusi untuk menghadapi sistemik dari berbagai bencana dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim termasuk kemampuan masyarakat, infrastruktur, dan ekosistem untuk bertahan dan bangkit kembali setelah terkena dampak peristiwa ekstrem atau perubahan lingkungan.

a) Penurunan Intensitas Emisi GRK

Emisi GRK adalah gas-gas yang mempunyai potensi untuk menyebabkan peningkatan efek rumah kaca di atmosfer bumi. Efek rumah kaca adalah proses di mana gas-gas ini menahan panas di atmosfer, sehingga mempengaruhi suhu permukaan bumi. Emisi gas-gas yang dilepaskan ke atmosfer dari berbagai aktivitas manusia di bumi menimbulkan efek rumah kaca di atmosfer. Gas-gas rumah kaca itu adalah karbon dioksida (CO2), belerang dioksida (SO2), nitrogen monoksida (NO), nitrogen dioksida (NO2), gas metana (CH4), dan klorofluorokarbon (CFC). Gas karbon sebagai pencemar utama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar minyak, batubara, dan bahan bakar organik lain.

b) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan alat untuk identifikasi risiko, manajemen risiko, dan paparan risiko yang diukur pada berbagai tingkat skala seperti global, regional, lintas batas, atau lokal. Indeks risiko bencana Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.22. Indeks Resiko Bencana Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Indikator Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Risiko Bencana	107,20	107,20	107,20	107,20	107,20

Sumber: IRBI

Kawasan-kawasan yang teridentifikasi rawan terhadap potensi gerakan tanah di Kabupaten Toba terdapat di beberapa kecamatan, antara lain Ajibata, Balige, Bonatua Lunasi, Borbor, Habinsaran, Laguboti, Lumban Julu, Nassau, Parmaksian, Pintu Pohan Meranti, Porsea, Siantar Narumonda, Silaen, Tampahan dan Uluan.

c) Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib

daerah. Potensi terhadap gerakan tanah dan kawasan rawan bencana dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2.23. Potensi Gerakan Tanah di Kabupaten Toba

No	KECAMATAN	POTENSI GERAKAN	No	KECAMATAN	POTENSI GERAKAN
1	Ajibata	Menengah	9	Parmaksian	Menengah
2	Balige	Menengah	10	Pintu Pohan Meranti	Menengah-Tinggi
3	Bonatua Lunasi	Menengah	11	Porsea	Menengah
4	Borbor	Menengah-Tinggi	12	Siantar Narumonda	Menengah
5	Habinsaran	Menengah-Tinggi	13	Silaen	Menengah-Tinggi
6	Laguboti	Menengah	14	Tampahan	Menengah
7	Lumban Julu	Menengah	15	Uluan	Menengah
8	Nassau	Menengah-Tinggi			

Sumber: Website Departemen Energi & Sumber Daya Mineral RI, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

2.1.13. Perubahan Iklim

Iklim secara alamiah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang dikenal sebagai variabilitas iklim. Salah satu contoh perubahan tersebut adalah adanya perubahan curah hujan dalam kurun waktu tertentu. Iklim juga didefinisikan sebagai ukuran variabilitas kuantitas serta rata-rata yang relevan dari sebuah variabel tertentu yaitu curah hujan, temperatur, atau angin pada suatu periode tertentu, yang umumnya merentang dari bulan hingga tahunan atau bahkan hingga jutaan tahun.

Perubahan iklim di Kabupaten Toba disebabkan karena peningkatan suhu, curah hujan ekstrem dan kebakaran hutan. Kabupaten Toba terletak pada garis khatulistiwa, dan tergolong pada iklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 17° C – 29° C dan rata-rata kelembaban udara 85.04 %. Rata-rata tinggi curah hujan setiap tahun sebesar 223 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 17 hari. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan 759 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 15 hari. Sedangkan pada bulan Mei curah hujan yang turun sangat rendah sekitar 93 mm, dengan jumlah hari hujan 19 hari, dan berdasarkan stasiun pengamatan, Kecamatan Habinsaran merupakan daerah dengan curah hujan yang tertinggi, yaitu 263 mm. Akibat perubahan iklim tersebut mengakibatkan dampak di Kabupaten Toba yaitu Peningkatan suhu menyebabkan penguapan yang tinggi di wilayah Danau Toba, Curah hujan ekstrem menyebabkan banjir dan tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan dapat dipicu oleh cuaca panas.

Iklim sendiri berubah secara terus menerus karena adanya faktor-faktor yang disebabkan oleh gas rumah kaca seperti karbondioksida, metana, dan uap air, indeks risiko bencana, indeks ketahanan daerah. Menurut Buku Indeks

Risiko Bencana Indonesia Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Nasional, Indeks Risiko Bencana Kabupaten Toba berada pada angka 112.97 dengan tingkat risiko sedang. Walaupun tingkat risiko bencana secara umum adalah sedang, risiko gempa, longsor, kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan dan cuaca ekstrem di Kabupaten Toba termasuk pada kategori risiko tinggi.

2.1.14. Demografi

Peningkatan Populasi penduduk suatu daerah menjadi salah satu tantangan yang sangat besar kedepan. Penambahan jumlah penduduk akan menimbulkan permasalahan diantaranya bertambahnya jumlah penduduk miskin, bertambahnya jumlah pengangguran, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, meningkatnya tindak kejahatan. Populasi penduduk Kabupaten Toba tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.24. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (jiwa)
Kabupaten Toba Tahun 2020-2024**

Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
Balige	44.635	45.276	46.100	46.568	47.999
Tampahan	5.141	5.207	5.293	5.339	5.486
Laguboti	22.397	22.724	23.141	23.379	24.107
Habinsaran	17.869	18.036	18.272	18.365	18.741
Borbor	8.299	8.422	8.578	8.668	8.941
Nassau	9.173	9.344	9.553	9.689	10.070
Silaen	14.143	14.289	14.491	14.579	14.908
Sigumpar	8.599	8.683	8.800	8.849	9.038
Porsea	14.669	14.732	14.850	14.875	15.045
Pintu Pohan Meranti	7.346	7.375	7.433	7.442	7.522
Siantar Narumonda	7.435	7.591	7.778	7.848	8.153
Parmaksian	11.556	11.594	11.675	11.701	11.823
Lumban Julu	9.953	10.099	10.286	10.393	10.718
Uluan	9.680	9.735	9.826	9.840	9.968
Ajibata	9.420	9.620	9.860	10.026	10.473
Bonatua Lunasi	5.884	6.027	6.197	6.289	6.588
TOTAL	206.199	208.754	212.133	213.850	219.580

Sumber: BPS

Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Balige dengan jumlah 47.999 jiwa dan jumlah penduduk terkecil merupakan Kecamatan Tampahan dengan jumlah 5.486 jiwa. Populasi penduduk Kabupaten Toba Tahun 2020-2024 menurut umur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.25. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (jiwa) Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	20.758	20.735	20.796	20.821	20.638
5-9	20.477	20.499	20.589	20.337	20.816
10-14	20.503	20.546	20.671	20.344	20.230
15-19	20.347	20.294	20.356	20.613	20.403
20-24	16.266	16.134	16.050	18.818	20.228
25-29	14.300	14.344	14.428	15.076	16.123
30-34	13.562	13.677	13.834	13.742	14.136
35-39	13.869	14.032	14.250	13.544	13.390
40-44	13.127	13.329	13.563	13.551	13.658
45-49	11.777	12.041	12.353	12.436	12.872
50-54	10.455	10.727	11.038	11.058	11.462
55-59	8.587	8.870	9.186	9.453	10.041
60-64	7.257	7.550	7.877	7.639	8.070
65-69	6.268	6.630	6.996	6.433	6.576
70-74	4.530	4.958	5.436	4.961	5.331
75+	4.116	4.388	4.710	5.024	5.606
TOTAL	206.199	208.754	212.133	213.850	219.580

Sumber: Kabupaten Toba Dalam Angka tahun 2025

Kepadatan kependudukan Kabupaten Toba Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.26 Kepadatan Penduduk Kabupaten Toba pada Tahun 2020-2024

No	Kecamatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Balige	490,2	497,3	506,3	511,5	519,3
2	Tampahan	210,3	213	216,5	218,4	221,4
3	Laguboti	303,1	307,5	313,1	316,4	321,3
4	Habinsaran	43,72	44,13	44,71	44,94	45,4
5	Borbor	46,98	47,68	48,56	49,07	49,84
6	Nassau	27,34	27,85	28,47	28,88	29,45
7	Silaen	81,95	82,8	83,97	84,48	85,43
8	Sigumpar	341,2	344,6	349,2	351,2	354,9
9	Porsea	387,3	388,9	392	392,7	395
10	Pintu Pohan Meranti	26,49	26,6	26,81	26,84	26,99
11	Siantar Narumonda	334,9	341,9	350,4	353,5	360,4
12	Parmaksian	251,3	252,2	253,9	254,5	255,9
13	Lumban Julu	109,5	111,1	113,2	114,3	116,1
14	Uluan	88,81	89,31	90,15	90,28	90,87
15	Ajibata	129,4	132,1	135,4	137,7	140,8
16	Bonatua Lunasi	101,9	104,4	107,3	108,9	111,5

Kepadatan penduduk Kabupaten Toba tahun 2024 sebesar 107,19 jiwa/km². Kecamatan Balige yang merupakan ibukota kabupaten, pusat perdagangan dan pusat pemerintahan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan dengan tingkat kepadatan sebesar 519,32 jiwa/km². Kemudian diikuti oleh Kecamatan Porsea dengan Tingkat kepadatan sebesar 394,98 jiwa/km². Sedangkan Kecamatan Pintu Pohan Meranti merupakan kecamatan dengan tingkat kepadatan yang terkecil, yaitu hanya 26,99 jiwa/km².

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro yang menggambarkan keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

Tabel 2.27 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Toba (dalam %)

PDRB Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,41	2,86	3,22	2,14	2,65
B	Pertambangan dan Penggalian	-0,86	4,16	4,88	6,96	4,41
C	Industri Pengolahan	-0,11	3,07	5,64	5,07	8,04
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,06	5	5,15	8,46	6,90
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,47	3,71	5,13	8,75	5,88
F	Konstruksi	-4,25	4,84	6,01	8,86	5,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,11	3,41	6,09	8,01	5,85
H	Transportasi dan Pergudangan	-4,64	3,53	5,6	8,76	5,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,81	0,2	3,67	7,66	4,50
J	Informasi dan Komunikasi	8,37	7,86	6,29	8,17	6,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,28	3,47	3,48	5,51	4,18
L	Real Estate	2,15	1,49	3,09	5,07	4,23
M,N	Jasa Perusahaan	-0,7	2,22	4,24	5,87	3,93
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,02	-0,22	0,47	0,51	5,90
P	Jasa Pendidikan	4,72	3,12	3,66	3,18	3,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,62	0,24	2,01	3,04	5,28
R,S,T,U	Jasa lainnya	-1,9	2,44	4,46	6,25	3,03
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		-0,27	2,92	4,24	4,93	4,84

Sumber: BPS

Pertumbuhan ekonomi Toba mengalami pola pertumbuhan yang sama dengan Sumatera Utara pada periode 2020-2023, yaitu mengalami percepatan. Akan tetapi pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara tetap mengalami akselerasi, berbeda dengan Toba yang mengalami perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2024, baik pertumbuhan Sumatera Utara dan Toba mengalami pertumbuhan yang positif yaitu masing masing sebesar 5,03 persen dan 4,84 persen.

Tabel 2.28 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran di Kabupaten Toba (%) Tahun 2020 - 2024

PDRB Menurut Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-1,24	2,86	3,88	3,7	4,06
Pengeluaran Konsumsi LNPR	-0,84	2,67	4,26	8,83	9,19
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	-0,23	-0,04	0,99	3,58	3,16
Pembentukan Modal Tetap Bruto	-1,63	4,94	5,58	6,89	4,62
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	6,86	4	8,33	9,22	-
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	-0,27	2,92	4,24	4,93	4,84

Sumber: BPS

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 2.29, bahwa pada tahun 2020, pertumbuhan PDRB Kabupaten Toba mengalami kontraksi sebesar -0,27 persen, yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Kemudian, pada tahun 2021-2024, pertumbuhan ekonomi Toba sudah membaik yang dapat dilihat dari laju pertumbuhan Toba yang mampu bertumbuh sebesar 2,92 persen pada tahun 2021. Dan pada tahun 2022-2024 laju pertumbuhan Toba sudah berada di atas 4 persen, hingga menjadi 4,84 persen pada tahun 2024.

Tabel 2.29 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Harga Konstan 2010 Kabupaten Toba dan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020-2024

TAHUN	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ribu rupiah)		PDRB atas Dasar Harga Konstan 2010 (Milyar Rupiah)	
	TOBA	SUMUT	TOBA	SUMUT
2020	41.812.686,00	54.620.404,00	5.503,76	539.513,85
2021	38.204.189,00	54.979.044,00	5.488,92	533.746,36
2022	39.597.467,00	57.569.793,00	5.649,10	556.835,87
2023	42.161.712,84	63.194.182,91	5.888,38	582.032,78
2024	45.154.410,54	68.306.000,00	6.178,95	602.235,95

Sumber: BPS

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Toba pada tahun 2020 mencapai 41.812.686,00 rupiah, lebih rendah dibanding PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Provinsi Smut mencapai 54.620.404,00 rupiah. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Toba pada tahun 2024 mencapai 45.154.410,54 rupiah.

PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Toba pada tahun 2020 mencapai 5.503,76 miliar rupiah, lebih rendah dibanding PDRB per kapita atas dasar konstan 2010 Provinsi Sumut mencapai 539.513,85 miliar rupiah. PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Toba pada tahun 2024 mencapai 6.178,95 miliar rupiah, lebih rendah dibanding PDRB per kapita atas dasar konstan 2010 Provinsi Sumatera Utara mencapai 602.235,95 miliar rupiah.

Tabel 2.30 Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Penduduk Miskin (Persen)					
	Kabupaten Toba	8,71	8,99	8,89	8,04	8,07
	Provinsi Sumatera Utara	8,75	9,01	8,42	8,15	7.99
2	Gini Ratio					
	Kabupaten Toba	0,2903	0,2719	0,305	0,295	0,3480
	Provinsi Sumatera Utara	0,3161	0,3145	0,312	0,309	0,2970
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Penduduk Umur 15 Tahun Keatas (Persen)					
	Kabupaten Toba	2,5	0,83	1,39	1,3	1.09
	Provinsi Sumatera Utara	6,91	6,33	6,16	5,89	5.60
4	Indeks Pembangunan Manusia					
	Kabupaten Toba	76,81	77,03	77,58	77,83	78,44
	Provinsi Sumatera Utara	73,62	73,84	74,51	75,13	75,76

Sumber: BPS Sumatera Utara, BPS Toba

Tabel 2.30 menggambarkan kondisi dan perkembangan indikator sosial-ekonomi utama Kabupaten Toba selama periode 2020 hingga 2024, yang meliputi persentase penduduk miskin, ketimpangan pendapatan (Gini Ratio), tingkat pengangguran terbuka (TPT), serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Keempat indikator ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap capaian pembangunan dan menjadi bahan evaluasi serta perencanaan strategis dalam penyusunan RPJMD.

1. Persentase Penduduk Miskin

Selama lima tahun terakhir, angka kemiskinan di Kabupaten Toba cenderung fluktuatif, namun menunjukkan sedikit penurunan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2020, persentase penduduk miskin sebesar 8,71%, sempat meningkat pada tahun 2022 menjadi 8,89%, dan kemudian menurun menjadi 8,07% pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, angka kemiskinan Kabupaten Toba masih sedikit lebih rendah, menunjukkan kondisi relatif lebih baik dari rata-rata provinsi.

2. Gini Ratio

Gini Ratio Kabupaten Toba mengalami peningkatan dari 0,2903 pada tahun 2020 menjadi 0,3480 pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan, yang perlu menjadi perhatian serius. Meski Gini Ratio Toba masih lebih rendah dari Provinsi Sumatera Utara (0,2970 pada 2024), tren peningkatan ini mengindikasikan perlunya strategi pemerataan ekonomi, khususnya dalam meningkatkan akses kelompok masyarakat miskin terhadap peluang ekonomi.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT Kabupaten Toba menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan, dari 2,5% pada tahun 2020 menjadi 1,09% pada tahun 2024. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata provinsi (5,60% pada 2024), menandakan bahwa ketersediaan lapangan kerja atau serapan tenaga kerja di Toba relatif baik. Namun, tetap perlu dilakukan verifikasi kualitas pekerjaan dan sektor dominan untuk memastikan pekerjaan yang tersedia bersifat produktif dan berkelanjutan.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM Kabupaten Toba terus mengalami peningkatan dari 76,81 (2020) menjadi 78,44 pada tahun 2024. Ini menunjukkan perbaikan berkelanjutan dalam dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Utara (75,76 pada 2024), capaian Kabupaten Toba termasuk dalam kategori tinggi dan konsisten berada di atas rata-rata provinsi. Tren ini menunjukkan efektivitas kebijakan pembangunan manusia yang telah dijalankan di Toba.

Berdasarkan tren indikator di atas, berikut beberapa arahan strategis yang dapat diakomodasi Kabupaten Toba:

1. Pengentasan Kemiskinan Terstruktur

Penurunan angka kemiskinan harus tetap menjadi prioritas melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, penguatan UMKM, serta pengembangan ekonomi lokal berbasis sumber daya unggulan.

2. Pengurangan Ketimpangan

Meningkatnya Gini Ratio menunjukkan perlunya distribusi ekonomi yang lebih merata, termasuk akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta peluang ekonomi bagi kelompok rentan dan terpencil.

3. Penciptaan Lapangan Kerja Berkualitas

Meski TPT menurun, penting untuk memastikan pekerjaan yang tersedia adalah pekerjaan layak dan produktif. Program pelatihan kerja, pengembangan sektor informal, dan konektivitas dengan dunia industri harus ditingkatkan.

4. Penguatan Pembangunan Manusia

Melanjutkan keberhasilan peningkatan IPM dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta penyediaan infrastruktur dasar yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat.

2.2.2. Kesehatan Untuk Semua

Kesehatan untuk semua menggambarkan setiap orang memiliki kesehatan yang baik sebagai fondasi utama dari kualitas hidup dan produktivitas seseorang. Kondisi kesehatan mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup.

Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang ditunjang oleh kemudahan dan terjangkau nya pelayanan kesehatan terhadap masyarakat luas merupakan salah satu pilar pembangunan dibidang kesehatan Pemerintah Kabupaten Toba. Dengan tersedianya sarana dan prasarana kesehatan berupa rumah sakit puskesmas, posyandu, apotek toko obat dan lain-lain merupakan sarana dalam meningkatkan dan menunjang kualitas hidup masyarakat. Jumlah rumah sakit di Kabupaten Toba tahun 2022 sebanyak 2 (dua) unit yang berlokasi di 2 (dua) Kecamatan yaitu Balige dan Porsea. Sementara sarana kesehatan yang lain seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berjumlah 19 (sembilas) unit, Posyandu 320 (tiga ratus dua puluh) unit, Poskesdes sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) unit, Klinik/Balai Kesehatan sebanyak 9 (sembilan) unit, Puskesmas Pembantu 31 (tiga puluh satu) unit, Apotek sebanyak 19 (sembilan belas) unit dan Toko Obat sebanyak 45 (empat puluh lima) unit. Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Toba tahun 2022 sebanyak 1.144 (seribu seratus empat puluh empat) orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 115 (seratus lima belas) orang Tenaga Medis, 368 (tiga ratus enam puluh delapan) orang Tenaga Keperawatan, 562 (lima ratus enam puluh dua) Tenaga Kebidanan, 63 (enam puluh tiga) orang Tenaga Kefarmasian dan 36 (tiga puluh enam) Tenaga Ahli Gizi. Selain itu jumlah dokter yang terdapat di Kabupaten Toba sebanyak 113 (seratus tiga belas) orang yang terdiri dari Dokter Umum sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) orang, Dokter Gigi sebanyak 13 (tiga belas) orang, dan Dokter Spesialis sebanyak 21 (dua puluh satu) orang.

Tabel 2.31 Indikator Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Indikator Kesehatan Masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024
1. Kesehatan Ibu dan Anak					
a. Umur Harapan Hidup (tahun)	73,44	73,649	74,07	74,22	74,54
b. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	110,99	166,48	55,49	85,06	131,00
c. Prevalensi Stunting pada Balita (%)	N/A	24,8	24,8	28	27
2. Penanganan tuberkulosis dan penyakit menular lainnya					
a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	33,2	34,3	66,2	82,4	68,2

Indikator Kesehatan Masyarakat	2020	2021	2022	2023	2024
b. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	90	90,,27	90,6	91,13	94,8
c. Eliminasi malaria (%)	NA	NA	100	100	100
3. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	NA	76,5	84,58	98 (2024)	99,22

Sumber: BPS Toba, Dinas Kesehatan Kab. Toba

2.2.3. Pendidikan Berkualitas yang Merata

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Pemerataan akses serta peningkatan kualitas pendidikan menjadi prioritas strategis dalam mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Toba. Upaya ini dilakukan melalui penyediaan layanan pendidikan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, dengan memperhatikan kesetaraan kesempatan bagi setiap anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis.

Kualitas pendidikan akan diperkuat melalui peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, serta penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Pemerintah daerah juga berkomitmen mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan dalam mendukung pengembangan ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.

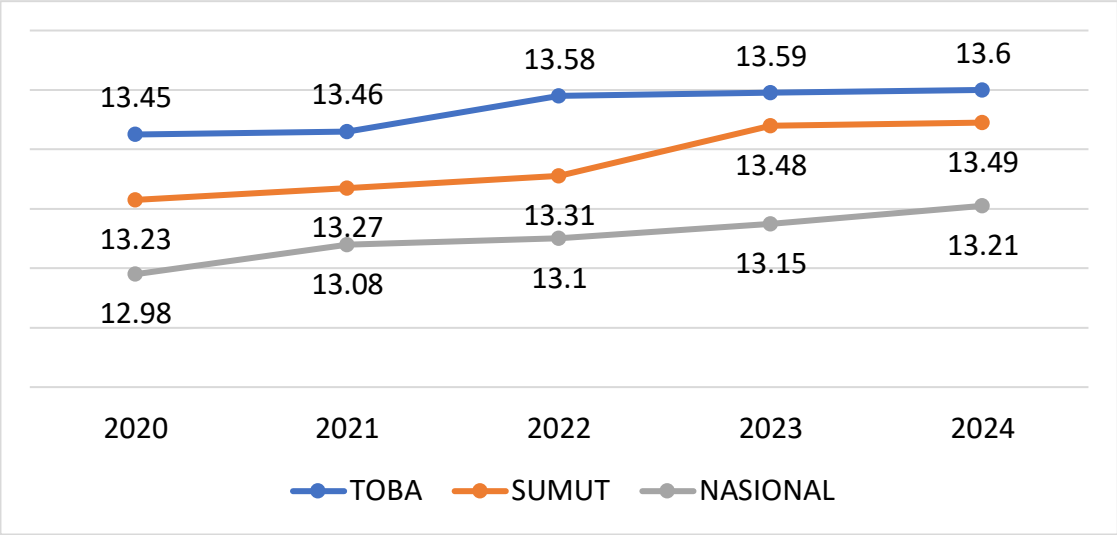
Selain itu, kebijakan pendidikan akan diarahkan pada penguatan pendidikan karakter, penumbuhan budaya literasi, serta pengembangan minat dan bakat peserta didik. Pemerintah daerah akan mengupayakan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi keluarga kurang mampu, sehingga tidak ada anak di Kabupaten Toba yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan tercapai pemerataan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah, yang pada gilirannya akan menjadi modal utama dalam mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

A. Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS)

HLS di Kabupaten Toba terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan HLS dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan bahwa harapan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba mengalami kemajuan. Dengan kata lain, semakin banyak penduduk di Kabupaten Toba yang berkeinginan kuat untuk bersekolah. Harapan lama sekolah Kabupaten Toba pada tahun 2024 sebesar 13,60. Artinya, secara rata-rata penduduk usia 7 tahun yang baru saja menempuh pendidikan formal

pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13-14 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan D1.

Grafik 2.5 Perkembangan Indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2020 - 2024



Selama periode 2020–2024, indikator Harapan Lama Sekolah (HRLS) Kabupaten Toba menunjukkan tren yang konsisten meningkat, mencerminkan perbaikan akses dan kualitas layanan pendidikan di daerah. Pada tahun 2020, HRLS Kabupaten Toba tercatat sebesar 13,45 tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, dan terus mengalami peningkatan hingga mencapai 13,60 tahun pada tahun 2024.

Kinerja HRLS Kabupaten Toba berada jauh di atas rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun Nasional. Sebagai perbandingan, HRLS Sumatera Utara pada tahun 2020 sebesar 9,54 tahun dan meningkat menjadi 9,93 tahun pada tahun 2024, sedangkan tingkat Nasional naik dari 8,48 tahun di tahun 2020 menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024.

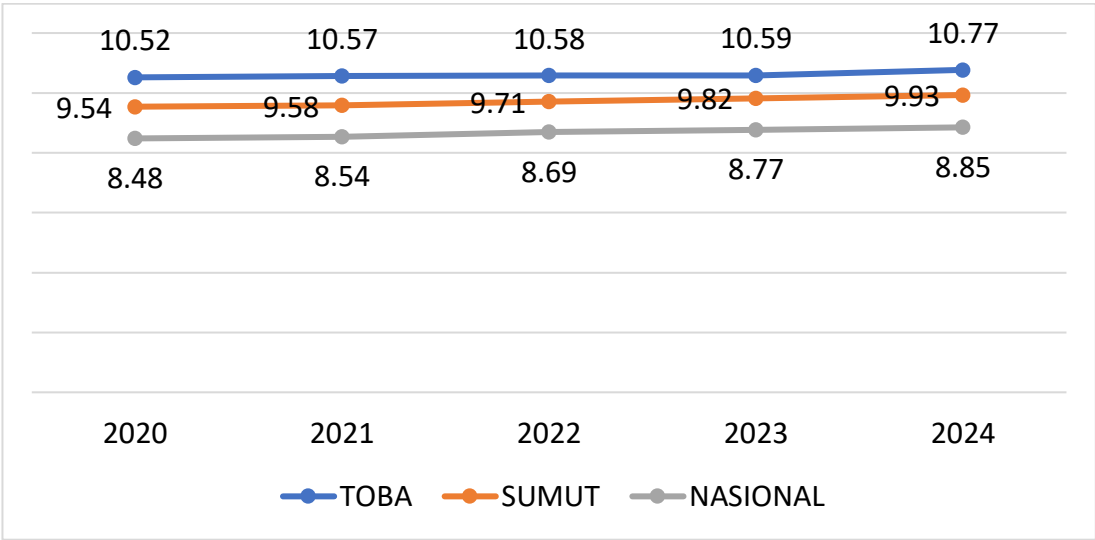
Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Toba memiliki peluang yang lebih besar untuk menikmati pendidikan dalam jangka waktu yang lebih lama dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Peningkatan ini tidak terlepas dari peran kebijakan daerah dalam memperluas akses pendidikan, pemberian beasiswa, perbaikan sarana prasarana sekolah, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Dengan capaian HRLS yang terus meningkat dan berada di atas rata-rata, Kabupaten Toba memiliki modal kuat untuk membentuk sumber daya manusia yang lebih berpendidikan, berdaya saing, dan siap menghadapi tantangan pembangunan ke depan.

B. Rata – rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator penting yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun penduduk usia 25 tahun ke atas mengenyam pendidikan formal. Indikator ini tidak hanya mencerminkan capaian pendidikan masyarakat, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kualitas sumber daya manusia, tingkat produktivitas, dan daya saing daerah. Peningkatan RLS menunjukkan semakin banyak penduduk yang berhasil menamatkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sebaliknya, RLS yang rendah mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, baik akibat keterbatasan sarana prasarana, faktor ekonomi, maupun kondisi geografis. Bagi Kabupaten Toba, RLS menjadi salah satu tolok ukur utama keberhasilan pembangunan sektor pendidikan. Dengan capaian RLS yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional, daerah ini memiliki potensi yang lebih besar dalam membangun masyarakat yang berpengetahuan, terampil, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya strategis seperti peningkatan kualitas guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang merata, dan program beasiswa akan menjadi kunci dalam menjaga tren positif RLS ke depan.

Grafik 2.6 Perkembangan Rata Rata Lama Sekolah Kabupaten Toba tahun 2020 - 2024



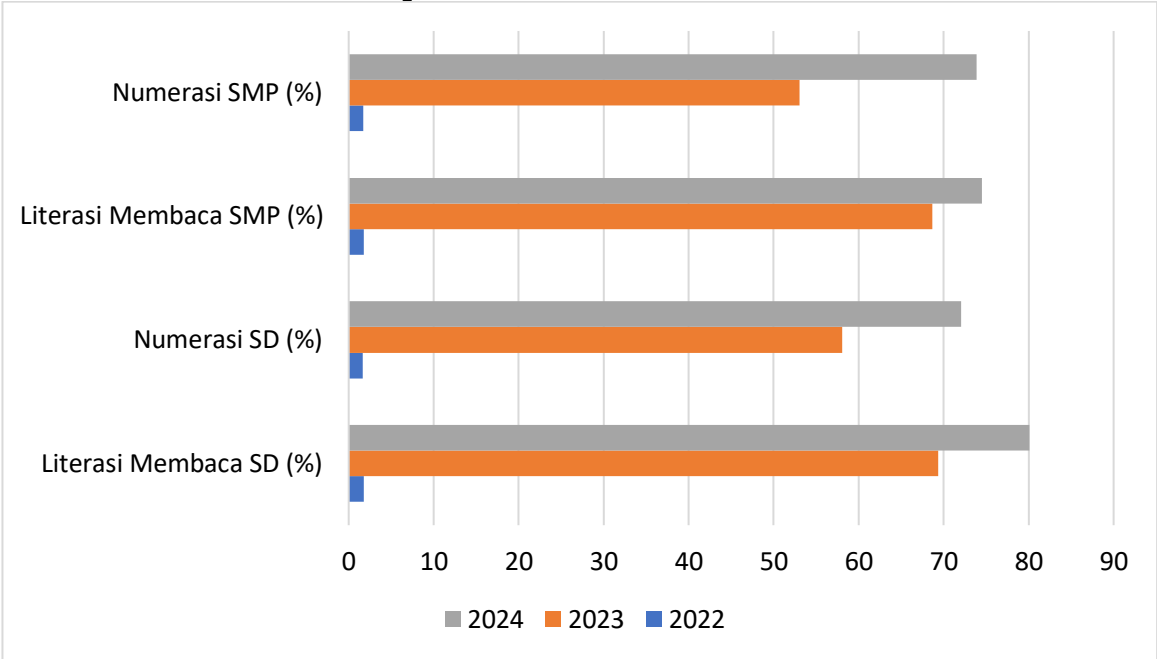
Selama periode 2020–2024, indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Toba menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada tahun 2020, RLS Kabupaten Toba tercatat sebesar 10,52 tahun dan terus meningkat menjadi 10,77 tahun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan semakin banyak penduduk usia 25 tahun ke atas yang menempuh pendidikan formal lebih lama, menandakan perbaikan akses dan mutu layanan pendidikan. Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Utara dan tingkat Nasional, RLS Kabupaten Toba berada pada posisi yang lebih tinggi. Pada tahun 2024, RLS Sumatera Utara berada di angka 9,93 tahun dan Nasional sebesar 8,85

tahun, sedangkan Kabupaten Toba sudah mencapai hampir 11 tahun. Keunggulan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Toba memiliki peluang yang lebih besar dalam menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Peningkatan RLS di Kabupaten Toba didukung oleh berbagai kebijakan daerah, seperti perluasan akses pendidikan ke wilayah terpencil, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta dukungan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Dengan tren positif ini, diharapkan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Toba terus meningkat, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah di masa mendatang.

C. Angka Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP

Angka literasi dan numerasi merupakan indikator penting yang mencerminkan kemampuan dasar peserta didik dalam membaca, memahami informasi, serta menguasai konsep dan keterampilan matematika. Literasi tidak hanya diartikan sebagai kemampuan membaca, tetapi juga meliputi keterampilan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi secara kritis. Sementara itu, numerasi mencakup kemampuan berpikir logis, menganalisis permasalahan, dan menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Bagi Kabupaten Toba, pencapaian literasi dan numerasi siswa SD dan SMP menjadi tolok ukur kualitas pendidikan dasar dan menengah. Capaian yang tinggi menunjukkan keberhasilan proses pembelajaran, kompetensi guru, dan relevansi kurikulum, sedangkan capaian yang rendah menandakan perlunya intervensi peningkatan mutu pembelajaran. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan angka literasi dan numerasi melalui berbagai strategi, seperti penguatan program Gerakan Literasi Sekolah, pelatihan guru dalam metode pembelajaran aktif dan inovatif, pemanfaatan teknologi pendidikan, serta peningkatan ketersediaan bahan bacaan dan media belajar yang menarik dan sesuai jenjang. Dengan upaya ini, diharapkan seluruh peserta didik di Kabupaten Toba dapat memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang setara atau bahkan melampaui standar provinsi maupun nasional, sebagai modal penting untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan menghadapi tantangan masa depan.

Grafik 2.7 Perkembangan Angka Literasi dan Numerasi Siswa SD dan SMP Kabupaten Toba Tahun 2020 – 2024



Selama periode 2022–2024, capaian literasi dan numerasi siswa SD dan SMP di Kabupaten Toba menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada jenjang SD, literasi membaca mengalami lonjakan dari hanya 1,77% pada tahun 2022 menjadi 69,35% pada 2023, dan mencapai 80,12% pada tahun 2024. Tren serupa terjadi pada numerasi SD, yang meningkat dari 1,62% di tahun 2022 menjadi 58,05% pada 2023, dan selanjutnya 72,04% pada 2024. Perbaikan yang sama terlihat pada jenjang SMP. Literasi membaca SMP naik dari 1,78% pada 2022 menjadi 68,67% pada 2023, dan 74,50% pada 2024. Sementara itu, numerasi SMP tumbuh dari 1,69% pada 2022 menjadi 53,03% pada 2023, dan melonjak ke 73,87% pada 2024.

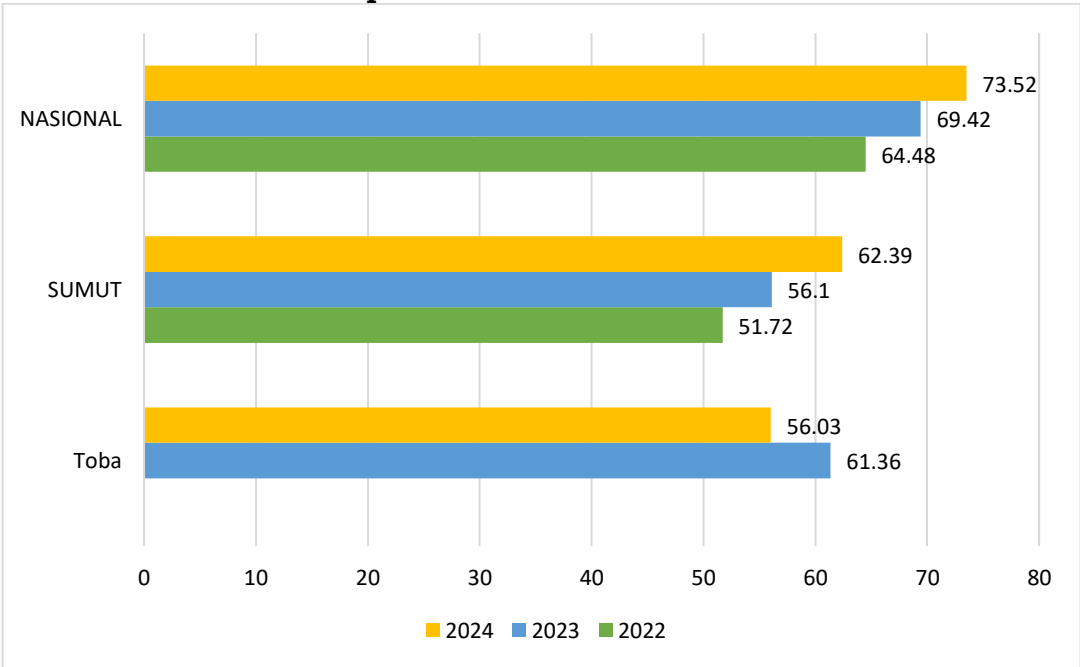
Peningkatan pesat ini menunjukkan keberhasilan program perbaikan mutu pendidikan yang dijalankan pemerintah daerah, khususnya pada aspek penguatan kompetensi literasi dan numerasi. Berbagai upaya seperti implementasi Gerakan Literasi Sekolah, pelatihan guru, pemanfaatan media pembelajaran inovatif, serta peningkatan ketersediaan bahan bacaan dan fasilitas belajar di sekolah, terbukti memberikan dampak signifikan. Dengan capaian yang terus membaik, diharapkan kemampuan literasi dan numerasi siswa Kabupaten Toba akan semakin kokoh, sehingga mendukung pencapaian standar pendidikan nasional dan memperkuat kualitas sumber daya manusia di masa depan.

D. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan indikator yang mengukur tingkat kemampuan, kebiasaan, akses, dan keberdayaan masyarakat dalam mengelola informasi serta pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Literasi dalam konteks ini tidak terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup literasi digital, literasi finansial, literasi sains, dan literasi budaya yang relevan dengan tantangan era modern. Bagi Kabupaten Toba, pembangunan literasi masyarakat memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam pembangunan. Tingkat literasi yang tinggi akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis, mengambil keputusan yang tepat, mengakses peluang ekonomi, serta menjaga kelestarian budaya dan lingkungan.

Upaya peningkatan IPLM di Kabupaten Toba diarahkan melalui perluasan akses terhadap bahan bacaan dan informasi yang berkualitas, pengembangan dan revitalisasi perpustakaan daerah dan desa, pelaksanaan program Gerakan Literasi Masyarakat, penguatan kapasitas tenaga perpustakaan, serta pemanfaatan teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan literasi. Selain itu, kolaborasi dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas literasi, dan sektor swasta akan menjadi penggerak utama dalam membangun ekosistem literasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 2.8 Perkembangan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024



Selama periode 2022–2024, capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Toba mengalami fluktuasi. Pada tahun 2022, data IPLM Kabupaten Toba belum tercatat, namun pada tahun 2023, capaian mencapai 61,36 poin, melampaui rata-rata Provinsi Sumatera Utara sebesar 56,10 dan mendekati rata-rata nasional sebesar 69,42. Capaian ini mencerminkan tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi serta meningkatnya akses terhadap fasilitas dan sumber bacaan.

Namun, pada tahun 2024, nilai IPLM Kabupaten Toba mengalami penurunan menjadi 56,03 poin. Kondisi ini menjadikan capaian daerah sedikit di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara (62,39) dan jauh tertinggal dari rata-rata nasional (73,52). Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan program literasi, baik dari sisi keterjangkauan layanan, minat baca masyarakat, maupun dukungan fasilitas dan sumber daya.

Perkembangan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih kuat untuk memperluas jangkauan dan keberlanjutan program literasi, termasuk revitalisasi perpustakaan, penguatan peran komunitas literasi, pemanfaatan teknologi digital, serta sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Dengan langkah yang tepat, IPLM Kabupaten Toba diharapkan dapat kembali meningkat dan menjadi salah satu indikator unggulan kualitas sumber daya manusia di daerah

2.2.4. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial yang adaptif bertujuan mengurangi kerentanan masyarakat dan memproteksi kelompok rentan dan juga ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Secara keseluruhan sistem perlindungan yang kuat membantu individu dan keluarga terutama yang miskin dan rentan untuk bersiap menghadapi krisis. Perlindungan sosial yang adaptif dapat dicapai dengan target kinerja indikator tingkat kemiskinan, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan persentase penyandang disabilitas yang bekerja dalam sektor formal.

Tabel 2.32 Indikator Pembangunan Perlindungan Sosial Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Indikator Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan (%)	8,71	8,99	8,89	8,04	8,07
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	16,83	17,05	21,55	24,27	33.88

Sumber: BPS, BPJS Ketenagakerjaan Kab. Toba (diolah)

Berdasarkan data indikator pembangunan tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika dalam tingkat kemiskinan dan peningkatan signifikan dalam cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Tingkat kemiskinan sempat meningkat dari 8,71% pada tahun 2020 menjadi 8,99% pada 2021, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga mencapai 8,04% pada 2023. Namun, terjadi sedikit kenaikan pada tahun 2024 menjadi 8,07%, yang perlu menjadi perhatian meskipun tidak terlalu signifikan. Di sisi lain, cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tren positif yang konsisten, meningkat dari 16,83% pada 2020 menjadi 33,88% pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan upaya perluasan perlindungan sosial bagi tenaga kerja. Secara keseluruhan, meskipun pengentasan kemiskinan masih memerlukan perhatian lebih, capaian dalam perluasan jaminan sosial menunjukkan kemajuan yang patut diapresiasi dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

2.2.5. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral, dan modal dasar pembangunan serta pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter serta memperteguh jati diri bangsa. Yang menjadi indikator dalam mengukur beragama maslahat dan berkebudayaan maju adalah indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Toba indikator dalam mengukur indikator tersebut adalah angka kesiapan sekolah. Angka Kesiapan sekolah merupakan tingkat perkembangan minimum yang memungkinkan anak merespons tuntutan sekolah secara memadai yang berkorelasi dengan keberhasilan belajar anak didukung oleh faktor yang lain yaitu peran sekolah serta orang tua.

Angka kesiapan sekolah di Kabupaten Toba tahun 2022, 2023 dan 2024 secara berturut-turut adalah 76,12, 76,14 dan 77,27, dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa angka kesiapan sekolah menggambarkan jumlah anak PAUD/TK yang sudah siap melanjutkan proses kegiatan belajar sekolah ke jenjang sekolah dasar mengalami peningkatan yang cukup baik artinya semakin besar kesiapan belajar yang dimiliki anak-anak di Kabupaten Toba ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yaitu pendidikan dasar.

Tabel 2.33 Indikator Berkebudayaan di Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Indikator Utama Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Angka Kesiapan Sekolah (%)	74,68	75,25	76,12	76,14	77,27
Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Muatan Lokal Bahasa Daerah dan Ekstra Kulikuler Kesenian (%)	92	92	92	92	92
Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 7-15 Tahun yang Bersekolah (%)	NA	NA	NA	NA	0,22
Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	0	0	0	0	0
Persentase Warisan Budaya Tak-Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	0	0	0	0	0
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	NA	NA	22,53	45,93	56,03

Sumber data: BPS, Disbudpar Kab. Toba, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Toba, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Toba.

Tabel menunjukkan perkembangan sejumlah indikator utama pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, budaya, dan literasi masyarakat dari tahun 2020 hingga 2024. Angka Kesiapan Sekolah mengalami peningkatan stabil setiap tahunnya, dari 74,68% pada 2020 menjadi 77,27% pada 2024. Hal ini mencerminkan peningkatan kesiapan anak-anak usia sekolah dalam memulai pendidikan formal. Sementara itu, persentase satuan pendidikan yang memiliki guru pengajar muatan lokal bahasa daerah dan kesenian tetap konsisten di angka 92% sepanjang lima tahun terakhir, menunjukkan komitmen yang berkelanjutan terhadap pelestarian budaya lokal dalam pendidikan.

Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 7–15 tahun yang bersekolah baru tercatat pada tahun 2024, yaitu sebesar 0,22%. Meskipun masih rendah, data ini merupakan langkah awal dalam upaya pemantauan inklusivitas pendidikan. Di sisi lain, persentase benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi, serta persentase warisan budaya tak-benda yang telah ditetapkan, masih berada pada angka 0% dari tahun 2020 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya dorongan lebih lanjut dalam upaya pelestarian dan legalisasi warisan budaya.

Terakhir, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Setelah tidak tersedia pada 2020 dan 2021, indeks ini mulai dicatat sebesar 22,53 pada 2022, meningkat menjadi 45,93 pada 2023, dan mencapai 56,03 pada 2024. Ini mencerminkan peningkatan akses dan kualitas literasi masyarakat yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, data menunjukkan kemajuan dalam aspek kesiapan pendidikan dan literasi, namun juga menyoroti area budaya yang masih perlu ditingkatkan perhatian dan aksinya.

2.2.6. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

Kabupaten Toba berkomitmen membangun masyarakat yang tangguh melalui penguatan peran keluarga, penerapan prinsip kesetaraan gender, dan pengembangan masyarakat yang inklusif. Keluarga berkualitas menjadi pilar utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter, sejalan dengan nilai-nilai budaya Batak yang menjunjung tinggi kekeluargaan dan gotong royong. Upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender terus didorong melalui peningkatan peran aktif perempuan dalam pendidikan, ekonomi, dan pengambilan keputusan, baik di tingkat desa maupun pemerintahan. Pemerintah daerah juga berupaya menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Dengan semangat kebersamaan dan kearifan lokal, Kabupaten Toba menempatkan inklusivitas sebagai fondasi dalam pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.34 Indikator Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender di Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Indikator Pembangunan Keluarga Berkualitas dan Kesetaraan Gender	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketimpangan Gender	0,533	0,493	0,535	0,505	0,394
Indeks Pemberdayaan Gender	60,07	59,51	60,66	61,53	71,96

Sumber: BPS. Provinsi Sumut, 2025

Selama periode 2020 hingga 2024, Kabupaten Toba menunjukkan berbagai dinamika dalam upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan masyarakat yang inklusif. Jumlah kejadian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami fluktuasi, dari 11 kasus pada tahun 2020 menurun menjadi 4 kasus pada 2021, namun kembali mengalami sedikit kenaikan pada tahun-tahun berikutnya dengan 6 kasus (2022), 5 kasus (2023), dan 4 kasus pada 2024.

Sementara itu, jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan tren peningkatan signifikan, dari 18 (delapan belas) kasus pada tahun 2020 menjadi 40 (empat puluh) kasus pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan perlunya perhatian dan intervensi yang lebih kuat dalam perlindungan terhadap kelompok rentan.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Gender (IPG) menunjukkan peningkatan stabil dari 97,96 (2020) menjadi 98,24 (2024), mencerminkan perbaikan akses dan peran perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Namun demikian, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih stagnan di kisaran 74, menandakan bahwa keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan, ekonomi, dan politik masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, Kabupaten Toba telah menunjukkan kemajuan dalam pengarusutamaan gender, namun tantangan dalam hal perlindungan terhadap perempuan dan anak serta pemberdayaan perempuan masih menjadi prioritas penting ke depan.

Tabel 2.35 Capaian Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Toba

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kejadian KDRT	11	4	6	5	4
2	Jumlah kejadian tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak	18	15	10	30	40
3	Indeks Pembangunan Gender	97,96	98,06	98,51	98,32	98,24
4	IPM Perempuan	74,53	74,83	74,05	74,41	74,95

Sumber: BPS. Provinsi Sumut

Jumlah kejadian KDRT mengalami tren penurunan dibandingkan tahun awal. Dari 11 (sebelas) kasus pada tahun 2020, turun menjadi 4 (empat) kasus pada tahun 2021, naik sedikit menjadi 6 (enam) kasus di tahun 2022, lalu menurun lagi menjadi 5 (lima) kasus (2023) dan 4 (empat) kasus (2024). Hal ini mencerminkan adanya upaya pencegahan yang cukup berhasil, meski tetap dibutuhkan penguatan edukasi dan perlindungan di tingkat keluarga.

Berbeda dengan kasus KDRT, jumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan cukup signifikan dari 18 kasus (2020) menjadi 40 kasus (2024). Kenaikan tajam terjadi mulai 2023 (30 kasus) hingga 2024. Hal ini dapat mencerminkan dua hal: meningkatnya kasus kekerasan atau meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan menangani kasus-kasus tersebut. Kedua interpretasi ini menunjukkan pentingnya respons yang lebih aktif dan sistematis dari pemerintah daerah dan masyarakat.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Toba terus mengalami peningkatan dari 97,96 (2020) menjadi 98,24 (2024). Ini menunjukkan bahwa kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan semakin menyempit, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) relatif stagnan dalam lima tahun terakhir, berada di kisaran 74 poin. Tahun 2020 tercatat 74,53, dan pada tahun 2024 berada di angka 74,95. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kesetaraan dalam akses layanan dasar meningkat (terlihat dari IPG), keterlibatan aktif perempuan dalam pengambilan keputusan, legislatif, manajerial, dan sektor ekonomi strategis masih perlu ditingkatkan secara lebih serius.

Secara umum, Kabupaten Toba menunjukkan kemajuan dalam pengarusutamaan gender, khususnya dalam capaian pembangunan dan pengurangan KDRT. Namun, peningkatan signifikan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta stagnasi IDG menjadi perhatian penting yang harus segera ditindaklanjuti melalui program pemberdayaan dan perlindungan yang lebih terintegrasi.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam memanfaatkan potensi sumber daya yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di tengah persaingan regional, nasional, maupun global. Kabupaten Toba memiliki potensi unggulan yang beragam, antara lain kekayaan alam, keindahan Danau Toba sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, sumber daya pertanian dan perikanan yang potensial, serta warisan budaya Batak yang khas. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum sepenuhnya memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi daya saing daerah antara lain kualitas infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, iklim investasi, inovasi teknologi, dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Saat ini, ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar, seperti jaringan jalan, transportasi publik, energi, dan telekomunikasi, masih memerlukan peningkatan untuk mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan mobilitas manusia.

Di sisi lain, penguatan sektor ekonomi produktif masih menghadapi kendala pada rendahnya nilai tambah produk, keterbatasan akses pasar, dan minimnya adopsi teknologi modern di sektor usaha kecil, menengah, dan koperasi. Iklim investasi juga perlu diperkuat dengan penyederhanaan perizinan, peningkatan kepastian hukum, serta kemudahan layanan bagi pelaku usaha.

Untuk meningkatkan daya saing daerah, diperlukan strategi terpadu yang mencakup peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur pendukung, inovasi dan digitalisasi, penguatan promosi investasi dan pariwisata, serta sinergi lintas sektor. Dengan langkah tersebut, Kabupaten Toba diharapkan mampu bertransformasi menjadi daerah yang tangguh, adaptif, dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional.

2.3.1 Daya Saing SDM

Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Toba masih memerlukan penguatan, baik dari segi kualitas pendidikan, keterampilan kerja, maupun kesehatan masyarakat. Meskipun angka partisipasi sekolah cukup baik, pemerataan mutu pendidikan dan penguasaan keterampilan berbasis teknologi masih menjadi tantangan. Tingkat kesehatan masyarakat juga berpengaruh

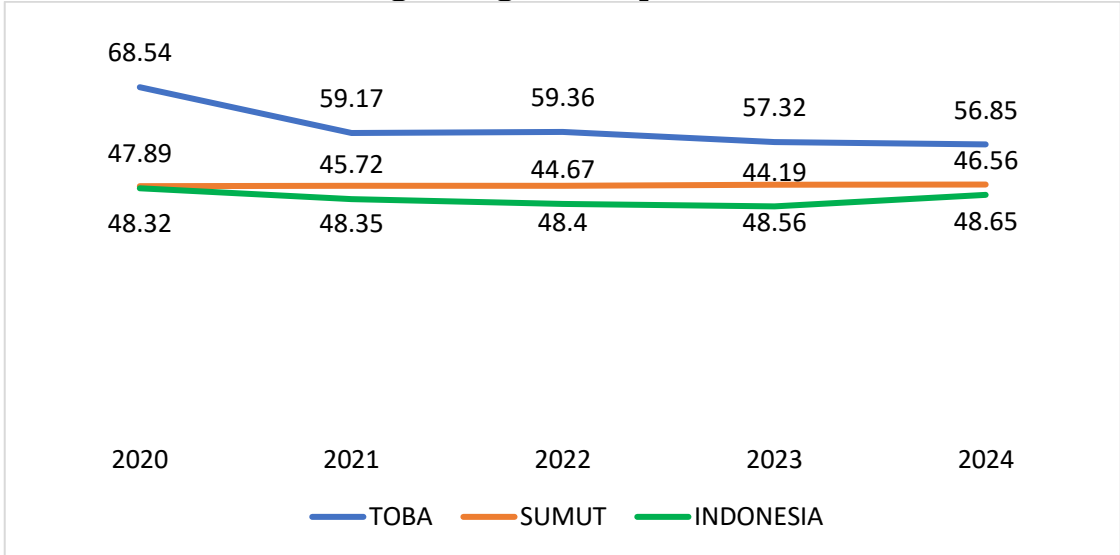
terhadap produktivitas kerja, di mana permasalahan stunting, penyakit menular, dan akses layanan kesehatan yang belum merata menjadi hambatan. Untuk meningkatkan daya saing SDM, diperlukan strategi terpadu yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, pelatihan vokasi, penguatan literasi digital, serta layanan kesehatan yang berkualitas dan inklusif.

A. Angka Ketergantungan

Dalam kurun waktu 2020–2024, angka ketergantungan di Kabupaten Toba mengalami tren penurunan yang cukup konsisten, meskipun fluktuasi kecil terjadi pada beberapa tahun. Pada tahun 2020, angka ketergantungan tercatat sebesar 68,54, yang mengindikasikan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban 68–69 penduduk usia tidak produktif (anak-anak dan lansia). Angka ini relatif tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara (48,32) dan nasional (47,89). Memasuki tahun 2021, angka ketergantungan di Toba turun signifikan menjadi 59,17, namun penurunan ini tidak berlanjut secara konsisten karena pada tahun 2022 sedikit meningkat menjadi 59,36. Pada 2023, kembali terjadi penurunan menjadi 57,32, dan tren penurunan berlanjut hingga 2024 dengan capaian 56,85.

Meskipun penurunan ini menunjukkan perbaikan dalam komposisi penduduk produktif dan tidak produktif, angka ketergantungan Kabupaten Toba masih berada jauh di atas capaian provinsi (48,65) dan nasional (46,56) pada tahun terakhir. Kondisi ini menandakan bahwa beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia kerja di Toba masih lebih berat dibandingkan wilayah lain.

Grafik 2.9. Rasio Ketergantungan Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024



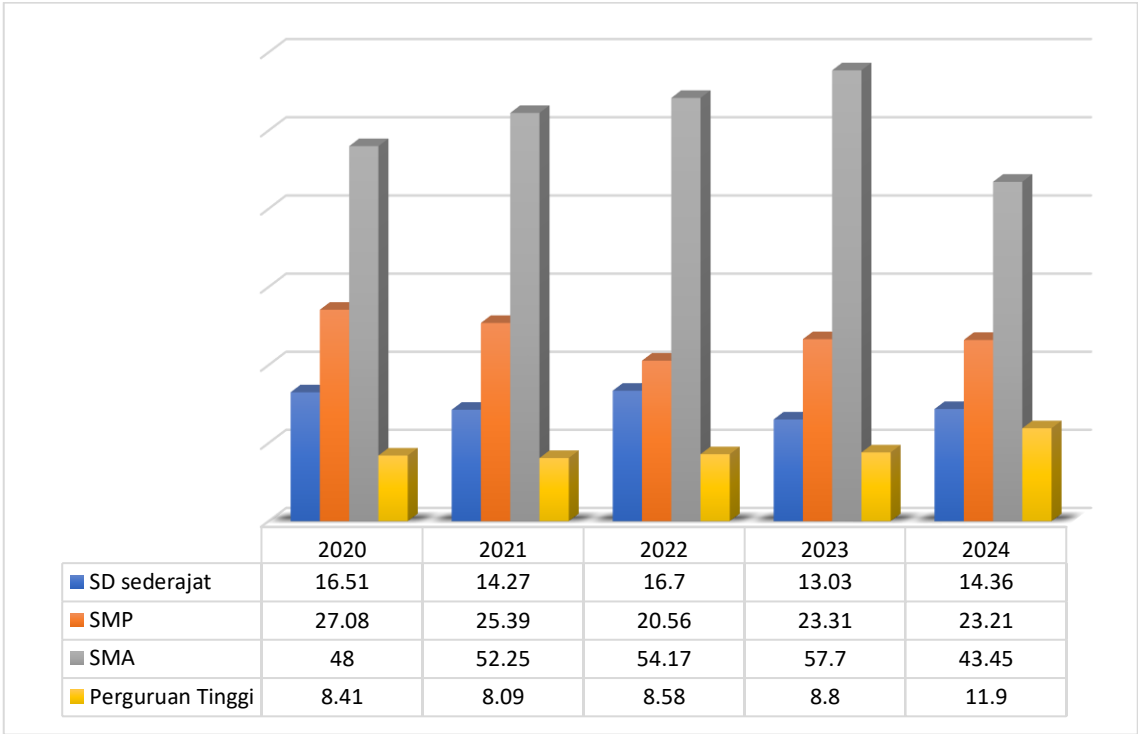
Tantangan untuk terus menurunkan beban ketergantungan melalui mengoptimalkan bonus demografi dengan menjadikan penduduk usia produktif sebagai pelaku pembangunan melalui peningkatan produktifitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan kualitas penduduk usia produktif agar menjadi sumber daya manusia yang berdaya saing dan unggul dan terus menjaga keberlanjutan produktivitas sampai usia lanjut dengan menjaga kualitas kesehatan dan pola konsumsinya. Meningkatnya kualitas sumber daya manusia akan meningkatkan produktivitas disertai meningkatnya investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menurunkan pengangguran dan kemiskinan, meningkatnya kesejahteraan maka akan menurunkan angka ketergantungan.

B. Tingkat Pendidikan Penduduk

Data periode 2020–2024 menunjukkan komposisi tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Toba mengalami fluktuasi pada semua jenjang. Persentase penduduk yang berpendidikan SD sederajat relatif stabil di kisaran 13–17%, dengan kecenderungan menurun pada 2023 (13,03%) sebelum naik kembali pada 2024 menjadi 14,36%. Pada jenjang SMP sederajat, persentase menurun dari 27,08% di 2020 menjadi 20,56% di 2022, kemudian sedikit meningkat pada 2024 (23,21%). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sebagian lulusan SMP yang melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Kategori SMA sederajat mendominasi tingkat pendidikan penduduk, dengan tren meningkat dari 48% di 2020 hingga mencapai puncak 57,7% pada 2023, namun mengalami penurunan tajam pada 2024 menjadi 43,45%. Penurunan ini berpotensi terkait dengan faktor migrasi lulusan, perubahan struktur usia penduduk, atau belum optimalnya pencatatan data pendidikan. Sementara itu, persentase lulusan Perguruan Tinggi masih relatif rendah namun menunjukkan kenaikan positif dari 8,41% di 2020 menjadi 11,9% di 2024. Kenaikan ini mengindikasikan adanya peningkatan akses dan minat melanjutkan pendidikan tinggi di kalangan penduduk. Secara umum, meskipun jumlah lulusan pendidikan menengah dan tinggi meningkat, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan proporsi lulusan pendidikan tinggi dan mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah. Hal ini penting untuk mendorong peningkatan daya saing SDM Kabupaten Toba di masa depan.

Grafik 2.10. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Karakteristik dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan



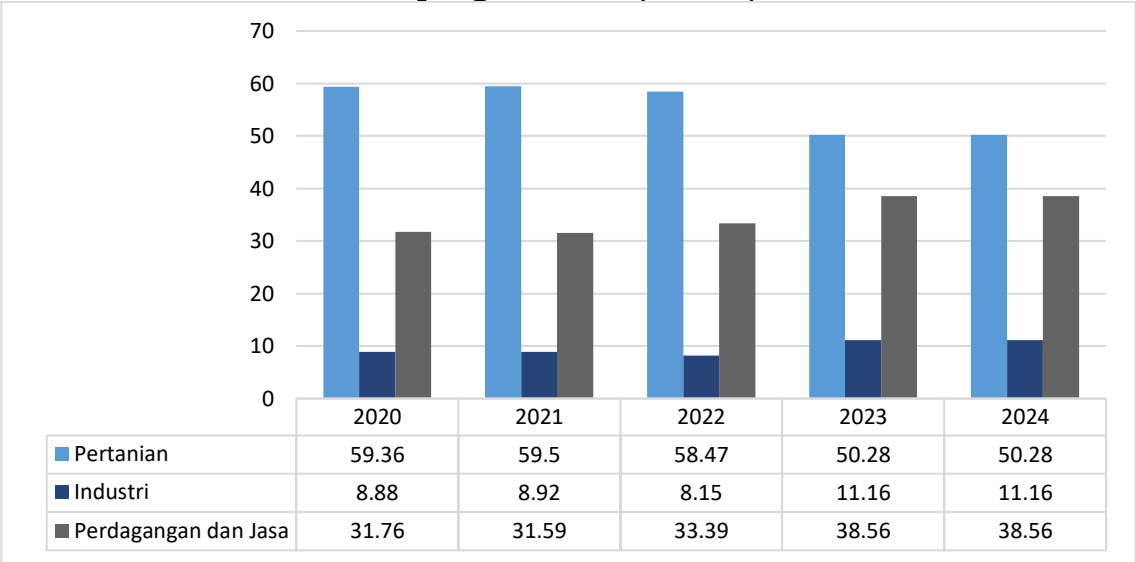
Sumber : Kabupaten Toba Dalam Angka

C. Tingkat Pendidikan Penduduk Termasuk Angkatan Kerja

Struktur ketenagakerjaan selama 5 Tahun lebih besar pada sektor Pertanian disusul oleh sektor perdagangan dan jasa dan sektor industri pengolahan. Pada sektor pertanian, persentase pekerja mengalami penurunan signifikan dari 59,36% pada 2020 menjadi 50,28% pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Sektor industri menunjukkan tren kenaikan, dari 8,88% pada 2020 menjadi 11,16% pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan tumbuhnya aktivitas manufaktur dan pengolahan yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sektor perdagangan dan jasa juga mengalami peningkatan cukup besar, dari 31,76% pada 2020 menjadi 38,56% pada 2024. Perkembangan ini menandakan semakin menguatnya peran sektor jasa dan perdagangan dalam struktur ekonomi daerah, seiring dengan bertambahnya kebutuhan layanan masyarakat dan berkembangnya kegiatan ekonomi berbasis jasa.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ketenagakerjaan dari sektor pertanian ke sektor industri serta perdagangan dan jasa, yang dapat menjadi indikasi transformasi ekonomi di Kabupaten Toba menuju sektor yang lebih bernilai tambah.

Grafik 2.11. Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Kelompok Lapangan Usaha (Persen)



Sumber : Kabupaten Toba Dalam Angka

Kondisi ini memberikan tantangan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan penduduk dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan kapasitas tenaga kerja dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan pasar kerja, dan penguatan pelatihan re-skilling dan up-skilling serta integrasi soft skill bagi angkatan kerja.

2.3.2 Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta kemampuan inovasi daerah menjadi salah satu pilar penting dalam meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pembangunan ekonomi Kabupaten Toba. Pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan ekosistem inovasi, dan penerapan digitalisasi pada berbagai sektor, termasuk pertanian, pariwisata, industri kreatif, dan jasa, diharapkan mampu mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi.

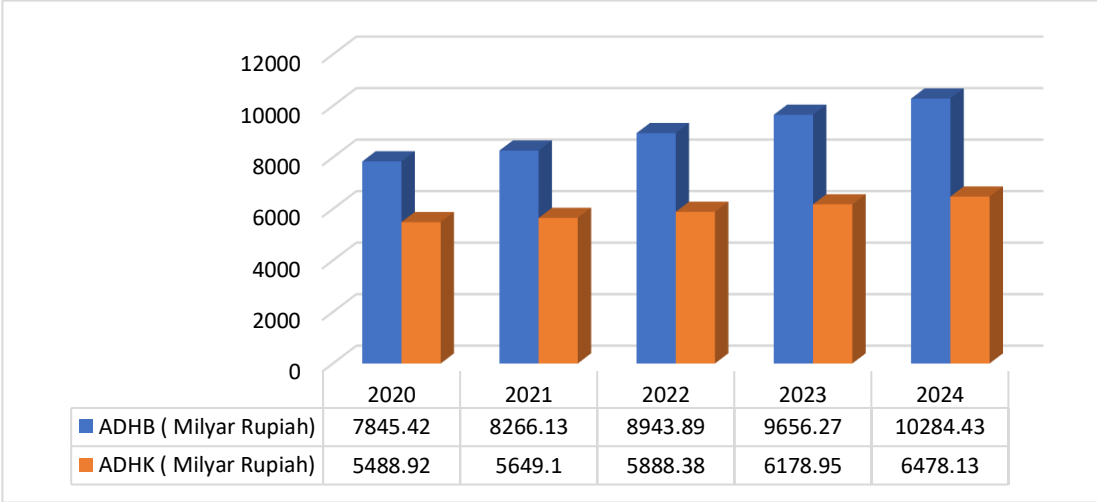
Meskipun telah terdapat inisiatif pengembangan Iptek di tingkat daerah, seperti pelatihan teknologi, penerapan sistem informasi, serta dukungan terhadap UMKM berbasis inovasi, tingkat adopsi teknologi dan budaya inovatif di masyarakat masih memerlukan penguatan. Tantangan utama meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital, serta keterbatasan riset dan pengembangan yang berorientasi pasar.

A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Toba atas dasar harga berlaku (ADHB) pada tahun 2024 mencapai 10.284,43 miliar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini meningkat sebesar 628,16 miliar rupiah dari tahun 2023 yang mencapai 9.656,27 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) 2010 adalah sebesar 6.478,13 miliar rupiah pada tahun 2024 meningkat dari 6.178,95 miliar rupiah

pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan pada tahun 2024, Toba mengalami perlambatan pada pertumbuhan ekonomi yaitu 4,84 persen.

Grafik 2.12. PDRB Kabupaten Toba Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, (Miliar Rupiah), 2020-2024



Berdasarkan data perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK) periode 2020–2024, terlihat adanya tren pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada ADHB, nilai PDRB meningkat dari Rp7.845,42 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp10.284,43 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya nilai nominal produksi barang dan jasa yang dihasilkan daerah, seiring dengan kenaikan harga dan pertumbuhan volume produksi.

Sementara itu, pada ADHK (dengan tahun dasar yang tetap), PDRB juga menunjukkan pertumbuhan positif dari Rp 5.488,92 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 6.478,13 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi riil Kabupaten Toba yang bebas dari pengaruh inflasi, sehingga menggambarkan peningkatan kapasitas produksi daerah secara murni. Secara keseluruhan, perkembangan ADHB dan ADHK ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Toba mengalami ekspansi yang stabil, baik dari sisi nilai nominal maupun volume riil produksi, yang dapat menjadi indikator positif bagi pencapaian target pembangunan daerah.

Selama 5 tahun terakhir, struktur perekonomian Toba masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibandingkan lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Toba. Sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Toba pada tahun 2024 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 30,69 persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 19,48 persen. Selanjutnya lapangan usaha

Konstruksi 14,14 persen serta Industri Pengolahan sebesar 11,55 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 10 (sepuluh) persen. Dari keempat lapangan usaha yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB pada tahun 2024, terdapat 2 (dua) lapangan usaha yang mengalami peningkatan peranan dibandingkan tahun 2023, yaitu lapangan usaha Konstruksi dan Industri Pengolahan.

Tabel 2.36 Peranan PDRB ADH Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020–2024

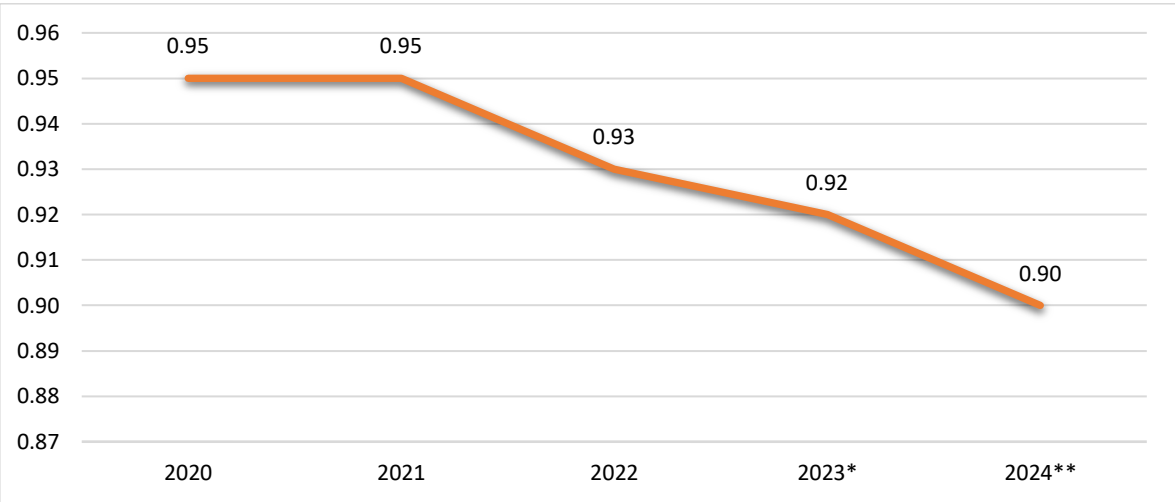
Lapangan Usaha		2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31,28	31,13	31,24	30,97	30,69
B	Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,27	0,27	0,27	0,26
C	Industri Pengolahan	10,71	10,99	11,34	11,24	11,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
F	Konstruksi	13,43	13,8	13,87	14	14,14
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi					
G	Mobil dan Sepeda Motor	18,13	18,3	18,8	19,52	19,48
H	Transportasi dan Pergudangan	3,08	3,10	3,11	3,32	3,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,74	2,61	2,53	2,58	2,55
J	Informasi dan Komunikasi	1,18	1,23	1,22	1,24	1,24
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,56	1,58	1,56	1,55	1,52
L	Real Estat	2,97	2,94	2,84	2,78	2,72
M,N	Jasa Perusahaan	0,93	0,94	0,92	0,92	0,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,90	9,37	8,70	8,12	8,19
P	Jasa Pendidikan	2,63	2,58	2,48	2,40	2,36
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,94	0,91	0,86	0,83	0,83
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

B. Kontribusi PDRB Kabupaten

Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba terhadap PDRB Provinsi Sumatera Utara mencerminkan peran strategis daerah dalam perekonomian wilayah. Selama periode lima tahun terakhir, kontribusi Kabupaten Toba menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan fluktuatif yang dipengaruhi oleh dinamika sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, perikanan, serta industri pengolahan. Meskipun secara total kontribusi PDRB Kabupaten Toba terhadap provinsi belum mencapai proporsi yang signifikan dibandingkan kabupaten/kota dengan basis industri dan perdagangan yang lebih besar, namun potensi pertumbuhan ekonomi daerah cukup menjanjikan. Hal ini didorong oleh kekayaan sumber daya alam, peningkatan konektivitas infrastruktur, pengembangan destinasi wisata Danau Toba, serta penguatan sektor pertanian berbasis teknologi dan inovasi.

Peningkatan kontribusi PDRB di masa mendatang memerlukan penguatan sektor-sektor produktif, diversifikasi basis ekonomi, dan optimalisasi nilai tambah melalui hilirisasi produk lokal. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan peran Kabupaten Toba dalam perekonomian Sumatera Utara, tetapi juga memperkuat daya saing daerah di tingkat regional maupun nasional.

Grafik 2.13. Kontribusi PDRB Kabupaten Toba terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara



Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Utara pada periode 2020–2024 menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2020 dan 2021, kontribusi Toba berada di angka 0,95 persen, kemudian menurun menjadi 0,93 persen pada tahun 2022, 0,92 persen pada tahun 2023, dan diperkirakan mencapai 0,90 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan perlunya upaya strategis untuk meningkatkan kinerja ekonomi daerah, baik melalui optimalisasi potensi sektor unggulan maupun pengembangan sektor-sektor baru yang dapat memberikan nilai tambah tinggi dan memperluas basis ekonomi Kabupaten Toba.

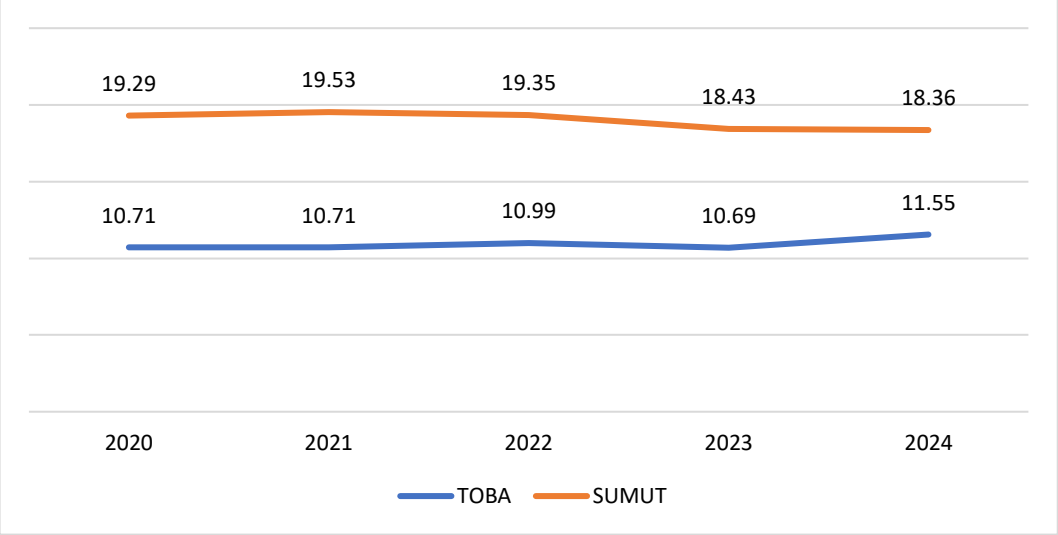
C. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Industri pengolahan merupakan salah satu sektor strategis dalam struktur perekonomian Kabupaten Toba karena memiliki potensi untuk memberikan nilai tambah signifikan terhadap hasil produksi sektor pertanian, perikanan, dan sumber daya lokal lainnya. Perkembangan rasio PDRB industri pengolahan terhadap total PDRB daerah menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusi industri pengolahan Kabupaten Toba terhadap PDRB cenderung fluktuatif, dipengaruhi oleh faktor ketersediaan bahan baku, kapasitas produksi, investasi industri, serta daya serap pasar domestik dan ekspor. Sektor ini masih didominasi oleh industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan,

termasuk pengolahan kopi, hasil perikanan Danau Toba, serta produk makanan dan minuman berbasis komoditas lokal.

Peningkatan rasio industri pengolahan menjadi fokus penting dalam rangka mendorong hilirisasi, meningkatkan nilai tambah produk daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperluas pasar. Ke depan, diperlukan upaya penguatan ekosistem industri melalui penyediaan infrastruktur pendukung, peningkatan kualitas SDM, serta kemitraan antara pelaku usaha, koperasi, dan UMKM agar kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB semakin optimal.

Grafik 2.14. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%) terhadap PDRB ADHB Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Toba.

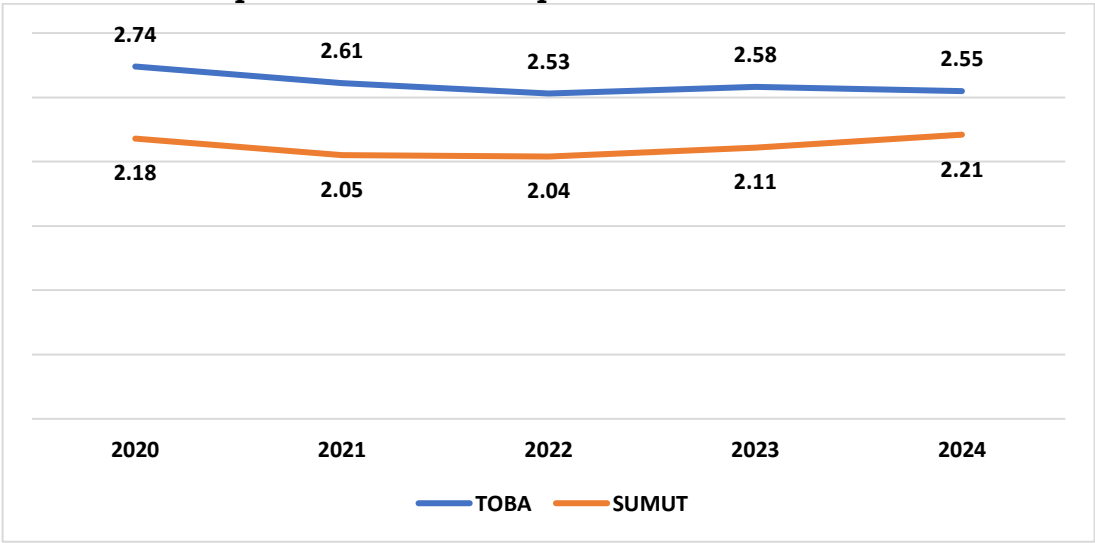
Selama periode 2020–2024, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Toba menunjukkan fluktuasi. Pada tahun 2020 dan 2021, kontribusi tercatat stabil di angka 10,71 persen. Tahun 2022 terjadi sedikit peningkatan menjadi 10,99 persen, namun pada 2023 kembali menurun menjadi 10,69 persen. Memasuki tahun 2024, kontribusi sektor ini meningkat cukup signifikan hingga mencapai 11,55 persen, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Sumatera Utara, kontribusi sektor industri pengolahan Kabupaten Toba masih berada di bawah capaian provinsi yang berada pada kisaran 18–19 persen. Meskipun demikian, tren peningkatan pada tahun 2024 memberikan sinyal positif bagi potensi penguatan sektor industri pengolahan di Toba di masa mendatang, khususnya melalui pengembangan nilai tambah dan daya saing produk industri lokal.

D. Pengembangan Pariwisata

a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

Tahun 2024, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum berkontribusi terhadap PDRB Kabupaten Toba sebesar 2,55 persen. Kontribusi sublapangan usaha Penyediaan Makan Minum terhadap pembentukan PDRB Toba sebesar 2,35 persen (92,50 persen terhadap lapangan usaha), sedangkan sublapangan usaha Penyediaan Akomodasi memberi kontribusi sebesar 0,19 persen (7,50 persen terhadap lapangan usaha). Secara keseluruhan, lapangan usaha ini mencatatkan laju pertumbuhan positif sebesar 4,50 persen pada tahun 2024, mengalami perlambatan dibandingkan tahun 2023 sebesar 7,66 persen. Hal ini disebabkan pertumbuhan kedua sublapangan usaha Penyediaan Makan Minum yang juga mengalami perlambatan pada tahun 2024.

Grafik 2.15. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHB Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024



Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman di Kabupaten Toba menunjukkan tren fluktuatif sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, rasio sektor ini tercatat sebesar 2,74%, lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara yang berada di angka 2,18%. Pada 2021, rasio Toba mengalami penurunan menjadi 2,61%, selaras dengan penurunan rata-rata provinsi menjadi 2,05%. Tren penurunan berlanjut pada 2022 dengan capaian 2,53% di Toba dan 2,04% di Sumatera Utara. Meski sempat meningkat pada 2023 menjadi 2,58%, angka tersebut kembali sedikit menurun pada 2024 menjadi 2,55%. Secara keseluruhan, kontribusi sektor ini di Toba konsisten berada di atas capaian provinsi, yang menandakan potensi sektor pariwisata dan kuliner daerah tetap kuat meskipun mengalami dinamika tahunan.

b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara.

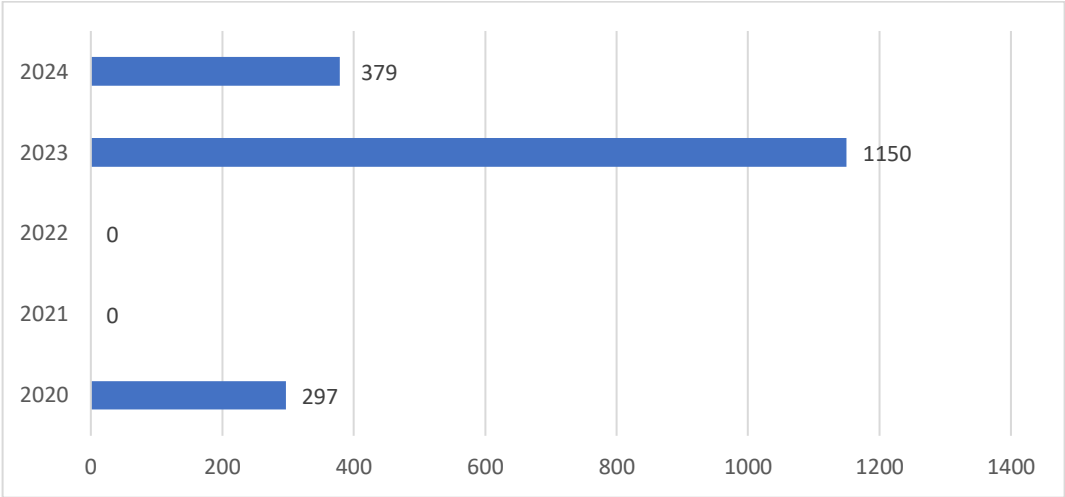
Perkembangan jumlah wisatawan nusantara (wisnus) di Kabupaten Toba dalam lima tahun terakhir memperlihatkan dinamika yang cukup mencolok, mencerminkan berbagai faktor eksternal dan internal yang memengaruhi sektor pariwisata. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 297 kunjungan wisatawan nusantara. Angka ini relatif rendah, salah satunya disebabkan oleh pembatasan perjalanan dan penutupan sebagian besar destinasi wisata akibat pandemi COVID-19.

Situasi tersebut semakin terasa pada tahun 2021 dan 2022, di mana data resmi mencatat nihil kunjungan wisnus. Hal ini tidak hanya terkait dengan pembatasan mobilitas, tetapi juga masih adanya kekhawatiran masyarakat terhadap risiko kesehatan serta keterbatasan kegiatan promosi wisata yang efektif selama masa pandemi. Kondisi ini berdampak langsung pada ekosistem pariwisata lokal, termasuk sektor perhotelan, transportasi, kuliner, hingga ekonomi kreatif yang menggantungkan pendapatan dari pergerakan wisatawan.

Memasuki tahun 2023, terlihat titik balik yang menggembirakan. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara melonjak signifikan menjadi 1.150 kunjungan. Lonjakan ini dapat dikaitkan dengan membaiknya situasi kesehatan nasional, pelonggaran pembatasan perjalanan, serta peningkatan kegiatan promosi dan event pariwisata di Kabupaten Toba. Keberadaan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas nasional juga menjadi katalisator penting yang menarik minat wisatawan domestik untuk kembali berkunjung.

Namun, tahun 2024 menunjukkan adanya penurunan jumlah kunjungan menjadi 379 wisatawan. Penurunan ini perlu menjadi perhatian serius, karena bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti persaingan antar destinasi, kurangnya inovasi paket wisata, atau terbatasnya promosi di pasar domestik. Fluktuasi ini menjadi sinyal bahwa keberlanjutan pertumbuhan sektor pariwisata membutuhkan strategi yang konsisten, kolaborasi lintas sektor, dan peningkatan kualitas layanan wisata, agar Kabupaten Toba tidak hanya menjadi tujuan sesaat tetapi juga destinasi yang terus menarik minat wisatawan dari tahun ke tahun.

Grafik 2.16. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2020 - 2024



Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba

c) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah:

Jumlah usaha industri kecil di Kabupaten Toba tahun 2024 sebanyak 1.602 usaha dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.883 orang. Dari jumlah usaha tersebut industri sandang dan kulit merupakan industri kecil dengan jumlah usaha terbanyak yaitu : 766 usaha (47,82 persen) dengan tenaga kerja sebanyak 1.288 orang. Berdasarkan kecamatan, industry sandang dan kulit terbanyak berada di Kecamatan Uluan dengan 275 usaha dengan 280 tenaga kerja dan Kecamatan Silaen dengan 158 usaha dengan 337 tenaga kerja. Industri Kerajinan Umum menempati urutan kedua terbanyak setelah industri sandang dan kulit sebanyak 351 usaha dan 464 tenaga kerja. Industri ini paling banyak terdapat di Kecamatan Sigumpar dengan 104 usaha yang menyerap 110 orang tenaga kerja.

d) Return On Asset BUMD (%)

Return On Asset BUMD (%) di Kabupaten Toba tahun 2020 sampai dengan 2024 tidak ada data karena belum ada pelaporan dari Return On Asset BUMD (ROA BUMD). ROA merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.

e) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)

Rasio Kewirausahaan Daerah (%) tahun 2020 sampai dengan 2024 di Kabupaten Toba yaitu 0,17%, 0,006%, 0.07%, 0.07% dan 0,07%. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang drastis pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tidak ada penurunan atau peningkatan mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap.

f) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. TPAK Perempuan (%) tahun 2020 sampai dengan 2024 yaitu 81,21, 80,38, 79,04, 75,29 dan 77,05, angka tersebut menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dibandingkan dengan tingkat partisipasi angkatan kerja seluruhnya dari tahun ke tahun cenderung menurun artinya persentase jumlah angkatan kerja perempuan (yang berusia 15 tahun keatas) terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan menurun.

g) Indeks Kapabilitas Inovasi (indeks)

Indeks Kapabilitas Inovasi (indeks) tahun 2020 sampai dengan 2024 di Kabupaten Toba yaitu 35, 37,68, 31,79, 11,6 dan 39,74, angka tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2020 memperoleh hasil kurang inovatif, tahun 2021 memperoleh hasil inovatif, tahun 2022 dan 2023 kurang inovatif dan pada tahun 2024 memperoleh hasil inovatif artinya kemampuan untuk inovasi pemerintah Kabupaten Toba sudah baik/inovatif.

h) Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu. Adapun Indeks inovasi Kabupaten Toba tahun 2021 memiliki nilai 37, 68 dengan kategori inovatif, pada tahun 2022 turun menjadi 31,79 dengan predikat kurang inovatif, tahun 2023 menjadi 11,76 dengan predikat kurang inovatif dan tahun 2024 meningkat menjadi 39,74 dengan predikat inovatif.

i) **Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)**

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) tahun 2022 sampai dengan 2024 di Kabupaten Toba yaitu 4,37 %, 4,81 %, 5,37 %, angka tersebut menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, hal ini disebabkan masyarakat Kabupaten Toba lebih mudah mengakses layanan keuangan, baik secara fisik maupun teknologi, lebih sering menggunakan berbagai layanan keuangan dan menggunakan produk keuangan yang beragam dan kompleks setiap tahunnya. Karena IKAD merupakan sebuah instrumen yang dikembangkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengukur tingkat inklusi keuangan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya IKAD, OJK berharap dapat memetakan kondisi inklusi keuangan di setiap daerah secara lebih komprehensif, sehingga kebijakan yang diambil bisa lebih tepat sasaran dan efektif. Selain itu, IKAD juga diharapkan dapat mendukung kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan program-program pemerintah lainnya dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Tabel 2.37 Indikator Pembangunan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi Kabupaten Toba

Indikator Utama Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	31,28	31,13	31,24	31,28	30,69
Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	10,71	10,71	10,99	10,69	11,55
Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman (%)	2,74	2,61	2,53	2,58	2,55
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (hotel berbintang, ribu orang)	0,267	0	0	1,150	0,379
Proporsi jumlah usaha kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	87,39%	85,56%	83,09%	80,74%	79,81%
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kabupaten (%)	13,77%	13,84%	13,86%	13,88%	13,90%
Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,17%	0,006%	0.07 %	0.07%	0,07%
Return on Asset BUMD (%)	NA	NA	NA	NA	N/A
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,5	0,83	1,39	1,3	1,79
TPAK Perempuan (%)	81,21	80,38	79,04	75,29	77,05
Indeks Kapabilitas Inovasi (indeks)	NA	NA	3,04	3,18	3,43
Indeks Inovasi Daerah	NA	37,68	31,79	11,76	39,74
Indeks Akses Keuangan Daerah (%)	0	0	4,37	4,81	5,37

Sumber Data: BPS Kab. Toba

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

Penerapan ekonomi hijau dan biru di Kabupaten Toba diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis pada potensi lokal. Ekonomi hijau berfokus pada pengelolaan sumber daya alam daratan secara berkelanjutan, pengurangan emisi, pengelolaan limbah yang efektif, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Sementara itu, ekonomi biru menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya perairan Danau Toba dan ekosistem sekitarnya secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kelestariannya.

Kabupaten Toba memiliki posisi strategis sebagai bagian dari Kawasan Danau Toba yang merupakan destinasi pariwisata super prioritas nasional. Oleh karena itu, penerapan ekonomi hijau dan biru menjadi kunci untuk memastikan bahwa pengembangan sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan industri kreatif berlangsung secara ramah lingkungan dan memberikan manfaat jangka panjang.

A. Pengelolaan sampah dan limbah

Pengelolaan sampah dan limbah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Di Kabupaten Toba, tantangan pengelolaan sampah tidak hanya terkait dengan volume yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi, tetapi juga pada keterbatasan infrastruktur pengolahan serta rendahnya tingkat pemilahan dan daur ulang. Sampah yang tidak dikelola dengan baik berpotensi mencemari lingkungan, khususnya perairan Danau Toba yang menjadi sumber kehidupan dan daya tarik pariwisata daerah.

Timbulan sampah di Kabupaten Toba bila dianalisis berdasarkan timbulan sampah yang dihasilkan oleh rata-rata setiap orang (2 liter/orang/hari), untuk sarana umum (0,5 liter/orang/hari) dan kegiatan komersial (0,25 liter/orang/hari). Dari total jumlah penduduk yang ada maka jumlah timbulan sampah domestik adalah sebanyak 427.700,0 liter, untuk sarana umum 106.925,0 liter dan kegiatan komersial sebesar 53.462,5 liter. Maka secara keseluruhan timbulan sampah di kabupaten Toba untuk setiap harinya adalah 1.063.961,3 liter atau 588,1 m³/hari dan atau 214.651,9 m³/tahun.

Tabel 2.38 Analisis Timbulan sampah berdasarkan Jumlah Penduduk di Kabupaten Toba

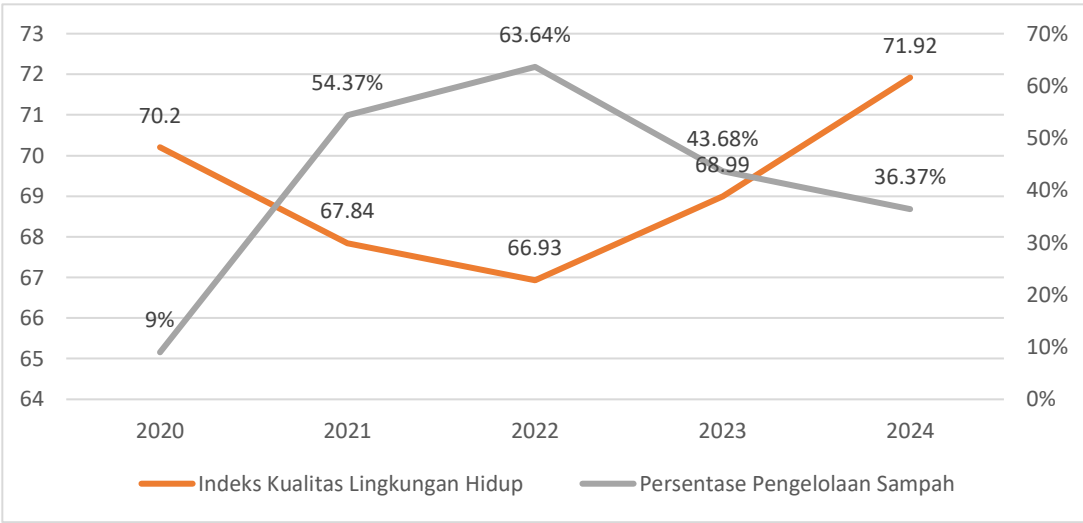
No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Domestik (2 1/orang/hari)	Sarana Umum/ Sosial (0,5 1/orang/ hari)	Komersial (0,25 1/orang/ hari)	Jumlah Timbulan Sampah		Timbulan sampah Tahunan
			1/hari	1/hari	1/hari	1/hari	m3/ hari	m3/ tahun
1	Ajibata	10.026	20.052,0	5.013,0	2.506,5	27.571,5	27,6	10.063,6
2	Balige	46.568	93.136,0	23.284,0	11.642,0	128.062,0	128,1	46.742,6
3	Bonatua Lunasi	6.289	12.578,0	3.144,5	1.572,3	17.294,8	17,3	6.312,6
4	Borbor	8.668	17.336,0	4.334,0	2.167,0	23.837,0	23,8	8.700,5
5	Habinsaran	18.365	36.730,0	9.182,5	4.591,3	50.503,8	50,5	18.433,9
6	Laguboti	23.379	46.758,0	11.689,5	5.844,8	64.292,3	64,3	23.466,7
7	Lumban Julu	10.393	20.786,0	5.196,5	2.598,3	28.580,8	28,6	10.432,0
8	Nassau	9.689	19.378,0	4.844,5	2.422,3	26.644,8	26,6	9.725,3
9	Parmaksian	11.701	23.402,0	5.850,5	2.925,3	32.177,8	32,2	11.744,9
10	Pintu Pohan Meranti	7.442	14.884,0	3.721,0	1.860,5	20.465,5	20,5	7.469,9
11	Porsea	14.875	29.750,0	7.437,5	3.718,8	40.906,3	40,9	14.930,8
12	Siantar Narumonda	7.848	15.696,0	3.924,0	1.962,0	21.582,0	21,6	7.877,4
13	Sigumpar	8.849	17.698,0	4.424,5	2.212,3	24.334,8	24,3	8.882,2
14	Silaen	14.579	29.158,0	7.289,5	3.644,8	40.092,3	40,1	14.633,7
15	Tampahan	5.339	10.678,0	2.669,5	1.334,8	14.682,3	14,7	5.359,0
16	Uluan	9.840	19.680,0	4.920,0	2.460,0	27.060,0	27,1	9.876,9
Total		213.850	427.700,0	106.925,0	53.462,5	588.087,5	588,1	214.651,9

Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah melalui pembangunan dan penguatan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), penerapan bank sampah di desa/kelurahan, serta pengembangan teknologi pengolahan limbah yang ramah lingkungan. Edukasi dan partisipasi aktif masyarakat juga akan menjadi kunci dalam membangun kesadaran dan perilaku bijak dalam pengelolaan sampah.

B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah indikator komposit yang mengukur kondisi kualitas udara, air, dan tutupan lahan. IKLH mencerminkan sejauh mana suatu daerah mampu menjaga keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan untuk menunjang kehidupan. Bagi Kabupaten Toba, keberadaan Danau Toba dan kawasan hutan lindung menjadikan IKLH sebagai indikator strategis yang harus dijaga. Peningkatan IKLH akan dicapai melalui pengendalian pencemaran air dan udara, konservasi sumber daya alam, penegakan hukum lingkungan, dan perbaikan tata kelola ruang. Kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah.

Grafik 2.17. Perkembangan IKLH dan Penanganan Sampah Kabupaten Toba Tahun 2020 – 2024



2.3.4 Transformasi Digital

Dalam mendukung Pencapaian Pembangunan Indonesia Kementerian Komunikasi dan Informatika akan fokus dalam mendukung mewujudkan Transformasi Digital Nasional. Transformasi Digital Nasional merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dan meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepan.

Untuk mencapainya, strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan ekosistem digital nasional (sebagai supply), baik ekosistem infrastruktur TIK maupun ekosistem industri TIK, dan memastikan pemanfaatannya (sebagai sisi demand).

Tabel 2.39 Indeks Adopsi TIK Kabupaten Toba

Indikator Utama Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Adopsi TIK	5,59	5,76	5,85	NA	NA

Sumber: BPS

Dari hasil survei yang di dapat dari BPS maka pada tahun 2020 ke tahun 2021 Indeks Adopsi TIK menurun sekitar 0,17% dan dari tahun 2021 ke 2022 meningkat 0,09%. Dari data tersebut dalam pencapaian pembangunan Indonesia untuk daya saing daerah indeks Adopsi TIK realisasi targetnya pada tahun 2022 hanya sekitar 0,09%.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Transformasi ekonomi difokuskan pada peningkatan produktivitas ekonomi secara masif dan optimalisasi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas unggulan sesuai dengan agenda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan pengembangan iptek dan inovasi. Percepatan pertumbuhan ekonomi didukung oleh optimalisasi sumber pertumbuhan ekonomi baru dengan

melanjutkan pengembangan ekonomi hijau dan bioteknologi, peningkatan investasi dalam teknologi dan bioteknologi, serta optimalisasi sektor-sektor strategis yang memiliki potensi ekspor sebagai bagian dari rantai pasok global. Peningkatan produktivitas dicapai melalui peningkatan secara masif, terutama disektor-sektor unggulan yaitu pertanian dan pariwisata. Dengan mendorong inovasi dalam pertanian melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan pelaku industri, serta mendukung start-up yang berbasis kepada produk. Sektor pariwisata diarahkan untuk meningkatkan laju pertumbuhan dengan produk yang semakin bervariasi dan berkualitas dan penerapan praktik hijau dalam industri pariwisata. Transformasi digital seperti marketing digital semakin diperkuat untuk mendukung branding pada pengembangan ekonomi, integrasi ekonomi domestik dan global serta pariwisata.

Integrasi ekonomi domestik dan global merupakan strategi tingkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan yang kompleks di tengah dinamika global yang terus berubah melalui penyebaran pembangunan yang merata, peningkatan kualitas SDM, pengembangan infrastruktur yang berkualitas, serta penguatan daya saing pusat-pusat pertumbuhan, Kabupaten Toba sebagai KSPN dapat berkembang dengan memanfaatkan potensi pariwisata yang ada, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Tabel 2.40 Indikator Integrasi Ekonomi

Indikator utama pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	0	82,10	91,03	93,19	59,76
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	0,295	0,311	0,323	0,342	0,349

Sumber Data: BPS, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Toba

Dari data diatas bahwa persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok di Kabupaten Toba tahun 2021, 2022 dan 2023 dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu secara berturut-turut sebesar 82,10, 91,03 dan 93,19 dimana indikator yang menunjukkan tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang pokok di Kabupaten Toba dari tahun ke tahun mengartikan bahwa kestabilan harga dan ketersediaan barang pokok mengalami penurunan.

Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. PMTB merupakan penopang produk domestik regional bruto (PDRB). Pada tahun 2023, PMTB tahun 2020 sampai dengan 2023 yaitu sebesar 0,295, 0,311, 0,323 dan 0,342 yang menunjukkan bahwa dari tahun 2020 sampai

dengan 2023 PMTB terus mengalami peningkatan artinya dari tahun ke tahun PMTB terus menopang PDRB walaupun angka PMTB tidak terlalu signifikan tetapi terus mengalami peningkatan.

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan wilayah merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memajukan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan suatu wilayah, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tersebut salah satu upaya yang dilakukan adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang produktif sehingga masyarakat dapat memampukan dirinya dalam memenuhi kebutuhannya dengan memanfaatkan potensi yang ada di wilayahnya masing-masing.

Ekonomi yang Produktif bertujuan untuk mempercepat peningkatan dan pertumbuhan produktivitas ekonomi untuk memperkuat struktur ekonomi dalam jangka panjang dengan pemanfaatan yang optimal dalam sektor-sektor unggulan dan potensial. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ataupun pergerakan ekonomi dalam wilayah perdesaan ataupun perkotaan. Dalam RPJPN 2025-2045 paradigma pembangunan telah mengarahkan kesinambungan pembangunan perdesaan dan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah, dan secara hubungan kewilayahan perdesaan dan perkotaan bukan merupakan wilayah yang bertentangan tetapi menjadi wilayah yang setara dan berkesinambungan.

Untuk mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, di dalam RPJPD Kabupaten Toba 2025-2045 telah dimuat arah pembangunan wilayah prioritas yaitu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan seperti kawasan strategis perkotaan, kawasan strategis cepat tumbuh, kawasan perdesaan prioritas, kawasan strategis pariwisata dan pertanian, pusat pertumbuhan baru, Kawasan Ekonomi Khusus, peningkatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah yang merata dan berkeadilan. Selain menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan wilayah, sasaran pokok juga memuat kebijakan untuk pencapaian sasaran ekonomi yang produktif sebagai upaya untuk mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
2. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga;
3. Percepatan penanganan kawasan kumuh;
4. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni;

5. Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi prinsip layak huni, inklusif dan berbudaya serta maju menyejahterakan;
6. Pengembangan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan potensi lokal;
7. Peningkatan konektivitas dalam rangka peningkatan hubungan perkotaan-perdesaan.
8. Prasarana penunjang berupa infrastruktur untuk akses ke dan dari Kawasan Ekonomi Khusus;
9. Revisi Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 12 tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toba, untuk mengakomodir pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan merubah beberapa pola ruang yang ada.

2.3.7 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Toba Dalam Tataran Kebijakan

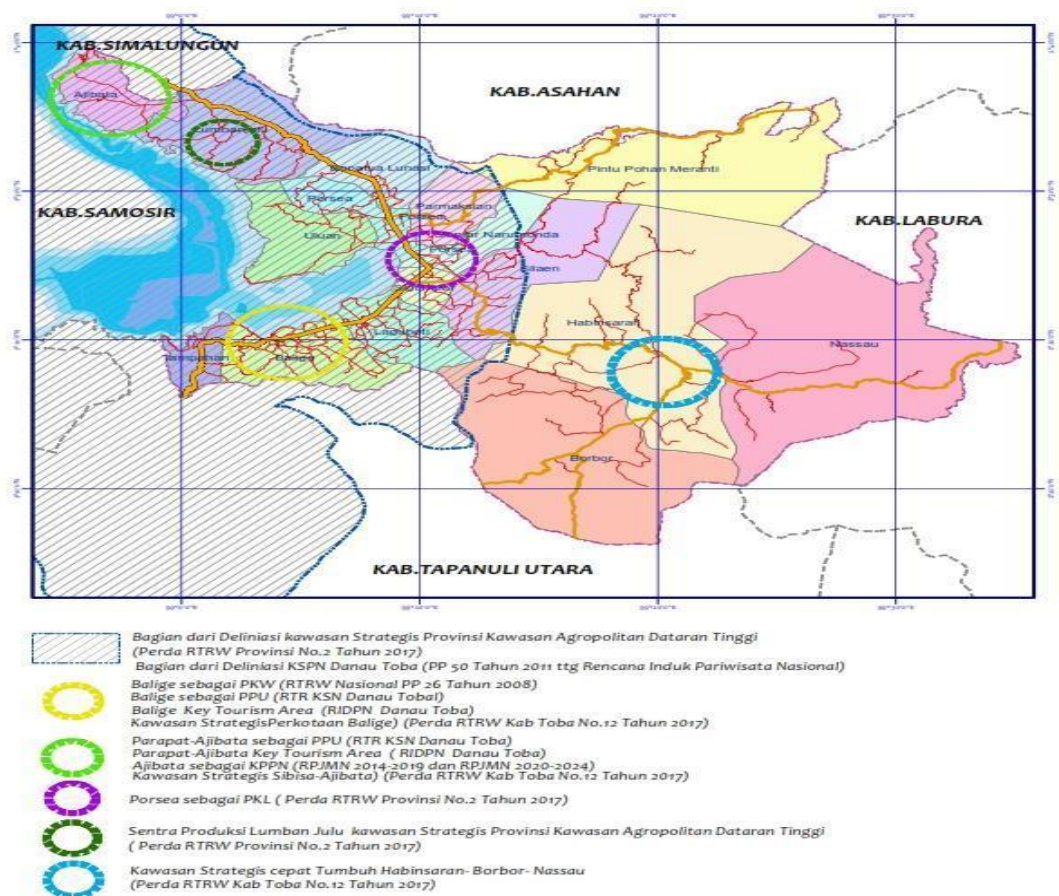
Mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi tidak terlepas aspek pembangunan wilayah dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menetapkan suatu wilayah sebagai pusat kegiatan, pusat pengembangan ataupun pusat-pusat pertumbuhan. Kebijakan penetapan wilayah di Kabupaten Toba Samosir seperti yang termuat pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41 Pusat-Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Toba

No	Dasar Penetapan	Arah kebijakan
1	Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 dan perubahannya tentang Rencana Tata ruang wilayah nasional	a. Penetapan Balige sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Sebagai Bagian dari Sistem Perkotaan Nasional dengan fungsi sebagai kawasan perkotaan yang berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; b. Penetapan Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional; c. Kawasan Suaka Margasatwa Dolok Surungan.
2	Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan Sekitarnya	a. PKW Balige dan PKL Parapat-Ajibata, ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Primer dengan fungsi pelayanan meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul utama transportasi yang menghubungkan ke/dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan/atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW); b. PKL Porsea Ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder dengan fungsi pelayanan yang meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul transportasi yang menghubungkan ke/dari Pusat

No	Dasar Penetapan	Arah kebijakan
		Kegiatan Lokal (PKL) dan/atau melayani beberapa kecamatan; c. Laguboti, Sigumpar, Silaen, Narumonda I, Sigaol, Lumban Julu, Pangombusan, Lumban Lobu, Tampahan, Ditetapkan sebagai Pusat Pelayanan Tersier dengan fungsi pelayanan yang meliputi perlindungan danau dan pariwisata yang didukung kegiatan budi daya perikanan, peternakan, perkebunan, dan hortikultura, serta simpul transportasi yang menghubungkan ke/dari kawasan peruntukan dan/atau satu kecamatan.
3	Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional	Penetapan Danau Toba Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
4	Rencana induk destinasi pariwisata nasional Danau Toba	Ajibata sebagai bagian dari KTA Parapat-Ajibata dengan tema MICE dan Recreation dan Balige sebagai KTA Balige dengan Tema Kota Pusaka.
5	Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037	menetapkan Kabupaten Toba adalah Bagian dari Kawasan Strategis Agropolitan dataran Tinggi dengan sentra produksi berada Di Lumbanjulu
6	Peraturan Daerah Toba Samosir No. 12 Tahun 2017 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2017-2037	a. PKW berada di kawasan perkotaan Balige; b. PKL berada di kawasan perkotaan Porsea; c. PKLp berada di kawasan perkotaan Ajibata. d. PPK yang meliputi: (1) Laguboti; (2) Sigumpar; (3) Parmaksian; (4) Silaen; (5) Habinsaran; dan (6) Ajibata. e. PPL yang meliputi: (1) Tampahan; (2) pusat kecamatan Uluan; (3) pusat kecamatan Siantar Narumonda; (4) pusat kecamatan Lumban Julu; (5) pusat kecamatan Bonatua Lunasi; (6) pusat kecamatan Nassau; (7) pusat kecamatan Borbor; dan (8) pusat kecamatan Pintu Pohan Meranti. f. Penetapan Kawasan Strategis Kabupaten Toba dengan kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari: (1) Kawasan Perkotaan Balige; (2) Kawasan Sibisa-Ajibata; dan (3) Kawasan Cepat Tumbuh Habinsaran- Borbor-Nassau.
7	Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025-2029	Ajibata Sebagai Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional

Gambar 2.10. Kedudukan Kabupaten Toba Dalam Kebijakan Strategis



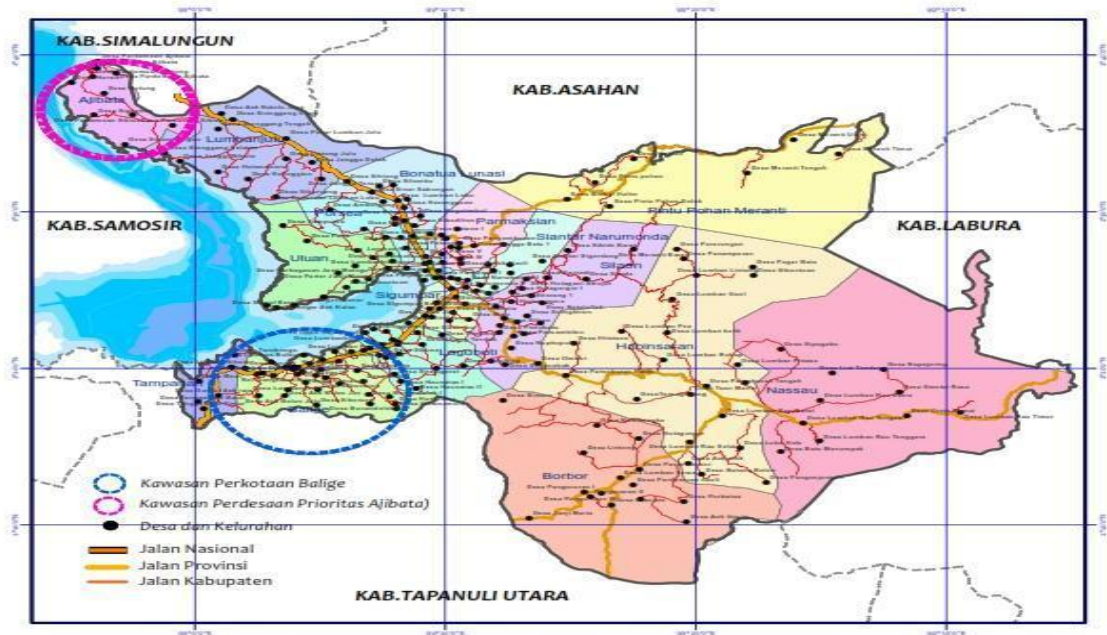
Pada gambar 2.10. dapat dilihat sebaran pusat-pusat pertumbuhan di kabupaten Toba yang penetapannya dari pemerintah pusat, provinsi dan Kabupaten Toba. Penetapan pusat pertumbuhan oleh pemerintah pusat atau provinsi tentunya menguntungkan bagi Kabupaten Toba, karena dalam aspek pengembangan dan pembangunannya dapat didukung pendanaan dari pemerintah pusat. Sebaran pusat-pusat Pertumbuhan inipun menggambarkan aspek pemerataan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Toba sehingga diharapkan pusat pertumbuhan ini dapat memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi pada lokus pusat pertumbuhan dan lokasi sekitar pusat pertumbuhan tersebut.

2.3.8 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa, Perdesaan dan Perkotaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan Kawasan perdesaan adalah wilayah yang

mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, dan Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu wilayah yang ditentukan berdasarkan batas administratif sedangkan kawasan perkotaan ataupun perdesaan adalah kawasan yang sifatnya lebih fungsional yaitu ditentukan menurut fungsi kegiatannya.

Gambar 2.11 Peta Sebaran Desa, Kawasan Perkotaan dan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Toba

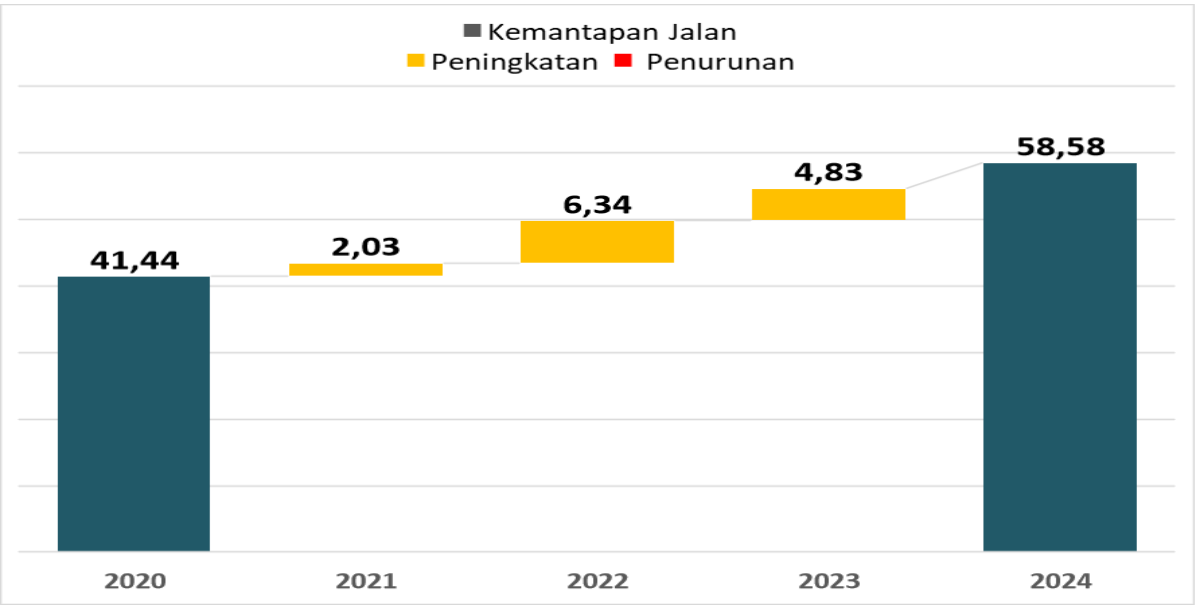


Pada gambar 2.11 di atas dapat dilihat di sebaran desa, kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan Kabupaten Toba yang terdiri dari 231 Desa, 13 Kelurahan, dan terdapat 2 kawasan fungsional yaitu Kawasan Perkotaan Balige dan Kawasan Perdesaan Ajibata .

Dalam upaya Pembangunan wilayah dan mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, infrastruktur menjadi hal utama yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah atau antar kawasan perkotaan dan perdesaan, yaitu dengan dukungan konektivitas yang berkualitas antar wilayah atau pusat-pusat kegiatan, sehingga proses angkutan barang, jasa dan penumpang dapat berjalan dengan baik. Gambar 2.11 terlihat secara keterhubungan desa, kawasan perdesaan, kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Toba sudah terhubung walaupun kondisi ataupun kualitas jalannya belum cukup baik.

Kondisi jalan di Kabupaten Toba ditampilkan dalam Grafik 2.18 Dalam 5 tahun, tingkat kemantapan jalan kabupaten bertambah lebih dari 41.44% Tahun 2020 menjadi 58,58 % pada tahun 2024.

Grafik 2.18. Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Toba Tahun 2020-2024



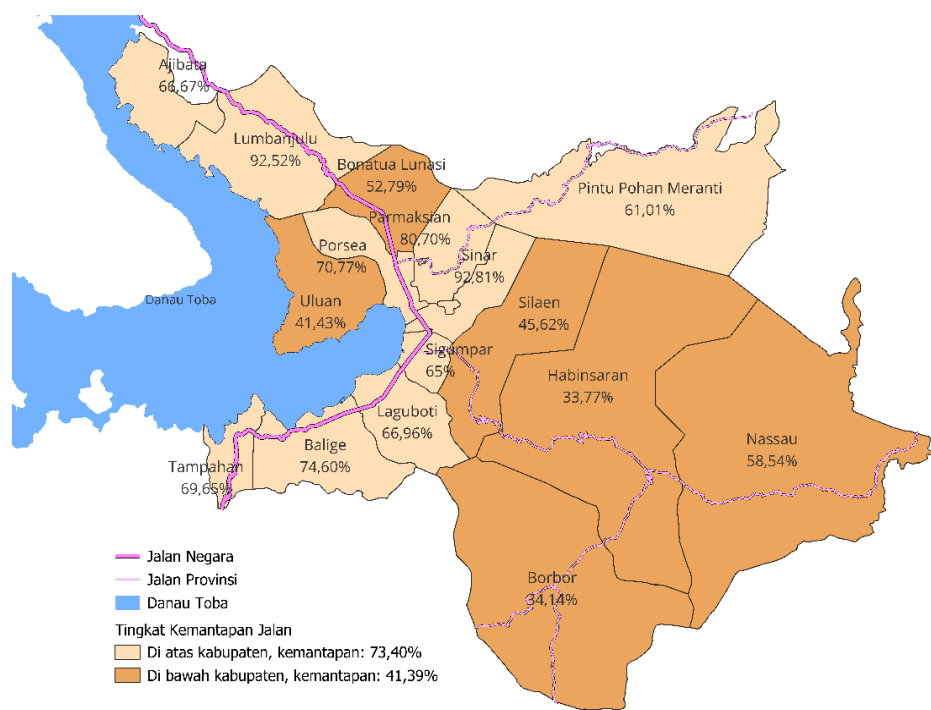
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba

Meskipun kemantapan jalan terus mengalami peningkatan setiap tahun, kondisi jalan di Kabupaten Toba masih belum sebaik kondisi jalan di kabupaten yang berdekatan seperti terlihat dalam Grafik 2.18. Dengan panjang jalan paling kecil di antara kabupaten bertetangga, tingkat kemantapan jalan di Kabupaten Toba tidak menjadi yang terbaik di antara 8 kabupaten tersebut.

Desa, perdesaan, perkotaan ataupun pusat-pusat pertumbuhan merupakan suatu wilayah yang dapat diandalkan dan didorong untuk pertumbuhan ekonomi karena memiliki potensi lokal seperti potensi pertanian, potensi sumber daya alam dan potensi pariwisata yang bisa dimaksimalkan, hal ini dapat memberikan efek domino bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi perkotaan sebagai wilayah dalam menjalankan aktivitas ekonomi, dengan adanya integrasi antara pembangunan ekonomi perdesaan dan perkotaan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Dengan menghubungkan kedua sektor tersebut, dapat tercipta kesinambungan dalam distribusi sumber daya dan peningkatan akses terhadap pasar bagi produk-produk lokal. Hal ini juga dapat memperkuat hubungan antara pedesaan dan perkotaan, sehingga tercipta kesempatan bagi pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh wilayah. Selain itu, integrasi antara pembangunan ekonomi perdesaan dan perkotaan juga dapat mengurangi kesenjangan antara keduanya, sehingga mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. Kondisi kemantapan jalan adalah salah satu

infrastruktur yang sangat berperan dalam hubungan integrasi ekonomi perdesaan dan perkotaan. Kondisi ketimpangan kualitas jalan antar wilayah dalam lingkup wilayah Kabupaten Toba. Dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2024, jalan kabupaten dengan kondisi mantap diproyeksikan berada pada angka sekitar 59,07%. Dari 16 (enam belas) kecamatan di Kabupaten Toba, terdapat 10 (sepuluh) kecamatan yang kemantapan jalannya di atas angka kemantapan kabupaten dengan kemantapan berkisar antara 61,01%-92,81% dan secara keseluruhan mencapai 73,40%. Sementara di 6 (enam) kecamatan lainnya yang memiliki kemantapan jalan di bawah kabupaten tingkat kemantapan berkisar antara 33,77%-58,54% dan secara keseluruhan hanya mencapai 41,39%, atau terdapat selisih hingga 32,01%. Perbedaan yang besar ini memiliki pengaruh terhadap perbedaan perkembangan perekonomian di kedua wilayah. Dari 6 kecamatan yang memiliki kemantapan jalan rendah.

Gambar 2.12. Persebaran Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Toba



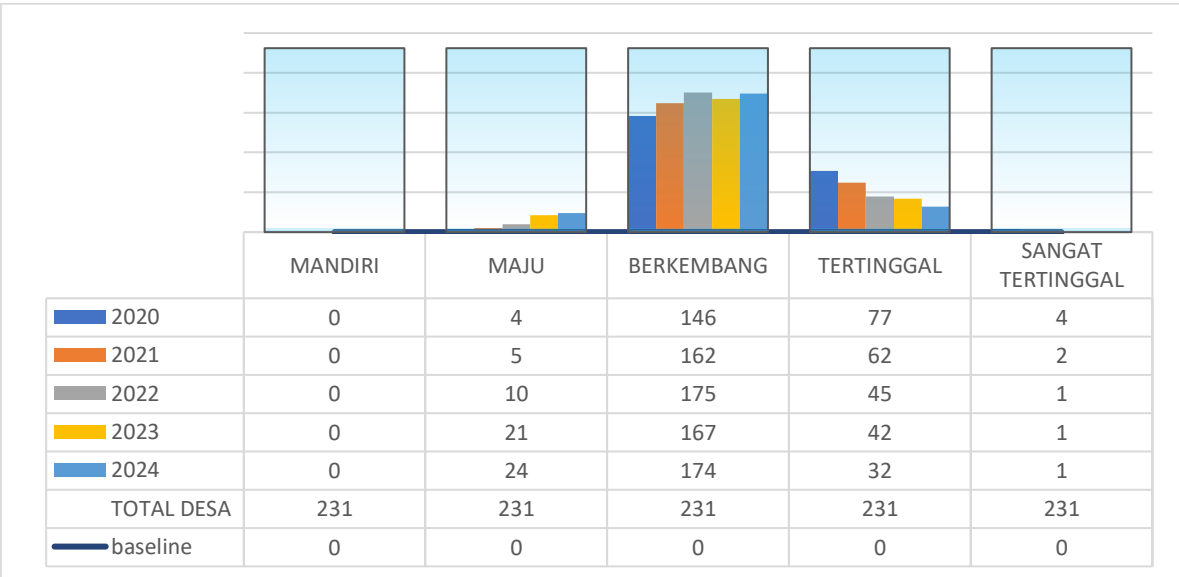
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (diolah)

2.3.9 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Desa

Pada hakikatnya pembangunan desa dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa merupakan satu kesatuan yang terintergrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional (pusat dan daerah), sesuai Misi ke-2

Transformasi Ekonomi yaitu perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, desa harus mampu untuk menggali potensi lokal desa yang mempunyai nilai ekonomi yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat di desa. Indikator yang mengukur tingkat perkembangan desa Diukur dengan Indeks Desa membangun (IDM) untuk melihat tingkat kemandirian desa. kondisi status desa di Kabupaten Toba dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Untuk status Desa Sangat Tertinggal pada Tahun 2020 sebesar 1,73% pada tahun 2024 menjadi 0,43%, Desa Tertinggal pada tahun 2020 sebesar 33,33% pada tahun 2024 berkurang menjadi 13,85% sedangkan Desa maju pada tahun 2020 hanya 1,73% pada tahun 2025 naik menjadi 10,39%, untuk status Desa mandiri sampai pada tahun 2024 belum ada desa yang memiliki status Desa Mandiri. Hal ini menggambarkan tingkat perkembangan kemandirian desa di Kabupaten Toba sudah mulai membaik, tapi menggambarkan kondisi keberhasilan yang cukup memuaskan karena belum ada desa di Kabupaten Toba yang mampu mencapai status Desa Mandiri yaitu desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk mensejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi yang berkelanjutan.

Grafik 2.19. Kondisi Status Desa di Kabupaten Toba



2.3.10 Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Perdesaan

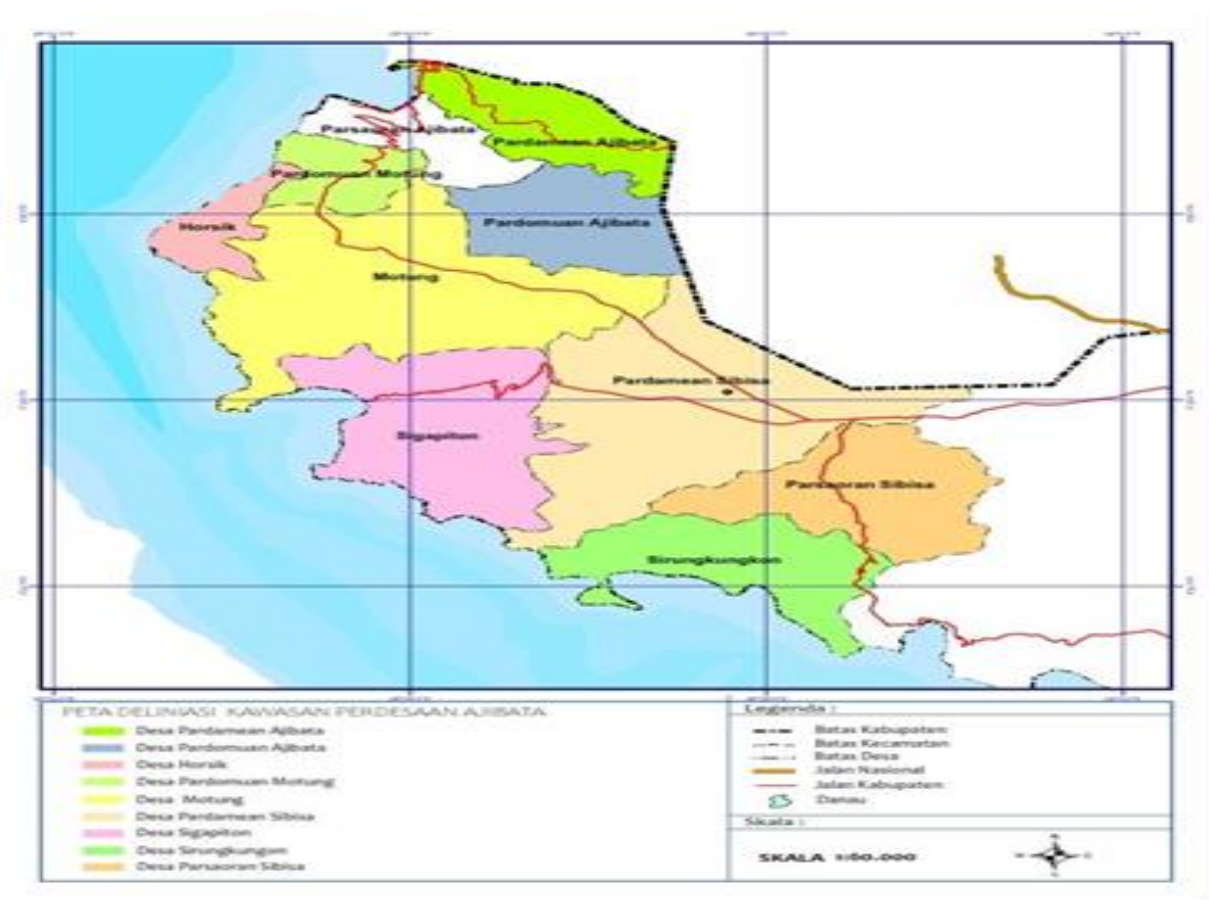
Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi atau pemberdayaan masyarakat desa, desa-desa yang berada pada wilayah yang berdekatan dan memiliki karakteristik potensi desa yang sama dapat dipadukan menjadi suatu kawasan. Untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif. Hal ini juga mendasari untuk membentuk

suatu kawasan perdesaan di Ajibata yang diharapkan dapat berdampak untuk pertumbuhan ekonomi dalam deliniasi kawasan ataupun di sekitar kawasan tersebut.

Kawasan perdesaan di Kabupaten Toba seperti yang termuat dalam gambar 2.7 berada di Kecamatan Ajibata. Awalnya Kawasan perdesaan Ajibata yang ditetapkan pada tahun 2017 berdasarkan SK Bupati Nomor 232 tahun 2017 tentang penetapan lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Ajibata Kabupaten Toba Samosir, terdiri dari 7 (tujuh) desa yaitu Desa Motung, Desa Pardomuan Motung, Desa Pardamean Sibisa, Desa Parsaoran Sibisa, Desa Sirungkungan, Desa Horsik dan Desa Sigapiton dengan potensi unggulan kopi, jagung dan jeruk. Pada tahun 2024 deliniasi kawasan perdesaan Ajibata di perluas dengan menambah 2 (dua) desa yaitu Desa Pardamean Ajibata dan Desa Pardomuan Ajibata yang ditetapkan dengan SK Bupati Nomor 754 Tahun 2024 tentang penetapan lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Ajibata yang terdiri dari 9 desa dan potensi pengembangan di sektor pengembangan kopi, jagung, jeruk dan pengembangan potensi pariwisata.

Pada Gambar 2.13 dan Tabel 2.42 dapat dilihat deliniasi Kawasan Perdesaan Ajibata dan Profil Umum serta status desa di Kawasan Perdesaan Ajibata.

Gambar 2.13. Deliniasi Kawasan Perdesaan Ajibata



Tabel 2.42 Profil Umum Serta Status Desa di Kawasan Perdesaan Ajibata Kabupaten Toba

No	Nama Desa	IDM 2024	Kriteria	Luas Wilayah Km ²	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Motung	0,6654	Berkembang	8	1167
2	Parsaoran Sibisa	0,6638	Berkembang	13,5	1186
3	Sirungkungan	0,5781	Tertinggal	5	561
4	Pardamean Sibisa	0,7052	Berkembang	16	1306
5	Pardomuan Motung	0,6822	Berkembang	6	456
6	Horsik	0,5841	Tertinggal	5,3	331
7	Sigapiton	0,5948	Tertinggal	5	592
8	Pardomuan Ajibata	0,703	Berkembang	6	799
9	Pardamean Ajibata	0,7498	Maju	5	2048
Jumlah				69,80	8446

Sumber: Kemendesa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan BPS Kab. Toba

Dalam penilaian terhadap perkembangan suatu kawasan perdesaan terdapat suatu ukuran yang disebut dengan Indeks Perkembangan Kawasan Perdesaan (I-PKP) yang bertujuan untuk mengetahui tingkat perkembangan kawasan perdesaan secara umum, menetapkan status perkembangan kawasan perdesaan, membandingkan kinerja pembangunan kawasan perdesaan antar wilayah serta melihat perkembangan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

Nilai IPKP Kawasan Perdesaan Ajibata Tahun 2020-2024 seperti termuat dalam Tabel 2.43. terlihat pada tahun 2020 status Kawasan Perdesaan Ajibata sudah tahap Mandiri dengan nilai 62,49 , dan Tahun 2024 Kawasan Perdesaan Ajibata berkembang dan meningkat menjadi Kawasan Perdesaan dengan status mandiri dengan nilai pada tahun 2024 sebesar 62,38, hal ini menunjukkan perkembangan yang positif.

Tabel 2.43. NILAI IPKP KAWASAN PERDESAAN AJIBATA

KAWASAN PERDESAAN AJIBATA	NILAI IPKP	STATUS
2020	62,49	Mandiri
2021	0	Tidak Dinilai
2022	52,51	Mandiri
2023	0	Tidak Dinilai
2024	62,38	Mandiri

Sumber: Kemendesa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

2.3.11 Stabilitas Ekonomi Makro

Kesinambungan fiskal merupakan kemampuan pemerintah dalam mempertahankan keuangan pada posisi yang kredibel (dapat dipercaya) serta dapat memberikan kewajiban berupa layanan publik yang baik kepada masyarakat dengan mengelola kebijakan belanja dan pendapatan, serta

perhitungan pembiayaan yang ditandai dengan kebijaksanaan atau kehati-hatian (prudent) dan dapat dipertanggungjawabkan secara dan akuntabel. Secara teknis, asumsi makro-ekonomi memperhatikan sensitivitas dan analisis risiko serta aturan fiskal yang tepat akan membantu mengarahkan kebijakan pengeluaran dan pendapatan yang berkelanjutan dalam jangka pendek dan jangka menengah.

Menjaga kesinambungan fiskal adalah prinsip yang sangat penting dalam menghindari ketidakstabilan ekonomi dan keuangan. Kebijakan fiskal yang tidak berkesinambungan akan memberikan dampak buruk bagi pembangunan, pertumbuhan ekonomi, distribusi, pengentasan kemiskinan, hingga stabilitas ekonomi. Untuk pencapaian stabilitas ekonomi sebagai Indikator Utama yang menjadi ukuran tercapainya 2020-2024 dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.44. Indikator Stabilitas Ekonomi Kabupaten Toba

No	Indikator Utama Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pajak terhadap pendapatan % Realisasi Pajak daerah /Ralisasi Pendapatan x100%	2,20	3,10	4,04	4,53	3,87
2	Rasio Pajak Daerah terhadap PAD % Realisasi pajak daerah/Realisasi PAD x 100 %	38,49	44,35	56,30	57,37	49,76
3	Rasio Restribusi Daerah terhadap PAD % Realisasi restribusi daerah/Realisasi PAD x 100	21,65	12,28	6,61	4,60	5,12
4	Rasio pajak daerah terhadap PDRB % *) Penerimaan pajak daerah/PDRB ADHB x 100	0,28	0,40	0,46	0,54	0,62
5	Tingkat Inflasi	1,14	2,97	3,15	2,80	2,70
Ket : *) data sementara						

Sumber: BPS, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab.Toba

Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah Indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Pada Juli 2024, seluruh kota Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Sumatera Utara yang berjumlah 8 (delapan) kabupaten/kota mengalami inflasi y-on-y. Inflasi y-on-y tertinggi terjadi di Kota Padangsidimpuan sebesar 2,80% dengan IHK sebesar 107,08 dan terendah berada di Kabupaten Labuhanbatu sebesar 1,22% dengan IHK sebesar 108,36. Sedangkan tingkat inflasi Kabupaten Toba tahun 2024 sebesar 2,70%. Namun hingga saat ini belum ada pengukuran

tingkat inflasi khusus untuk Kabupaten Toba sehingga tingkat inflasinya masih mengikuti Kota Sibolga.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan merupakan upaya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui inovasi, peningkatan transparansi, dan akuntabilitas, serta menciptakan tata kelola ekonomi ke arah yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi. Tata kelola menggambarkan keberhasilan pelayanan umum terhadap pemerintahan, pembanguan dan kemasyarakatan yang berkesinambungan, sehingga tata kelola melibatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.

Indikator tata kelola pelayanan umum di Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45. Indikator Tata Kelola Pelayanan Umum Kabupaten Toba

Indikator Utama Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,59	1,69	1,86	2,16	2,95
Indeks Pemerintahan Digital*	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Indeks Pelayanan Publik	N/A	2,61 (C)	3,18 (B-)	3,08 (B-)	3,81 (B)
Indeks Penilaian Integritas	N/A	61,89	70,81	70,04	72,09
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Hasil Evaluasi SAKIP		50.10 CC	53,85 CC	55,42 CC	60,04 B
IPASN**	N/A	46,58	50,38	71,00	78,10
Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	40,11 (C)	42,55 (C)	48,63 (C)	47,78 (C)	64,97 (B)
Jumlah Kerja Sama Daerah	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: menpan.go.id, Inspektorat Kab. Toba

- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Formula untuk menghitung Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari hasil perkalian tersebut. Indeks SPBE digunakan untuk menggambarkan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Kategori indeks SPBE adalah: Kurang = 1, Cukup = 2, Baik = 3, Sangat Baik = 4, Memuaskan =5.
Indeks SPBE pada tahun 2020 sebesar 1,59 skor ini masuk dalam kategori Cukup. Pada tahun 2021 sebesar 1,69 dari target 2,5. Nilai

indeks tersebut masuk dalam kategori Kurang. Pada tahun 2022 Indeks SPBE sebesar 1,86. Kemudian pada tahun 2023 nilai Indeks SPBE mengalami kenaikan menjadi 2,16. Dan pada tahun 2024 Indeks SPBE naik menjadi 2,95, angka ini sudah masuk dalam kategori Baik.

- Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah alat ukur untuk menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah. IPP digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Nilai Indeks Pelayanan Kabupaten Toba pada tahun 2021 sebesar 2,61 (C), dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 3,18 (B-). Dan pada tahun 2023 skor nya sebesar 3,08 (B-). Pada tahun 2024 skor Indeks Pelayanan Publik mengalami kenaikan menjadi 3,81 (B) dan sudah masuk dalam kategori Baik.

- Indeks Penilaian Integritas

Indeks Penilaian Integritas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat integritas suatu instansi. Indeks ini merupakan hasil dari Survei Penilaian Integritas (SPI) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rentan dengan rentang nilai 0-72,9, Waspada dengan nilai 73-77,9 dan Terjaga dengan nilai 78-100. Skor SPI pada tahun 2021 sebesar 61,89 yang masih masuk kategori rentan. Kemudian pada tahun 2022 naik menjadi 70,81 namun masih masuk dalam kategori Rentan. Lalu pada tahun 2023 skor SPI mengalami penurunan sedikit menjadi 70,04. Dan pada tahun 2024 skor SPI naik menjadi 72,09. Kenaikan skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dipengaruhi oleh upaya instansi pemerintah dalam meningkatkan integritas pelayanan publik dan bebas korupsi.

- Opini BPK

Opini BPK adalah pernyataan profesional Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kewajaran informasi dalam laporan keuangan yang diperiksa, baik itu laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Opini ini diberikan setelah BPK melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan dan berdasarkan pada kriteria seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. **Kabupaten Toba 9 Tahun berturut-turut menerima opini WTP** (Wajar Tanpa pengecualian) pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak

material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

- Hasil Evaluasi SAKIP

Tujuan evaluasi adalah mengetahui tingkat implementasi sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi pada hasil. Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas rencana, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Adapun nilai Evaluasi SAKIP Kabupaten Toba dari Tahun 2021 adalah sebesar 50,10 / C meningkat pada tahun 2022 menjadi 53,85/ CC, Tahun 2023 menjadi 55, 42 / CC, pada tahun 2024 meningkat menjadi 60,00/C.

- Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas jabatan. IP ASN bertujuan untuk memberikan standar bagi instansi dalam melakukan pengukuran profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan.

IP ASN terdiri dari empat dimensi utama:

- a. Dimensi Kualifikasi: Menilai kesesuaian kualifikasi pendidikan ASN.
- b. Dimensi Kompetensi: Mengukur pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- c. Dimensi Kinerja: Menilai kinerja ASN berdasarkan indikator seperti produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.
- d. Dimensi Disiplin: Mengukur tingkat kedisiplinan ASN, termasuk data mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima.

Adapun nilai Indeks Profesionalitas ASN Kabupaten Toba tahun 2021 adalah 46,58 (sangat rendah), kemudian pada tahun 2022 menjadi 50,38 (sangat rendah), pada tahun 2023 menjadi 70,00 (sedang) dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 78,10 (sedang).

- Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah sistem penilaian untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi pemerintah. IRB bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan

yang efektif, efisien, bersih dari korupsi, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

IRB umumnya mencakup beberapa aspek penilaian:

- a. Manajemen Perubahan: Terkait dengan perubahan budaya kerja dan peningkatan kualitas SDM aparatur.
- b. Penguatan Kelembagaan: Mencakup penataan organisasi dan perbaikan sistem birokrasi.
- c. Tata Laksana: Berkaitan dengan efisiensi proses bisnis dan penyederhanaan prosedur pelayanan.
- d. Pengawasan: Mencakup sistem pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
- e. Akuntabilitas Kinerja: Berkaitan dengan pengukuran dan pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Adapun nilai IRB Kabupaten Toba tahun 2020 adalah 40,11 /C, tahun 2021 menjadi 42,55/ C, tahun 2022 menjadi 46,63 / C, tahun 2023 menjadi 47,78 / C dan tahun 2024 meningkat menjadi 64,97 / B.

- Jumlah Kerja Sama Daerah (Sister Regency)
Jumlah kerja sama antar daerah / *sister regency* adalah hubungan kerja sama antara dua daerah setingkat kabupaten/kota, baik di dalam maupun luar negeri, yang memiliki tujuan untuk saling mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah. Kabupaten Toba belum pernah menjalin kerja sama dengan kabupaten/kota lain baik dalam maupun luar negeri.

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Yang Tangguh Dan Demokrasi Substansial

Ketertiban dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Toba dapat lihat pada tabel berikut;

Tabel 2.46. Indikator Kondisi Pembangunan Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Toba

Indikator Utama Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	19,05	19,05	100	100	100
Persentase Capaian Aksi HAM	33,30	43,23	33,20	68,80	65,50
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	NA	NA	100	100	100
Indeks Reformasi Hukum	NA	NA	NA	43,68	53,10

Sumber: LPPD kabupaten Toba Tahun 2020-2024

Berikut adalah analisis data yang diberikan berdasarkan indikator utama pembangunan dari tahun 2020 hingga 2024:

1. Persentase Penegakan Perda:
Tidak ada data pada tahun 2020 dan 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan pencapaian 88%. Stabil pada 100% di

tahun 2023 dan 2024, menunjukkan penegakan peraturan daerah yang maksimal selama dua tahun berturut-turut.

2. Persentase Capaian Aksi HAM:

Mengalami fluktuasi dari 33,30% pada tahun 2020 menjadi 43,23% di 2021, tetapi turun kembali ke 33,20% di tahun 2022.

Kenaikan signifikan pada 2023 hingga 68,80%, meskipun sedikit menurun menjadi 65,50% pada 2024. Hal ini menunjukkan peningkatan namun belum sepenuhnya stabil.

3. Indeks Ketentraman dan Ketertiban:

Tidak ada data untuk 2020 dan 2021. Stabil pada tingkat maksimal 100 dari 2022 hingga 2024, menunjukkan bahwa kondisi ketertiban dan ketentraman telah terjaga dengan sangat baik selama tiga tahun terakhir.

4. Indeks Reformasi Hukum.

Indeks Reformasi Hukum adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Adapun Indeks Reformasi Hukum kabupaten Toba Tahun 2023 dengan nilai 43,68 predikat buruk dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 53,10 dengan predikat cukup.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, ada pencapaian positif pada beberapa indikator, terutama dalam hal penegakan Perda dan ketertiban umum yang mencapai 100% dalam beberapa tahun terakhir. Namun, untuk aksi HAM dan indeks demokrasi, terdapat beberapa fluktuasi yang perlu dievaluasi lebih lanjut untuk menjaga tren peningkatan yang konsisten.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

Pada dasarnya penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki, yaitu pelayanan (service), pemberdayaan (empowerment), dan pembangunan (development). Pembentukan daya saing tentu tidak hanya mencakup upaya untuk memperkuat sinergi berbagai sektor pembangunan daerah, tetapi juga mencakup penyempurnaan secara struktural dalam sistem pembangunan daerah agar pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat secara lebih efektif dan efisien dan Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan. Tabel indeks daya saing Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.47. Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Toba

Indikator Utama Pembangunan	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Daya Saing Daerah	N/A	N/A	3,04	3,18	3,43

Sumber: brin.go.id

Nilai IDSD Kabupaten Toba pada tahun 2022 adalah 3,04 skor ini masuk dalam kategori Tinggi. Kemudian pada tahun 2023, nilai IDSD Kabupaten Toba mengalami peningkatan menjadi 3,18 skor ini juga masuk dalam kategori Tinggi, dan pada tahun 2024 skor IDSD mencapai 3,43, ada peningkatan sebesar 0.25 dari tahun 2023 ke tahun 2024. NILAI IDSD. 3,76 - 5 = SANGAT TINGGI. 2,51 - 3,75 = TINGGI. 1,26 - 2,5 = SEDANG. 0 - 1,25 = RENDAH. Skor IDSD dipengaruhi oleh 4 komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem manusia yang terbagi menjadi 12 pilar. Peningkatan Skor IDSD pada tahun 2023 banyak dipengaruhi oleh Pilar 1 yaitu Institusi, Pilar 3 yaitu Adopsi TIK, dan Pilar 6 yaitu Keterampilan.

2.4.4 Evaluasi Indikator Kinerja Kunci

Evaluasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dilakukan sebagai upaya untuk menilai sejauh mana capaian pembangunan daerah pada periode sebelumnya dapat dijadikan landasan dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Toba tahun 2025–2029. IKK diposisikan sebagai ukuran utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dalam aspek pelayanan publik, pembangunan ekonomi, maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD periode 2020–2024, terdapat sejumlah indikator kinerja yang menunjukkan tren positif, seperti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurunnya tingkat kemiskinan, serta perbaikan dalam rata-rata lama sekolah. Namun demikian, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, di antaranya adalah ketimpangan pembangunan antarwilayah, keterbatasan akses infrastruktur dasar, tingginya angka pengangguran terbuka, serta rendahnya daya saing ekonomi lokal.

Selain itu, indikator makro ekonomi daerah seperti laju pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika global, termasuk dampak pandemi serta perubahan iklim yang berimplikasi terhadap sektor pertanian dan pariwisata sebagai basis utama ekonomi daerah. Hal ini menjadi pelajaran penting dalam merumuskan target-target pembangunan ke depan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Evaluasi ini juga menegaskan pentingnya sinkronisasi IKK dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta arah kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian,

penetapan indikator kinerja kunci pada RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025–2029 diharapkan mampu mengukur efektivitas pelaksanaan program pembangunan secara terintegrasi, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Tabel 2.48. evaluasi Indikator Kinerja Kunci tahun 2022 – 2024

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
I	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	PENDIDIKAN					
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	67%	33%	99,56%	46,81%	98,77
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	98%	90%	100%	90,66%	100,8
	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	95%	80%	125,76%	95,89%	113,18
B	KESEHATAN					
	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,10%	0,10%	0,11%	1,18%	1,36%
	Persentase RS tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	100%	23,80%	100%	100%
	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	81,22%	83,90%	88,19%	81,95%	93,61
	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	80,25%	80,36%	85,72%	83,12%	94,02
	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	84,32%	83,97%	89,48%	86,08%	94,88
	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	99,36%	94,14%	92,44%	80,59%	90,99
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	99,93%	95,02%	26,45%	78,67%	80,9
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	23,96%	13,49%	21,41%	41,34%	54,84
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	66,18%	90,17%	110,32%	100%	145,26
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	55,43%	20,57%	81,89%	48,26%	52
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49,00%	69,91%	83,45%	84,97%	93,66
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	76,36%	76,83%	100%	100%
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	49,21%	42,58%	102,80%	100%	100%
	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	73,29%	115,97%	100%	100%
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Tingkat kemantapan jalan	41,44%	43,47%	49.81%	54.64%	58.58%
	Layanan irigasi	18,59%	1,48%	95.85%	96.66%	98,85%
	Ketersediaan tenaga konstruksi terlatih	82,14%	42%	82.67%	82.67%	114%
	Proyek tanpa kecelakaan	100%	N/A	100%	100%	100%
	Kepatuhan IMB	100%	100%	100%	100%	72,06%
	Akses air minum	73,68%	74,36%	75.59%	77.79%	76,63%
	Akses pengolahan limbah domestic	80,97%	87,56%	84.76%	85.86%	80,90%

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
D	Perumahan rakyat dan kawasan permukiman					
	Penanganan kawasan kumuh	N/A	8,16%	6.18%	6.92%	9,06%
	Kelayakan rumah tinggal	16,99%	17,56%	82.42%	82.95%	84,66%
	Layanan PSU perumahan	N/A	N/A	64.85%	64.85%	61,33%
E	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat					
	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	85%	75,44%	100%	100%	100%
	Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	19,05%	19,05%	100%	100%	100%
	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	29.17%	47,37%
	Tingkat Waktu Tanggap daerah wilayah kebakaran (menit)	20	20	20	21.77	19,14
F	SOSIAL					
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	100%	100%	100%
II	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
A	Tenaga kerja					
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	50%	100%	50%	80%	75%
	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	100%	0%	3,07%	1,98%	5,44
	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	4,17%	72,22%	75,56%	2,85%	8,65%
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten	0%	100%	100%	33,16%	100%
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	0,06%	0,05%	0,07%	0,07%	0.065%
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	0,03%	0,02%	100%	100%	100%
	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,02%	0,01%	14,87%	8,22%	30,77%
C	Pangan					
	Persentase ketersediaan pangan	100%	100%	100%	100%	100%
D	Pertanahan					
	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	100%	100%	100%	0
	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	0	25.49	0	0
	Tersedianya tanah untuk masyarakat	100%	100%	100%	N/A	0
E	Lingkungan hidup					
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	70,2	67,84	66,93	68,99	71,92
	Persentase Pengelolaan Sampah	9%	54,37%	63,64%	43,68%	
	Ketaatan terhadap Izin Lingkungan	NA	100%	81,82%	100%	
F	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Perekaman KTP Elektronik	98%	98%	99.93%	98.87%	96,14%
	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA	45%	30	40.57%	34.68%	37.00%
	Kepemilikan akta kelahiran	45%	60%	97.00%	97.00%	50,75%

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	0	0	15.91%	29.54%	0.00%
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Persentase pengentasan desa tertinggal	NA	7,36%	7,79%	1,30%	4,33%
	Persentase peningkatan status desa mandiri	0	0	0	0	0
H	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Total Fertility Rate	3,61	2,52	2,51	3,36	2,54
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern	77,30%	79,40%	77,83%	61,64%	36,40%
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi	11,80%	10,82%	11,99%	13,45%	27,00%
I	Perhubungan					
	Rasio konektivitas	55,1	55,1	0.66	0.68	0.71
	Kinerja lalulintas	N/A	N/A	0.12	0.18	0.12
J	Komunikasi dan Informatika					
	Persentase perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	0%	0%	2.27%	2.27%	100%
	Persentase layanan yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten	89,60%	89,08%	61.81%	66.00%	100%
K	Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian					
	Koperasi yang berkualitas	0%	0%	10%	21,05%	0.192%
	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	12%	21%	47,86%	15,43%	13,80%
L	Penanaman Modal					
	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0%	92,22%	152,40%	4251,47%	
M	Kepemudaan dan Olah Raga					
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,07%	0,05%	0,07%	20,39%	53,02%
N	Statistik					
	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	54,55%	100%	100%	95.45%	100%
	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	54,55%	100%	100%	95.45%	100%
O	Persandian					
	Tingkat keamanan informasi pemerintah	20%	40%	0.40%	0.31%	40%
P	Kebudayaan					
	Terlestarikannya cagar budaya	0%	2,22%	2,22%	0%	2%
Q	Perpustakaan dan Kearsipan					
	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	2,81%	3,43%	46,64%	48,58%	56,42%
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	7,66%	11,45%	22,53%	45,93%	56,03
	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban	100%	100%	37,15%	43,62%	53,94
R	Perikanan					
	Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten	2.091	1.960	1.872	2.169	2.323
S	Pariwisata					
	Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	1,90%	-100%	0%	2926%	0,38%

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	25,78%	-7,42%	412%	101,17%	-58,99
	Tingkat hunian akomodasi	20%	23,29%	25,55%	21,86%	22,99%
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	2,74%	2,61%	3,67%	7,66%	2,55%
	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	16,36%	2,08%	11,01%	11,20%	13,12%
T	Pertanian					
	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	592	604	662,26	676,94	629,8
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	'-0,129	'0,303	98,92%	74,86%	'4,347
U	Perdagangan					
	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	0%	8,70%	44,28%	14,89%	49,67%
	Persentase kinerja realisasi pupuk	NA	34,39%	98,36%	84,01%	34,38%
	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	0,04%	2,45%	13,85%	38,49%	51,62%
V	Perindustrian					
	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	0%	0%	12,25%	8,89%	15,85%
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0%	0%	0%	0%	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	70,44%	83,19%	
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten	0%	0%	0%	0%	
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	0%	0%	75%	100%	

2.5. Gambaran Keuangan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur mengenai lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang meliputi: 1) pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi; 2) pengelolaan Transfer ke Daerah/TKD; 3) pengelolaan belanja daerah; 4) pemberian kewenangan untuk melakukan pembiayaan daerah; dan 5) pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan UU Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Selain itu, penyederhanaan retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal dan kesenjangan pelayanan antar-daerah, pengelolaan TKD mengedepankan kinerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan di daerah, sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti atas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan Daerah meliputi:

- a. Hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan kepada pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan;
- f. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara: tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah akan dikatakan baik jika berhasil dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah, hal ini sangat penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

2.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Keuangan Daerah merupakan komponen daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyatu dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD hakikatnya merupakan salah satu instrument kebijakan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Analisis kinerja keuangan daerah diperlukan dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah melalui pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya, sehingga dibutuhkan pemahaman yang baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah sekurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas: pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah, sehingga dalam menganalisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu harus memahami jenis obyek pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah sesuai dengan kewenangan.

Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah. Oleh karenanya untuk mengetahui kinerja keuangan daerah diperlukan pemahaman yang baik tentang obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan dan struktur masing-masing APBD. Dalam rangka memahami kinerja keuangan Kabupaten Toba, maka diperlukan analisis kinerja keuangan masa lalu, yakni kinerja keuangan tahun 2020-2024. Secara berturut-turut pada sub bagian ini akan dijelaskan kinerja keuangan yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

2.5.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2029, evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada periode sebelumnya menjadi landasan penting untuk mengidentifikasi capaian, tantangan, dan pembelajaran yang dapat diadopsi ke depan. Analisis terhadap kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Toba Tahun 2020–2024 bertujuan untuk

mengukur efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian anggaran dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Evaluasi ini juga menjadi refleksi terhadap kapasitas fiskal daerah, konsistensi kebijakan anggaran, dan keselarasan program dengan prioritas pembangunan jangka menengah.

A. Kinerja Pendapatan Daerah

Selama periode 2020–2024, pendapatan daerah Kabupaten Toba menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi nasional, kebijakan fiskal pusat, serta kemampuan daerah dalam mengelola potensi lokal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih menjadi porsi kecil dalam struktur pendapatan, yang didominasi oleh transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun demikian, terdapat tren pertumbuhan positif PAD dari sektor pajak daerah dan retribusi, meskipun belum signifikan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer.

Selama periode 2020 hingga 2024, total pendapatan Kabupaten Toba menunjukkan tren meningkat secara konsisten, dari Rp. 1.006.299.214.620,28 pada tahun 2020 menjadi Rp. 1.286.506.020.126,93 pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan sumber penerimaan, meskipun masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Gambaran lebih lengkap realisasi pendapatan TA 2024 berdasarkan sumber pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi PAD terhadap APBD mengalami peningkatan bertahap dari 5,70% pada 2020 menjadi 7,86% pada 2023, meskipun sedikit menurun kembali menjadi 7,18% pada 2024. Kenaikan ini mencerminkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah. Namun demikian, secara keseluruhan, kontribusi PAD masih tergolong rendah dan perlu menjadi fokus penguatan dalam periode RPJMD 2025–2029.

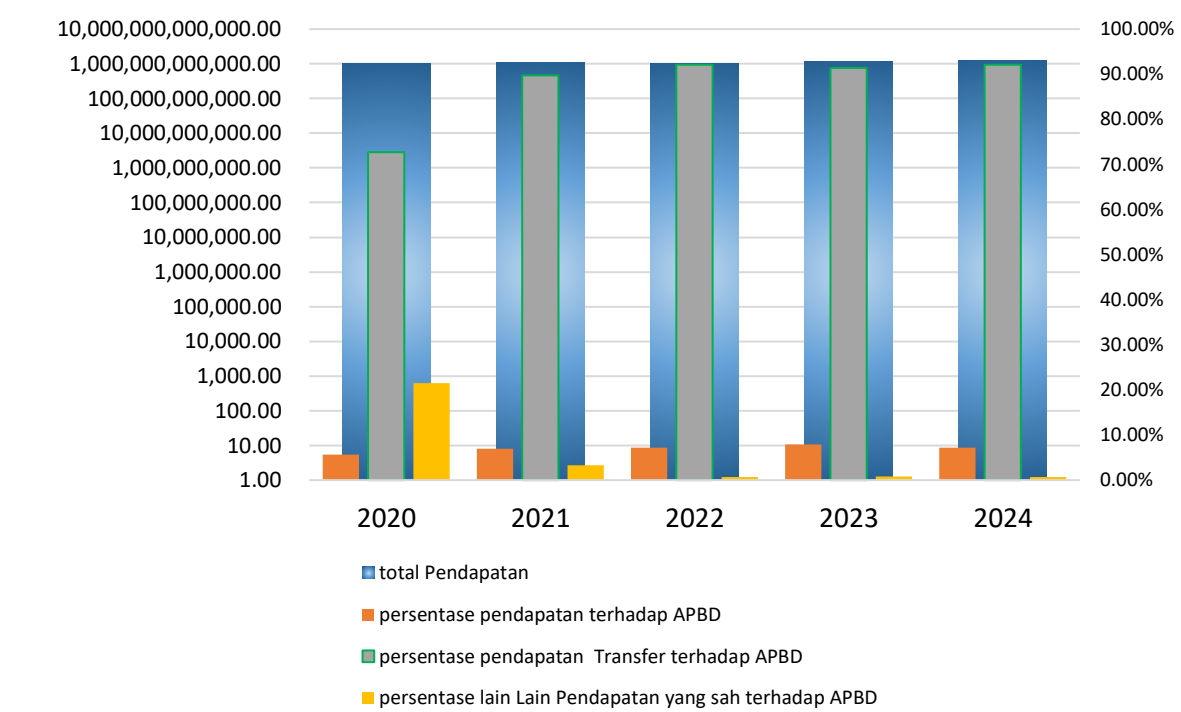
2. Dana Transfer

Persentase dana transfer terhadap APBD sangat dominan, meningkat dari 72,76% pada 2020 hingga mencapai 92,13% pada 2022, dan stabil di atas 91% hingga 2024. Hal ini menandakan tingginya ketergantungan Kabupaten Toba terhadap pemerintah pusat, yang menjadi tantangan dalam membangun kemandirian fiskal.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen ini mengalami penurunan drastis dari 21,53% pada 2020 menjadi kurang dari 1% sejak tahun 2022 hingga 2024. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan sah lainnya yang potensial untuk kembali dioptimalkan.

Grafik 2.20. Peranan Sumber-Sumber Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020-2024 (%)



Tabel 2.49. Peranan Sumber-sumber Pendapatan terhadap Total Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020-2024 (%)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pendapatan terhadap APBD	5,70%	6,98%	7,18%	7,86%	7,18%
Persentase pendapatan Transfer terhadap APBD	72,76%	89,71%	92,13%	91,39%	92,09%
Persentase lain Lain Pendapatan yang sah terhadap APBD	21,53%	3,30%	0,69%	0,75%	0,73%

Tabel 2.50. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024

No.	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.1	Pendapatan Asli Daerah	57.403.162.933,28	75.305.397.700,12	73.220.848.673,93	90.517.424.553,86	92.355.642.286,93	7,69%
4.1.1	Pajak Daerah	22.095.458.949,54	33.395.690.381,56	41.222.547.398,13	51.929.550.124,46	47.413.320.231,98	16,36%
4.1.2	Retribusi Daerah	12.427.241.098,22	9.248.310.843,61	4.842.425.770,00	4.159.822.305,00	4.947.998.530,10	-15,79%
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.050.089.714,00	8.403.651.368,00	8.508.877.255,00	8.799.329.827,00	10.321.296.025,39	8,05%
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	16.830.373.171,52	24.257.745.106,95	18.646.998.250,80	25.628.722.297,40	29.673.027.499,46	10,17%
4.2	Pendapatan Transfer	732.232.369.687,00	967.354.006.117,00	939.743.251.146,00	1.053.018.594.746,00	1.184.777.280.358,00	9,21%
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	696.492.738.653,00	921.861.287.336,00	890.329.969.935,00	993.427.965.650,00	1.099.672.961.242,00	8,92%
4.2.2	Transfer Antar Daerah	35.739.631.034,00	45.492.718.781,00	49.413.281.211,00	59.590.629.096,00	85.104.319.116,00	14,73%
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	216.663.682.000,00	35.614.321.000,00	7.058.455.033,40	8.693.327.177,00	9.373.097.482,00	-26,22%
4.3.1	Pendapatan Hibah	39.588.830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2	Dana Darurat	177.074.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	35.614.321.000,00	7.058.455.033,40	8.693.327.177,00	9.373.097.482,00	-37,30%
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.006.299.214.620,28	1.078.273.724.817,12	1.020.022.554.853,33	1.152.229.346.476,86	1.286.506.020.126,93	3,99%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata laju pertumbuhan Pendapatan Daerah sampai dengan Tahun 2024 mencapai 2,46 %

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD tumbuh rata-rata **7,69 %** per tahun, menunjukkan adanya peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan sendiri. Pertumbuhan tertinggi berasal dari:

Pajak Daerah tumbuh signifikan sebesar **16,36%**, mencerminkan keberhasilan intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak.

Lain-lain PAD yang sah juga tumbuh positif sebesar **10,17 %**, menandakan mulai dimanfaatkannya potensi sumber-sumber penerimaan lokal lainnya. Namun, hal yang memprihatinkan adalah Retribusi Daerah yang justru mengalami penurunan rata-rata **-15,79%** per tahun. Hal ini mencerminkan lemahnya pengelolaan layanan publik yang bersifat berbayar atau belum optimalnya tarif dan cakupan pelayanan yang dikenakan retribusi.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer secara keseluruhan tumbuh stabil sebesar **9,21%** per tahun, dengan kontribusi utama berasal dari:

- Transfer Pemerintah Pusat tumbuh 8,92%, menunjukkan masih kuatnya ketergantungan fiskal terhadap pusat.
- Transfer Antar Daerah mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam kategori ini, yaitu 14,73%, mencerminkan adanya peningkatan sinergi dan alokasi dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Ketergantungan yang besar terhadap transfer pusat menegaskan perlunya strategi kemandirian fiskal dalam periode RPJMD 2025–2029, agar daerah tidak terlalu rentan terhadap perubahan kebijakan pusat.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Komponen ini justru mengalami penurunan tajam, dengan rata-rata pertumbuhan **-26,22%**. Ini terutama dipengaruhi oleh berkurangnya pendapatan dari kategori hibah dan hilangnya komponen "lain-lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan" yang pada 2020 sempat menyumbang angka signifikan.

B. Analisa Kinerja Pendapatan Daerah

Peningkatan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah merupakan hal yang baik karena akan meningkatkan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah. Khusus indikator Derajat Desentralisasi Fiskal dihitung dari rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Total Pendapatan Daerah.

Berikut ini disajikan data perkembangan Derajat Kemandirian Keuangan Kabupaten Toba Tahun 2020-2024.

Tabel 2.51. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024

TAHUN	PAD	TOTAL PENDAPATAN	DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL (%)
2020	68.046.526.605	1.075.193.000.279	6,33%
2021	57.403.162.933	1.006.299.214.620	5,70%
2022	75.305.397.700	1.078.273.724.817	6,98%
2023	73.220.848.674	1.020.022.554.853	7,18%
2024	90.517.424.554	1.152.229.346.477	7,86%
	92.355.642.287	1.286.506.020.127	7,18%
		rata rata	6,87%

Derajat desentralisasi fiskal merupakan indikator yang menunjukkan tingkat kemandirian fiskal suatu daerah, yang diukur dari perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, maka semakin besar kontribusi PAD dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik, serta semakin rendah ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Toba menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung membaik. Pada tahun 2020, derajat desentralisasi fiskal tercatat sebesar 6,33%, namun mengalami penurunan menjadi 5,70% di tahun 2021 yang diduga sebagai dampak dari penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sejak tahun 2022 hingga 2024, tren derajat desentralisasi fiskal terus menunjukkan peningkatan, dengan capaian masing-masing sebesar 6,98%, 7,18%, dan kembali stabil pada 7,18% di tahun 2024.

Rata-rata derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Toba selama lima tahun terakhir adalah sebesar 6,87%. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, nilai ini masih tergolong rendah dan menandakan bahwa struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh transfer pemerintah pusat. Tingkat kemandirian fiskal yang rendah ini menunjukkan bahwa Kabupaten Toba belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan secara mandiri.

Kondisi tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Pemerintah Kabupaten Toba untuk menyusun strategi penguatan pendapatan asli daerah. Upaya-upaya yang perlu didorong antara lain adalah optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan kinerja pengelolaan aset daerah, inovasi

pelayanan publik berbayar, serta digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya aparatur serta perbaikan regulasi daerah juga menjadi aspek penting dalam memperkuat basis penerimaan PAD.

Dengan mengacu pada capaian dan tantangan tersebut, maka arah kebijakan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 perlu secara tegas mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, agar Kabupaten Toba mampu membiayai pembangunan daerah secara lebih mandiri, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Kemandirian Keuangan Daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan transfer.

Untuk indikator Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.52. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024

TAHUN	PAD	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (%)
2020	57.403.162.933	732.232.369.687	7,84%
2021	75.305.397.700	967.354.006.117	7,78%
2022	73.220.848.674	939.743.251.146	7,79%
2023	90.517.424.554	1.053.018.594.746	8,60%
2024	92.355.642.287	1.184.777.280.358	7,80%
		rata rata	7,96%

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Toba menunjukkan rata-rata sebesar 7,96%. Berikut rincian perkembangan tahunan:

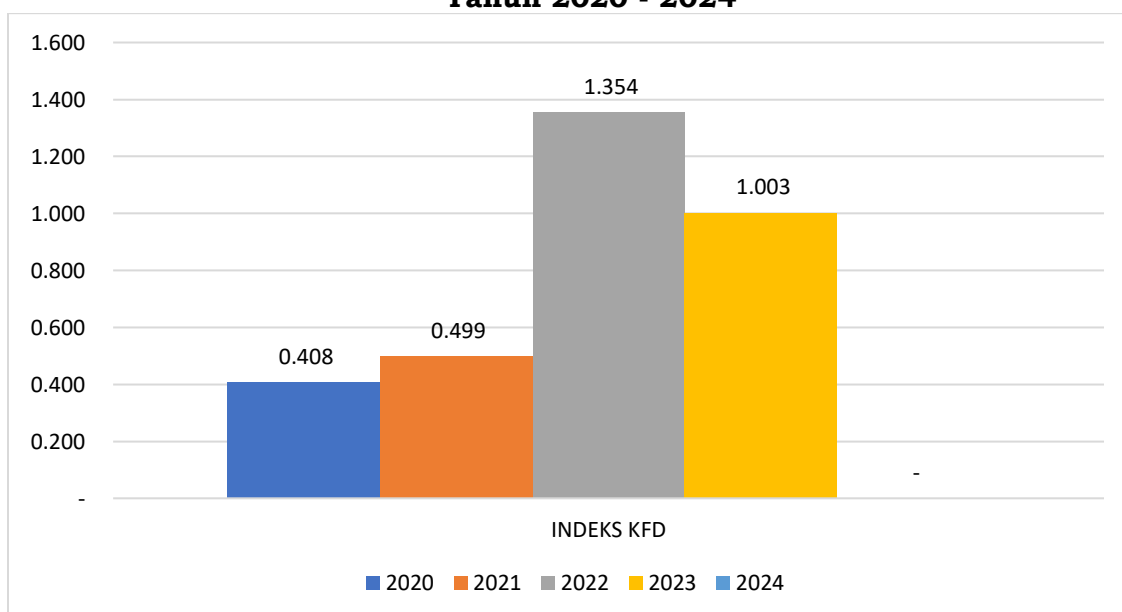
- Tahun 2020: Rasio sebesar 7,84%, dengan PAD sebesar Rp.57,4 miliar terhadap pendapatan transfer Rp732,2 miliar.
- Tahun 2021: Mengalami sedikit penurunan menjadi 7,78%, meskipun terjadi peningkatan pada PAD.
- Tahun 2022: Rasio tercatat sebesar 7,79%, menunjukkan stagnansi meski nilai PAD menurun dari tahun sebelumnya.
- Tahun 2023: Mencapai puncaknya pada periode ini, yakni 8,60%, didorong oleh pertumbuhan PAD yang signifikan menjadi Rp.90,5 miliar.

- Tahun 2024: Rasio turun kembali ke 7,80%, meskipun PAD meningkat menjadi Rp.92,3 miliar, dikarenakan kenaikan lebih besar pada pendapatan transfer.

Secara umum, rasio kemandirian Kabupaten Toba masih berada pada kategori rendah, yang menandakan bahwa struktur keuangan daerah masih sangat tergantung pada dana transfer pusat dan provinsi. Walaupun ada tren kenaikan PAD, tetapi belum cukup signifikan untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMD 2025–2029, diperlukan arah kebijakan dan strategi yang lebih kuat dalam intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, seperti optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah, pemanfaatan aset daerah, dan penguatan BUMD. Selain itu, diperlukan inovasi kebijakan fiskal daerah yang adaptif dan partisipatif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Grafik 2.21. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024



Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) mencerminkan kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan belanja publik secara mandiri, tanpa terlalu bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Semakin tinggi nilai indeks KFD, semakin besar kemampuan fiskal daerah tersebut.

a) Tahun 2020–2021 (Sangat Rendah):

Pada periode ini, kapasitas fiskal Kabupaten Toba berada dalam kategori sangat rendah, dengan indeks di bawah 0,5. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran publik sangat terbatas dan ketergantungan terhadap dana transfer sangat tinggi.

b) Tahun 2022 (Lonjakan Signifikan):

Terjadi peningkatan signifikan pada indeks KFD menjadi 1,354, menggeser kategori ke sedang. Hal ini menunjukkan perbaikan kapasitas fiskal daerah, kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

c) Tahun 2023 (Fluktuasi – Rendah):

Terjadi penurunan ke angka 1,003, menempatkan Toba ke dalam kategori rendah. Penurunan ini bisa disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan PAD atau meningkatnya belanja wajib yang tidak diimbangi oleh kenaikan pendapatan daerah.

d) Tahun 2024 (Pemulihan – Sedang):

KFD kembali meningkat menjadi 1,265, masuk ke kategori sedang, mengindikasikan upaya perbaikan kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan atau efisiensi belanja kembali menunjukkan hasil yang positif.

C. Kinerja Belanja Daerah

Selama periode tahun 2020 hingga 2024, total belanja daerah Kabupaten Toba mengalami peningkatan yang signifikan dari Rp.743,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp.1.293,41 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Toba dalam memperluas kapasitas fiskal untuk mendanai pembangunan dan pelayanan publik. Namun, jika dilihat berdasarkan jenis belanjanya, masih terdapat ketimpangan proporsi dan perlu strategi penyesuaian ke depan agar lebih efisien dan berdampak nyata.

1. Belanja Operasi

Belanja operasi tetap menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja daerah, meningkat dari Rp. 669,31 miliar (2020) menjadi Rp.824,88 miliar (2024). Dominasi belanja operasi, khususnya pada belanja pegawai dan barang/jasa, mengindikasikan masih kuatnya beban rutin. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam RPJMD mendatang agar tidak mengurangi alokasi belanja yang bersifat produktif, seperti belanja modal.

2. Belanja Modal

Belanja modal yang mencerminkan investasi daerah dalam pembangunan infrastruktur dan aset fisik mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dari Rp.66,58 miliar (2020) menjadi Rp.211,82 miliar (2024). Tren kenaikan ini positif dan menunjukkan arah kebijakan yang mulai memprioritaskan pembangunan strategis. Namun demikian, proporsinya masih relatif kecil dibanding total belanja, sehingga perlu ditingkatkan

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan layanan publik.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga menunjukkan fluktuasi, dengan lonjakan tajam pada tahun 2021 sebesar Rp. 89,57 juta, yang diduga terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Namun pada tahun-tahun berikutnya, nilai belanja ini kembali menurun drastis, menjadi hanya Rp.15 juta pada tahun 2024. Pengendalian belanja tidak terduga ini positif, namun harus tetap disiapkan secara memadai sebagai bentuk antisipasi risiko fiskal.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer relatif stabil dari tahun ke tahun, berkisar antara Rp.254,7 miliar (2020) hingga Rp.256,7 miliar (2024). Ini menunjukkan konsistensi dalam mendukung pembangunan desa dan entitas lain yang menerima dana transfer dari pemerintah daerah. Namun, efektivitas belanja transfer tetap perlu ditingkatkan melalui pengawasan dan penguatan kapasitas aparatur pelaksana di tingkat penerima.

Tabel 2.53. Kinerja Belanja Tahun 2020-2024

No.	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan* (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
5	BELANJA DAERAH	743.254.747.846,50	757.063.873.275,10	801.356.114.604,00	904.322.680.077,00	1.293.406.878.075,98	15,90%
5.1	Belanja Operasi	669.315.441.382,00	639.812.047.016,20	641.908.469.494,00	723.948.363.074,35	824.877.262.605,98	5,66%
5.1.1	Belanja Pegawai	408.153.207.697,00	401.728.056.649,00	399.389.688.117,00	413.147.637.849,00	468.041.813.810,00	3,64%
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	202.773.071.300,00	230.803.160.067,20	234.723.578.286,00	277.186.555.956,35	306.157.884.375,98	11,02%
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.5	Belanja Hibah	57.860.834.385,00	6.970.830.300,00	7.327.603.091,00	33.135.530.439,00	50.233.464.420,00	80,24%
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	528.328.000,00	310.000.000,00	467.600.000,00	478.638.830,00	444.100.000,00	1,16%
5.2	Belanja Modal	66.583.199.217,00	117.162.255.843,90	155.829.389.716,00	180.113.873.752,65	211.821.471.337,00	35,54%
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	566.169.167,00	140.580.000,00	0,00	0,00	-43,79%
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.997.090.640,00	37.345.328.838,40	44.982.660.246,00	36.244.627.236,65	41.863.963.620,00	6,59%
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.019.348.523,00	9.027.358.946,00	15.392.028.806,00	32.597.427.430,00	56.177.040.043,00	66,80%
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.126.713.434,00	66.699.785.563,50	93.020.345.789,00	101.129.152.216,00	108.615.596.294,00	76,08%
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.440.046.620,00	3.523.613.329,00	2.293.774.875,00	10.142.666.870,00	5.164.871.380,00	55,74%
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Belanja Tidak Terduga	7.356.107.247,50	89.570.415,00	3.618.255.394,00	260.443.250,00	15.000.000,00	913,44%
	Belanja Tidak Terduga	7.356.107.247,50	89.570.415,00	3.618.255.394,00	260.443.250,00	15.000.000,00	913,44%
	Belanja Transfer	254.702.533.741,00	258.099.636.759,00	248.774.802.327,00	256.663.738.307,00	256.693.144.133,00	0,23%
	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	4.052.770.000,00	4.363.900.106,00	3.200.000.000,00	3.199.999.999,00	10,78%
	Belanja Bantuan Keuangan	252.202.533.741,00	254.046.866.759,00	244.410.902.221,00	253.463.738.307,00	253.493.144.134,00	0,16%
	SURPLUS/(DEFISIT)	8.341.933.032,78	63.110.214.783,02	(30.108.362.077,67)	(8.757.071.907,14)	(6.900.857.949,05)	104,18%

B. Pembiayaan Daerah

Informasi realisasi pengeluaran pembiayaan untuk melihat seberapa besar pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengikat untuk dipenuhi oleh surplus anggaran yang ada. Bersama dengan belanja daerah, pengeluaran pembiayaan merupakan komponen pengeluaran daerah. Tabel 2.54. berikut merupakan data realisasi pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Toba selama 5(lima) tahun terakhir dan pertumbuhannya.

Tabel 2.54. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020-2024 dan Rata-Rata Pertumbuhannya

No.	URAIAN	REALISASI					Rata-Rata Pertumbuhan* (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8
6	PEMBIAYAAN	53.370.346.887,62	56.712.279.920,40	114.822.494.703,42	79.714.132.625,75	67.957.060.718,61	15,85%
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	53.370.346.887,62	61.712.279.920,40	119.822.494.703,42	84.714.132.625,75	70.957.060.718,61	16,06%
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	53.370.346.887,62	61.712.279.920,40	119.822.494.703,42	84.714.132.625,75	70.957.060.718,61	16,06%
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-10,00%
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00	-10,00%
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	PEMBIAYAAN NETTO	53.370.346.887,62	56.712.279.920,40	114.822.494.703,42	79.714.132.625,75	67.957.060.718,61	15,85%
6.2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	61.712.279.920,40	119.822.494.703,42	84.714.132.625,75	70.957.060.718,61	61.056.202.769,56	8,67%
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang Lain yang Diperlukan	-	-	-	-	-	
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	-	-	-	-	-	

*: LRA; **: APBD

2.5.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas keuangan dan informasi mengenai fleksibilitas keuangan. Pemberian informasi tersebut merupakan upaya dan tindakan Pemerintah Daerah untuk menjalankan good government governance dan bentuk pertanggungjawaban atas posisi kekayaan daerah.

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Jenis rasio solvabilitas yang digunakan, antara lain: rasio total hutang terhadap total aset (debt to asset ratio) dan rasio hutang terhadap modal (debt to equity ratio). Rasio aktivitas adalah rasio untuk melihat tingkat aktivitas tertentu pada kegiatan pelayanan pemerintah daerah. Jenis rasio aktivitas yang digunakan dalam analisis, antara lain: rata-rata umur piutang dan rata-rata umur persediaan. Berikut ini disajikan Tabel 2.75 perkembangan neraca daerah selama 5(lima) tahun terakhir dan rata-rata pertumbuhannya.

Analisis Neraca Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020–2024

1. Perkembangan Total Aset

Total aset Pemerintah Kabupaten Toba menunjukkan tren peningkatan yang stabil selama lima tahun terakhir, dari Rp.1,88 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.2,64 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan dan akumulasi kekayaan daerah, yang dapat menjadi modal penting dalam pelaksanaan pembangunan ke depan.

Kenaikan aset terutama ditopang oleh peningkatan aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, serta gedung dan bangunan, yang mengindikasikan bahwa pemerintah telah melakukan investasi besar dalam pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas layanan publik.

2. Aset Lancar dan Kemampuan Likuiditas

Aset lancar juga mengalami kenaikan signifikan dari Rp.111 miliar (2020) menjadi Rp.222 miliar (2024), menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek serta menjaga likuiditas kas daerah. Komponen kas dan piutang dalam aset lancar juga relatif stabil, menunjukkan pengelolaan keuangan yang konservatif dan hati-hati.

Namun, adanya penyisihan piutang tak tertagih yang juga meningkat signifikan menjadi Rp.57 miliar pada tahun 2024 menjadi catatan penting. Hal ini menunjukkan masih adanya risiko dalam efektivitas penagihan piutang, yang perlu mendapat perhatian dalam perbaikan sistem tata kelola keuangan daerah ke depan.

3. Aset Tetap

Komponen aset tetap mengalami peningkatan dari Rp.1,59 triliun (2020) menjadi Rp.1,83 triliun (2024). Kenaikan ini utamanya terjadi pada akun gedung dan bangunan serta jalan, jaringan, dan instalasi. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan layanan publik dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi prioritas daerah. Kenaikan nilai aset tetap juga menunjukkan peningkatan kapasitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

4. Kewajiban Daerah

Total kewajiban daerah mengalami lonjakan signifikan dari Rp.7,15 miliar (2020) menjadi Rp.34,46 miliar (2024). Lonjakan kewajiban jangka pendek, khususnya pada akun utang pajak dan pendapatan diterima di muka, menjadi catatan penting. Ini menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dalam pengelolaan utang dan perencanaan keuangan jangka pendek agar tidak mengganggu keseimbangan fiskal daerah.

5. Ekuitas

Ekuitas daerah terus mengalami peningkatan dari Rp.1,87 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp.2,60 triliun pada tahun 2024, menandakan pertumbuhan nilai kekayaan bersih daerah. Hal ini mencerminkan kinerja positif dalam pengelolaan aset dan pendapatan daerah, serta menjadi indikator sehatnya neraca fiskal pemerintah daerah.

Tabel 2.55. Perkembangan Neraca Daerah Selama 5 (lima) Tahun Terakhir dan Rata-Rata Pertumbuhannya

NO 1	Uraian 2	2020 3	2021 4	2022 5	2023 6	2024 7
	ASET					
	ASET LANCAR	111.285.080.591,12	193.397.329.808,86	200.922.188.691,32	218.285.549.761,26	222.047.256.804,64
	Kas	62.445.804.157,40	119.927.712.703,42	84.714.132.625,75	70.956.985.718,61	61.056.202.769,56
	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Piutang	24.933.708.994,80	36.324.818.616,39	94.692.572.341,61	129.170.046.120,16	144.240.440.319,21
	Piutang Lain-lain	10.908.895.331,21	9.884.593.665,80	9.878.055.515,80	9.878.055.515,80	9.878.055.515,80
	Persediaan	18.107.294.861,67	32.746.130.496,63	21.498.192.090,39	24.414.981.813,19	24.232.335.540,58
	Belanja dibayar dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(5.110.622.753,96)	(5.485.925.673,38)	(9.860.763.882,23)	(16.134.519.406,50)	(17.359.777.340,51)
	INVESTASI JANGKA PANJANG	30.716.234.634,93	35.716.234.634,93	40.716.225.817,00	45.716.225.817,00	48.716.225.817,00
	Investasi Non Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investasi Permanen	30.716.234.634,93	35.716.234.634,93	40.716.225.817,00	45.716.225.817,00	48.716.225.817,00
	ASET TETAP	1.592.010.188.810,01	1.602.838.478.972,24	1.657.905.358.435,60	2.057.795.217.253,85	2.207.085.587.769,52
	Tanah	497.608.768.375,10	500.177.229.852,10	500.684.819.742,10	500.684.819.742,10	510.233.436.742,10
	Peralatan dan Mesin	314.551.163.753,48	349.866.706.448,21	401.069.555.032,07	424.428.801.772,31	470.385.185.773,31
	Gedung dan Bangunan	499.521.339.107,40	505.024.185.513,40	514.410.588.486,40	555.294.029.380,93	639.754.225.932,93
	Jalan, jaringan dan Instalasi	1.112.028.822.355,08	1.180.457.286.782,58	1.274.179.041.438,58	1.378.508.905.143,71	1.483.583.345.331,23
	Aset tetap lainnya	14.035.093.087,05	14.552.309.057,05	18.924.354.527,55	67.325.349.236,05	77.303.185.222,05
	Konstruksi dalam Pengerjaan	55.004.859.032,90	58.256.775.010,90	60.887.611.758,90	63.374.116.498,77	59.199.198.732,90

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Akumulasi Penyusutan	(900.739.856.901,00)	(1.005.496.013.692,00)	(1.112.250.612.550,00)	(931.820.804.520,02)	(1.033.372.989.965,00)
	DANA CADANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ASET LAINNYA	151.646.115.599,18	154.730.327.792,85	154.818.836.938,21	165.090.593.774,05	164.634.260.830,82
	Tagihan Piutang Penjualan Angsuran	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647.273.831,70
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aset Tidak Berwujud	2.012.897.819,00	3.282.880.973,00	4.350.440.280,00	5.802.473.430,00	6.442.008.658,00
	Aset Lain-lain	149.633.217.780,18	151.447.446.819,85	150.468.396.658,21	159.288.120.344,05	154.937.841.341,12
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607.137.000,00
	Penyisihan Piutang SKPD Tak Tertagih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Amortisasi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH ASET	1.885.657.619.635,24	1.986.682.371.208,88	2.054.362.609.882,13	2.486.887.586.606,16	2.642.483.331.221,98
	KEWAJIBAN					
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	7.151.467.543,78	1.111.507.497,00	1.831.699.057,22	11.786.255.157,53	34.640.363.447,93
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	409.945.810,00	390.424.873,00	390.424.873,00	390.424.873,00	390.424.873,00
	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Beban	6.390.183.401,78	417.880.469,00	406.741.077,00	10.312.492.071,00	20.455.086.135,00

NO	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
	Bagian Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utang Jangka Panjang					
	Pendapatan Diterima Dimuka	155.124.456,00	176.558.694,00	245.418.066,22	317.785.949,53	274.238.989,93
	Utang Jangka Pendek Lainnya	196.213.876,00	126.643.461,00	789.115.041,00	765.552.264,00	13.520.613.450,00
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utang Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH KEWAJIBAN	7.151.467.543,78	1.111.507.497,00	1.831.699.057,22	11.786.255.157,53	34.640.363.447,93
	EKUITAS					
	EKUITAS					
	Ekuitas	1.878.506.152.091,46	1.985.570.863.711,88	2.052.530.910.824,91	2.475.101.406.448,63	2.607.842.967.774,05
	JUMLAH EKUITAS	1.878.506.152.091,46	1.985.570.863.711,88	2.052.530.910.824,91	2.475.101.406.448,63	2.607.842.967.774,05
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.885.657.619.635,24	1.986.682.371.208,88	2.054.362.609.882,13	2.486.887.661.606,16	2.642.483.331.221,98

2.5.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah serta Pembiayaan Daerah. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik akan menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah.

Sesuai dengan ruang lingkup keuangan daerah, pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba diarahkan pada sumber-sumber pendapatan yang selama ini telah menjadi sumber penghasilan Kas Daerah dengan tetap mengupayakan sumber-sumber pendapatan yang baru. Sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, diantaranya Lain-lain Pendapatan yang Sah, Pendapatan Transfer dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

2.5.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah pada Tahun 2020-2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Selama Periode Tahun Anggaran 2020-2024, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui :

- 1) Inventarisasi dan peningkatan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan baru yang memungkinkan untuk dioptimalkan.
- 2) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan dan pemanfaatan aset daerah.
- 3) Peningkatan sumber-sumber pendanaan pembangunan dari sumber non APBD kabupaten dengan menjalin kerjasama/kemitraan baik dengan pemerintah pusat, provinsi, swasta dan dunia usaha, masyarakat, perguruan tinggi maupun lembaga/badan.
- 4) Optimalisasi pemungutan retribusi serta peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.
- 5) Pengembangan sistem pemungutan dan administrasi pajak serta retribusi berbasis online.
- 6) Pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan dan mendukung prioritas pembangunan.

2.5.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja

Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas. Untuk menggambarkan seberapa besar belanja pemerintah daerah yang digunakan dalam upaya untuk mensejahterakan penduduk di suatu daerah. Kebijakan dalam belanja daerah Kabupaten Toba berusaha untuk meningkatkan porsi belanja publik untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan efisiensi pengelolaan belanja.

Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Pemerataan pembangunan dengan prioritas pada peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur (khususnya daerah sumber sumber pertumbuhan ekonomi)
- 2) Pemenuhan alokasi persentase belanja untuk urusan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pengawasan sesuai peraturan.
- 3) Prioritas belanja yang berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Prioritas program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.
- 5) Pengalokasian belanja pada program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam forum koordinasi di bidang perencanaan.

2.5.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dari sisi pembiayaan daerah, Pemerintah Kabupaten Toba mengambil kebijakan yang konservatif dan hati-hati, dengan prioritas pada:

- 1) Penggunaan SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) sebagai sumber pembiayaan utama.
- 2) Menghindari ketergantungan terhadap pembiayaan utang daerah.
- 3) Memprioritaskan pembiayaan untuk penyertaan modal daerah, penguatan program strategis, dan penanggulangan kondisi darurat, seperti pada masa pandemi COVID-19.

Selain itu, pembiayaan netto dari tahun ke tahun diarahkan untuk menutup defisit anggaran yang direncanakan, dengan tetap menjaga kestabilan fiskal dan arus kas daerah.

2.5.2.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

Belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur meliputi belanja pegawai, operasional perkantoran, serta pengeluaran lain yang mendukung kelancaran fungsi administratif pemerintahan. Berdasarkan data, terjadi tren penurunan proporsi belanja aparatur terhadap total pengeluaran dari tahun ke tahun.

Tabel 2.56. Proporsi Belanja Kabupaten Toba Tahun 2020-2024 dan Rata-Rata Pertumbuhannya

No	Uraian	Total Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran) (Rp)	Persentase ((a/b)x100%)
		A	B	
1	2	3	4	5
1	2020	408.153.207.697,00	796.625.094.734,12	51,24
2	2021	401.728.056.649,00	813.776.153.195,50	49,37
3	2022	399.389.688.117,00	916.178.609.307,42	43,59
4	2023	413.147.637.849,00	984.036.812.702,75	41,98
5	2024	468.041.813.810,00	1.361.363.938.794,59	34,38

Selama periode lima tahun terakhir, terlihat adanya tren penurunan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja daerah. Pada tahun 2020, proporsi belanja untuk kebutuhan aparatur mencapai 51,24% dari total pengeluaran daerah. Angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai 34,38% pada tahun 2024.

Secara nominal, belanja pemenuhan kebutuhan aparatur mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022, nilai belanja aparatur sempat menurun dari Rp401,7 miliar menjadi Rp399,3 miliar, namun kembali meningkat signifikan pada tahun 2024 menjadi Rp468,04 miliar, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun demikian, pertumbuhan total pengeluaran daerah yang jauh lebih tinggi, yakni dari Rp796,62 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp1,36 triliun pada tahun 2024, menyebabkan persentase belanja aparatur terhadap total belanja mengalami penurunan drastis.

Penurunan persentase ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Toba mulai menggeser alokasi anggaran dari belanja aparatur ke sektor-sektor yang lebih produktif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran daerah serta arah kebijakan pembangunan yang lebih fokus pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur serta ekonomi Masyarakat.

2.5.2.5. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Tabel 2.57. Defisit Riil Anggaran Kabupaten Toba Tahun 2020-2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
		(ribu rupiah)	(ribu rupiah)	(ribu rupiah)	(ribu rupiah)	(ribu rupiah)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Realisasi Pendapatan Daerah	1.006.299.215	1.078.273.725	1.020.022.555	1.152.229.346	1.286.506.020
	Dikurangi Realisasi :					
2.	Belanja Daerah	997.957.282	1.015.163.510	1.050.130.917	1.160.986.418	1.293.406.878
3.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		5.000.000	5.000.000	5.000.000	3.000.000
	Defisit Riil	8.341.933	58.110.215	-35.108.362	-13.757.072	-9.900.858

Tabel 2.57 menggambarkan perbandingan antara realisasi pendapatan daerah dan total belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah, yang kemudian menghasilkan nilai defisit riil anggaran setiap tahunnya selama periode 2020–2024.

Pendapatan daerah mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari Rp 1,006 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 1,286 triliun pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan upaya intensifikasi pendapatan melalui optimalisasi pendapatan transfer dan peningkatan PAD, meskipun struktur pendapatan daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat.

Belanja daerah juga mengalami peningkatan secara bertahap, dari Rp. 743,25 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 1,293 triliun pada tahun 2024. Selain belanja, terdapat pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 5 miliar per tahun selama 2021–2023 dan Rp 3 miliar pada 2024, yang umumnya dialokasikan untuk penyertaan modal atau pengeluaran pembiayaan lainnya.

Selama periode 2020–2023, Kabupaten Toba mengalami defisit riil anggaran setiap tahun, yang menunjukkan bahwa kebutuhan belanja lebih besar dibandingkan pendapatan.

Tabel 2.58. Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

No.	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	53.370.346.887,62	61.712.279.920,40	119.822.494.703,42	84.714.132.625,75	70.957.060.718,61
2.	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Komponen terbesar dalam penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Toba selama tahun 2020 hingga 2024 adalah SiLPA, yaitu sisa anggaran tahun sebelumnya yang dapat digunakan kembali: Tahun 2020: Rp 53,37 miliar; Tahun 2021: Rp 61,71 miliar ; Tahun 2022: Rp 119,82 miliar (tertinggi selama lima tahun) ; Tahun 2023: Rp 84,71 miliar ; Tahun 2024: Rp 70,96 miliar. Kenaikan SiLPA tahun 2022 menunjukkan adanya efisiensi dalam realisasi belanja atau sehingga menjadi saldo anggaran tahun berikutnya. Selama tahun 2020 hingga 2024, SiLPA menjadi satu-satunya komponen penerimaan pembiayaan yang dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba. Hal ini menunjukkan karakteristik kebijakan pembiayaan daerah yang Konservatif, karena tidak mengambil pinjaman atau menjual aset daerah Fiskal hati-hati, dengan tetap menjaga keberlanjutan anggaran. Mengandalkan efisiensi, karena SiLPA merupakan cerminan efisiensi pengelolaan anggaran tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menjadi cerminan bahwa Pemerintah Kabupaten Toba menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan pembiayaan daerah, yang penting dalam menciptakan stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

A. Analisis Komponen Pembentuk SiLPA Kabupaten Toba Tahun 2020–2024

Berdasarkan data rekapitulasi, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Toba menunjukkan fluktuasi selama tahun 2020 hingga 2024. Jumlah SiLPA tertinggi tercatat pada tahun 2021 sebesar Rp.119,82 miliar, sementara jumlah terendah terjadi pada tahun 2024 yaitu Rp.61,06 miliar.

1. Pelampauan Penerimaan PAD

Pelampauan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut menyumbang terhadap pembentukan SiLPA, meskipun kontribusinya relatif kecil. Pada tahun 2020, pelampauan PAD sebesar Rp.4,49 miliar atau sekitar 7,28%

dari total SiLPA. Namun kontribusi ini menurun drastis pada tahun 2021 (1,99%) dan 2022 (1,05%). Bahkan pada tahun 2024 terjadi shortfall atau kekurangan PAD sebesar Rp.13,69 miliar, yang berarti PAD terealisasi lebih rendah dari target, dan secara negatif memengaruhi pembentukan SiLPA.

2. Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan
Komponen pelampauan penerimaan Dana Perimbangan tidak tercatat menyumbang SiLPA selama periode ini. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, pelampauan penerimaan dari lain-lain pendapatan daerah yang sah masing-masing menyumbang Rp.9,18 miliar (14,88%) dan Rp.350 juta (0,29%), sebelum tidak tercatat lagi dalam tahun-tahun berikutnya.
3. Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya
Data tidak menunjukkan nilai eksplisit untuk komponen ini selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, secara umum komponen ini berpotensi muncul dari efisiensi pengeluaran atau keterlambatan pelaksanaan kegiatan.
4. Kewajiban kepada Pihak Ketiga
Kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga akhir tahun cukup signifikan. Pada tahun 2020, nilai kewajiban mencapai Rp.7,15 miliar (12% dari SiLPA) dan meningkat terus hingga tahun 2024, mencapai Rp.34,64 miliar atau 57% dari total SiLPA. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar SiLPA dalam beberapa tahun terakhir merupakan komitmen yang belum terselesaikan, bukan dana bebas yang bisa langsung digunakan.
5. Kegiatan Lanjutan
Dalam tabel tidak dicatat secara eksplisit nilai kegiatan lanjutan, namun umumnya kegiatan ini terkait dengan proyek yang belum selesai dan dilanjutkan ke tahun anggaran berikutnya. Kegiatan semacam ini sebaiknya dikonfirmasi melalui DPA tahun berikutnya atau daftar kegiatan tunda bayar.

Selama periode 2020–2024, struktur SiLPA Kabupaten Toba sebagian besar dipengaruhi oleh:

- ✚ Pelampauan penerimaan (khususnya PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah) pada awal periode,
- ✚ Peningkatan kewajiban kepada pihak ketiga yang cukup signifikan pada akhir periode (terutama tahun 2023 dan 2024),
- ✚ Terjadinya penurunan kualitas SiLPA pada tahun 2024, ditandai dengan terjadinya defisit PAD dan dominasi SiLPA oleh kewajiban belum dibayar.

Tabel 2.59. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

No.	URAIAN	2020		2021		2022		2023		2024	
		Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp .	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA	Rp.	% dari SILPA
1	2	3		4		5		6		7	
1	Jumlah SiLPA	61.712.279.920,40		119.822.494.703,42		84.714.132.625,75		70.957.060.718,61		61.056.202.769,56	
2	Pelampauan Penerimaan PAD	4.489.618.260,28	7,28%	2.390.378.000,12	1,99%	893.552.459,93	1,05%			- 13.696.906.911,07	
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	9.182.030.000,00	14,88%	350.077.500,00	0,29%						
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga Sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	7.151.467.543,78	12%	1.111.507.497,00	1%	1.831.699.057,22	2%	10.176.325.268,53	14%	34.640.363.447,93	57%
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.5.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan instrumen penting yang menggambarkan kemampuan fiskal dan arah pembiayaan untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dalam periode RPJMD. Penyusunan kerangka pendanaan ini didasarkan pada proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dan sumber-sumber pembiayaan lainnya secara realistis dan berkelanjutan, dengan mempertimbangkan dinamika makroekonomi, regulasi fiskal nasional, serta potensi dan kapasitas keuangan daerah.

Selama periode 5 tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Toba dihadapkan pada tantangan keterbatasan fiskal yang menuntut strategi pendanaan yang inovatif, efisien, dan tepat sasaran. Oleh karena itu, selain mengandalkan pendapatan daerah, pemerintah daerah juga akan mengoptimalkan alternatif pembiayaan pembangunan seperti kerja sama dengan pihak ketiga, pemanfaatan skema pendanaan kreatif, serta mendorong peran aktif masyarakat dan dunia usaha.

Kerangka pendanaan dalam RPJMD ini juga menjadi landasan dalam memastikan keberlanjutan pembiayaan program prioritas daerah, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan konsisten dalam kerangka waktu perencanaan jangka menengah.

2.5.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah merupakan komponen krusial dalam penyusunan RPJMD yang berfungsi sebagai dasar perhitungan kemampuan pembiayaan program dan kegiatan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Proyeksi ini disusun dengan pendekatan yang realistis dan akuntabel, memperhatikan tren historis, potensi riil daerah, arah kebijakan fiskal nasional, serta dinamika ekonomi regional dan global.

Pendapatan daerah diproyeksikan berasal dari tiga sumber utama, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, khususnya dari sektor pajak daerah dan retribusi, akan menjadi prioritas untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Di sisi lain, belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, baik belanja operasional, belanja modal, maupun belanja transfer, dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Proyeksi pendapatan dan belanja juga mempertimbangkan kesinambungan fiskal dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pelayanan dasar, pemenuhan belanja wajib, dan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, perencanaan keuangan daerah dalam RPJMD disusun secara terukur dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya.

Tabel 2.60. Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2030

KODE	URAIAN	PROYEKSI					
		TAHUN 2025**	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	1.307.762.689.144,70	1.182.746.227.000,00	1.238.150.263.000,00	1.298.353.797.000,00	1.380.639.144.000,00	1.452.378.497.000,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.897.636.104,00	151.139.786.000,00	166.253.764.000,00	182.852.141.000,00	215.908.064.000,00	237.498.869.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	88.600.182.391,00	97.460.200.000,00	107.206.220.000,00	117.926.842.000,00	129.719.527.000,00	142.691.479.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	32.475.748.672,00	35.723.323.000,00	39.295.655.000,00	43.225.221.000,00	47.547.743.000,00	52.302.517.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.800.000.000,00	11.880.000.000,00	13.068.000.000,00	14.374.800.000,00	15.812.280.000,00	17.393.508.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.021.705.041,00	6.076.263.000,00	6.683.889.000,00	7.325.278.000,00	22.828.514.000,00	25.111.365.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	984.462.793.040,70	1.018.461.441.000,00	1.058.751.499.000,00	1.102.356.656.000,00	1.151.586.080.000,00	1.201.734.628.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	842.547.996.000,00	920.327.995.000,00	959.751.499.000,00	1.002.356.656.000,00	1.049.586.080.000,00	1.096.734.628.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya						
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	141.914.797.040,70	98.133.446.000,00	99.000.000.000,00	100.000.000.000,00	102.000.000.000,00	105.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	186.402.260.000,00	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	186.402.260.000,00	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00	13.145.000.000,00
5	BELANJA DAERAH	1.365.818.891.914,26	1.179.746.227.000,00	1.235.150.263.000,00	1.295.353.797.000,00	1.377.639.144.000,00	1.449.378.497.000,00
5.1	BELANJA OPERASI	930.184.262.156,59	798.322.959.000,00	825.575.992.000,00	871.892.787.000,00	894.359.441.000,00	893.406.307.000,00
5.1.01	Belanja Pegawai	553.190.513.012,26	461.187.316.000,00	467.580.675.000,00	474.582.950.000,00	481.040.604.000,00	488.442.307.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	368.707.272.244,33	329.768.943.000,00	350.282.071.000,00	363.539.000.000,00	379.539.000.000,00	397.539.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	30.000.000,00	30.000.000,00	31.411.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00	30.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	7.919.776.900,00	7.000.000.000,00	7.329.296.000,00	33.366.837.000,00	33.366.837.000,00	7.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	336.700.000,00	336.700.000,00	352.539.000,00	371.000.000,00	380.000.000,00	395.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	161.748.041.917,67	111.179.259.000,00	136.808.508.000,00	147.110.000.000,00	201.420.000.000,00	269.150.000.000,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.058.332.028,00	-				
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.619.835.095,50	25.181.894.000,00	32.366.511.000,00	34.000.000.000,00	38.500.000.000,00	54.500.000.000,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI					
		TAHUN 2025**	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.408.537.444,17	35.332.386.000,00	38.393.615.000,00	40.000.000.000,00	61.000.000.000,00	77.500.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	83.473.251.470,00	50.564.979.000,00	65.943.678.000,00	73.000.000.000,00	101.800.000.000,00	137.000.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	188.085.880,00	100.000.000,00	104.704.000,00	110.000.000,00	120.000.000,00	150.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.000.000.000,00	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	7.500.000.000,00	8.300.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.000.000.000,00	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	6.300.000.000,00	7.500.000.000,00	8.300.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	266.886.587.840,00	263.944.009.000,00	266.465.763.000,00	270.051.010.000,00	274.359.703.000,00	278.522.190.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.273.000.000,00	11.650.187.000,00	11.650.187.000,00	12.815.206.000,00	14.126.727.000,00	15.599.399.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.613.587.840,00	252.293.822.000,00	254.815.576.000,00	257.235.804.000,00	260.232.976.000,00	262.922.791.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-58.056.202.769,56	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.056.202.769,56	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.056.202.769,56	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	58.056.202.769,56	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2025-2030 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan target pendapatan daerah baik dari Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah secara terencana, dengan memaksimalkan pemungutan berdasarkan potensi yang dimiliki melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sesuai dengan kondisi perekonomian dengan memperhatikan kendala, potensi dan coverage ratio yang ada.
- b. Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Toba yang up to date, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar untuk menghitung potensi pendapatan, merumuskan target tahunan, serta menentukan sasaran dalam peningkatan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. Meningkatkan sistem dan prosedur pemungutan dan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dan komponen pendapatan daerah lainnya dengan menggunakan/memanfaatkan ketersediaan teknologi informasi (IT) serta memangkas alur pelayanan menjadi lebih sederhana;
- d. Mengembangkan manajemen pendapatan daerah melalui prinsip profesionalisme, efisiensi, transparan, akuntabel, dan bertanggungjawab;
- e. Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta usaha mendorong peningkatan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
- f. Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur yang bertugas mengelola dan memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toba;
- g. Meningkatkan kinerja pengelolaan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) yang terdapat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba;
- h. Melakukan pemanfaatan aset/Barang Milik Daerah Kabupaten Toba untuk menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhatikan peraturan tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah;
- i. Melakukan koordinasi dan meningkatkan hubungan kerja / kerjasama dengan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BAPPENAS dan kementerian/ instansi terkait lainnya, dalam rangka mendukung peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Bantuan Keuangan sesuai dengan potensi dan kebutuhan Pemerintah Kabupaten Toba;
- j. Peningkatan atraksi, aksesibilitas, amenitas dan ansilari sektor pariwisata.

B. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dimaksud digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyusunan belanja untuk pelaksanaan urusan wajib dilaksanakan dengan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan.

Selain itu, Daerah juga wajib mengalokasikan belanja wajib untuk mendanai Urusan Pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan misalkan untuk Pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 10% dan belanja infrastruktur sebesar 40%. Selain itu, perencanaan belanja daerah juga harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah, organisasi, Program, Kegiatan, jenis, obyek, dan rincian obyek Belanja Daerah. Pada tingkat Perangkat Daerah, nantinya belanja dimaksud akan dirinci dengan mencantumkan target dan sasaran, indikator capaian keluaran serta indikator capaian hasil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dalam Struktur APBD diubah menjadi 4 (empat) kelompok belanja sebagai berikut:

- a. Belanja operasi : merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- b. Belanja modal : merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi;
- c. Belanja tidak terduga : merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- d. Belanja transfer: merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Arah kebijakan belanja daerah, ditetapkan melalui pendekatan belanja proporsional, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan dilaksanakan dengan berpedoman pada anggaran berbasis kinerja serta berdasarkan kepada agenda-agenda dan prioritas Pembangunan. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Toba pada Tahun 2025-2030 disusun untuk mencapai target program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2030. Kebijakan belanja daerah

dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Kabupaten Toba, sebagai berikut:

- a. Mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagai upaya peningkatan pelayanan bidang pendidikan;
- b. Mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji sebagai upaya peningkatan bidang kesehatan, termasuk di dalamnya anggaran penanggulangan *stunting*;
- c. Mengelola belanja daerah berlandaskan pada anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada pencapaian target tujuan dan sasaran Pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2030 serta renstra perangkat daerah tahun 2025-2030;
- d. Mendanai program-program yang bersifat strategis dalam rangka mendorong terwujudnya visi dan misi kepala daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2030;
- e. Mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas pada belanja belanja operasional kantor, pemeliharaan mesin dan kendaraan dinas dan operasional perjalanan dinas, rapat, dan honorarium;
- f. Pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Standar Pelayanan Minimal;

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

2.5.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Penghitungan kerangka pendanaan merupakan tahapan penting dalam penyusunan RPJMD yang berfungsi untuk memastikan keterukuran antara rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dengan kapasitas fiskal yang dimiliki. Kerangka pendanaan disusun berdasarkan proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah selama periode lima tahun, dengan mempertimbangkan asumsi pertumbuhan ekonomi, arah kebijakan fiskal nasional dan daerah, serta kapasitas riil keuangan daerah.

Dalam penghitungan ini, dilakukan estimasi kebutuhan pendanaan berdasarkan prioritas pembangunan yang dituangkan dalam sasaran dan target RPJMD, kemudian dibandingkan dengan kapasitas pendanaan daerah yang tersedia. Selisih antara kebutuhan dan kapasitas pendanaan akan menjadi dasar dalam merumuskan strategi pembiayaan alternatif, seperti optimalisasi pendapatan asli daerah, pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan kreatif, maupun kerja sama pendanaan dengan pihak ketiga.

Dengan pendekatan ini, kerangka pendanaan dalam RPJMD tidak hanya menggambarkan potret fiskal daerah, tetapi juga menjadi alat kendali fiskal yang menjamin pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan secara terencana, berkelanjutan, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Table 2. 61 menampilkan keseluruhan kerangka pendanaan daerah Kabupaten Toba untuk Tahun 2025 – 2029.

Tabel 2.61. Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2030

NO	URAIAN	PROYEKSI					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peendapatan	1.274.496.114.717,00	1.182.746.227.000,00	1.238.150.263.000,00	1.298.353.797.000,00	1.380.639.144.000,00	1.452.378.497.000,00
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	58.243.502.636,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Total Penerimaan	1.332.739.617.353,00	1.187.746.227.000,00	1.243.150.263.000,00	1.303.353.797.000,00	1.385.639.144.000,00	1.457.378.497.000,00
	Dikurangi:						
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat	538.654.395.403,00	917.805.532.000,00	937.924.188.000,00	953.058.617.000,00	968.522.639.000,00	984.682.901.000,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	677.598.216.678,00	259.940.695.000,00	295.226.075.000,00	340.295.180.000,00	407.116.505.000,00	462.695.596.000,00

Tabel 2.62. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2030

Uraian	Proyeksi					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas riil kemampuan keuangan	677.598.216.678,00	259.940.695.000,00	295.226.075.000,00	340.295.180.000,00	407.116.505.000,00	462.695.596.000,00
Prioritas I	406.558.930.006,80	155.964.417.000,00	177.135.645.000,00	204.177.108.000,00	244.269.903.000,00	277.617.357.600,00
Prioritas II	271.039.286.671,20	103.976.278.000,00	118.090.430.000,00	136.118.072.000,00	162.846.602.000,00	185.078.238.400,00

Sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah, proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menjadi acuan utama dalam merumuskan skenario pembiayaan untuk pencapaian target pembangunan daerah. Proyeksi ini menggambarkan estimasi potensi fiskal yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Toba selama periode RPJMD 2025–2030.

Berdasarkan hasil penghitungan, kapasitas riil kemampuan keuangan daerah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 677,60 miliar, yang kemudian mengalami penurunan tajam pada tahun 2026 menjadi Rp. 259,94 miliar. Selanjutnya, tren kapasitas keuangan diperkirakan meningkat secara bertahap hingga mencapai Rp.462,70 miliar pada tahun 2030.

Dalam kerangka pembiayaan, kebutuhan belanja pembangunan dikelompokkan ke dalam Prioritas I dan Prioritas II. Prioritas I mencakup program-program strategis yang mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran utama pembangunan daerah. Sementara Prioritas II merupakan kegiatan pendukung dan pelengkap yang tetap dibutuhkan untuk mendukung kesinambungan pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya.

2.6. Permasalahan dan Isu Strategis

2.6.1 Permasalahan Pembangunan

Penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Toba dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir telah memberikan hasil yang diharapkan, tetapi untuk pembangunan ke depan masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Berbagai permasalahan yang akan dihadapi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal yang terjadi sebagai interaksi dan dinamika perkembangan berbagai sektor. Berdasarkan hasil evaluasi gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Toba sebagaimana telah disajikan pada Bab 2 (dua), yang menjadi Permasalahan Utama adalah **"Belum optimalnya kualitas pembangunan daerah yang ditandai oleh keterbatasan infrastruktur, rendahnya produktivitas, lemahnya pelayanan publik, serta kurang meratanya layanan dasar dan pelestarian budaya."** terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Kabupaten Toba dapat dikelompokkan menjadi:

2.6.1.1 Permasalahan Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Toba masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Tingkat pendidikan masyarakat belum merata, terutama di wilayah pedesaan dan daerah terpencil, yang berdampak pada rendahnya keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal. Meskipun akses pendidikan dasar relatif baik, mutu

layanan pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik berkualitas, dan sarana-prasarana sekolah masih perlu ditingkatkan.

Dari aspek kesehatan, masih terdapat kendala pada pemerataan akses layanan kesehatan, keterbatasan tenaga medis dan paramedis di fasilitas kesehatan tingkat pertama, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini berkontribusi pada angka stunting, prevalensi penyakit menular dan tidak menular, serta kualitas kesehatan ibu dan anak yang belum optimal.

Kesejahteraan masyarakat juga dipengaruhi oleh tingginya tingkat kemiskinan di beberapa wilayah, terbatasnya peluang kerja yang layak, dan rendahnya produktivitas sektor informal. Selain itu, ketimpangan akses terhadap sumber-sumber ekonomi, seperti modal usaha, teknologi, dan pasar, menghambat peningkatan pendapatan masyarakat.

Dari sisi sosial, masih terdapat kerentanan terhadap masalah sosial seperti pengangguran, dan penurunan peran generasi muda dalam pelestarian budaya lokal. Peningkatan SDM yang unggul, sehat, terampil, dan berdaya saing menjadi kunci dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba secara berkelanjutan. Uraian permasalahan sebagai berikut :

A. *Belum Optimalnya Kualitas Pendidikan*

Peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Toba masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian serius. Meskipun capaian angka partisipasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar tergolong baik, pemerataan mutu pendidikan antar wilayah belum sepenuhnya tercapai. Ketersediaan tenaga pendidik yang berkualifikasi dan memiliki kompetensi yang memadai masih terbatas, terutama di daerah terpencil. Berdasarkan data Rapor Pendidikan tahun 2023, hanya sekitar 58,05% siswa SD dan 53,03% siswa SMP yang mencapai kompetensi minimum dalam numerasi, serta 69,35% siswa SD dan 68,67% siswa SMP dalam literasi membaca. Meskipun pada tahun 2024 angka ini meningkat (Numerasi SD 72,04%, SMP 73,87%; Literasi SD 80,12%, SMP 74,5%).

Sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas penunjang pembelajaran, belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal. Hal ini berdampak pada keterbatasan pengalaman belajar yang berkualitas bagi peserta didik. Selain itu, penguasaan literasi, numerasi, dan keterampilan abad ke-21 (critical thinking, creativity, collaboration, communication) masih perlu ditingkatkan untuk menghadapi tuntutan era digital dan pasar kerja global.

Upaya peningkatan kualitas pendidikan memerlukan strategi terpadu yang mencakup peningkatan kapasitas guru, pemenuhan sarana-prasarana yang layak, penguatan kurikulum berbasis keterampilan, serta pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pendidikan anak-anak. Dengan demikian, kualitas SDM Kabupaten Toba di masa mendatang dapat lebih kompetitif dan adaptif terhadap perubahan.

B. Belum Optimalnya Derajat Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat Kabupaten Toba dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya kemajuan di beberapa indikator, namun masih terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada aspek Kesehatan Ibu dan Anak, Umur Harapan Hidup (UHH) terus mengalami peningkatan dari 73,44 tahun pada 2020 menjadi 74,54 tahun pada 2024. Meskipun demikian, Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, dari 110,99 pada 2020 naik menjadi 166,48 pada 2021, lalu menurun hingga 85 pada 2023, dan kembali meningkat menjadi 131 pada 2024. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan layanan kesehatan ibu, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, dan pemenuhan fasilitas persalinan yang memadai.

Prevalensi stunting pada balita juga menjadi tantangan serius. Meskipun angka stunting relatif stabil pada 24,8% di 2021–2022, terjadi penurunan menjadi 25% pada 2023 dan 27% pada 2024, yang berarti prevalensinya masih berada di atas target nasional yang diharapkan di bawah 14% pada 2024. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi gizi terpadu, peningkatan edukasi kesehatan keluarga, serta penguatan layanan kesehatan anak di tingkat desa/kelurahan.

Dalam penanganan penyakit menular, capaian penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) meningkat signifikan dari 33,2% pada 2020 menjadi 82,4% pada 2023, namun menurun menjadi 68,2% pada 2024. Hal ini menandakan adanya tantangan keberlanjutan dalam deteksi dini dan pengobatan TB. Sementara itu, keberhasilan pengobatan TB (treatment success rate) relatif tinggi, stabil di atas 90%, namun tetap memerlukan pengawasan ketat agar tidak terjadi resistensi obat.

Indikator eliminasi malaria sudah mencapai 100% pada 2024, yang menunjukkan keberhasilan program pengendalian malaria, namun tetap diperlukan kewaspadaan agar tidak terjadi re-emerging kasus.

Pada aspek cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terjadi peningkatan yang signifikan dari 76,5% pada 2021 menjadi 99,22% pada 2024. Meskipun sudah mendekati universal health coverage, perlu dipastikan bahwa kepesertaan ini diikuti dengan kemudahan akses layanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh penduduk.

C. Belum Optimalnya Perlindungan sosial.

Perlindungan sosial di Kabupaten Toba belum berjalan secara optimal untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan. Program bantuan sosial, baik yang bersifat reguler maupun bersyarat, belum sepenuhnya tepat sasaran akibat keterbatasan validasi dan pemutakhiran data penerima manfaat. Masih terdapat ketidaksesuaian antara jumlah masyarakat miskin menurut data statistik dengan daftar penerima bantuan, yang menyebabkan adanya exclusion error (keluarga miskin tidak menerima bantuan) dan inclusion error (keluarga mampu menerima bantuan).

Dari sisi indikator kesejahteraan, angka kemiskinan masih relatif tinggi, dengan persentase rumah tangga miskin yang belum signifikan menurun. Tingkat

pengangguran terbuka, meskipun relatif rendah dibanding rata-rata nasional, masih mempengaruhi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar. Rasio ketimpangan (Gini Ratio) juga menunjukkan adanya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan tinggi.

Indikator ketahanan sosial memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat masih rentan terhadap guncangan ekonomi, bencana alam, dan krisis kesehatan. Akses terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan belum sepenuhnya merata, terutama bagi pekerja informal dan masyarakat di wilayah terpencil. Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan memang meningkat, tetapi belum sepenuhnya mencapai universal health coverage.

Di bidang perlindungan anak dan kelompok rentan, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta permasalahan anak yang memerlukan perlindungan khusus, masih memerlukan penanganan lebih serius. Layanan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas juga belum menjangkau seluruh sasaran. 15 kasus pada 2021, dan pada tahun 2024 tercatat 11 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), masih dibutuhkan peningkatan efektivitas layanan dan edukasi masyarakat mengenai perlindungan perempuan dan anak.

Upaya optimalisasi perlindungan sosial memerlukan penguatan sistem pendataan terpadu, integrasi program bantuan, peningkatan cakupan jaminan sosial, serta sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang inklusif dan berbasis data akurat, perlindungan sosial di Kabupaten Toba dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat.

Secara umum, permasalahan utama dalam pembangunan SDM dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Toba meliputi:

1. Ketimpangan akses dan mutu layanan kesehatan, khususnya untuk ibu dan anak serta daerah tertinggal.
2. Tingginya prevalensi stunting yang masih di atas ambang batas WHO.
3. Kualitas pendidikan dasar yang belum merata, dengan sebagian besar siswa belum mencapai kompetensi minimum.
4. Rendahnya capaian pendidikan formal rata-rata, yang membatasi daya saing tenaga kerja lokal.
5. Tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, meskipun mengalami tren penurunan.
6. Kurangnya perlindungan efektif bagi perempuan dan anak, serta masih tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga.

Permasalahan-permasalahan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan lintas sektor dalam pembangunan SDM, dengan menekankan pada pemerataan layanan, peningkatan kualitas, dan perlindungan sosial yang inklusif.

2.6.1.2 Permasalahan Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur merupakan penilaian atas kondisi infrastruktur sebagai pendukung aktivitas perekonomian daerah. Tingkat kemantapan jalan kabupaten pada tahun 2024 yang sebesar 54.58% masih perlu untuk terus ditingkatkan untuk mendukung perekonomian daerah. Kondisi jalan yang baik sangat dibutuhkan pada daerah yang menggunakan transportasi darat sebagai transportasi utama. Kondisi yang ada saat ini belum mampu memberikan dukungan optimal terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi jalan yang buruk menyebabkan biaya transportasi tinggi, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan menghambat usaha percepatan penurunan angka kemiskinan. Akses air minum juga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara maksimal. Kemampuan keuangan menjadi salah satu faktor yang menyulitkan penyediaan air minum yang diperparah dengan persebaran penduduk di daerah yang luas. Sebagai daerah yang didominasi oleh perdesaan, masih banyak permukiman penduduk di Kabupaten Toba yang memiliki kepadatan rendah sehingga menambah biaya penyediaan air minum. Tidak tersedianya air baku di sebagian tempat juga menjadi hal yang menyulitkan dalam penyediaan air minum bagi masyarakat.

2.6.1.3 Permasalahan Pembangunan Ekonomi

A. Belum Optimalnya Potensi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Toba memiliki kekayaan alam, budaya, dan sejarah yang berpotensi menjadi daya tarik wisata kelas dunia, terutama dengan keberadaan Danau Toba sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) nasional. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum memberikan kontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Hal ini tercermin dari kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB yang masih rendah dan tingkat kunjungan wisatawan yang belum mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Faktor penghambat antara lain masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang pariwisata, rendahnya kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta promosi destinasi yang belum terintegrasi dengan baik. Selain itu, keterkaitan antara sektor pariwisata dengan ekonomi kreatif, seperti kuliner khas, kerajinan tangan, dan seni pertunjukan, belum terbangun kuat.

Ekonomi kreatif di Kabupaten Toba juga menghadapi tantangan berupa rendahnya inovasi produk, keterbatasan akses permodalan, serta minimnya penggunaan teknologi digital dalam pemasaran. Akibatnya, kontribusi sektor ini terhadap PAD masih terbatas, dan belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah.

B. Belum optimalnya Produktivitas sektor pertanian

Sektor pertanian merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Kabupaten Toba, baik sebagai penyedia lapangan kerja maupun sumber penghidupan masyarakat. Namun, produktivitas pertanian masih berada di bawah potensi optimalnya. Data menunjukkan bahwa produktivitas komoditas utama seperti padi, jagung, dan hortikultura masih lebih rendah dibandingkan rata-rata Provinsi Sumatera Utara, sehingga daya saing produk pertanian daerah ini kurang kompetitif di pasar.

Beberapa faktor penyebab rendahnya produktivitas antara lain keterbatasan infrastruktur irigasi, minimnya penerapan teknologi pertanian modern, rendahnya kualitas benih dan pupuk yang digunakan, serta keterbatasan akses petani terhadap pembiayaan dan pelatihan. Selain itu, pola tanam yang belum optimal dan minimnya diversifikasi komoditas menyebabkan risiko kegagalan panen lebih tinggi, terutama saat menghadapi perubahan iklim dan serangan hama penyakit. Rendahnya produktivitas pertanian berdampak pada pendapatan petani yang stagnan, terbatasnya pasokan bahan baku bagi industri pengolahan, serta melemahnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB daerah. Kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas produksi, penguatan kelembagaan petani, dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

C. Belum optimalnya kontribusi UMKM dan koperasi

UMKM dan koperasi merupakan pilar penting perekonomian daerah yang berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, kontribusi UMKM dan koperasi di Kabupaten Toba terhadap PDRB dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum optimal. Sebagian besar UMKM masih berada pada skala usaha mikro dengan keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar. Pemanfaatan platform digital untuk pemasaran masih rendah, sehingga daya jangkauan produk terbatas dan kurang mampu bersaing di pasar regional maupun nasional.

Dari sisi kualitas produk, inovasi dan diferensiasi masih minim, sehingga nilai tambah yang dihasilkan relatif kecil. Di sektor koperasi, masih banyak koperasi yang tidak aktif atau memiliki tata kelola yang lemah. Rendahnya penerapan manajemen modern, transparansi keuangan, dan inovasi layanan menghambat perkembangan koperasi sebagai lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri. Selain itu, akses pembinaan dan pendampingan usaha juga belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Toba.

Kondisi ini mengakibatkan peran UMKM dan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal belum maksimal, baik dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha maupun kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

D. Perizinan dan kemudahan berusaha belum optimal

Kemudahan berusaha merupakan salah satu faktor kunci dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, proses perizinan di Kabupaten Toba masih menghadapi sejumlah hambatan yang menyebabkan iklim investasi belum sepenuhnya kompetitif. Meskipun telah tersedia sistem perizinan berbasis elektronik (OSS), implementasinya belum optimal karena keterbatasan infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, dan koordinasi antar perangkat daerah. Proses perizinan dan non-perizinan masih memerlukan waktu relatif lama, serta belum seluruhnya terintegrasi secara digital dan transparan.

Selain itu, pelaku usaha masih menghadapi kendala seperti keterbatasan informasi terkait prosedur dan persyaratan, biaya tidak resmi, serta kurangnya fasilitas pelayanan terpadu yang efektif. Ketersediaan lahan usaha yang layak dan

infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan air bersih juga menjadi faktor penghambat minat investasi.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya realisasi investasi dibandingkan target, terbatasnya jumlah pelaku usaha baru, dan belum optimalnya kontribusi sektor usaha terhadap peningkatan PAD serta penciptaan lapangan kerja.

E. Kualitas Lingkungan Hidup belum optimal

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Toba masih menghadapi tantangan signifikan, terutama terkait dengan penurunan tutupan lahan hijau, degradasi kualitas air, dan pengelolaan limbah. Penurunan luas hutan dan lahan hijau terjadi akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali, yang berdampak pada meningkatnya risiko banjir, longsor, dan penurunan keanekaragaman hayati.

Kondisi Danau Toba sebagai ikon pariwisata dan sumber kehidupan masyarakat juga mengalami tekanan lingkungan yang cukup berat. Pencemaran air akibat limbah domestik, aktivitas perikanan, dan limbah industri rumah tangga menurunkan kualitas air, yang berpotensi mengganggu ekosistem perairan dan keberlanjutan pemanfaatannya.

Pengelolaan sampah dan limbah di tingkat daerah belum optimal. Kapasitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) terbatas, tingkat daur ulang rendah, serta kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan pembangunan daerah.

Kondisi ini berimplikasi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Toba yang masih di bawah target nasional, serta berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mendukung kegiatan ekonomi, pariwisata, dan kehidupan masyarakat.

F. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum Optimal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toba menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, namun kontribusinya terhadap total pendapatan daerah masih relatif rendah. Ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat masih tinggi, sehingga kemandirian fiskal daerah belum tercapai.

Struktur PAD juga masih didominasi oleh pajak daerah dan retribusi daerah, sementara potensi dari sumber-sumber lain seperti pengelolaan aset daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum tergali secara optimal.

Beberapa faktor yang menjadi hambatan antara lain: rendahnya basis data objek pajak dan retribusi yang terintegrasi, lemahnya penegakan aturan pemungutan pajak dan retribusi, serta keterbatasan inovasi dalam penciptaan sumber pendapatan baru. Selain itu, kontribusi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) masih minim akibat rendahnya kinerja dan daya saing.

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang fiskal daerah untuk membiayai program prioritas pembangunan, termasuk pengentasan kemiskinan, peningkatan infrastruktur, dan penguatan layanan publik.

G. Produktivitas ekonomi Kabupaten Toba masih berada pada tingkat yang rendah bila dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Hal ini terlihat dari PDRB ADHB per kapita tahun 2023 yang hanya sebesar 45,154 juta rupiah, dibandingkan dengan provinsi yang mencapai 68,306 juta rupiah. Produktivitas yang rendah akan menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi dan menjadi penghambat dalam usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan. Pengelolaan potensi ekonomi yang belum maksimal membuat produksi rendah, sehingga produktivitas menjadi rendah. Sebagai daerah yang mengandalkan pertanian dan juga bagian dari Destinasi Pariwisata Prioritas Nasional, potensi pada sektor pertanian dan pariwisata belum memberikan output optimal terhadap perekonomian daerah. Pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan yang belum maksimal, kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan, dan sistem pertanian yang belum menerapkan teknologi yang tepat, menjadi penghambat peningkatan produktivitas di sektor pertanian. Pada sektor pariwisata, masih diperlukan penataan objek-objek wisata prioritas yang didukung dengan peningkatan sumber daya manusia serta penyelenggaraan event-event pariwisata yang teratur dan mampu menarik wisatawan nusantara dan mancanegara.

2.6.1.4 Permasalahan Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan di Kabupaten Toba telah menunjukkan kemajuan dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik, namun masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat terwujudnya pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif.

A. Belum optimalnya implementasi SAKIP

Hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menunjukkan bahwa meskipun terjadi tren peningkatan nilai dari tahun ke tahun, capaian kinerja masih berada pada kategori CC selama tiga tahun berturut-turut (50,10 pada tahun pertama; 53,85 pada tahun kedua; 55,42 pada tahun ketiga). Peningkatan signifikan baru terlihat pada tahun keempat dengan nilai 60,04 yang masuk kategori B. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih belum optimal dan konsisten berada pada level menengah bawah dalam periode awal, yang dapat disebabkan oleh:

- Kualitas perencanaan kinerja yang belum sepenuhnya terukur dan selaras dengan sasaran strategis daerah.
- Pemantauan dan evaluasi kinerja yang kurang efektif, sehingga perbaikan tidak cepat teridentifikasi dan diimplementasikan.
- Keterbatasan kapasitas SDM dalam pengelolaan kinerja, termasuk pemahaman indikator, penyusunan laporan, dan tindak lanjut hasil evaluasi.
- Integrasi program dan anggaran yang belum optimal, mengakibatkan output dan outcome tidak maksimal terhadap pencapaian sasaran.

Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kepercayaan publik, kurangnya efektivitas belanja daerah, dan belum tercapainya target kinerja pembangunan secara optimal.

B. Belum optimal transformasi dan digitalisasi pelayanan public

Di bidang pelayanan publik, penerapan sistem layanan berbasis digital (e-government) masih belum merata dan terintegrasi, sehingga kualitas layanan belum konsisten di seluruh unit kerja. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan masih terbatas, terutama di wilayah terpencil.

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menunjukkan tren peningkatan dari 1,59 pada tahun pertama menjadi 2,95 pada tahun kelima. Meskipun terdapat kemajuan, nilai tersebut masih berada pada kategori sedang dan belum mencapai standar ideal penerapan SPBE secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa digitalisasi proses pemerintahan belum sepenuhnya terintegrasi dan belum merata di seluruh perangkat daerah, yang dapat dipengaruhi oleh:

- Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi di beberapa sektor pelayanan publik.
- Rendahnya interoperabilitas sistem antar perangkat daerah, sehingga data dan layanan belum sepenuhnya terhubung.
- Kurangnya kompetensi SDM dalam pemanfaatan dan pengelolaan aplikasi pemerintahan digital.

Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik menunjukkan nilai awal 2,61 (kategori C) dan meningkat menjadi 3,81 (kategori B) pada tahun kelima. Walaupun peningkatan ini cukup signifikan, capaian tersebut masih memerlukan perbaikan untuk mencapai kategori yang lebih tinggi. Permasalahan yang memengaruhi kinerja pelayanan publik antara lain:

- Standar pelayanan yang belum seragam di seluruh unit pelayanan.
- Keterbatasan inovasi pelayanan, terutama berbasis digital, yang menghambat percepatan dan kemudahan akses.
- Pengelolaan pengaduan masyarakat yang belum maksimal sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital dan peningkatan mutu pelayanan publik masih memerlukan upaya perbaikan yang terencana dan terintegrasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

C. Belum optimalnya Profesionalitas ASN

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia aparatur daerah masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kompetensi teknis maupun pemahaman regulasi. Pengawasan internal dan eksternal juga belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) menunjukkan tren peningkatan dari 46,58 pada tahun kedua menjadi 78,1 pada tahun kelima. Meskipun terdapat kemajuan signifikan, capaian awal yang berada di bawah 50 mencerminkan adanya permasalahan mendasar terkait kapasitas dan kompetensi

ASN di awal periode, yang dapat menghambat kinerja organisasi perangkat daerah. Permasalahan yang diidentifikasi antara lain:

- Kualitas kompetensi ASN yang belum merata, khususnya pada aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai standar jabatan.
- Keterbatasan pengembangan karier dan pelatihan berbasis kebutuhan, sehingga peningkatan kompetensi tidak sepenuhnya terarah.
- Sistem penilaian kinerja yang belum optimal, sehingga penghargaan dan sanksi belum berjalan efektif untuk memotivasi peningkatan profesionalitas.
- Distribusi dan penempatan ASN yang belum sepenuhnya mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kebutuhan organisasi.

Walaupun tren peningkatan menunjukkan upaya perbaikan yang nyata, masih diperlukan strategi yang lebih terarah dan berkelanjutan untuk memastikan seluruh ASN memiliki profesionalitas tinggi, guna mendukung tata kelola pemerintahan yang efektif dan pelayanan publik yang berkualitas.

Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya capaian reformasi birokrasi, Indeks Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance Index), dan Indeks Kepuasan Masyarakat. Daya saing Kabupaten Toba yang dinilai dengan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) belum berada pada tingkat yang optimal. Nilai IDSD Kabupaten Toba sebesar 3,18 masih berada di bawah nilai rata-rata kabupaten/kota di Sumatera Utara (3,58), nilai provinsi (3,44) dan nilai nasional (3,31). Dari 12 pilar IDSD, terdapat 4 pilar yang perlu mendapat fokus utama yaitu Infrastruktur, Sistem Keuangan, Ukuran Pasar, dan Dinamisme Bisnis karena skornya yang masih rendah.

2.6.1.5 Upaya Pelestarian Budaya dan Kearifan Lokal Belum Optimal

Kabupaten Toba sebagai bagian dari kawasan Danau Toba memiliki potensi budaya dan kearifan lokal yang sangat kaya, mulai dari seni, bahasa, arsitektur tradisional, nilai-nilai adat Batak Toba, hingga ritual dan upacara keagamaan yang sarat makna. Budaya ini merupakan identitas kolektif masyarakat sekaligus aset strategis dalam mendukung pembangunan pariwisata berbasis kearifan lokal.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa upaya pelestarian budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Toba belum dilakukan secara optimal. Transformasi sosial akibat modernisasi dan globalisasi telah menggeser orientasi masyarakat, khususnya generasi muda, dari nilai-nilai budaya tradisional menuju budaya populer yang cenderung pragmatis. Bahasa daerah mulai jarang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, seni dan musik tradisional mulai ditinggalkan, serta peran lembaga adat mengalami penurunan dalam pengambilan keputusan sosial kemasyarakatan.

Selain itu, belum terdapat kebijakan daerah yang kuat, terpadu, dan berkelanjutan untuk mendukung pelestarian budaya. Kegiatan pelestarian cenderung bersifat seremonial dan belum terintegrasi dengan sistem pendidikan, pembangunan pariwisata, dan ekonomi kreatif. Minimnya anggaran, kurangnya pendataan warisan budaya, serta lemahnya kolaborasi antar pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat adat, lembaga pendidikan, dan pelaku budaya) juga menjadi hambatan signifikan.

Dari sisi pembangunan ekonomi, budaya lokal belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai penggerak sektor unggulan seperti pariwisata dan industri kreatif. Padahal, dengan pendekatan yang tepat, pelestarian budaya dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jika tidak ditangani secara komprehensif, kondisi ini berisiko menyebabkan degradasi nilai-nilai luhur masyarakat Toba, hilangnya identitas budaya, serta melemahnya daya saing daerah yang sangat bergantung pada karakteristik budaya sebagai keunggulan komparatifnya.

2.6.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.

2.6.2.1 Isu Global

Beberapa isu global yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toba 2025-2029, diantaranya:

A. Perkembangan Demografi Global

Menurut data World Population Prospects (2022), populasi dunia saat ini mencapai lebih dari 7,0 miliar jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat hingga 9,7 miliar jiwa di tahun 2050 (RPJPN 2025-2045). Kondisi ini memberikan tantangan terkait penyesuaian tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam dan lahan. Sementara itu, kebutuhan terhadap pangan, energi, dan air akan semakin meningkat seiring dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Dampak dari hal tersebut adalah diperlukan penyesuaian sektor produksi untuk mendorong rentang kehidupan (life-span) yang semakin panjang. Meskipun jumlah penduduk terus bertambah, namun laju pertumbuhannya terus melambat. Hal ini mempengaruhi proporsi demografi dimana bertambahnya kelompok penduduk usia tua (aging population) dan tingginya jumlah penduduk usia muda akan memberikan tantangan seperti kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan.

Fenomena tidak memiliki anak (childfree), menunda pernikahan, dan perilaku kehidupan sesama jenis telah menyebabkan turunya angka kelahiran. Perkawinan di bawah umur dan akses terhadap media digital yang tidak terkendali berisiko meningkatkan kekerasan, perdagangan manusia, adiksi terhadap pornografi, perilaku menyimpang, dan perilaku berisiko anggota keluarga. Hal ini memengaruhi kualitas keluarga dan menjadi tantangan bagi keluarga dalam memaknai dan menjalankan fungsinya secara optimal.

Pada tahun 2025, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 285,20 juta orang dan berada di urutan ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbanyak setelah USA,

China dan India. Proyeksi pada tahun 2045, jumlah penduduk Indonesia mengalami peningkatan menjadi 324,05 juta orang dan berada di urutan ke-6 terbesar setelah Pakistan, Nigeria, USA, China dan India. Dengan adanya bonus demografi akan menjadi tantangan untuk mengoptimalkan kondisi tersebut dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung pembangunan di segala bidang.

B. Geopolitik dan Geoekonomi

Perkembangan geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tantangan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Perang antara Rusia dan Ukraina meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan dikawasan lainnya. Perang ini juga telah menyebabkan kerugian bagi negara lain seperti tekanan inflasi, krisis energi dan pangan, mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan dan berpotensi meningkatnya ketegangan antarnegara serta memungkinkan munculnya konflik atau perang berkelanjutan di masa depan.

Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang memicu ketidakpastian geoekonomi. Menghadapi kondisi ini diperlukan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan di daerah, nasional maupun internasional. Pada tahun 2015, negara berkembang menyumbang 55% dari output dunia, meningkat dari 34% pada tahun 1980. Pada tahun 2050, nilai output negara-negara berkembang diperkirakan meningkat mencapai 71% dari total nilai output dunia dengan negara Asia sebagai pendorong utama mencapai 54% dari total nilai output global. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya pendapatan per kapita negara-negara berkembang termasuk Indonesia walaupun masih dibawah dari negara-negara maju.

Perubahan struktur perekonomian, utamanya di negara pengimpor komoditas menurunkan permintaan atas komoditas. Kesiapan menghadapi perubahan atas komoditas akan menentukan pertumbuhan ekonomi negara berkembang di masa mendatang. Sebagai sumber pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang di masa depan adalah institusi ekonomi. Kebijakan makroekonomi yang kredibel dan berdasarkan prinsip kehati-hatian telah menjadi penompang pertumbuhan ekonomi negara berkembang selama ini dan menjadi salah satu pilar utama di masa mendatang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki SDM dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Reformasi dan perbaikan iklim usaha akan mendukung terbangunnya struktur perekonomian yang berdaya saing dan berkualitas.

Pertumbuhan sektor industri manufaktur akan menjadi penompang pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan pekerjaan. Perbaikan investasi dan perkembangan sektor jasa bernilai tambah tinggi akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi di negara berkembang termasuk Indonesia. Kebijakan perdagangan internasional yang terbuka, iklim usaha dan investasi yang mendukung inovasi, serta kapasitas

sumber daya manusia yang meningkat menjadi faktor penentu bagi negara berkembang untuk mengejar ketertinggalan teknologi percepatan pertumbuhan ekonominya.

C. Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi diberbagai bidang kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat seperti Internet of Things (IoT), blockchain, Hyper Connection, Artificial Intellegence (AI), Distributed Ledger Technology (DLT), Production Lifecycle Management, Robotic Process Automation (RPA), Edge Computing Auto Robotic System, SD, dan Future Technologies.

Kemampuan adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan perkembangan teknologi perlu ditopang dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik. Hal ini perlu didorong agar mampu memanfaatkan perkembangan teknologi secara optimal yang diiringi dengan meminimalkan risiko yang menyertai terjadinya disrupsi teknologi. Digitalisasi usaha dapat mendorong peningkatan produktivitas serta pasar usaha, namun tingkat pemanfaatannya masih terbatas dan belum merata disebabkan faktor SDM, permodalan, dan infrastruktur penunjang dan kondisi perlu diatasi. Perubahan teknologi mencakup percepatan otomasi di sebagian besar aktivitas industri, digitalisasi yang mendukung konektivitas, material maju, rekayasa genetika dan bioteknologi, teknologi lanjutan, inovasi mesin multifungsi yang mengintegrasikan proses produksi komponen dan produk akhir untuk rantai pasok terlokalisasi, serta teknologi hijau, termasuk untuk penyediaan energi baru terbarukan.

Inovasi pengajaran dan pembelajaran yang berbasis artificial intelligensi (AI) menjadi sebuah keniscayaan sehingga transfer ilmu pengetahuan dan pengembangan kompetensi dapat berlangsung kontinu, tanpa terbatas ruang dan waktu. Dengan pemanfaatan AI, penyelenggaraan pendidikan akan menjadi lebih efisien, efektif, transparan dan ekonomis.

Dengan perkembangan teknologi menyebabkan jenis pekerjaan tergantikan oleh teknologi. Pada saat ini, kecerdasan buatan (artificial intelligence) dapat menggantikan tugas manusia seperti berpikir, menulis artikel dan membuat karya seni grafis. Industri media termasuk yang paling berdampak dan ke masa depan pekerjaan kreatif (seni dan hiburan) dalam jangka panjang berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh kemajuan teknologi dengan perkembangan pesat kecerdasan buatan. Perkembangan teknologi juga berdampak pada pekerjaan yang tidak mampu beradaptasi dengan pola kerja konvensional seperti properti perkantoran dan real estate. Pekerjaan jarak jauh (remote working) menciptakan peluang di sektor TIK dan mendorong perkembangan sektor lain dengan pola work from anywhere (WFA).

Perkembangan teknologi dapat berdampak besar terhadap cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang baru dalam pembangunan ekonomi, mendorong inovasi dan transformasi tata kelola melalui peningkatan kinerja pelayanan publik, pembuatan kebijakan berbasis bukti, serta efisiensi sumber daya, seperti

pembenahan proses perumusan kebijakan, proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih terencana, terpadu dan sistematis serta penataan kelembagaan.

D. Konstelasi Perdagangan Global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asi-Afrika. Perekonomian negara berkembang diperkirakan akan meningkat tinggi dan mendominasi perekonomian dunia menggantikan dominasi negara-negara maju. Pertumbuhan perdagangan negara berkembang akan didorong oleh perdagangan intra-Asia yang menunjukkan tren yang berlanjut terutama dari Tiongkok, India, dan negara-negara ASEAN. Kolaborasi produksi bersama internasional dengan skema Global Production Networks/GPN) dan rantai pasok global (global value chain/GVC) semakin menguat dan terdiversifikasi. Manfaat GPN dan GVC akan mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih murah dan peningkatan investasi asing.

Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Kemajuan teknologi digital mendorong kompleksitas dan diversifikasi produksi, mengurangi biaya transaksi dan mempercepat perubahan dalam struktur perdagangan.

Kerja sama kawasan menciptakan pusat perdagangan strategis seperti Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, SDA yang melimpah, dan posisi geografis yang strategis akan menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di kawasan Asia-Pasifik yang mendorong ketersediaan rantai pasok global, investasi, serta inovasi dan teknologi.

E. Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses SDA (energi, air dan pangan) diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Bertambahnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi yang menyebabkan peningkatan kebutuhan SDA diantaranya air, pangan dan energi, mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik. Tingkat persaingan SDA akan bergantung pada ketatnya faktor permintaan dan penawaran, diantaranya efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi SDA, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

F. Perubahan Iklim, Daya Dukung dan Daya Tampung

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi, serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global diperkirakan akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Tiga krisis global ini (The Triple Planetary Crisis) akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan seperti lingkungan, kesehatan, penghidupan masyarakat dan laju pembangunan jika masyarakat tidak melakukan perubahan. Hal ini berimplikasi terhadap tuntutan untuk beralih ke aktivitas

ekonomi yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di berbagai sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian serta limbah dan penerapan ekonomi sirkular.

Untuk mengendalikan tiga krisis global, kebijakan dan strategi global akan diarahkan pada pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon. Pelaksanaan pembangunan yang lebih hijau melalui penerapan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon merupakan arah pembangunan global di masa mendatang.

Suhu bumi yang semakin panas saat ini telah masuk pada kategori “kode merah bagi manusia” dengan tren kenaikan suhu rata-rata global tahun 2022 telah mencapai 0,89 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu tahun 1900 (NOAA, 2023) dan dikhawatirkan akan terus meningkat dan melampaui 1,5 derajat Celcius di tahun 2100. Kenaikan tren temperatur disebabkan oleh peningkatan konsentrasi GRK dari berbagai aktivitas manusia dan menyebabkan perubahan iklim yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan manusia seperti kenaikan permukaan air laut berkisar 0,7-0,9 cm/tahun.

Perubahan iklim berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi dan mengakibatkan 319 kabupaten/kota di Indonesia terutama di sektor kelautan dan pesisir, air, pertanian, dan kesehatan. Indonesia turut berkontribusi dalam emisi GRK global dimana tahun 2020, Indonesia berkontribusi sebesar 1,05 GtCO₂e atau 2,67 persen dari total emisi GRK global yang diestimasikan sebesar 39,32 GtCO₂e. Sumber emisi GRK terutama dari sektor energi, diikuti oleh sektor kehutanan dan penggunaan lahan, limbah, pertanian, serta industri dan penggunaan produk. Emisi GRK Indonesia diperkirakan akan terus meningkat apabila paradigma pembangunan tidak diubah. Kebijakan yang perlu dikembangkan adalah pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim penting dan mendesak guna mengurangi risiko perubahan iklim.

Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Daya dukung lahan hutan diperkirakan akan menurun seiring dengan proyeksi hilangnya luas hutan sebesar 10 juta Ha dari tahun 2025 sampai tahun 2060 (BaU). Hal ini dipengaruhi oleh pengurangan luas tutupan hutan dalam kawasan konservasi sebesar 700 ribu hektare selama 2020-2045 dan luas lahan sawah akan terus menurun hingga 7 juta hektare yang diiringi menurunnya tingkat produktivitas menjadi 7 ton/hektare akibat degradasi tanah. Daya dukung ketersediaan air mengalami tren menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Indonesia. Sampai tahun 2045, tingkat ketersediaan air di wilayah Jawa, sebagian Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi bagian selatan, sudah berada pada tingkat langka atau kritis. Daya dukung ketersediaan energi dan sumber daya mineral cukup besar tetapi belum sepenuhnya dioptimalkan. Daya dukung lahan dan air dalam menopang ketahanan pangan semakin menurun. Ketersediaan lahan mengalami tekanan dengan semakin meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Ketersediaan dan pasokan air untuk penyediaan pangan akan menurun, terutama akibat persaingan penggunaan lain dan penurunan

keanekaragaman hayati berdampak pada penurunan keragaman sumber pangan akibat hilangnya habitat, peningkatan pencemaran, dan perubahan iklim. Daya tampung kualitas air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Daya tampung kualitas udara telah melampaui standar baku mutu, daya tampung lahan mengalami penurunan secara kapasitas dan kualitas. Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup diperkirakan akan menurun akibat kualitas air dan tanah menurun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal seiring aktivitas perekonomian terus meningkat.

2.6.2.2 Isu Strategis Pembangunan Nasional

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029, beberapa isu nasional yang mempengaruhi dan perlu dipertimbangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, yaitu:

A. Rendahnya Produktivitas

Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat. Berdasarkan rilis laporan Asian Productivity Organization (2024), rata-rata produktivitas Indonesia yang tercermin dari Total Factor Productivity selama tahun 2015-2022 hanya tumbuh positif sebesar 60 basis poin dari periode sebelumnya tahun 2010-2015 (-0,9 persen ke -0,3 persen).

Kondisi produktivitas yang rendah di antaranya disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih tertinggal, terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan teknologi, dan inovasi yang tertinggal, serta kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah. Rendahnya produktivitas tenaga kerja perempuan dipengaruhi oleh lingkungan kerja yang belum mendukung mereka untuk masuk dan bertahan di pasar kerja, antara lain norma sosial budaya yang membebankan peran pengasuhan dan tugas domestik pada perempuan, jam kerja yang kurang fleksibel, serta minimnya akses layanan daycare berkualitas yang terjangkau. Produktivitas yang rendah juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung melambat. Selama tahun 2005-2010, ekonomi Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,7 persen. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi melambat menjadi rata-rata 4,7 persen selama tahun 2010-2015. Pertumbuhan ekonomi meningkat kembali mencapai rata-rata 5,0 persen selama tahun 2015-2019 dan 5,05 persen pada tahun 2023 serta turun menjadi 5,03 persen di tahun 2024. Selain itu, produktivitas yang rendah menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi potensial. Kondisi inilah yang menyebabkan ekonomi Indonesia sulit tumbuh lebih cepat dan stagnan dalam rentang 5,0 persen.

B. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan Asian Productivity Organization (2024), produktivitas tenaga kerja Indonesia yang diukur dari Produk Domestik Bruto per tenaga kerja tahun 2022 relatif rendah, yaitu sebesar US\$28.600 per pekerja. Angka tersebut masih tertinggal jauh di bawah Amerika Serikat US\$149.100 per pekerja dan di bawah

rata-rata kawasan Association of Southeast Asian Nations sebesar US\$30.200 per pekerja. Tantangan peningkatan produktivitas tenaga kerja di antaranya disumbang oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dicerminkan dari capaian rata-rata nilai Programme for International Student Assessment siswa Indonesia untuk semua aspek (membaca, matematika, dan sains) sebesar 369,3 pada tahun 2022. Angka tersebut menurun dibanding tahun 2018 dengan nilai rata-rata 382 serta masih tertinggal dibandingkan siswa dari negara-negara The Organization for Economic Co-operation and Development sebesar 488,33.

Pembangunan manusia unggul juga dihadapkan pada tantangan rendahnya daya saing tenaga kerja yang ditunjukkan dengan rendahnya kualifikasi pendidikan tenaga kerja. Berdasarkan pada kualifikasi pendidikan, data Survei Angkatan Kerja Nasional Agustus 2024 menunjukkan sebesar 52,32 persen penduduk yang termasuk angkatan kerja merupakan lulusan pendidikan rendah (sekolah menengah pertama/ madrasah tsanawiyah sederajat ke bawah), sedangkan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan menengah (sekolah menengah atas/ sekolah menengah kejuruan sederajat) sebesar 34,82 persen, dan penduduk yang termasuk angkatan kerja berpendidikan tinggi sebesar 12,86 persen. Kualifikasi pendidikan tenaga kerja yang rendah berdampak pada keterserapan tenaga kerja di pasar kerja, hanya 41,23 persen pekerja yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi. Oleh karena itu, untuk mencapai pembangunan yang optimal, Indonesia harus mampu mengatasi berbagai dampak risiko ini dan melakukan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. Pergeseran Struktur Kelas Masyarakat

Calon kelas menengah merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlahnya meningkat sebesar 8,65 juta orang sehingga mencapai 137,5 juta orang atau sekitar 49,2 persen dari total populasi. Di sisi lain, jumlah warga yang rentan miskin juga meningkat sebanyak 12,72 juta orang dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2024, angka ini mencapai 67,69 juta atau 24,33 persen dari total populasi (Badan Pusat Statistik, 2024). Meskipun jumlah masyarakat calon kelas menengah dan yang rentan miskin terus bertambah, populasi kelas menengah justru mengalami penurunan. Risiko pergeseran status ini, dari kelas menengah menjadi calon kelas menengah dan rentan miskin, disebabkan oleh tingginya angka pemutusan hubungan kerja. Pada Agustus 2024, tercatat 46.420 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (Kementerian Ketenagakerjaan, 2024) dan angka ini diperkirakan akan terus meningkat.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja adalah rendahnya daya beli masyarakat. Hal ini terlihat dari deflasi yang terjadi pada komponen harga yang diatur pemerintah dan harga bergejolak. Menurut laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (2024), komponen harga yang diatur pemerintah mengalami deflasi dari 1,68 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,40 persen pada September 2024. Sementara itu, komponen harga bergejolak mengalami deflasi yang

signifikan, dari 3,04 persen pada Agustus 2024 menjadi 1,43 persen pada September 2024. Daya beli masyarakat yang rendah berimplikasi pada menurunnya permintaan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh industri. Dengan permintaan yang lemah, industri tidak dapat memenuhi biaya operasional, yang pada akhirnya memaksa untuk mengurangi jumlah karyawan atau bahkan menutup usaha.

D. Kebutuhan Hidup Tinggi pada Usia Produktif

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) diproyeksikan mencapai 147,71 juta jiwa. Hal ini menjadi tantangan pembangunan, yaitu tingginya kebutuhan hidup masyarakat dengan terbatasnya ketersediaan sumber daya alam (pangan, energi, dan air) serta lahan. Selain itu, terdapat kewajiban terhadap pemenuhan perlindungan sosial, jaminan kesehatan, pendidikan, dan pembukaan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi dalam upaya pemenuhan kebutuhan penduduk yang besar.

E. Krisis Lingkungan

Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan (triple planetary crisis) yang mengancam masa depan bumi dan manusia, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Sekitar 50-75 persen dari populasi global berpotensi terdampak kondisi iklim yang mengancam jiwa pada tahun 2100 (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2022). Kerugian ekonomi akibat risiko bencana diperkirakan sebesar Rp22,8 triliun per tahun (Kementerian Keuangan, 2023), sementara jumlah kematian selama 10 tahun terakhir mencapai 9.176 orang (Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2024).

Sekitar satu juta spesies tumbuhan dan hewan menghadapi ancaman kepunahan (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, 2019). Sementara itu, risiko polusi udara merupakan penyebab penyakit dan kematian dini terbesar di dunia, serta menyebabkan hingga 4,2 juta kematian setiap tahun (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2022). Indonesia merupakan negara dengan tingkat polusi tertinggi di Asia Tenggara dengan konsentrasi particulate matter 2,5 (World Health Organization, 2021). Sekitar 70 persen dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar (Badan Pusat Statistik, 2021). Pada tahun 2020, sebanyak 40,3 persen timbulan sampah merupakan sampah makanan dan diproyeksikan akan menghasilkan 344 kg/kapita/tahun pada tahun 2045 (Proyeksi Business-As-Usual, Report Food and Loss Waste in Indonesia, 2021). Perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, dan polusi udara juga secara langsung akan menyebabkan krisis sumber daya alam.

Ekstraksi sumber daya alam di dunia meningkat tiga kali lipat dalam lima dekade terakhir dengan pertumbuhan lebih dari 2,3 persen per tahun. Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekstraksi pertambangan terbesar ke-8 di dunia (United Nations Environment Programme, 2023), turut berkontribusi dalam krisis tersebut.

Data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tahun 2022 menunjukkan masih terdapat 2.741 lokasi tambang ilegal yang berpotensi merusak lingkungan. Pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi yang tinggi serta kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi air, dan pangan) di tingkat global berpotensi mendorong terjadinya kompetisi dan persaingan geopolitik di berbagai wilayah.

Risiko Triple Planetary Crisis berimplikasi pada pencapaian target pembangunan, baik jangka menengah maupun jangka panjang dan tuntutan untuk beralih ke aktivitas ekonomi yang rendah emisi gas rumah kaca di berbagai sektor, seperti sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, serta limbah dan penerapan ekonomi sirkuler. Untuk itu, penyelarasan aspek pertumbuhan ekonomi dan lingkungan menjadi hal yang perlu diprioritaskan.

F. Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan risiko geopolitik dapat berdampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan dan tatanan global. Salah satu tantangan geopolitik yang perlu diantisipasi Indonesia adalah eskalasi persaingan antarnegara adidaya yang meluas dan memunculkan kekuatan baru. Kemunculan berbagai kekuatan baru telah memengaruhi perkembangan kondisi di kawasan maupun tatanan global, serta sikap Indonesia dalam dunia internasional.

Perang antara Rusia dan Ukraina telah meningkatkan kewaspadaan global terhadap potensi konflik geopolitik ke depan di kawasan lainnya, seperti konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, dan Laut China Selatan. Perang menyebabkan kerugian, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi negara-negara lainnya, seperti tekanan inflasi global yang tinggi serta adanya krisis energi dan pangan. Selain itu, perang juga mendorong negara-negara untuk mencari instrumen militer demi melindungi kedaulatan mereka. Hal tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan antarnegara sehingga memungkinkan terjadinya kembali konflik atau perang di masa depan. Persaingan geopolitik terutama di kawasan Indo Pasifik yang dekat dengan Indonesia semakin meningkat dan meluas. Kawasan Indo-Pasifik muncul karena adanya dinamika geopolitik yang berkembang dan melibatkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik sebagai zona maritim. Nilai strategis Kawasan Indo-Pasifik yang diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia telah menarik perhatian banyak pihak. Tentu saja hal tersebut berdampak pada penciptaan persaingan pengaruh antarnegara, baik yang berada di dalam maupun luar kawasan.

Selanjutnya, ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi di tingkat global. Ekonomi dunia diproyeksikan tumbuh pada 3,2 persen selama 2024 dan 2025 (International Monetary Fund, 2024). Sementara itu, inflasi global diperkirakan menurun secara bertahap dari 6,8 persen pada 2023 menjadi 5,9 persen pada 2024 dan 4,5 persen pada 2025 (International Monetary Fund, 2024). Di sisi lain, prospek perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh dinamika ekonomi global melalui jalur

keuangan dan jalur perdagangan, tercermin dari tingginya tingkat suku bunga global serta ketidakpastian akibat gejolak geopolitik. Dalam jangka menengah, situasi suku bunga global yang relatif tinggi diperkirakan akan tetap berlanjut terlepas dari pemangkasan yang dilakukan oleh The Federal Reserve. Peningkatan laju inflasi mendorong bank Central di seluruh dunia untuk menaikkan suku bunga acuan secara bersamaan sejak semester kedua tahun 2023, seperti Bank of England dan The Federal Reserve. Kenaikan suku bunga acuan tersebut juga dilakukan di negara-negara anggota G20, seperti Brasil, India, dan Indonesia. Kenaikan suku bunga acuan yang dilakukan secara bersamaan oleh bank-bank sentral di seluruh dunia akan berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan berpotensi memicu resesi ekonomi global. Faktor gejolak geopolitik, tekanan inflasi, suku bunga yang tinggi, pelepasan dolar Amerika Serikat, pergeseran belanja konsumen dari barang ke jasa, penurunan harga komoditas, serta tekanan harga pangan akibat kenaikan biaya input pertanian dan pertumbuhan populasi global, serta perubahan iklim juga menyebabkan perlambatan aktivitas perdagangan global pada tahun 2023 dan menjadi tantangan berikutnya. Hal ini tercermin dari penurunan Battic W Index level menjadi rata-rata indeks sebesar 1.393,56 dibandingkan rata-rata indeks 1.930,86 di tahun 2022. Adapun perlambatan aktivitas perdagangan pada tahun 2023 utamanya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain perlambatan volume perdagangan pada tahun setelah mengalami pertumbuhan pada tahun 2021 dan 2022. Dengan gambaran tersebut, tantangan-tantangan yang bersifat tanpa batas membutuhkan kolaborasi yang erat dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, baik di dalam negeri maupun internasional serta membutuhkan arah kebijakan yang solid untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

G. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

Pemberantasan korupsi merupakan isu strategis yang membutuhkan sinergi dari semua pemangku kepentingan. Hal ini menjadi prasyarat upaya percepatan pencapaian sasaran pembangunan nasional, mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, serta meningkatkan investasi. Hal ini merupakan pijakan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi.

Dalam lima tahun terakhir, Indeks Persepsi Korupsi/ Corruption Perception Index Indonesia menunjukkan tren penurunan dari 40 pada tahun 2019 menjadi 34 pada tahun 2022 dan stagnan di angka yang sama pada 2023 (peringkat 115 dari 180 negara). Adapun pada indikator Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia, meski mengalami tren perbaikan pada periode 2019-2022, namun capaian tersebut sedikit mengalami tantangan pada tahun berikutnya. Hal ini mencerminkan risiko dalam pencapaian pemberantasan korupsi. Selanjutnya, tata kelola data memainkan peran kunci dalam mendukung pembangunan nasional, terutama dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat, efektif, dan berkelanjutan. Tingkat keamanan data privasi dan siber untuk data pemerintah dan nasional belum sepenuhnya dapat mengantisipasi terjadinya risiko peretasan dan

pembajakan serta pengelolaan data dalam skala besar yang dapat menciptakan potensi pelanggaran privasi dan ancaman keamanan.

2.6.2.3 Isu Strategis Wilayah Sumatera

Sesuai dengan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029, isu-isu strategis pembangunan Provinsi Sumatera Utara yang berpengaruh terhadap pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, diantaranya:

A. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia dihadapkan pada pembangunan dan pembentukan modal manusia. Modal manusia tersebut dapat terwujud apabila setiap individu sehat, terdidik, dan terlindungi dari berbagai risiko siklus hidup. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan Transformasi Sosial yang menitikberatkan pada penuntasan pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Transformasi Sosial diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup sehingga mampu melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul, dan berdaya saing. Pembangunan Kesehatan dihadapkan pada peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, pengendalian penyakit, penguatan dan pemerataan kapasitas ketahanan kesehatan, serta responsiveness/ketanggapan sistem kesehatan di seluruh wilayah. Pembangunan pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas agar dapat mendukung percepatan pembangunan di berbagai bidang sedangkan Perlindungan sosial yang adaptif ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya sistem demokrasi masih prosedural ditandai dengan kapasitas dan kemandirian masyarakat sipil belum kuat; belum terjaminnya kebebasan dan kesetaraan sosial, ekonomi, dan politik; informasi dan komunikasi publik belum merata; permasalahan politik elektoral seperti politik uang, politisasi isu SARA; nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi yang belum terinternalisasi serta sistem kaderisasi partai politik belum maksimal. Selain hal di atas nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan menjadi dimensi dasar dalam proses pembangunan kualitas sumber daya manusia. Agama dan kebudayaan harus menjadi landasan spiritual, etika, dan moral dalam penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Dalam hal ini, sumber daya manusia berperan sebagai katalisator transformasi pembangunan dengan dukungan keluarga sebagai institusi internalisasi nilai positif dan pembangunan integritas karakter individu. Selain itu, perlu dipastikan terselenggaranya kebijakan pemerintah yang ramah gender serta inklusif bagi kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas dan lanjut usia, untuk pemerataan pembangunan dan layanan dasar yang optimal.

B. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas ke destinasi wisata unggulan seperti Danau Toba, Nias, dan Bukit Lawang. Untuk meningkatkan daya tarik wisata, diperlukan pembangunan dan perbaikan jalan, bandara, serta transportasi publik yang lebih terintegrasi. Selain itu, penyediaan fasilitas pendukung seperti hotel, restoran, dan pusat informasi wisata yang berkualitas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kenyamanan wisatawan dan memperpanjang durasi kunjungan mereka. Selain infrastruktur, penguatan ekonomi kreatif juga menjadi kunci dalam mendukung sektor pariwisata. Pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang bergerak di bidang kerajinan tangan, kuliner khas, serta seni pertunjukan perlu mendapatkan pembinaan dan akses permodalan yang lebih baik. Digitalisasi usaha ekonomi kreatif, seperti pemasaran berbasis e-commerce dan promosi melalui platform media sosial, juga harus diperkuat agar produk-produk lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, ekonomi kreatif tidak hanya mendukung industri pariwisata tetapi juga memberikan peluang kerja yang lebih besar bagi masyarakat lokal. Keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya harus menjadi fokus dalam pengembangan sektor ini. Pariwisata berbasis alam dan budaya perlu dikembangkan dengan tetap menjaga ekosistem dan kearifan lokal agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Edukasi kepada masyarakat dan pelaku wisata mengenai pentingnya ekowisata serta pengelolaan sampah di kawasan wisata harus ditingkatkan.

C. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspons ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspons dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (urban sprawl). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara. Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas.

Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen tenaga listrik masih

didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan. Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut. Permasalahan dari pelayanan dasar mencakup tiga aspek, yakni aspek perumahan dan permukiman, aspek kesehatan dan aspek ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Aspek perumahan dan permukiman mencakup akses terhadap layanan sumber air minum, sanitasi dan pengolahan air limbah dan lumpur tinja. Aspek kesehatan mencakup Jaminan Kesehatan Sosial, ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan distribusi tenaga kesehatan. Sedangkan aspek kasus kejahatan, rasa aman dan penyalahgunaan narkoba. Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri belum memenuhi target, hal ini mempengaruhi akses terhadap layanan air minum dan sanitasi.

Pada sisi lain ketersediaan air di Provinsi Sumatera Utara secara total masih surplus, termasuk pada daerah kabupaten/kota. Namun pada lokasi-lokasi tertentu terjadi defisit air seperti pada sebagian wilayah Kota Tanjungbalai, Kota Medan, Tebing Tinggi, Pematangsiantar, Kabupaten Asahan, Batubara, Serdang Bedagai dst. Kondisi defisit dipengaruhi oleh ketersediaan dan tingkat konsumsi. Ketersediaan air cenderung menurun dari waktu ke waktu, selain karena dampak perubahan iklim juga karena makin terdegradasinya daerah hulu baik karena deforestasi, maupun karena alih fungsi hutan dan lahan. Luasan hutan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) dimana kota-kota utama di Sumatera Utara berada, pada umumnya sudah berada di bawah 30%.

Hal ini akan menambah ancaman keberlanjutan ketersediaan air pada masa yang akan datang. Kekurangtersediaan air akan menyebabkan ketidaktercapaian target sanitasi dan akan mempengaruhi kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dipengaruhi oleh sampah yang belum tertangani, juga disebabkan oleh sanitasi, air peningkatan kualitas lingkungan juga belum memadai, yang tercermin dari belum tercapainya jumlah perusahaan yang menerapkan manajemen lingkungan yang baik (sertifikasi SNI ISO 14001) serta masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai. Penurunan kualitas air permukaan cenderung meningkat seiring waktu, mengingat pertambahan jumlah penduduk yang terus meningkat. Timbulan sampah akan meningkat, juga limbah cair dan lumpur tinja serta limbah B3. Peningkatan beban lingkungan ini harus dibarengi dengan peningkatan pengelolaan untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

D. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan. Pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan yang berkaitan erat dengan keberadaan pangan Defisit air pada beberapa wilayah dapat menyebabkan gangguan terhadap ketahanan pangan. Secara umum ketersediaan air di Sumatera Utara melebihi kebutuhan (surplus) namun ketersebarannya tidak selalu bersesuaian dengan ketersebaran kebutuhan, hal inilah yang menyebabkan defisit air pada beberapa wilayah, dan status defisit ini akan mempengaruhi ketahanan pangan.

Dari aspek ketersediaan pangan, Sumatera Utara juga masih surplus, hal ini turut ditopang oleh keanekaragaman hayati yang tinggi di Sumatera Utara. Kondisi kekurangan pangan di beberapa wilayah di Sumatera Utara dapat dipengaruhi oleh jasa lingkungan penyediaan pangan yang memiliki kategori rendah dan sangat rendah yang terdapat pada wilayah barat Sumatera Utara. Kerentanan wilayah yang tinggi terhadap dampak perubahan iklim juga dapat mempengaruhi produksi pangan. Perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana juga merupakan permasalahan di Provinsi Sumatera Utara. Aspek perubahan iklim menyangkut jumlah emisi gas rumah kaca yang masih tinggi, intensitas energi primer yang masih tinggi serta upaya penyerapan emisi gas rumah kaca terutama pada wilayah perkotaan yang masih minim yang terlihat dari belum terpenuhinya penerapan green waste dan ruang terbuka hijau.

Perubahan iklim ini akan menimbulkan dampak yang semakin parah mengingat 73% wilayah Sumatera Utara cukup rentan terhadap perubahan iklim terlebih pada 2% wilayah yang sangat rentan perubahan iklim. Pada sisi lain jasa lingkungan pengatur iklim juga dominan bernilai rendah hingga sangat rendah pada wilayah Pesisir Timur Sumatera. Aspek pencegahan serta penanggulangan bencana mencakup jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana, jumlah kerugian diperlengkapi secara khusus, dan penurunan indeks risiko bencana yang belum mencapai target. Aspek-aspek ini belum mencapai target juga dipengaruhi oleh wilayah Sumatera Utara yang memiliki potensi bencana tinggi pada beberapa wilayah seperti potensi banjir tinggi pada pantai utara Kabupaten Langkat hingga Kabupaten Labuhanbatu Selatan, potensi kekeringan kelas tinggi pada beberapa kabupaten. Keberadaan potensi bencana yang tinggi ini belum dibarengi dengan

peningkatan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi bencana. Pada sisi lain jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam juga sangat rendah terutama pada sisi timur Sumatera Utara dan kepulauan Nias. Mengingat dominan bencana alam di Sumatera Utara adalah bencana hidrometeorologi, bencana yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim serta ketidakmampuan alam menampung dampak perubahan iklim, maka upaya penurunan faktor penyebab perubahan iklim mutlak dilakukan disertai dengan peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan bencana alam.

E. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalnya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan

F. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif.

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

2.6.2.4 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Toba disarikan dari analisis isu-isu pembangunan berkelanjutan. Melalui metode tabulasi silang dapat dilihat hubungan keterkaitan isu utama berdasarkan capaian TPB RPJMD dengan isu

strategis RPJPN, isu strategis RPJMD Provinsi Sumatera Utara, dan isu kondisi umum wilayah.

Isu Pelayanan Kesehatan Secara Siklus Hidup pada KLHS RPJMD memiliki kesamaan dengan isu masih rendahnya infrastruktur dan Kualitas SDM yang makin rendah pada isu strategis RPJPN. Isu tersebut memiliki kesamaan dengan peningkatan pelayanan dasar pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dengan isu penurunan kuantitas dan mutu air permukaan, pengelolaan persampahan, dan penurunan mutu udara yang merupakan isu pokok pada RPPLH Provinsi Sumatera Utara, serta dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup serta kinerja jasa layanan ekosistem pada isu kondisi umum wilayah.

- 1) Isu Kualitas Sumber Daya Manusia memiliki kesamaan dengan isu Infrastruktur dan literasi digital rendah dan Kualitas SDM yang makin rendah, rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat, lemahnya kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi dan inovasi (IPTEKIN), serta inovasi yang tertinggal pada Isu RPJPN, memiliki kesamaan dengan isu peningkatan pelayanan dasar pada KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara.
- 2) Isu Pengentasan Kemiskinan, Ketimpangan Kesejahteraan dan Ketahanan Pangan pada KLHS RPJMD memiliki kesamaan dengan isu produktivitas yang rendah, pariwisata yang belum optimal, ekonomi kelautan yang belum optimal, masih rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi serta infrastruktur dan literasi digital yang masih rendah yang merupakan isu pada RPJPN, memiliki kesamaan dengan isu pengentasan kemiskinan dan penguatan ketahanan pangan pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dengan isu penurunan kuantitas dan mutu air permukaan serta alih fungsi hutan dan lahan yang merupakan isu pokok pada RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh kondisi umum daerah yang tercermin dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim serta ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
- 3) Isu Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (Perbaikan Struktur Ekonomi, Pertanian, Industri/Manufaktur, UMKM) memiliki kesamaan dengan isu produktivitas yang rendah, ekonomi laut yang belum optimal, kontribusi UMKM dan koperasi yang masih rendah serta kualitas SDM yang rendah, belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik sehingga keterkaitan ekonomi antarwilayah masih relatif terbatas pada isu RPJPN, berkaitan dengan isu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh isu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada kondisi umum wilayah.
- 4) Isu daya saing dan pariwisata memiliki kesamaan dengan isu Pariwisata di bawah potensinya dan Infrastruktur dan literasi digital rendah pada isu RPJPN, berkaitan dengan isu peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas tenaga kerja pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh isu Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam pada kondisi umum wilayah.

- 5) Isu terkait Pencegahan Kerusakan Lingkungan hidup memiliki kesamaan dengan isu Pembangunan belum berkelanjutan pada RPJPN, kesamaan dengan isu peningkatan kualitas lingkungan, pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dengan isu alih fungsi serta kerusakan hutan dan lahan, serta ancaman kehilangan keanekaragaman hayati yang merupakan isu RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati pada Kondisi Umum wilayah.
- 6) Isu Pengelolaan Risiko Bencana memiliki kesamaan dengan isu Pembangunan belum berkelanjutan pada RPJPN, isu penanganan perubahan iklim dan pencegahan serta penanggulangan bencana pada KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, memiliki unsur yang sama dengan isu alih fungsi serta kerusakan hutan dan lahan pada isu pokok RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh kondisi umum daerah yang tercermin dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dampak dan resiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim.
- 7) Isu Pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang berkualitas dan merata memiliki kesamaan dengan isu masih rendahnya infrastruktur dan integrasi domestik terbatas pada isu strategis RPJPN. Isu tersebut memiliki kesamaan dengan peningkatan pelayanan dasar pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dengan isu penurunan kuantitas dan mutu air permukaan dan pengelolaan persampahan yang merupakan isu pokok pada RPPLH Provinsi Sumatera Utara, dan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja jasa layanan ekosistem serta dampak dan resiko lingkungan hidup (mencakup persampahan dan limbah) pada isu kondisi umum wilayah.
- 8) Isu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki kesamaan dengan isu kualitas SDM yang rendah, sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan, dan Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal pada isu RPJPN, memiliki kesamaan dengan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada Isu strategis KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Utara.
- 9) Isu peningkatan tata kelola pemerintahan terkait dengan semua isu strategis menunjukkan bahwa peran dan/atau tidak berperannya pemerintah sangat besar dalam menyebabkan munculnya/ terselesaikannya isu-isu tersebut. Dengan demikian terlihat bahwa isu strategis berdasarkan capaian TPB pada KLHS RPJMD masih sejalan dan saling terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya.

Dengan melihat korelasi dan saling pengaruh antar isu menggunakan tabulasi silang antara isu utama capaian indikator TPB, isu strategis dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya, isu berdasarkan muatan KLHS (base line) serta analisis isu utama capaian indikator TPB dengan muatan KLHS, maka dapat dirumuskan isu strategis TPB di Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

- 1) Pengentasan Kemiskinan, Ketimpangan Kesejahteraan
- 2) Penguatan Ketahanan Pangan
- 3) Pengelolaan Risiko Bencana
- 4) Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup
- 5) Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Secara Merata
- 6) Penguatan Daya Saing Pariwisata
- 7) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- 8) Pelayanan Kesehatan Secara Siklus Hidup
- 9) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (Perbaikan Struktur Ekonomi, Pertanian, Industri/Manufaktur, UMKM)
- 10) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pembangunan Pendidikan, Tenaga Kerja)
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.6.2.5 Isu Strategis Kabupaten Toba

A. Ketimpangan Antar Wilayah

Ketimpangan antar wilayah menjadi isu yang penting di Kabupaten Toba karena sangat berpengaruh terhadap kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Ada 2 jenis ketimpangan yang dapat diidentifikasi yaitu ketimpangan tingkat kesejahteraan dan ketimpangan kualitas infrastruktur jalan. Ketimpangan tingkat kesejahteraan terlihat dari adanya perbedaan yang besar antara porsi penduduk pada data P3KE di antara kecamatan-kecamatan. Secara keseluruhan, porsi penduduk Kabupaten Toba yang termasuk ke dalam Desil 1 P3KE tahun 2023 adalah sebesar 10,22%. Terdapat 8 kecamatan dengan porsi Desil 1 di atas angka kabupaten dengan rata-rata sebesar 6,90%, dan 8 kecamatan dengan porsi Desil 1 di atas angka kabupaten dengan rata-rata sebesar 15,45%. Perbedaan angka rata-rata sebesar 8,5% ini perlu ditekan sehingga tingkat kesejahteraan menjadi lebih merata di antara kecamatan-kecamatan dalam kabupaten.

Ketimpangan kualitas jalan juga ditemukan di antara wilayah dalam kabupaten. Dengan anggaran yang tersedia pada tahun 2024, jalan kabupaten dengan kondisi mantap diproyeksikan berada pada angka sekitar 59,07%. Dari 16 kecamatan di Kabupaten Toba, terdapat 10 kecamatan yang kemandapan jalannya di atas angka kemandapan kabupaten dengan kemandapan berkisar antara 61,01%-92,81% dan secara keseluruhan mencapai 73,40%. Sementara di 6 kecamatan lainnya yang memiliki kemandapan jalan di bawah kabupaten tingkat kemandapan berkisar antara 33,77%-58,54% dan secara keseluruhan hanya mencapai 41,39%, atau terdapat selisih hingga 32,01%. Perbedaan yang besar ini memiliki pengaruh terhadap perbedaan perkembangan perekonomian di kedua wilayah.

B. Kawasan Danau Toba sebagai KSN dengan fungsi perlindungan

Kabupaten Toba merupakan bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang KSN Danau Toba. Dalam kebijakan tersebut, wilayah ini memiliki fungsi utama perlindungan, yang mencakup pelestarian lingkungan hidup, kelestarian ekosistem kawasan danau, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat. Fungsi perlindungan ini menjadi pijakan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Namun demikian, seiring meningkatnya aktivitas pembangunan, pertumbuhan pariwisata, dan tekanan pemanfaatan ruang, muncul tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara konservasi dan pembangunan. Perubahan tata guna lahan, degradasi lingkungan, pencemaran air Danau Toba, serta berkurangnya tutupan hutan merupakan ancaman nyata terhadap fungsi perlindungan kawasan. Di sisi lain, koordinasi lintas sektor dan lintas daerah dalam pengelolaan kawasan belum sepenuhnya efektif, sehingga upaya pelestarian sering kali bersifat parsial dan tidak sinkron dengan arah kebijakan nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Toba menghadapi isu strategis dalam memastikan bahwa seluruh pembangunan daerah harus mengacu pada prinsip perlindungan lingkungan dan budaya sebagai mandat utama dari status KSN. Oleh karena itu, pembangunan di Kabupaten Toba ke depan harus diarahkan pada model pembangunan rendah emisi, berbasis konservasi, dan berbasis kearifan lokal, yang tidak hanya menjaga keberlanjutan sumber daya alam tetapi juga memperkuat identitas budaya masyarakat Toba. Penanganan isu ini membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah daerah, pusat, dunia usaha, dan masyarakat, dengan dukungan regulasi yang kuat, kelembagaan yang efektif, dan pengawasan tata ruang yang konsisten.

C. Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Ajibata dan Kawasan Perkotaan Balige masuk menjadi hight light intervensi arah Pembangunan kewilayahan di RPJMN

Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) Ajibata dan Kawasan Perkotaan Balige di Kabupaten Toba telah ditetapkan sebagai bagian dari fokus intervensi pembangunan kewilayahan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Penetapan ini menunjukkan pengakuan strategis terhadap posisi Kabupaten Toba dalam mendukung pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba, sekaligus sebagai simpul penting dalam pemerataan pembangunan wilayah barat Indonesia.

Sebagai KPP, Ajibata diarahkan untuk menjadi pusat pengembangan wilayah perdesaan yang berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan darat, dan pariwisata alam. Sementara itu, Kawasan Perkotaan Balige berperan sebagai pusat kegiatan wilayah yang memegang fungsi administratif, layanan publik, perdagangan, serta pariwisata budaya. Intervensi pemerintah pusat melalui RPJMN menempatkan

kedua kawasan ini sebagai lokus percepatan pembangunan yang harus direspons secara aktif oleh pemerintah daerah melalui penguatan perencanaan, kelembagaan, infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Namun demikian, isu strategis muncul dalam bentuk kesenjangan antara arah kebijakan nasional dan kesiapan daerah, baik dari sisi tata ruang, infrastruktur dasar, konektivitas antarwilayah, maupun penguatan ekonomi lokal. Keterbatasan anggaran daerah, lemahnya integrasi perencanaan lintas sektor, dan belum optimalnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan dalam mewujudkan peran strategis Ajibata dan Balige sebagai motor penggerak pembangunan wilayah.

Oleh karena itu, perlu adanya respons kebijakan daerah yang adaptif dan selaras dengan RPJMN, termasuk integrasi program pembangunan kewilayahan ke dalam RPJMD, percepatan pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan dasar, dan penguatan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Toba dituntut untuk tidak hanya menjadi penerima intervensi, tetapi juga sebagai aktor utama yang mampu merancang strategi pembangunan wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi jangka panjang.

D. Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Kabupaten Toba memiliki posisi strategis sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, budaya, serta potensi ekonomi, khususnya di sektor pariwisata berbasis Danau Toba. Sejalan dengan komitmen nasional dan global, Kabupaten Toba berupaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai kerangka pembangunan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian TPB di Kabupaten Toba masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan multidimensi. Di bidang sosial, meskipun terdapat kemajuan, tingkat kemiskinan masih signifikan, terutama di kawasan perdesaan. Akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, dengan disparitas yang cukup nyata antara wilayah perkotaan seperti Balige dan kawasan perdesaan seperti Ajibata. Angka putus sekolah, rendahnya kualitas sarana kesehatan, dan keterbatasan akses air bersih serta sanitasi menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi.

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Toba masih bergantung pada sektor primer dengan produktivitas yang relatif rendah. Kesempatan kerja yang layak dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah belum optimal, sehingga pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan lambat. Sektor pariwisata yang menjadi tumpuan utama belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan, serta menghadapi risiko degradasi lingkungan dan budaya akibat pengelolaan yang kurang terpadu.

Lingkungan hidup menghadirkan tantangan besar berupa degradasi kualitas danau, deforestasi, pencemaran limbah, dan perubahan iklim yang berdampak pada keberlangsungan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas

pembangunan berisiko mengancam kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan strategis nasional.

Kelembagaan dan tata kelola juga menjadi faktor penting dalam pencapaian TPB. Koordinasi antar instansi pemerintah, sinergi dengan sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat masih perlu ditingkatkan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan berjalan efektif dan akuntabel. Keterbatasan data terpilah dan sistem informasi yang belum terintegrasi menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dalam menghadapi isu-isu tersebut, Kabupaten Toba perlu memperkuat strategi pembangunan yang berbasis pendekatan lintas sektoral dan terintegrasi. Peningkatan kualitas layanan sosial dasar, pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan budaya, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat harus menjadi fokus utama. Optimalisasi sumber daya lokal, pengembangan inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim juga perlu menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan berkelanjutan di daerah.

Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, Kabupaten Toba dapat mempercepat pencapaian TPB, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempertahankan identitas budaya sebagai modal pembangunan jangka panjang..

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1. RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 Tahap Pertama RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2045.

Untuk mendukung Visi Indonesia Emas 2045 dan dengan memperhatikan Visi Provinsi Sumatera Utara 2045, yaitu Sumatera Utara Unggul, Maju dan Berkelanjutan, Visi Kabupaten Toba 2045 adalah:

TOBA UNGGUL, MAJU DAN BERKELANJUTAN.

Visi Kabupaten Toba 2045 dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Toba sebagai daerah unggul dengan ekonomi berdaya saing dan berkelanjutan dengan pengembangan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan pariwisata. Kondisi yang ingin dicapai pada tahun 2045 adalah sebagai berikut:

Unggul

Kondisi Unggul pada tahun 2045 menunjukkan kondisi sumber daya manusia yang inovatif dan mampu menghadapi berbagai tantangan sehingga mampu menjadi subyek pembangunan yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi pendorong dalam peningkatan peran pertanian dan pariwisata sehingga dapat memberikan manfaat dan dampak yang lebih luas terutama di kawasan Danau Toba.

Maju

Pada tahun 2045, penduduk Kabupaten Toba mengalami peningkatan kesejahteraan yang pesat. Seiring dengan peningkatan pendapatan, terjadi penurunan dalam tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Kondisi Maju juga ditandai dengan ketersediaan infrastruktur pelayanan publik dengan kualitas yang semakin meningkat dan tersedia secara merata di seluruh wilayah kabupaten yang menjadi pendukung dalam peningkatan produksi dan produktivitas daerah terutama pada sektor pertanian dan pariwisata. Peningkatan kesejahteraan juga didorong oleh peran maksimal pusat-pusat pertumbuhan daerah. Dari sisi tata kelola pemerintahan, pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dengan aparatur yang kompeten dan berintegritas disertai kemandirian daerah yang semakin meningkat.

Berkelanjutan

Pembangunan akan berkelanjutan bila pertumbuhan ekonomi dapat berlangsung secara terus menerus dalam jangka panjang sehingga dapat memberikan dukungan kepada generasi masa depan. Pemanfaatan potensi ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, terutama mencegah terjadinya degradasi lingkungan sebagai wadah berkehidupan manusia. Danau Toba yang memiliki fungsi perlindungan dalam tata ruang

nasional harus tetap mampu menjalankan fungsinya sambil memberikan manfaat ekonomi yang optimal kepada masyarakat.

Dengan memperhatikan sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045, maka sasaran visi Kabupaten Toba 2045 disusun sebagai berikut:

Tabel 3.1. Sasaran Visi Kabupaten Toba 2045

No.	Sasaran/Indikator	2025	2045
1	Pendapatan per Kapita Meningkat		
	PDRB per Kapita (juta rupiah)	47,00-49,00	339,19-428,01
	Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)	10,90-11,15	11,75-12,00
2	Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun		
	Tingkat Kemiskinan (%)	7,6-7,9	2,49-1,17
	Rasio Gini (indeks)	0,285-0,294	0,240-0,250
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05-5,10	5,27-5,73
	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	0,81-0,89	0,99-1,04
3	Daya Saing Daerah Meningkat		
	Indeks Inovasi Daerah	43-47	81-90
	Indeks Daya Saing Daerah	3,20-3,46	4,50-4,72
4	Sumber Daya Manusia Berdaya Saing		
	Indeks Pembangunan Manusia	79,44-81,65	86,66-89,66
5	Emisi GRK Menurun		
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (tonCO2eq)	137.330,04	806.097,33
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,38-70,35	73,39-75,11

Dengan memperhatikan Visi dan Misi Nasional dan Provinsi serta kondisi daerah, maka Misi RPJPD Kabupaten Toba 2025 - 2045 ditetapkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan transformasi sosial dengan sumber daya manusia berkualitas dan unggul. Misi pertama ini dimaksudkan untuk membangun sumber daya manusia yang berdaya saing. Tersedianya sumber daya manusia yang berdaya saing akan menjadi modal besar untuk mendorong peningkatan kesejahteraan secara lebih baik dengan pemanfaatan potensi ekonomi daerah yang optimal. Perwujudan misi ini akan memerlukan akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah. Selain pendidikan formal sesuai kewenangan daerah, pendidikan vokasional untuk pemanfaatan potensi unggulan daerah juga akan mengoptimalkan daya saing sumber daya manusia.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan optimalisasi sektor pertanian dan pariwisata. Melalui misi kedua ini diharapkan terwujud optimalisasi sektor unggulan pertanian dan pariwisata untuk meningkatkan produktivitas daerah. Penerapan teknologi dan mendorong inovasi akan memberikan peningkatan pada produksi dan produktivitas. Kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan nilai tambah diharapkan dapat terwujud dengan mendorong bertumbuhnya UMKM yang memanfaatkan produk-produk unggulan daerah di antaranya dengan agrowisata dan agroindustri.

3. Mewujudkan transformasi tata kelola berintegritas yang efektif, efisien dan transparan.
Misi ketiga ini dimaksudkan untuk meningkatkan proses bisnis pemerintahan dan mewujudkan aparatur pemerintah yang berintegritas agar dapat memberikan pelayanan prima. Reformasi birokrasi akan dilakukan dengan penerapan sistem e-government, peningkatan kompetensi aparatur, dan penerapan mekanisme akuntabilitas yang ketat untuk memastikan pelayanan publik yang prima. Tata kelola yang efektif dan efisien juga diharapkan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas pelaksanaan program pemerintah pada seluruh bidang urusan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro dan peningkatan kemandirian daerah.
Melalui misi keempat diharapkan terwujud situasi dan kondisi daerah yang kondusif untuk berlangsungnya aktivitas ekonomi yang produktif dan mendorong bertumbuhnya investasi. Terciptanya masyarakat demokratis aman, dan stabil secara ekonomi melalui penguatan kapasitas keamanan lokal, partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas harga dan pertumbuhan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal akan menjadi landasan yang kuat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Kondisi daerah yang kondusif dan daya saing tinggi akan mendorong meningkatnya kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan.
5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan budaya maju dan lingkungan lestari.
Dalam misi kelima ini diharapkan terwujud individu, keluarga dan masyarakat sebagai partisipan pembangunan yang tangguh dan berbudaya tinggi serta memiliki hubungan timbal balik yang seimbang dengan lingkungan. Modal sosial budaya diharapkan untuk dapat mewujudkan ketahanan terhadap bencana, perubahan dan guncangan, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kondisi masyarakat yang berbudaya tinggi, selain menambah daya tarik pada wisata alam yang berlimpah, menjadi modal utama dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Toba 2045 secara lebih optimal.
6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dimaksudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang disertai dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, serta ketahanan sosial dan ekologi. Pembangunan kewilayahan di Kabupaten Toba akan difokuskan pada pemerataan infrastruktur dan layanan publik dengan pendekatan yang berbasis karakteristik wilayah. Hal ini termasuk peningkatan konektivitas antar wilayah, alokasi anggaran yang adil, dan penguatan kapasitas daerah-daerah tertinggal.
7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan.
Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi. Pembangunan sarana dan prasarana di Kabupaten Toba akan diarahkan pada pembangunan yang berkualitas dan ramah lingkungan, termasuk pengembangan infrastruktur transportasi dan fasilitas publik yang mendukung pengurangan emisi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan.

Kesinambungan pembangunan diperlukan untuk mengawal pencapaian Visi Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan yang diwujudkan melalui kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan. Kesinambungan pembangunan akan dijaga melalui penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang komprehensif dengan indikator kinerja yang jelas. Rencana pembiayaan yang berkelanjutan dan strategi mitigasi risiko juga akan diterapkan untuk memastikan tercapainya tujuan jangka panjang yang telah ditetapkan.

3.1.2. Arah Kebijakan Tahap I 2025-2029

Tahap pertama pembangunan jangka panjang diarahkan kepada perkuatan landasan untuk memberikan fondasi yang kuat bagi keberhasilan pencapaian Visi. Tahap pertama ini bertujuan untuk menguatkan fondasi dalam transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Arah kebijakan pada tahap ini memastikan bahwa Kabupaten Toba memiliki dasar yang kuat untuk memulai transformasi menuju pertanian dan pariwisata yang kuat. Prioritas pada tahap ini adalah pembangunan layanan dasar kesehatan dan pendidikan serta perlindungan sosial, penguatan sektor unggulan serta pusat-pusat pertumbuhan. Dalam hal tata kelola pemerintahan dilakukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas ASN. Ketertiban umum serta ketahanan sosial budaya diperkuat sebagai modal dasar pembangunan di samping pemantapan terhadap kemandirian daerah. Transformasi sosial diarahkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang unggul, serta penyediaan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat untuk membentuk masyarakat yang produktif dan berkualitas sebagai fondasi untuk Kabupaten Toba yang unggul.

Transformasi ekonomi difokuskan pada penguatan sektor unggulan yaitu pertanian dan pariwisata. Pengembangan pertanian dilakukan dengan penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian yang difokuskan kepada sentra-sentra produksi komoditas unggulan serta mendorong penerapan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam pertanian. Sektor pariwisata diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang positif dalam kunjungan wisatawan mancanegara dengan penekanan kepada perubahan pola pikir untuk memperbaiki komitmen dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka penyehatan kondisi lingkungan strategis dengan melalui menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan memperluas diferensiasi produk, serta didukung oleh peningkatan infrastruktur transportasi yang mampu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas destinasi kawasan Danau Toba. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan penataan objek-objek wisata unggulan dengan prasarana pendukung yang semakin berkualitas serta mendorong bertumbuhnya ekosistem ekonomi kreatif. Penguatan UMKM yang berbasis kepada pertanian dan pariwisata serta pengembangan industri eksisting untuk peningkatan kemandirian usaha yang mendorong peningkatan produksi dan produktivitas.

Transformasi tata kelola difokuskan pada kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN), regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan dengan pembentukan kelompok kerja (POKJA) pariwisata kabupaten serta menjalin kerja sama internasional dengan negara-negara lain untuk mendapatkan investasi, teknologi, dan pengetahuan yang diperlukan dalam pengembangan pertanian dan pariwisata. Kelembagaan tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran yang menjamin perangkat daerah lebih dinamis dan responsif dalam menyelenggarakan pelayanan. Penguatan kelembagaan tepat fungsi akan membantu menghasilkan perangkat daerah yang kolaboratif. Peningkatan kualitas ASN dalam tahap ini memfokuskan pada penyiapan peta arah sistem merit, penataan kembali fungsi meritokrasi, manajemen ASN yang lebih terarah dan objektif, dan penguatan fungsi pengawasan pelaksanaan sistem merit, peningkatan ASN berkualitas menjadi pendukung terwujudnya ASN unggul dan profesional.

Digitalisasi pelayanan publik lebih diarahkan pada penguatan ketersediaan sistem informasi publik di semua sektor, pengintegrasian sistem informasi, penyediaan dashboard pelayanan publik dan penyiapan regulasi pembangunan basis satu data pelayanan publik. Penguatan tata kelola pada sektor pariwisata dilakukan dengan penguatan peran serta masyarakat dengan mendorong pembentukan kelompok sadar wisata pada obyek pariwisata unggulan.

Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro dan peningkatan kemandirian daerah difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, lembaga demokrasi yang kuat dan akuntabilitas berbasis digital. Stabilitas ekonomi ditekankan dengan menguatkan fondasi untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta menjaga stabilitas harga untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Stabilitas ekonomi makro difokuskan kepada optimalisasi perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD, dan pengelolaan fiskal yang adaptif serta penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan dalam menjaga stabilitas ekonomi makro daerah.

Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan budaya maju dan lingkungan lestari difokuskan pada aktualisasi nilai-nilai budaya yang mendorong kesejahteraan masyarakat, serta penguatan pembangunan keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif untuk meningkatkan pembangunan kebudayaan dan menggerakkan modal sosial dalam masyarakat serta mensosialisasikan prinsip pariwisata berkelanjutan pada destinasi pariwisata prioritas.

Ketahanan masyarakat juga dibangun untuk meningkatkan ketangguhan dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana. Penciptaan iklim riset dan inovasi dilakukan untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pengembangan kapasitas kelembagaan dan instrumen kebijakan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan, termasuk untuk menguatkan pemanfaatan energi terbarukan dan menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Pembangunan kewilayahan serta sarana dan prasarana pada tahap ini difokuskan untuk penuntasan pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, listrik) yang diprioritaskan pada pemerataannya di seluruh wilayah. Pembangunan

konektivitas difokuskan untuk menghubungkan pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan ekonomi, pusat komoditas sumber daya alam, serta kawasan pariwisata agar menjadi destinasi wisata unggulan yang berkelanjutan. Pengembangan infrastruktur fokus pada peningkatan layanan air bersih melalui konservasi air, sanitasi dan pengolahan persampahan terpadu. Memperkuat infrastruktur dasar untuk mendukung pengembangan bioindustri dan pariwisata juga ditekankan dalam tahap pertama ini. Pembiayaan pembangunan dioptimalkan dengan membuka proyek-proyek perintis dengan pembiayaan alternatif (KPBU) dan menguatkan instrumen dan sistem informasi untuk melakukan reformasi tata kelola fiskal daerah.

Pada Perkuatan Landasan ini PDRB per kapita ditargetkan mencapai Rp. 79-116 juta dan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,0-6,5 persen. Hal ini dicapai dengan menguatkan fondasi sebagai pusat pengembangan pertanian dan pariwisata bertaraf global, dengan arah kebijakan ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.2. Arah Kebijakan Tahap I 2025-2029

Aspek Arah Kebijakan	Fokus Arah Kebijakan
Transformasi Sosial	- Memenuhi pelayanan dasar kesehatan yang merata untuk seluruh masyarakat - Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang unggul - Menyediakan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.
Transformasi Ekonomi	- Penyediaan sarana prasarana pendukung pertanian. - Menerapkan teknologi hijau dan praktik berkelanjutan dalam sektor pertanian - Penataan objek wisata unggulan - Mendorong diferensiasi produk wisata - Memperkuat ekosistem ekonomi kreatif - Penguatan UMKM berbasis pertanian dan pariwisata - Peningkatan produktivitas UMKM eksisting - Meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas pada pusat-pusat pertumbuhan
Transformasi Tata Kelola	- Menguatkan kelembagaan yang dinamis dan responsif - Meningkatkan kualitas ASN melalui sistem merit - Digitalisasi pelayanan publik - Mengelola pariwisata secara berkelanjutan melalui kelompok masyarakat - Meningkatkan kerja sama untuk mendorong pertumbuhan investasi, teknologi dan ilmu pengetahuan
Keamanan dan Stabilitas	- Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat - Menjaga stabilitas ekonomi makro dengan penguatan kapasitas fiskal daerah, stabilitas harga, dan daya beli masyarakat - Mengoptimalkan perencanaan pembangunan berbasis risiko
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Mendorong aktualisasi nilai-nilai kebudayaan - Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan bencana - Mengelola sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan
Pembangunan Kewilayahan dan Infrastruktur	- Menuntaskan pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah - Menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pariwisata melalui konektivitas

Visi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 yaitu **“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, Berkelanjutan Pembangunanannya”**, merupakan rumusan arah pembangunan daerah yang bersinergi dan selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah, provinsi, dan nasional.

1. **Keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Toba 2025–2045:**

- Visi jangka panjang daerah yaitu **“Toba Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”** menjadi fondasi utama arah pembangunan dalam RPJMD. Visi **“TOBA MANTAP”** merupakan penjabaran operasional dari visi jangka panjang tersebut, dengan penekanan pada keberlanjutan pembangunan, peningkatan daya saing daerah (unggul dan maju), serta kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir.
- Kesamaan kata kunci *maju*, *berkelanjutan*, dan semangat *unggul* menunjukkan kesinambungan arah pembangunan jangka menengah terhadap visi jangka panjang.

2. **Keterkaitan dengan Visi RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025–2029:**

- Visi Sumut *“Kolaborasi SUMUT Berkah menuju Sumatera Utara yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan”* memiliki kesamaan substansi dengan visi Kabupaten Toba, baik dari segi orientasi pembangunan berkelanjutan, peningkatan daya saing (unggul), serta kemajuan daerah.
- Visi **“TOBA MANTAP”** merupakan bentuk partisipasi aktif Kabupaten Toba dalam mewujudkan Sumatera Utara yang unggul dan maju melalui pendekatan kolaboratif dan kemandirian daerah.

3. **Keterkaitan dengan Visi RPJMN 2025–2029:**

- Visi Nasional *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”* dengan 8 Asta Cita menjadi arah pembangunan nasional yang menginspirasi RPJMD Kabupaten Toba.
- Visi **“TOBA MANTAP”** selaras dengan semangat nasional dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, daerah yang maju, serta pembangunan yang berkelanjutan, yang merupakan bagian integral dalam pencapaian Indonesia Emas 2045.
- RPJMD Kabupaten Toba memperkuat kontribusi daerah dalam mewujudkan Asta Cita, seperti pembangunan manusia unggul, penguatan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan.

Visi RPJMD Kabupaten Toba 2025–2029 secara konsisten merepresentasikan sinergi vertikal antar dokumen perencanaan pembangunan, dari tingkat nasional (RPJMN), provinsi (RPJMD Sumut), hingga jangka panjang daerah (RPJPD Toba). Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan yang terintegrasi, partisipatif, dan berorientasi hasil demi tercapainya masyarakat Kabupaten Toba yang sejahtera dan berdaya saing dalam jangka menengah maupun panjang

Dalam rangka mewujudkan visi **“TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, Berkelanjutan Pembangunanannya”** untuk pencapaian sasaran utama Pembangunan RPJMD Kabupaten Toba 2025–2029 yaitu:

Tabel 3.3. Sasaran Makro Pembangunan Kabupaten Toba Tahun 2025-2030

Sasaran/ Indikator		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1 Pendapatan per Kapita Meningkat								
PDRB per Kapita (juta rupiah)		47.45	49.5	51.8	54.3	57	60	63.5
Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan (%)		11,55	11,57	11,58	11,61	11,63	11,65	11,67
2 Kemiskinan dan Ketimpangan Menurun								
Tingkat Kemiskinan (%)		8.07	7.87	7.63	7.38	7.13	6.87	6.6
Rasio Gini (indeks)		0.348	0.344	0.34	0.336	0.332	0.328	0.324
Pertumbuhan Ekonomi (%)		4.84	4.90-5.00	5.00-5.15	5.15-5.25	5.25-5.35	5.35-5.50	5.50-5.65
Kontribusi PDRB Kabupaten (%)			0,81-0,89	0,81-0,89	0,81-0,89	0,81-0,89	0,81-0,89	0,81-0,89
3 Daya Saing Daerah Meningkat								
Indeks Inovasi Daerah		39,74	40	41	42	43	44	45
Indeks Daya Saing Daerah		3.43	3.46	3.49	3.52	3.55	3.58	3.61
4 Sumber Daya Manusia Berdaya Saing								
Indeks Pembangunan Manusia		78.44	78.74	79.15	79.57	79.99	80.42	80.85
5 Emisi GRK Menurun								
Penurunan intensitas emisi GRK (tonCO2eq)			137,330.04	150,042.36	163,926.41	179,095.20	195,667.63	213,773.58

3.1.4. Misi

Dalam rangka pencapaian visi pembangunan jangka menengah maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 sebagai berikut

1. MISI 1 Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak

Misi ini berfokus kepada upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui optimalisasi kualitas pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan harkat dan martabat manusia khususnya masyarakat yang memerlukan layanan kesejahteraan sosial.

2. MISI 2 Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata

Misi kedua dimaksudkan untuk melakukan peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur yang lebih baik. Infrastruktur yang menjadi fokus adalah infrastruktur yang menjadi kepentingan masyarakat secara luas sesuai dengan kondisi daerah, yaitu jalan, irigasi, air minum dan pengelolaan air limbah.

3. MISI 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah

Misi ketiga bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan potensi daerah, yaitu pertanian dan pariwisata, untuk secara efektif meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas dengan peningkatan produksi dan produktivitas serta upaya peningkatan nilai tambah dengan mendorong berkembangnya usaha-usaha yang memanfaatkan produk-produk unggulan daerah. Pembangunan ekonomi juga diharapkan untuk memberikan dukungan terhadap peningkatan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

4. MISI 4 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat

Misi keempat bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan aparatur yang berkompeten dan berintegritas serta berorientasi kepada pelayanan.

5. MISI 5 Meningkatkan keamanan dan ketertiban

Misi kelima ditujukan untuk memberikan landasan yang kuat demi terlaksananya pembangunan daerah serta berkembangnya usaha yang mendorong peningkatan ekonomi daerah.

6. MISI 6 Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal

Misi ini bertujuan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya luhur untuk mempertahankan jati diri daerah serta mendukung berkembangnya pariwisata daerah.

Tabel 3.4. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Toba dengan RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2045

MISI RPJPD KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 - 2045	MISI RPJMD KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 - 2029	Keterkaitan/Substansi yang Sama
MISI 1. Mewujudkan transformasi sosial dengan sumber daya manusia berkualitas dan unggul	MISI I. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak	Penguatan kapasitas SDM yang unggul, produktif dan berintegritas
MISI 2. Mewujudkan transformasi ekonomi dengan optimalisasi sektor pertanian dan pariwisata	MISI 3.Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah	Optimalisasi sektor unggulan daerah: pertanian, pariwisata, dan UMKM
MISI 3. Mewujudkan transformasi tata kelola berintegritas yang efektif, efisien dan transparan	MISI. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat	Reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan penguatan transparansi pemerintah
MISI 4. Mewujudkan masyarakat demokratis dengan penciptaan lingkungan aman dan stabilitas ekonomi makro dan peningkatan kemandirian daerah	MISI 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Menjamin tatanan sosial yang kondusif untuk pembangunan
MISI 5. Mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi dengan budaya maju dan lingkungan lestari	MISI 6. Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal	Perlindungan budaya Batak Toba dan pelestarian lingkungan
MISI 6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	MISI 2. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata	Pemerataan pembangunan antar wilayah, khususnya kawasan pedesaan dan tertinggal
MISI 7. Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		Penekanan pada infrastruktur hijau dan aksesibilitas
MISI 8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan		Menjadi prinsip utama dalam seluruh proses pembangunan

Tabel 3.5. Keterkaitan Misi RPJMD Kabupaten Toba dengan Misi RPJMD Propinsi Sumut dan RPJMN Tahun 2025 – 2045

MISI RPJMD KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 - 2029	MISI RPJMD PROPINSI SUMUT TAHUN 2025 - 2045	MISI RPJMN
MISI 1 Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak	Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	Asta Cita 4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Genegarsi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas
MISI 2. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata	Misi 4. Mengembangkan dan Menata Infrastruktur yang berkualitas, Estetik dan Ramah Lingkungan	Asta Cita 3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi
MISI, 3 Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah	Misi 2. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi Daerah	Asta Cita 2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru
		Asta Cita 5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
		Asta Cita 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan
MISI 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat	Misi 3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	Asta Cita 7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan
MISI 5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Misi 5. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya untuk membangun Masyarakat Sumut yang Tangguh	Asta Cita 1. Memperkokoh Idiologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
MISI 6. Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal		Asta Cita 8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya serta Peningkatan toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Misi pembangunan daerah Kabupaten Toba dalam RPJMD 2025–2029 dirumuskan secara strategis agar selaras dan mendukung misi pembangunan provinsi dan nasional. Setiap misi memiliki keterkaitan substansial yang menunjukkan kesinambungan perencanaan dari tingkat daerah hingga pusat.

1. Misi 1: Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak
- Misi ini sejalan dengan Misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Utara yaitu “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)”. Keduanya menekankan pentingnya SDM yang unggul sebagai fondasi pembangunan. Pada tingkat nasional, misi ini mendukung Asta Cita 4 RPJMN yang menekankan penguatan SDM melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan pemuda dan perempuan.

2. Misi 2: Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata
Selaras dengan Misi 4 RPJMD Provinsi Sumut yang menargetkan pengembangan infrastruktur estetik, ramah lingkungan, dan berkualitas. Pada tingkat nasional, misi ini mendukung Asta Cita 5 RPJMN yang berfokus pada hilirisasi industri dan penguatan infrastruktur strategis untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
3. Misi 3: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah
Misi ini mendukung Misi 2 RPJMD Provinsi Sumut tentang stabilitas makro ekonomi dan diperkuat oleh Asta Cita 2 dan 5 RPJMN yang menekankan pada penguatan ketahanan pangan, ekonomi hijau, ekonomi biru, serta pengembangan industri berbasis sumber daya lokal untuk kemandirian bangsa.
4. Misi 4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat
Ini sejalan dengan Misi 3 RPJMD Provinsi Sumut, yaitu peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Pada tingkat nasional, misi ini mendukung Asta Cita 7 RPJMN yang menekankan reformasi birokrasi, pemberantasan korupsi, dan penguatan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
5. Misi 5: Meningkatkan keamanan dan ketertiban
Keterkaitan langsung dengan Misi 5 Provinsi Sumut, yaitu memperkuat ketahanan sosial dan budaya, yang mencakup stabilitas sosial, ketertiban umum, dan ketahanan masyarakat. Di tingkat nasional, hal ini selaras dengan Asta Cita 3 yang memperkokoh ideologi Pancasila dan demokrasi.
6. Misi 6: Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal
Mendukung bagian dari Misi 5 RPJMD Provinsi Sumut dalam menjaga identitas budaya masyarakat. Misi ini sangat relevan dengan Asta Cita 8 RPJMN yang menekankan penguatan budaya, toleransi antarumat beragama, serta pembangunan masyarakat yang harmonis dan sejahtera.

Misi RPJMD Kabupaten Toba 2025–2029 disusun dengan mengacu dan menjabarkan arah pembangunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJMN. Keterkaitan ini menunjukkan sinergi vertikal dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan ekonomi berkelanjutan, serta pemerintahan yang bersih dan inklusif.

3.1.5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah merupakan penjabaran dari visi dan misi pembangunan Kabupaten Toba yang dirumuskan untuk menjawab berbagai isu strategis daerah, sekaligus sebagai arah dan fokus utama pembangunan lima tahun ke depan. Penyusunan tujuan dan sasaran ini dimaksudkan untuk menciptakan keterpaduan antara rencana strategis daerah dengan perencanaan pembangunan provinsi dan nasional secara sinergis dan berkelanjutan.

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Toba dalam RPJMD 2025–2029 diarahkan untuk mempercepat transformasi daerah menuju wilayah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi “TOBA MANTAP 2029”. Oleh karena itu, setiap tujuan

dirumuskan secara spesifik dan terukur guna mencapai perubahan yang nyata dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Sasaran pembangunan ditetapkan sebagai hasil antara (intermediate outcomes) dari proses pembangunan daerah yang mencerminkan capaian yang ingin diwujudkan setiap tahunnya. Sasaran ini mengacu pada indikator kinerja utama yang menggambarkan keberhasilan pencapaian tujuan secara kuantitatif dan kualitatif, serta menjadi dasar pengukuran kinerja perangkat daerah.

Tujuan dan Sasaran Daerah merupakan kinerja yang akan menjadi perwujudan tercapainya Visi dan Misi Daerah. Tujuan dan Sasaran Daerah yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1: Meningkatnya kualitas sumber daya manusia

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) merupakan fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Toba menetapkan peningkatan kualitas SDM sebagai tujuan strategis dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Tujuan ini diarahkan untuk membangun manusia Toba yang sehat, cerdas, produktif, berdaya saing, serta berkarakter luhur.

Upaya pencapaian tujuan ini akan difokuskan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan yang inklusif dan berkualitas, serta peningkatan keterampilan dan kompetensi angkatan kerja lokal melalui pelatihan vokasional dan pengembangan talenta. Selain itu, pembangunan karakter generasi muda juga menjadi perhatian melalui pembinaan budaya, nilai-nilai kearifan lokal, dan penguatan pendidikan karakter. Pemerintah Kabupaten Toba juga berkomitmen untuk memperkuat perlindungan sosial bagi kelompok rentan, termasuk anak-anak, perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dengan sasaran daerah sebagai berikut:

Sasaran 1.1: Meningkatnya kualitas kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang unggul. Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan layanan promotif dan preventif, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga medis, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Upaya percepatan penurunan stunting, peningkatan gizi masyarakat, dan pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi prioritas dalam menciptakan generasi yang sehat, tangguh, dan produktif.

Sasaran 1.2: Meningkatnya akses terhadap pendidikan

Pendidikan yang berkualitas merupakan fondasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas dan kompetitif. Sasaran ini menekankan pada peningkatan akses, pemerataan, dan mutu pendidikan di seluruh jenjang. Pemerintah Kabupaten Toba akan terus mendorong peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana pendidikan yang memadai, serta penguatan kurikulum berbasis kearifan lokal dan teknologi. Selain itu, dukungan terhadap pendidikan non-formal dan vokasional juga

akan diperluas untuk menjawab tantangan dunia kerja dan perkembangan zaman. Melalui pendekatan yang inklusif dan partisipatif, diharapkan pendidikan di Kabupaten Toba mampu mencetak generasi pembelajar.

Sasaran 1.3: Menurunnya Permasalahan Sosial

Sasaran “Menurunnya Permasalahan Sosial” dimaknai sebagai kondisi yang menunjukkan adanya penurunan jumlah, intensitas, dan dampak dari berbagai persoalan sosial yang terjadi di masyarakat Kabupaten Toba. Permasalahan sosial tersebut meliputi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, lanjut usia terlantar, anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus, korban kekerasan, Penurunan PPKS, penyalahgunaan narkoba.

Sasaran ini menitikberatkan pada penguatan fungsi perlindungan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan kelompok rentan dan marginal, serta penanganan secara terpadu terhadap akar penyebab masalah sosial melalui pendekatan preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Penurunan permasalahan sosial diharapkan terjadi melalui peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar yang berkualitas, peningkatan peran serta masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan layanan sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

Capaian sasaran ini akan menjadi salah satu indikator keberhasilan Pemerintah Kabupaten Toba dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan tangguh secara sosial, sebagai bagian dari misi pembangunan daerah dalam RPJMD 2025–2029.

2. Tujuan 2: Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan

Infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan menjadi prasyarat utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk membangun infrastruktur yang tidak hanya memenuhi standar teknis dan fungsional, tetapi juga menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata, terutama di wilayah tertinggal, perdesaan, dan terpencil. Tujuan ini akan diwujudkan melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi yang mendukung konektivitas antarwilayah, pelayanan dasar, serta kemudahan akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Pembangunan infrastruktur akan diarahkan secara terpadu dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, efisiensi, dan daya guna, serta melibatkan partisipasi masyarakat dan sektor swasta. Melalui peningkatan indeks infrastruktur, Kabupaten Toba diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, membuka peluang usaha, dan mempercepat transformasi sosial ekonomi.

Sasaran 2.1: Meningkatnya Infrastruktur Berkualitas dan Berkeadilan

Ketersediaan infrastruktur dasar merupakan pondasi penting dalam penyediaan layanan publik yang optimal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sasaran ini mencerminkan upaya nyata Pemerintah Kabupaten Toba dalam memperluas dan memperkuat pembangunan infrastruktur dasar, seperti akses ja

lan yang layak, air bersih, sistem sanitasi, jaringan irigasi, serta infrastruktur pendidikan dan kesehatan. Penekanan juga diberikan pada penyediaan infrastruktur yang inklusif dan tangguh terhadap perubahan iklim serta bencana.

Melalui peningkatan Indeks Ketersediaan Infrastruktur, Pemerintah Daerah berupaya menjamin bahwa seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil dan perdesaan, mendapatkan hak yang setara dalam menikmati manfaat pembangunan. Sasaran ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan antarwilayah, meningkatkan mobilitas dan produktivitas, serta memperkuat fondasi bagi pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Tujuan 3: Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Toba, peningkatan produktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan menjadi salah satu tujuan strategis utama. Tujuan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan dengan mengoptimalkan potensi lokal secara berkelanjutan.

Kabupaten Toba memiliki beragam potensi unggulan, khususnya pada sektor pertanian, pariwisata, perikanan, kehutanan, dan ekonomi kreatif yang belum seluruhnya dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, melalui peningkatan produktivitas, pemerintah daerah berupaya mendorong transformasi ekonomi dari berbasis eksploitasi sumber daya alam menuju ekonomi yang bernilai tambah tinggi, berbasis inovasi, teknologi, dan partisipasi masyarakat.

Peningkatan produktivitas tidak hanya dimaknai sebagai peningkatan output ekonomi semata, tetapi juga sebagai upaya peningkatan efisiensi, kualitas, dan keberlanjutan sistem produksi dan distribusi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan untuk tidak hanya menciptakan pertumbuhan, tetapi juga mengurangi ketimpangan antar wilayah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Secara simultan, keberlanjutan menjadi prinsip utama yang melandasi arah pembangunan ekonomi daerah. Hal ini mencakup upaya pelestarian lingkungan hidup, efisiensi energi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim, yang seluruhnya merupakan bagian penting dari agenda pembangunan jangka menengah dan panjang Kabupaten Toba.

Sasaran 3.1: Meningkatnya Produksi Pertanian

Pertanian merupakan tulang punggung ekonomi Kabupaten Toba yang menyerap Sektor pertanian tetap menjadi sektor andalan dan tulang punggung ekonomi Kabupaten Toba, terutama dalam menyerap tenaga kerja dan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Peningkatan produksi pertanian diarahkan melalui modernisasi sistem budidaya, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta penguatan infrastruktur irigasi dan distribusi. Pemerintah Kabupaten Toba juga akan mendorong integrasi antara subsektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan, guna menciptakan efisiensi, diversifikasi produksi, dan peningkatan daya saing produk lokal. Dengan demikian, sektor pertanian akan semakin berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Sasaran 3.2: Meningkatnya pengembangan pariwisata

Kabupaten Toba memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, terutama karena letaknya yang strategis di kawasan Danau Toba sebagai destinasi super prioritas nasional. Pemanfaatan sektor ini akan difokuskan pada pengembangan destinasi berbasis alam dan budaya, peningkatan kualitas atraksi dan amenitas wisata, serta penguatan promosi digital. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat lokal akan diperkuat untuk menciptakan pariwisata yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat. Peningkatan pemanfaatan sektor pariwisata juga akan menjadi katalis bagi sektor ekonomi kreatif dan pengembangan produk lokal.

Sasaran 3.3: Terwujudnya Iklim Investasi yang Kompetitif

Penciptaan iklim investasi yang kondusif menjadi prioritas dalam mendorong masuknya investasi swasta dan memperluas kegiatan usaha di Kabupaten Toba. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan kemudahan berusaha melalui penyederhanaan perizinan, transparansi informasi investasi, serta penguatan infrastruktur penunjang kawasan industri dan pariwisata. Reformasi regulasi, digitalisasi pelayanan perizinan, dan pemberian insentif usaha akan didorong untuk menarik investor baru dan memperkuat pelaku usaha lokal. Dengan terciptanya iklim investasi yang kompetitif, pertumbuhan ekonomi daerah diharapkan akan semakin dinamis dan berkelanjutan.

Sasaran 3.4: Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan kekuatan utama ekonomi rakyat yang perlu terus didukung dan ditingkatkan kualitasnya. Pemerintah Kabupaten Toba akan memfokuskan program pada penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kapasitas manajemen usaha, akses pembiayaan, dan perluasan pasar bagi UMKM. Transformasi digital UMKM juga akan didorong untuk meningkatkan efisiensi usaha dan daya saing produk lokal. Dengan peningkatan kualitas koperasi dan UMKM, diharapkan sektor ini mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tangguh dan inklusif.

Sasaran 3.5: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

Produktivitas ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dilepaskan dari kelestarian lingkungan hidup. Sasaran ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan ekosistem alam. Pemerintah Kabupaten Toba akan memperkuat upaya konservasi sumber daya alam, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah yang terintegrasi, serta edukasi lingkungan kepada masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas lingkungan hidup, produktivitas ekonomi dapat terus tumbuh tanpa mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan daerah.

4. Tujuan 4: Menurunnya Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas utama dalam pembangunan jangka menengah Kabupaten Toba. Tujuan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Kemiskinan tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga terkait erat dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, serta layanan dasar lainnya. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan diarahkan secara multidimensional dan integratif, dengan memperkuat peran perlindungan sosial, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah. Penurunan angka kemiskinan ditargetkan tidak sekadar dari sisi statistik, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat. Pembangunan yang inklusif, berbasis komunitas, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan menjadi pendekatan utama untuk memastikan tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*).

Sasaran 4.1: Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat

Sasaran ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antar kelompok masyarakat yang diukur melalui indikator Gini Ratio, melalui peningkatan akses masyarakat miskin dan rentan terhadap kesempatan ekonomi, lapangan kerja, dan usaha produktif, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Pencapaian sasaran ini diharapkan dapat mendorong distribusi hasil pembangunan yang lebih adil dan berkontribusi langsung terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Sasaran 4.2: Meningkatnya perlindungan sosial

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan, kualitas, dan ketepatan sasaran perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, rentan, dan kelompok berisiko, guna mengurangi beban pengeluaran serta mencegah munculnya kemiskinan baru. Upaya peningkatan perlindungan sosial dilakukan melalui penguatan program bantuan sosial, jaminan sosial, serta peningkatan akurasi data penerima manfaat. Dengan meningkatnya perlindungan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, diharapkan daya tahan sosial ekonomi masyarakat semakin kuat dan berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

5. Tujuan 5: Meningkatnya kemampuan keuangan daerah

Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu indikator utama dalam mewujudkan kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah. Tujuan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Toba untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui optimalisasi penerimaan dari sektor perpajakan daerah. Rasio pajak terhadap PDRB digunakan untuk mengukur kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Upaya pencapaian tujuan ini akan dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam

pemungutan pajak, serta penyempurnaan regulasi dan tata kelola pajak daerah. Dengan meningkatkan rasio pajak terhadap PDRB, diharapkan Pemerintah Daerah dapat memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program-program pembangunan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara berkelanjutan.

Sasaran 5.1: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas fiskal daerah yang tercermin dari meningkatnya rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Pencapaian sasaran dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber PAD secara berkelanjutan, peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, serta penguatan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. Dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, diharapkan ketergantungan terhadap transfer pusat dapat berkurang dan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah dapat ditingkatkan secara mandiri dan berkelanjutan.

6. Tujuan 6: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas

Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi prasyarat utama dalam mendukung pencapaian seluruh tujuan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Toba menetapkan tujuan strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas, yang mampu mendorong terciptanya pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Tujuan ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan integritas dan kompetensi aparatur sipil negara, serta membangun sistem manajemen kinerja dan pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) tidak hanya memperkuat kepercayaan publik, tetapi juga mempercepat proses pembangunan dengan meminimalkan inefisiensi dan kebocoran sumber daya.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan mendorong digitalisasi, reformasi birokrasi, dan sistem pengawasan yang efektif, pelayanan publik diharapkan dapat menjadi lebih mudah diakses, cepat, tepat sasaran, dan inklusif. Program benar-benar menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat.

Sasaran 6.1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi, Pemerintah Kabupaten Toba menargetkan peningkatan akuntabilitas kinerja sebagai sasaran utama. Akuntabilitas bukan hanya pada aspek pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga pada pencapaian hasil dan dampak program pembangunan bagi masyarakat.

Langkah-langkah strategis dalam mencapai sasaran ini antara lain:

- 1) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
- 2) Penerapan manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management),
- 3) Transparansi dalam penganggaran dan pelaporan,

- 4) Peningkatan peran pengawasan internal dan partisipasi publik dalam evaluasi kinerja pemerintah.

Dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja, diharapkan tercipta kultur birokrasi yang berintegritas dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menjawab tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih, melayani, dan terpercaya

7. Tujuan 7: Meningkatnya Kondisi Masyarakat yang Tenteram dan Tertib

Pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga sangat bergantung pada terciptanya kondisi sosial yang aman, tertib, dan tenteram. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Toba menetapkan tujuan strategis untuk meningkatkan kondisi masyarakat yang harmonis, taat hukum, serta tangguh dalam menghadapi potensi gangguan dan bencana.

Kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib merupakan fondasi utama bagi stabilitas daerah dan keberlanjutan pembangunan. Tenteram berarti terwujudnya rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat, sementara tertib mencerminkan adanya keteraturan sosial dan kepatuhan terhadap norma serta aturan yang berlaku. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial yang kondusif.

Selain itu, ketenteraman masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan daerah dalam merespons dan menghadapi risiko bencana alam dan non-alam. Kabupaten Toba sebagai wilayah yang memiliki potensi risiko geologis, hidrometeorologis, maupun kebencanaan sosial, perlu memperkuat sistem ketangguhan masyarakat dalam upaya pencegahan, mitigasi, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana

Sasaran 7.1: Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda

Kepatuhan terhadap Perda merupakan indikator kedewasaan sosial dan keterlibatan warga dalam menjaga ketertiban umum. Pemerintah daerah akan terus mendorong penyebarluasan informasi regulasi, peningkatan edukasi hukum, dan penguatan penegakan Perda melalui pendekatan persuasif, partisipatif, dan represif yang proporsional.

Sasaran 7.2: Meningkatnya Ketangguhan terhadap Bencana

Sebagai daerah dengan potensi risiko bencana, Pemerintah Kabupaten Toba menempatkan peningkatan ketangguhan masyarakat terhadap bencana sebagai langkah strategis untuk menjaga keselamatan jiwa dan aset publik. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, pembangunan sistem peringatan dini, serta edukasi dan pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat menjadi bagian integral dari upaya ini. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan kolaboratif lintas sektor, Kabupaten Toba diarahkan untuk menjadi daerah yang tangguh, siap menghadapi bencana, serta mampu pulih lebih cepat pasca kejadian.

8. Tujuan 8: Meningkatnya Pelestarian Budaya Daerah

Budaya adalah identitas dan jati diri masyarakat Toba yang harus dijaga dan diwariskan lintas generasi. Pemerintah Kabupaten Toba memandang pelestarian

budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan yang tidak hanya melestarikan warisan masa lalu, tetapi juga mengaktualisasikannya dalam kehidupan modern. Tujuan ini mencakup perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya lokal untuk memperkuat karakter daerah serta memperkaya kehidupan sosial dan pendidikan.

Sasaran 8.1: Meningkatnya Pelestarian Budaya daerah

Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk melestarikan warisan budaya daerah, baik yang bersifat tangible (bangunan, situs, artefak) maupun intangible (bahasa, musik, adat istiadat). Upaya ini mencakup identifikasi, dokumentasi, registrasi, serta revitalisasi nilai-nilai dan ekspresi budaya lokal. Keterlibatan masyarakat adat, lembaga budaya, serta generasi muda menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan warisan budaya sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan daya tarik pariwisata budaya yang berkelanjutan.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Daerah selama periode RPJMD diukur dengan indikator-indikator dalam Tabel 3.6.

Tabel 3.6. . Misi, Tujuan, Sasaran, dan Target Tujuan, Sasaran Tahun 2025-2030

MISI	Tujuan/Sasaran	SASARAN	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	78,74	79,15	79,57	79,99	80,42	80,85
		Meningkatnya kualitas kesehatan	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	21,46	19,31	17,64	16,25	15,13	14,13
			Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,89	75,19	75,49	75,79	76,1	76,41
		Meningkatnya akses terhadap pendidikan	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,67	13,72	13,78	13,84	13,91	13,98
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (tahun)	10,80	10,82	10,89	10,96	11,03	11,11
			Rasio permasalahan sosial (per 100.000 penduduk)	3.449	3.432	3.416	3.399	3.383	3.366
Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan.		Indeks Infrastruktur (Indeks)	0,5061	0,5114	0,5202	0,5298	0,5419	0,5570
		Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan	Indeks Infrastruktur (Indeks)	0,5061	0,5114	0,5202	0,5298	0,5419	0,5570
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah	Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan		PDRB Per Kapita (Rp. Juta Per Tahun)	49,50	51,80	54,30	57,00	60,00	63,50
		Meningkatnya produksi pertanian	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	30,70	30,71	30,72	30,73	30,74	30,75
		Meningkatnya pengembangan pariwisata	Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman (%)	2,56	2,58	2,60	2,62	2,65	2,68
			Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)	8,16	10,45	11,45	12,45	13,45	14,45
			Persentase koperasi yang berkualitas (%)	0	1,69	3,39	5,08	6,78	8,47

MISI	Tujuan/Sasaran	SASARAN	Indikator	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,430	0,431	0,432	0,433	0,434	0,435
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	71.95-72.05	72.12-72.22	72.30-72.40	72.47-72.57	72.65-72.75	72.82-72.92
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.		Rasio PAD Terhadap APBD (%)	12,41	12,78	13,42	14,08	14,57	15,24
	Menurunnya Kemiskinan	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Rasio PAD Terhadap APBD (%)	12,41	12,78	13,42	14,08	14,57	15,24
			Tingkat Kemiskinan ((%))	7,87	7,63	7,38	7,13	6,87	6,60
		Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	Rasio Gini (Indeks)	0,344	0,340	0,336	0,332	0,328	0,324
		Meningkatnya perlindungan sosial	Cakupan Penerima Bantuan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4,01	4,10	4,15	4,25	4,40	4,51
			Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	67,00	70,00	73,00	76,00	79,00	82,00
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Hasil Evaluasi SAKIP (Nilai)	63,50	67,10	70,80	74,50	78,10	82,25
Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Meningkatnya kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib.		Indeks Keamanan dan Ketertiban (Indeks)	0,999	0,999	1	1	1	1
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Persentase Penegakan Perda (%)	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya pelestarian budaya daerah.	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	107,20	107,15	106,5	104	101,5	99
Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal			Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD) (Indeks)	37,31	38,24	45,37	52,48	53,36	54,32
		Meningkatnya pelestarian budaya daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD) (Indeks)	37,31	38,24	45,37	52,48	53,36	54,32

**Tabel 3.7. Penyelesaian Sasaran Pembangunan RPJMD Kabupaten Toba 2025-2029 dengan
Sasaran Pembangunan RPJMN 2025-2029 dan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2025-2029**

Indikator	Satuan	RPJMN			RPJMD Provinsi Sumatera Utara			RPJMD KAB.TOBA						
		Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Baseline 2024	Target 2025	Target 2029	Baseline 2024	Target 2025	Target 2026	Baseline 2027	Baseline 2028	Baseline 2029	Target 2030
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5,05	5,3	8	5,03	5,20-5,60	7,60-8,00	4.84	4.90-5.00	5.00-5.15	5.15-5.25	5.25-5.35	5.35-5.50	5.50-5.65
PDRB Per Kapita (rp juta)	Juta	4.870 (2023)	5.410	8.000	73,57	78,4	115,3	47.45	49.5	51.8	54.3	57	60	63.5
Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Persen	7,9 (2022)	8,1	9,1	5,2	5,2	5,3	0.90	0,81-0,89	0,81-0,89	0,81-0,89	0,81-0,89	0,81-0,89	0,81-0,89
Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	9,03	7,0 - 8,0	4,5 - 5,0	7,19	6,69 - 7,17	2,82 - 3,82	8.07	7.87	7.63	7.38	7.13	6.87	6.6
Rasio Gini	Poin	0,379	0,378 - 0,382	0,372-0,375	0,306	0,303 - 0,305	0,287-0,291	0.348	0.344	0.34	0.336	0.332	0.328	0.324
Indeks Modal Manusia	Poin	0,54 (2020)	0,56	0,59	N/A	0,54	0,57	78.44	78.74	79.15	79.57	79.99	80.42	80.85
Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	34,09 (2022)	35,53	45,17	N/A	1	16,88		137,330.04	150,042.36	163,926.41	179,095.20	195,667.63	213,773.58
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72,54 (2023)	76,49	77,2	73,96	77,2	77,87	71.93	71.95-72.05	72.12-72.22	72.30-72.40	72.47-72.57	72.65-72.75	72.82-72.92
Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,91	4,50-5,00	4,00-4,71	5,6	5,27-5,56	4,74-5,20	1.09	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04	1.03

3.2. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Penyusunan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus sebagai upaya nyata mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.

3.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pembangunan daerah disusun sebagai pendekatan sistematis untuk mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat daya saing, dan mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Strategi ini menekankan pada penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur dasar, serta reformasi tata kelola pemerintahan. Strategi pembangunan juga diarahkan untuk memperluas akses pelayanan publik yang berkualitas dan merata, memperkuat ketahanan sosial dan lingkungan, serta mendorong kemandirian desa dan masyarakat.

Arah kebijakan pembangunan diturunkan dari strategi yang telah dirumuskan, dengan fokus pada penyelenggaraan pembangunan yang efektif, efisien, dan berbasis hasil. Pemerintah Kabupaten Toba berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan, mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan seperti pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif, serta memperkuat konektivitas antarwilayah dan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan publik. Arah kebijakan juga diarahkan pada pelestarian lingkungan, pengurangan risiko bencana, serta peningkatan kapasitas fiskal melalui penguatan pendapatan daerah.

Strategi dan arah Kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8. Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Toba Tahun 2025 - 2029

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak	Penguatan Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan	- Pembangunan dan rehabilitasi puskesmas, rumah sakit, dan posyandu
			- Pengadaan peralatan medis dan ambulans
			- Peningkatan akses layanan kesehatan di daerah terpencil
		Meningkatkan budaya hidup sehat	- Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
			- Penyuluhan gizi seimbang dan PHBS
			- Program pencegahan penyakit menular dan tidak menular
		Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan	- Peningkatan kapasitas tenaga medis dan paramedis
			- Implementasi sistem antrean dan rekam medis elektronik
			- Penyediaan layanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap yang terstandar
		Meningkatkan mutu sarana prasarana pendidikan	- Rehabilitasi ruang kelas dan fasilitas sekolah
			- Pengadaan peralatan pembelajaran berbasis TIK
			- Pembangunan unit sekolah baru di wilayah yang membutuhkan
		Meningkatkan mutu proses pembelajaran	- Pengembangan kurikulum berbasis kompetensi
			- Pelatihan guru terkait metode pembelajaran aktif
			- Pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran
		Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	- Pelatihan berkelanjutan bagi guru dan tenaga kependidikan
			- Sertifikasi profesi guru
			- Redistribusi guru antar sekolah
		Pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	- Insentif bagi guru di daerah terpencil
			- Program perpustakaan keliling
			- Kegiatan membaca bersama di komunitas
		Meningkatkan literasi masyarakat	- Pemanfaatan rumah baca digital
			- Layanan darurat 24 jam untuk korban kekerasan
			- Penyediaan rumah aman dan layanan rehabilitasi

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
			- Peningkatan kapasitas petugas penanganan PPKS
		Meningkatkan kualitas data PPKS	- Pemutakhiran data PPKS secara berkala
			- Integrasi data dengan sistem nasional
			- Pelatihan operator data PPKS di tingkat daerah
Meningkatnya infrastruktur berkualitas dan berkeadilan	Peningkatan ketersediaan dan pemerataan layanan infrastruktur	Meningkatkan pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas untuk mendukung pembangunan wilayah yang merata	- Pembangunan dan rehabilitasi jembatan, dan dermaga
		Peningkatan infrastruktur pendukung untuk pengembangan pertanian dan pariwisata;	- Pembangunan irigasi pertanian dan embung
			- Penyediaan jalan usaha tani dan akses ke sentra produksi
			- Pembangunan fasilitas wisata seperti dermaga wisata, jalur trekking, dan area parkir
		Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, air minum dan sanitasi layak,	- Program rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah
			- Pembangunan jaringan air bersih dan instalasi pengolahan air
			- Pembangunan dan rehabilitasi jamban sehat
		Pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman kumuh	- Program penataan kawasan kumuh
			- Peningkatan sistem drainase lingkungan
		Meningkatkan sarana dan prasarana dasar untuk pengembangan kawasan pertumbuhan kawasan Perkotaan Balige, KPP Ajibata dan pusat-pusat kegiatan strategis	- Pembangunan fasilitas umum di kawasan perkotaan (pasar modern, terminal)
			- Peningkatan kualitas jalan dan drainase perkotaan
			- Revitalisasi kawasan pusat kota dan kawasan wisata
		Peningkatan pengelolaan lalu lintas yang berkualitas	- Pemasangan rambu lalu lintas dan marka jalan
			- Pengembangan sistem manajemen lalu lintas berbasis teknologi
			- Penataan parkir dan jalur pedestrian

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah	Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pertanian;	- Pengadaan alat dan mesin pertanian modern
			- Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi dan embung
			- Penyediaan gudang dan sarana pascapanen
			- Pelatihan teknis budidaya dan manajemen usaha tani
			- Penguatan kelembagaan kelompok tani dan gapoktan
	Pengembangan pariwisata berkelanjutan	Meningkatkan kualitas SDM dan kapasitas kelembagaan petani	- Pendampingan dan penyuluhan pertanian berbasis teknologi
			- Pembangunan infrastruktur penunjang destinasi (toilet, parkir, signage)
			- Revitalisasi objek wisata unggulan
			- Fasilitasi pelaku ekonomi kreatif berbasis budaya lokal
			- Pelatihan pemandu wisata dan manajemen homestay
	Peningkatan pendidikan dan latihan kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Meningkatkan kualitas SDM pelaku pariwisata.	- Sertifikasi kompetensi SDM pariwisata
			- Penyusunan dan publikasi kalender event tahunan
			- Pemasaran digital melalui media sosial dan platform daring
			- Kerja sama promosi dengan agen perjalanan dan komunitas wisata
			- Program penempatan tenaga kerja di sektor prioritas
	Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru		- Job fair dan portal lowongan kerja terintegrasi
			- Kemitraan dengan sektor swasta untuk penyerapan tenaga kerja
			- Fasilitasi wirausaha baru melalui pelatihan dan modal usaha

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
			- Inkubasi bisnis dan startup berbasis teknologi
			- Program padat karya produktif
		Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja yang berdaya saing	- Pelatihan vokasi berbasis industri
			- Sertifikasi kompetensi tenaga kerja
			- Kerja sama pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri (DUDI)
		Meningkatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja	- Sosialisasi dan pelatihan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
			- Pengawasan penerapan standar K3 di perusahaan
			- Penyediaan fasilitas kesehatan kerja
	Penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM yang berdaya saing	- Digitalisasi manajemen koperasi dan UMKM
			- Pelatihan manajemen usaha dan pemasaran
			- Akses pembiayaan dan permodalan
		Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil	- Pendampingan usaha mikro berbasis potensi lokal
			- Fasilitasi perizinan usaha kecil
			- Pengembangan jejaring pasar dan e-commerce
	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha;	- Pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3 dan medis
			- Kampanye kesadaran lingkungan di masyarakat dan industri
			- Penerapan teknologi ramah lingkungan
		Penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	- Program bank sampah dan daur ulang
			- Pelatihan pengelolaan sampah rumah tangga
			- Insentif bagi pengelola sampah mandiri
		Meningkatkan sarana prasarana dan pengelolaan persampahan;	- Pembangunan TPA modern berbasis sanitary landfill
			- Pengadaan armada pengangkut sampah
			- peningkatan sistem pemilahan sampah dari sumber
		Meningkatkan kualitas air, udara dan tutupan lahan	- Rehabilitasi daerah aliran sungai
			- Penanaman pohon di kawasan kritis
			- Pemantauan kualitas udara secara berkala

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan pengawasan terhadap izin lingkungan	- Audit kepatuhan lingkungan pada perusahaan
			- Penguatan kapasitas pengawas lingkungan
			- Sanksi tegas untuk pelanggaran izin lingkungan
		Meningkatkan pengelolaan lahan	- Penataan tata guna lahan berkelanjutan
			- Pencegahan alih fungsi lahan produktif
			- Pengembangan pertanian ramah lingkungan
	Mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia bidang perpajakan untuk menunjang pelayanan prima dan peningkatan sumber-sumber pendapatan	Menyediakan database subjek dan objek pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Toba yang <i>up to date</i>	- Pengembangan sistem informasi pajak terintegrasi
			- Pemutakhiran data subjek dan objek pajak secara berkala
			- Digitalisasi proses pendaftaran dan pendataan pajak
		Menyempurnakan regulasi terkait dengan penguatan sistem pemungutan dan pengendalian, serta penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah	- Penyusunan dan revisi perda/perbup pajak daerah
			- Penyesuaian tarif pajak sesuai potensi dan kemampuan masyarakat
			- Penguatan mekanisme pengendalian pemungutan pajak
		Menigkatkan basis pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak serta mendorong sektor informal dan formal	- Sosialisasi kewajiban pajak bagi pelaku usaha
			- Razia dan inspeksi kepatuhan pajak
			- Program insentif bagi wajib pajak patuh
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang akuntabel, efisiensi, transparan, profesionalisme dan bertanggung jawab	- Pelatihan profesionalisme aparatur pajak
			- Audit pengelolaan pajak secara rutin
			- Laporan publik terkait penggunaan dana pajak
		Menggali sumber-sumber penerimaan pajak baru	- Identifikasi potensi objek pajak baru
			- Penetapan retribusi sektor potensial
			- Inovasi produk pajak daerah berbasis kearifan lokal

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Pendapatan Pajak Daerah	- Pelatihan teknis dan manajerial aparatur pajak
			- Sertifikasi kompetensi petugas pajak
			- Magang dan studi banding ke daerah lain yang sukses
		Penyusunan studi kelayakan dan pembentukan BUMD berbasis potensi lokal	- Kajian potensi usaha daerah yang menguntungkan
			- Penyusunan rencana bisnis BUMD
			- Pendampingan pembentukan dan pengelolaan BUMD
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas yang Efektif, Efisien dan Transparan berorientasi pada pelayanan	Peningkatan kualitas regulasi daerah	- Penyusunan dan revisi perda sesuai kebutuhan daerah
			- Harmonisasi regulasi antar perangkat daerah
			- Sosialisasi regulasi baru kepada masyarakat dan ASN
		Percepatan digitalisasi layanan publik untuk penguatan aspek pemerintahan digital	- Pengembangan aplikasi layanan publik terintegrasi
			- Penyediaan infrastruktur TIK yang memadai
			- Pelatihan pegawai dalam pengoperasian sistem digital
		Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat	- Penguatan kanal pengaduan masyarakat berbasis online dan offline
			- Standarisasi SOP penanganan pengaduan
			- Monitoring tindak lanjut laporan secara real time
		Penguatan kapasitas aparatur daerah baik dari sisi kuantitas yang tepat guna, kualitas kinerja, dan profesionalisme	- Rekrutmen ASN berbasis kompetensi
			- Pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi profesi
			- Sistem penilaian kinerja berbasis output dan outcome
		Penataan perangkat daerah menuju organisasi pemerintah daerah yang modern, gesit, adaptif, dan profesional	- Review dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah
			- Penetapan indikator kinerja organisasi

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
			- Penerapan manajemen perubahan
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	- Implementasi e-planning, e-budgeting, dan e-procurement
			- Publikasi data perencanaan dan pengadaan secara terbuka
			- Penguatan pengawasan internal dan eksternal
		Penguatan penerapan sistem merit dalam pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja	- Penerapan sistem merit berbasis penilaian kinerja dan kompetensi
			- Sistem promosi dan mutasi berbasis transparansi
			- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem merit
		Penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi	- Dukungan anggaran riset kebijakan dan inovasi daerah
			- Kolaborasi dengan perguruan tinggi dan lembaga riset
			- Pengembangan inovasi layanan publik
		Meningkatkan kapasitas manajemen pengawasan (APIP)	- Pelatihan dan sertifikasi auditor internal pemerintah
			- Penyediaan alat bantu audit berbasis teknologi
			- Penguatan fungsi pengawasan preventif
		Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	- Implementasi sistem akuntansi daerah berbasis akrual
			- Inventarisasi dan optimalisasi aset daerah
			- Audit keuangan dan aset secara berkala
		penguatan ideologi kebangsaan, demokrasi yang partisipatif dan kerukunan umat beragama.	- Sosialisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendidikan, forum, dan media lokal.
			- Penguatan peran FKDM dan FPK dalam menjaga persatuan dan kesatuan.
			- Fasilitasi pendidikan politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam pemilu.
			- Pembinaan partai politik dan ormas agar berperan aktif secara konstruktif dan berintegritas.

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan keamanan dan ketertiban	Penguatan kapasitas penegakan perda.	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas	- Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam pencegahan dan penanganan potensi konflik keagamaan.
			- Peningkatan jumlah dan kapasitas personel keamanan di wilayah rawan kriminalitas.
			- Patroli rutin gabungan antara aparat kepolisian, Satpol PP, dan masyarakat (siskamling modern).
			- Program edukasi dan sosialisasi pencegahan kejahatan di sekolah, pasar, dan lingkungan pemukiman.
		Penguatan kapasitas penegakan perda	- Penguatan peran forum kemitraan polisi dan masyarakat (FKPM).
			- Pelatihan teknis dan hukum bagi aparat Satpol PP.
			- Penyediaan sarana dan prasarana pendukung penegakan perda
			- Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam penegakan perda.
	Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana dan Kebakaran	meningkatkan Kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana	- Sosialisasi perda secara masif melalui media cetak, elektronik, dan digital.
			- Penerapan sistem pelaporan dan tindak lanjut pelanggaran perda berbasis digital.
			- Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana di tingkat desa/kelurahan.
			- Pembentukan dan penguatan kelompok siaga bencana berbasis masyarakat.
		Meningkatkan Evakuasi Korban Bencana	- Penyediaan sarana dan prasarana peringatan dini (early warning system).
			- Penyusunan peta risiko bencana dan jalur evakuasi di wilayah rawan.
			- Pengadaan armada dan peralatan evakuasi (perahu, tandu, kendaraan penyelamat).
			- Pembentukan tim evakuasi terlatih di setiap kecamatan.
			- Pembangunan dan penyiapan lokasi pengungsian sementara yang layak.
			- Pelatihan pertolongan pertama bagi petugas dan relawan.

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
		Meningkatnya pemberian bantuan sandang dan pangan bagi Korban Bencana	- Penyediaan gudang logistik bencana di wilayah strategis. - Pengadaan stok darurat bahan pangan, air bersih, dan pakaian. - Mekanisme distribusi cepat bantuan melalui sistem koordinasi terpadu. - Kerja sama dengan pihak swasta/LSM untuk penyaluran bantuan.
		Meningkatkan penanggulangan kejadian kebakaran	- Peningkatan kapasitas dan jumlah personel pemadam kebakaran. - Pengadaan dan pemeliharaan armada damkar dan alat pemadam portabel. - Sosialisasi pencegahan kebakaran di lingkungan permukiman dan pasar. - Penetapan jalur akses darurat dan hidran umum di lokasi rawan kebakaran.
Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal	Ketahanan budaya	Penyusunan muatan lokal berbasis budaya daerah dalam kurikulum sekolah	- Menyusun kurikulum muatan lokal yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya daerah. - Melibatkan tokoh adat dan budayawan dalam perumusan materi ajar. - Mengintegrasikan materi budaya lokal pada berbagai mata pelajaran. - Membuat buku teks, modul, dan video pembelajaran yang menampilkan kearifan lokal. - Mengembangkan media digital interaktif yang mengangkat budaya daerah. - Memanfaatkan cerita rakyat, lagu, dan permainan tradisional sebagai media ajar. - Mengadakan workshop dan pelatihan guru terkait metode pembelajaran berbasis budaya. - Memberikan sertifikasi kompetensi guru dalam pengajaran berbasis kearifan lokal. - Menyediakan panduan praktis bagi guru untuk integrasi budaya di kelas. - Menyelenggarakan festival budaya tahunan. - Berpartisipasi dalam pameran seni dan budaya tingkat nasional/internasional.
		Pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran berbasis budaya lokal	
		Pelatihan guru dalam pengajaran berbasis kearifan lokal	
		Promosi budaya melalui festival, pameran, dan kolaborasi antar daerah.	

MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	INTERVENSI ARAH KEBIJAKAN
			- Mengadakan pertukaran budaya dengan daerah lain.
		Peningkatan Inventarisasi dan Dokumentasi WBTb	- Melakukan pendataan menyeluruh warisan budaya takbenda (WBTb).
			- Membuat database digital WBTb yang mudah diakses publik.
			- Mendokumentasikan tradisi dan seni dalam bentuk audiovisual
		Pemberdayaan lembaga adat, seniman, dan komunitas budaya lokal.	- Memberikan dukungan pembiayaan dan fasilitas kepada lembaga adat dan komunitas seni.
			- Mengadakan pelatihan manajemen dan pemasaran untuk pelaku budaya.
			- Mendorong kolaborasi antara seniman lokal dan pelaku industri kreatif.

Sejalan dengan strategi dan arah kebijakan tersebut, program prioritas pembangunan daerah ditetapkan secara selektif dan terarah, guna memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program-program tersebut mencakup peningkatan mutu dan akses pendidikan serta layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas wilayah, pengembangan pertanian modern dan berkelanjutan, penguatan sektor pariwisata berbasis budaya dan alam, serta pemberdayaan masyarakat desa secara inklusif. Selain itu, reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan partisipatif menjadi bagian integral dari prioritas pembangunan lima tahun ke depan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis data, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menciptakan transformasi pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika global dan lokal, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Toba sebagai wilayah yang maju, berdaya saing, dan sejahtera.

3.2.2. Penahapan Pembangunan

Penahapan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah serta memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan secara sistematis dan berkelanjutan. Penahapan ini juga memperhatikan capaian pembangunan sebelumnya, potensi dan permasalahan daerah, serta arah kebijakan nasional dan provinsi. RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari tahapan Pertama dari RPJPD Kabupaten Toba Tahun 2025–2045. Dengan demikian, RPJMD ini memiliki posisi strategis dalam menjembatani keberlanjutan pembangunan lintas periode, sekaligus menginisiasi transformasi pembangunan menuju visi jangka panjang daerah 2045. Penahapan ini akan dilaksanakan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada hasil (outcome-based). Setiap tahapan pembangunan akan dievaluasi secara periodik untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan akuntabilitas pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pencapaian Visi Toba Mantap dilakukan secara bertahap dimulai dari tahun 2026 dengan harapan dapat diwujudkan pada tahun 2030. Pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, dimulai dari langkah perkuatan landasan pembangunan hingga kepada terwujudnya Toba Mantap. Penahapan pembangunan selama 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.9. Penahapan Pembangunan 2026 - 2030

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
Penyiapan landasan pembangunan menuju Toba Mantap	Peningkatan landasan pembangunan	Akselerasi pembangunan	Pemantapan capaian prioritas pembangunan	Perwujudan Toba Mantap sebagai landasan menuju Toba Unggul, Maju dan Berkelanjutan
• Intensifikasi potensi pariwisata, pertanian, dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; • Peningkatan tata kelola pemerintahan • Peningkatan penyediaan layanan infrastruktur dasar publik, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; • Menggali dan mengembangkan potensi pendapatan daerah.	• Peningkatan pengelolaan potensi daerah dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; • Meningkatkan kualitas pelayanan publik; • Pemerataan infrastruktur dasar publik, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.	• Evaluasi capaian pelaksanaan pembangunan; • Akselerasi pembangunan infrastruktur; • Penguatan layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; • Meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan publik;	• Optimalisasi pembangunan infrastruktur; • Optimalisasi layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial; • Pemantapan kualitas pelayanan publik;	

1. Tahap I (Tahun 2026): Penyiapan Landasan Pembangunan Menuju Toba Mantap.

Pada tahun pertama pelaksanaan RPJMD 2025–2029, pembangunan difokuskan pada penyiapan landasan yang kokoh untuk mendukung arah transformasi menuju visi "Toba Mantap". Tahap ini menjadi fondasi awal guna memastikan pembangunan lima tahun ke depan berjalan secara terarah, bertahap, dan berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan utama yang menjadi prioritas pada Tahap I meliputi:

- 1) Intensifikasi Potensi Ekonomi Daerah
- Penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi menjadi fokus utama. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan basis ekonomi yang produktif dan berdaya saing sebagai penggerak utama pertumbuhan wilayah.
- 2) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
- Dilakukan perbaikan sistem manajemen pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif, termasuk optimalisasi sistem perencanaan, penganggaran, serta pengawasan internal.
- 3) Pemenuhan Layanan Dasar Publik
- Pemerintah daerah akan memperkuat akses dan kualitas layanan dasar seperti infrastruktur publik, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, sebagai bentuk kehadiran Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 4) Penggalan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
- Untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan akan dilakukan melalui pengelolaan potensi PAD secara inovatif dan berkelanjutan, serta optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

Tahap ini bersifat strategis dan mendasar, karena akan menentukan keberhasilan tahapan pembangunan selanjutnya. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip kolaborasi, inklusivitas, dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat luas.

2. Tahap II (Tahun 2027): Peningkatan Landasan Pembangunan

Memasuki tahun kedua implementasi RPJMD, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan dan penguatan landasan pembangunan yang telah dibangun pada tahap sebelumnya. Tahun 2027 menjadi fase konsolidasi dan akselerasi yang menitikberatkan pada kualitas tata kelola dan pemerataan hasil pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Toba.

Adapun prioritas utama dalam Tahap II ini mencakup:

- 1) Peningkatan Pengelolaan Potensi Daerah dan Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi.

Penguatan kelembagaan dan sistem pengelolaan potensi daerah terus ditingkatkan, terutama dalam hal optimalisasi sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, dan UMKM. Pengembangan kawasan strategis dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru akan diperluas untuk menciptakan efek multiplikasi ekonomi di wilayah sekitar.

- 2) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Upaya reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, baik dari sisi kecepatan, akurasi, maupun kepuasan masyarakat. Digitalisasi layanan, integrasi sistem informasi, serta peningkatan kapasitas SDM menjadi strategi utama dalam perbaikan pelayanan.

- 3) Pemerataan Infrastruktur dan Layanan Dasar

Pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, serta sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan terus dilanjutkan secara merata, dengan fokus pada wilayah yang tertinggal atau sulit dijangkau. Perlindungan sosial juga diperluas untuk menjangkau kelompok rentan dan miskin ekstrem.

Tahap ini bersifat konsolidatif dan transformatif, yang menjadi jembatan penting untuk mendorong capaian pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berdampak nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Toba.

3. Tahap III (Tahun 2028): Akselerasi Pembangunan

Tahap ketiga dalam pelaksanaan RPJMD diarahkan pada akselerasi pembangunan, yang ditujukan untuk mempercepat pencapaian target-target pembangunan daerah sekaligus menyempurnakan hasil-hasil yang telah dicapai pada tahap sebelumnya. Tahun 2028 menjadi momen penting untuk melakukan penyesuaian arah kebijakan guna memastikan capaian RPJMD berada pada jalur yang tepat menuju visi “Toba Mantap”.

Fokus utama pada tahap ini meliputi:

- 1) Evaluasi Capaian Pelaksanaan Pembangunan

Sebagai bagian dari penguatan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap capaian program, kegiatan, dan kinerja perangkat daerah. Hasil evaluasi ini menjadi dasar dalam menyusun langkah strategis dan koreksi kebijakan di tahap akhir RPJMD.

2) Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur dipercepat untuk mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, dan akses terhadap layanan publik. Fokus diarahkan pada penyelesaian proyek-proyek strategis dan percepatan infrastruktur dasar yang bersifat mendesak.

3) Penguatan Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial

Pelayanan dasar di sektor kesehatan dan pendidikan terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, sistem perlindungan sosial diperluas dan diperkuat untuk menjangkau kelompok rentan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

4) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik

Pembangunan diarahkan untuk mengurangi kesenjangan wilayah dan sosial dengan memperluas jangkauan pelayanan publik serta memastikan mutu layanan yang setara di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal.

Tahap ini bersifat percepatan dan penyempurnaan, yang sangat krusial untuk memastikan semua program strategis berada dalam posisi optimal menuju penyelesaian di tahun terakhir RPJMD.

4. Tahap IV (Tahun 2029): Pemantapan Capaian Prioritas Pembangunan

Tahap terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 difokuskan pada pemantapan dan penyempurnaan capaian prioritas pembangunan. Tahun 2029 menjadi fase penutup yang menekankan pada optimalisasi hasil pembangunan, keberlanjutan program strategis, serta penguatan fondasi kelembagaan dan pelayanan publik.

Adapun fokus utama dalam Tahap IV ini meliputi:

1) Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur

Penyelesaian dan pemanfaatan infrastruktur strategis menjadi prioritas, guna memastikan infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

2) Optimalisasi Layanan Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial

Layanan dasar difokuskan pada peningkatan mutu dan jangkauan, dengan orientasi pada pencapaian standar pelayanan minimal (SPM) dan pemerataan layanan yang adil, inklusif, serta berkeadilan sosial, khususnya bagi kelompok rentan dan marjinal.

3) Pemantapan Kualitas Pelayanan Publik

Penguatan sistem pemerintahan yang adaptif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima menjadi target utama. Inovasi pelayanan, digitalisasi birokrasi, dan penguatan budaya kerja ASN menjadi bagian integral dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Tahap ini bersifat finalisasi dan konsolidasi capaian, serta menjadi landasan penting dalam penyusunan RPJMD periode berikutnya. Pemantapan diharapkan tidak hanya mencerminkan keberhasilan pelaksanaan RPJMD 2025–2029, tetapi juga menjadi warisan pembangunan yang berkelanjutan menuju visi jangka panjang Kabupaten Toba.

5. Tahap V (Tahun 2030): Perwujudan Toba Mantap sebagai Landasan Menuju Toba Unggul, Maju, dan Berkelanjutan.

Tahun 2030 menjadi tahun transisi yang sangat strategis, karena berfungsi sebagai titik temu antara akhir implementasi RPJMD 2025–2029 dan awal arah pembangunan jangka menengah berikutnya. Pada tahap ini, Pemerintah Kabupaten Toba memfokuskan seluruh energi pembangunan untuk mengokohkan capaian visi "Toba Mantap", sekaligus menyiapkan langkah menuju visi jangka panjang "Toba Unggul, Maju, dan Berkelanjutan". Fokus utama Tahap V adalah:

- 1) **Konsolidasi Capaian Pembangunan Lima Tahunan**
Semua program prioritas yang telah dijalankan selama empat tahun sebelumnya dikonsolidasikan untuk memastikan keberlanjutan, efektivitas, dan ketahanan dampaknya. Evaluasi menyeluruh terhadap outcome dan dampak pembangunan dilakukan sebagai dasar penyusunan RPJMD selanjutnya.
- 2) **Transformasi Menuju Pembangunan Berkelanjutan**
Tahap ini menandai pergeseran pendekatan pembangunan dari berbasis pertumbuhan menuju model yang lebih inklusif, inovatif, hijau, dan tangguh terhadap perubahan iklim. Fokus diarahkan pada integrasi prinsip keberlanjutan dalam tata kelola ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.
- 3) **Penguatan Daya Saing dan Inovasi Daerah**
Dalam rangka menuju "Toba Unggul dan Maju", Kabupaten Toba akan mulai menempatkan inovasi, digitalisasi, ekonomi kreatif, serta sumber daya manusia unggul sebagai pilar utama penggerak pembangunan masa depan.
- 4) **Penyiapan RPJMD Periode Selanjutnya**
Tahun 2030 juga menjadi momentum untuk merumuskan arah kebijakan jangka menengah baru dengan mengacu pada evaluasi RPJMD 2025–2029, RPJPD 2025–2045, serta dinamika pembangunan nasional dan global.

Dengan pelaksanaan Tahap V ini, Kabupaten Toba diharapkan tidak hanya berhasil menyelesaikan misi RPJMD 2025–2029, tetapi juga siap melangkah lebih jauh dalam mewujudkan daerah yang unggul dalam daya saing, maju dalam tata kelola, dan berkelanjutan dalam pembangunan.

3.2.3. Lokus Pembangunan

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, lokus pembangunan Kabupaten Toba diarahkan pada wilayah-wilayah strategis yang memiliki potensi unggulan, tantangan pembangunan yang signifikan, serta nilai strategis dalam mendukung pemerataan dan percepatan pembangunan daerah.

Tingkat Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan yang meningkat pada tahun 2024 memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih tepat sasaran untuk mengoptimalkan manfaat pembangunan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan paling rendah. Analisis kondisi antar wilayah menunjukkan bahwa kawasan yang meliputi Kecamatan-kecamatan Habinsaran, Nassau, Borbor, Silaen dan Pintu Pohan Meranti memiliki ketertinggalan daripada kecamatan-kecamatan lainnya, baik dari tingkat kesejahteraan maupun kualitas infrastruktur. Pembangunan infrastruktur dan pembangunan ekonomi pada wilayah tertinggal ini perlu menjadi prioritas untuk secara cepat memberikan hasil yang lebih baik terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Penetapan lokus pembangunan mempertimbangkan aspek kewilayahan, kesesuaian rencana tata ruang wilayah, serta sinergi dengan program nasional dan provinsi. Lokus pembangunan diprioritaskan pada kawasan berikut:

1. Kawasan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru : Kecamatan Laguboti, Balige, dan Porsea, yang didorong sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, dan jasa berbasis potensi lokal dan pariwisata.
2. Kawasan Strategis Pertanian, yang tersebar di wilayah Kecamatan Habinsaran, Nassau, dan Silaen, untuk peningkatan produktivitas pangan dan penguatan ketahanan pangan daerah.
3. Kawasan Wisata Danau Toba, terutama Kecamatan Balige, Tampahan, Ajibata, dan Lumban Julu, yang menjadi bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.

Kawasan Key tourism Area (KTA) Parapat yang ditetapkan dalam Perpres Nomor 89 tahun 2024, di Kecamatan Lumban Julu : Wisata Alam : Air Terjun Situmurun, Situmurun Uluan Ulok, Air Terjun Paleozoic Basement Caldera Walk, Wisata Budaya : Desa Jangga Dolok, Hutabagasan,. Kecamatan Ajibata : Wisata Religi Desa Sigapiton, Bukit Gibeon, Wisata Buatan Toba Caldera Resort dan Eden 100 Botanical Garden. Kawasan Key tourism Area (KTA) Balige : Wisata Alam Liang Sipege, Basiha Stone, Pantai Lumban Silintong, Tarabunga. Wisata budaya : Pantai Lumban Bulbul, Pasar tradisional onan balerong, Makam SM. Raja ke XII, Desa Meat, Huta Tinggi Parmalim, Wisata Buatan : Museum TB Silalahi.

4. Fokus pembangunan diarahkan pada pengembangan infrastruktur pendukung pariwisata, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kapasitas masyarakat lokal dengan lokasi Peningkatan jalan kabupaten difokuskan pada daerah timpang kemantapan jalan yakni: Kecamatan Habinsaran, Nassau, Borbor, Silaen dan Pintu Pohan Meranti;
Peningkatan akses air minum dan air limbah difokuskan pada wilayah berisiko stunting dan masyarakat miskin;
5. Kawasan Perdesaan Prioritas Pengembangan Ajibata yang memerlukan intervensi untuk peningkatan akses layanan dasar, infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
6. Wilayah Perbatasan dan Hinterland, seperti Kecamatan Pintu Pohan Meranti dan Siantar Narumonda, sebagai kawasan penghubung antar wilayah dan pendukung konektivitas ekonomi dan sosial di kawasan Toba.

Penetapan lokus pembangunan ini menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas daerah, serta menjadi arah dalam pengalokasian sumber daya pembangunan secara efektif, efisien, dan berkeadilan. Pemetaan lokus pembangunan ini juga mendukung pendekatan spasial dalam perencanaan, sehingga pembangunan tidak bersifat sektoral semata, namun mampu mengintegrasikan dimensi wilayah, sosial, ekonomi, dan lingkungan.

3.2.4. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perwujudan Visi Toba Mantap 2029 dilaksanakan melalui 6 Misi yang diwujudkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah selama 5 tahun ke depan untuk mencapai sasaran pembangunan daerah.

1. Prioritas Pembangunan Daerah 1: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Prioritas Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan kualitas sumber daya manusia dari aspek pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan martabat manusia yang dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
- 2) Peningkatan kualitas dan pemenuhan sarana prasarana kesehatan primer dan rujukan;
- 3) Pemenuhan sarana prasarana mendukung pola hidup sehat dan sarana untuk aktivitas fisik;
- 4) Pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- 5) Percepatan penurunan dan pencegahan stunting;
- 6) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat;
- 7) Pemenuhan upaya kesehatan lanjut usia;
- 8) Pemenuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan secara merata;
- 9) Peningkatan kesejahteraan tenaga medis dan tenaga kesehatan;
- 10) Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal;
- 11) Peningkatan kualitas pelayanan KB dan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan;
- 12) Penguatan layanan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia;
- 13) Pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan;
- 14) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah);
- 15) Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar;
- 16) Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan;
- 17) Pemberian beasiswa bagi siswa tidak mampu;
- 18) Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
- 19) Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik;
- 20) Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan;
- 21) Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat
- 22) Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi dan sebagainya;
- 23) Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marginal dan rentan;

- 24) Peningkatan kualitas data penerima bantuan sosial yang inklusif dengan verifikasi dan validasi;
- 25) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia dengan memperhatikan kebutuhan berdasarkan siklus hidup dan karakteristiknya termasuk perlindungan dari kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

2. Prioritas Pembangunan Daerah 2: Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dan merata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Prioritas Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk menyediakan infrastruktur publik secara meluas dan merata untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah. Arah Kebijakan untuk prioritas ini adalah:

1. Menuntaskan pemenuhan pelayanan dasar di seluruh wilayah yang merata dan berkeadilan;
2. Pengembangan infrastruktur wilayah yang menghubungkan antar wilayah, antar pusat-pusat kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan konektivitas dan aksesibilitas;
3. Pengembangan transportasi lokal termasuk sistem angkutan umum yang menghubungkan antar kecamatan, pusat pertumbuhan dan angkutan desa;
4. Memperkuat infrastruktur dasar untuk pengembangan pertanian dan pariwisata;
5. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak, air minum aman dan layak, serta sanitasi yang aman dan berkelanjutan;
6. Peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan kawasan permukiman melalui upaya pengurangan dan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.

3. Prioritas Pembangunan Daerah 3: Mengembangkan pertanian dan pariwisata serta pusat pertumbuhan ekonomi, membangun desa, dan memperkuat peran usaha mikro yang berkelanjutan.

Prioritas ini dimaksudkan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sektor-sektor unggulan daerah, yaitu pertanian dan pariwisata, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Arah Kebijakan untuk prioritas ini adalah:

- 1) Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi dan implementasi teknologi;
- 2) Peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian;
- 3) Pengembangan komoditas pertanian unggulan;
- 4) Pengembangan sentra pertanian berdasarkan komoditas unggulan untuk meningkatkan produksi pertanian;
- 5) Peningkatan kapasitas dan akses informasi teknologi petani untuk peningkatan produktivitas;
- 6) Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian;
- 7) Penguatan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata;
- 8) Pengembangan kepariwisataan dan ekonomi kreatif untuk mendukung DPP Danau Toba;
- 9) Perluasan pemasaran wisata;

- 10) Pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman sumber daya alam, geologis dan budaya secara bertanggung jawab;
- 11) Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan pariwisata;
- 12) Pengembangan produk pariwisata yang beragam dan berkelanjutan;
- 13) Pengembangan objek wisata dan atraksi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- 14) Meningkatkan nilai tambah pariwisata dengan menyandingkan dengan sektor pertanian
- 15) Penguatan UMKM melalui perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan pemasaran;
- 16) Peningkatan kewirausahaan dengan penguatan kapasitas usaha;
- 17) Penguatan BUMD yang profesional;
- 18) Peningkatan daya saing perempuan dalam pasar kerja;
- 19) Penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor;
- 20) Pengembangan ekosistem ekonomi sirkular terutama pada sektor (i) makanan dan minuman; (ii) tekstil; (iii) konstruksi dan bahan bangunan; dan (iv) packaging termasuk plastik;
- 21) Penerapan pertanian regeneratif;
- 22) Pengelolaan lahan pertanian serta produk turunannya secara berkelanjutan;
- 23) Mendorong penerapan prinsip zero waste dalam sistem pengelolaan sampah dan limbah domestik;
- 24) Peningkatan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis;
- 25) Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat;
- 26) Peningkatan kemampuan SDM digital;
- 27) Pengembangan produk turunan pertanian inovatif;
- 28) Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian yang memanfaatkan bahan lokal;
- 29) Penguatan keterhubungan antara pusat-pusat pertumbuhan;
- 30) Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru berdasarkan potensi lokal;
- 31) Peningkatan kemantapan jalan daerah;
- 32) Peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi;
- 33) Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga;
- 34) Percepatan penanganan kawasan kumuh;
- 35) Fasilitasi penyediaan rumah layak huni;
- 36) Pengembangan kawasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan yang memenuhi prinsip layak huni, inklusif dan berbudaya serta maju menyejahterakan;
- 37) Pengembangan ekonomi perdesaan melalui pemanfaatan potensi lokal;
- 38) Peningkatan konektivitas dalam rangka peningkatan hubungan perkotaan-perdesaan;
- 39) Peningkatan basis pajak melalui penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak serta mendorong sektor informal menjadi formal;
- 40) Penggalan sumber-sumber penerimaan pajak baru;
- 41) Pembentukan BUMD berbasis potensi daerah.

4. **Prioritas Pembangunan Daerah 4: Memperkuat reformasi tata kelola pemerintahan**

Prioritas Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang dilakukan dengan Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kualitas regulasi daerah;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat sipil yang bermakna termasuk pelibatan masyarakat;
- 3) Percepatan digitalisasi layanan publik untuk penguatan aspek pemerintahan digital;
- 4) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat;
- 5) Penguatan kapasitas aparatur daerah baik dari sisi kuantitas yang tepat guna, kualitas kinerja, dan profesionalisme;
- 6) Penataan perangkat daerah menuju organisasi pemerintah daerah yang modern, gesit, adaptif, dan profesional;
- 7) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital;
- 8) Penguatan penerapan sistem merit dalam pengembangan karier, promosi mutasi ASN, dan manajemen kinerja;
- 9) Penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi.

5. **Prioritas Pembangunan Daerah 5: Memantapkan keamanan dan ketertiban umum dan pemberdayaan linmas**

Prioritas Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk menyediakan ketenteraman dan ketertiban serta memperkuat ideologi Pancasila yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas;
- 2) Penguatan kapasitas penegakan perda;
- 3) Peningkatan pelaksanaan Aksi HAM;
- 4) Pembinaan ideologi Pancasila untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan kepribadian dalam kebudayaan serta penguatan karakter dan identitas bangsa;
- 5) Perubahan perilaku masyarakat menuju gaya hidup berkelanjutan;
- 6) Pengelolaan lahan secara berkelanjutan;
- 7) Peningkatan pengelolaan limbah B3 dan limbah medis berkelanjutan dengan penekanan pada perubahan perilaku masyarakat dan pelaku usaha;
- 8) Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir dimulai dari rumah tangga yang diprioritaskan pada upaya pemilahan dari sumber;
- 9) Penerapan teknologi tepat guna pada TPS dan TPA;
- 10) Penataan pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan ekonomi sirkular.
- 11) Integrasi dan kolaborasi mitra *reuse, reduce, recycle* (3R) persampahan;
- 12) Penyadartahuan dan pemicuan perubahan perilaku masyarakat untuk pengurangan dan pemilahan sampah di sumber serta peningkatan partisipasi dan kemauan untuk membayar retribusi;
- 13) Perbaikan retribusi yang mendukung pembiayaan pengelolaan sampah;

- 14) Penyediaan layanan persampahan yang terintegrasi dengan air minum dan air limbah domestik di perdesaan;
- 15) Peningkatan upaya konservasi tanah dan air;
- 16) Penyediaan, pengoperasian dan pengawasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang ramah lingkungan;
- 17) Penegakan hukum dan skema insentif disinsentif berbasis kinerja
- 18) Meningkatkan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan, penyelamatan, dan evakuasi korban, serta sistem dasar penanggulangan bencana.

6. Prioritas Pembangunan Daerah 6: Memperkuat lembaga adat dan sanggar budaya untuk mendukung pelestarian budaya dan kearifan lokal.

Prioritas Pembangunan Daerah ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan kearifan lokal sebagai salah satu landasan pembangunan yang dilaksanakan melalui Arah Kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan keragaman nilai, ekspresi, dan praktik kebudayaan;
- 2) Peningkatan budaya literasi, kreativitas, dan inovasi;
- 3) Pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- 4) Pengembangan dan pemanfaatan kearifan lokal dan warisan budaya untuk mendorong produktivitas dan kesejahteraan;
- 5) Peningkatan ketahanan keluarga dengan kebijakan ramah keluarga dan layanan dukungan keluarga;
- 6) Meningkatkan pelestarian, dan pengakuan atas seni dan budaya lokal;
- 7) Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, untuk memastikan partisipasinya secara bermakna dalam berbagai sektor pembangunan;
- 8) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal dalam pembangunan;
- 9) Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan.

Tabel 3.10. Program-Program Prioritas Daerah RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2030

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
TOBA MANTAP 2029: "Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya"					
MISI I : Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak					
Meningkatnya kualitas sumber daya manusia.			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
	Meningkatnya kualitas kesehatan		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)		
			Umur Harapan Hidup (Tahun)		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Meningkatnya Kualitas Pola Hidup Sehat Masyarakat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Jumlah Kematian Ibu (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Jumlah Kematian Balita (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
	Meningkatnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas		Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
			Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun ((tahun))		
		Meningkatnya kualitas dan Pemerataan pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SD (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Skor Literasi Membaca SD (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Cakupan Penerima KIP (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Angka Kesiapan Sekolah (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Skor Numerasi SD (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Skor Literasi Membaca SMP (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Skor Numerasi SMP (Angka)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Menurunnya permasalahan sosial		Rasio permasalahan sosial (per 100.000 penduduk)		
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
		Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Meningkatnya validitas Data Kesejahteraan Sosial	Persentase verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
MISI 2 : Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata.					
Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan.			Indeks Infrastruktur(Indeks)		
	Meningkatnya infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan		Indeks Infrastruktur (Indeks)		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan irigasi	Tingkat Layanan Irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (%)	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
		Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Penanganan Jalan Kabupaten (Km)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Tingkat Pengawasan Penataan Ruang (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
		Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Persentase Rumah Layak Huni (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
MISI 3 : Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah.					
Meningkatnya produktivitas ekonomi daerah secara berkelanjutan			PDRB Per Kapita(Rp. Juta Per Tahun)		
	Meningkatnya produksi pertanian		Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)		
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan irigasi	Tingkat Layanan Irigasi (%)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh pertanian dan pemberdayaan petani	Persentase kelembagaan kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Luas lahan tidur yang dimanfaatkan (Ha)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
		Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Peningkatan produksi daging (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
		Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Penanganan Jalan Kabupaten (Km)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
	Meningkatnya pengembangan pariwisata		Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman (%)		
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Persentase Pembentukan Satlinmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
		Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Penanganan Jalan Kabupaten (Km)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
		Meningkatnya pemasaran pariwisata	Tingkat hunian akomodasi (%)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
		Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HKI (Pelaku Usaha)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
		Meningkatnya Pengembangan SDM Kepariwisata	Persentase sumber daya manusia pelaku pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
	Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif		Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota (%)		
		Meningkatnya kapasitas usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Meningkatnya kemudahan investasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya kepatuhan berusaha	Persentase Penanganan pengaduan perizinan (%)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
		Meningkatnya pelayanan perizinan	Persentase ketersediaan SOP pelayanan perizinan (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Persentase layanan perizinan yang dilakukan secara elektronik (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP (%)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
		Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ((%))	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
		Meningkatnya promosi investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
	Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM		Rasio Kewirausahaan Daerah (%)		
			Persentase koperasi yang berkualitas (%)		
		Meningkatnya kapasitas usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten (%)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
		Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
		Meningkatnya penilaian kesehatan koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi (%)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)		
		Meningkatnya ketaatan persetujuan lingkungan hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
		Meningkatnya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
		Meningkatnya tata kelola persampahan	Timbulan sampah terdaur ulang (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
		Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Indeks Kualitas Udara (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
Menurunnya Kemiskinan			Tingkat Kemiskinan((%))		
	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat		Rasio Gini (Indeks)		
		Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh pertanian dan pemberdayaan petani	Persentase kelembagaan kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
		Meningkatnya kapasitas usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya perlindungan sosial		Cakupan Penerima Bantuan Sosial (%)		
		Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Meningkatnya validitas Data Kesejahteraan Sosial	Persentase verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Jumlah Kematian Ibu (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Jumlah Kematian Balita (Orang)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
Meningkatnya kemampuan keuangan daerah.			Rasio PAD Terhadap APBD(%)		
	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah		Rasio PAD Terhadap APBD (%)		
		Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Persentase peningkatan pajak daerah lainnya (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Persentase peningkatan penerimaan retribusi daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Persentase peningkatan PBB dan BPHTB (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
MISI 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat.					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas untuk mendukung pelayanan publik yang berkualitas			Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
			Indeks Pelayanan Publik.(Indeks)		
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah		Hasil Evaluasi SAKIP (Nilai)		
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase kinerja pelayanan kedinasan Kepala Daerah (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Realisasi Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.13.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
		Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) (Nilai)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
			Manajemen Risiko Indeks (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
		Meningkatnya kualitas penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
		Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
		Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (%)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
		Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
		Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi PNS (%)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase penyusunan pertanggungjawaban APBD tepat waktu (%)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Manajemen Aset (Kategori)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
		Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN	NSPK ASN (Nilai)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik daerah	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		Terselenggaranya pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
MISI 5 : Meningkatkan keamanan dan ketertiban.					
Meningkatnya kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib.			Indeks Keamanan dan Ketertiban (Indeks)		
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah		Persentase Penegakan Perda (%)		
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Persentase Pembentukan Satlinmas (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana		Indeks Risiko Bencana (Indeks)		
		Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar korban bencana	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
MISI 6 : Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal.					
Meningkatnya pelestarian budaya daerah.			Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD) (Indeks)		
	Meningkatnya pelestarian budaya daerah		Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD) (Indeks)		
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
		Meningkatnya kualitas dan Pemerataan pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SD (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	

VISI/MISI/TUJUAN 1	SASARAN 2	OUTCOME 3	INDIKATOR 4	PROGRAM PRIORITAS 5	KET 6
			Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
		Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah	Persentase Warisan Budaya Tak-Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
		Meningkatnya pendidikan budaya daerah di satuan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	
		Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Muatan Lokal Bahasa Daerah dan Ekstra Kulikuler Kesenian (%)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Program perangkat daerah merupakan program yang akan dilaksanakan perangkat daerah dalam pencapaian Visi Toba Mantap dengan mengacu kepada nomenklatur program yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Program perangkat daerah secara lengkap ditampilkan dalam Tabel 4.1.

1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Mendukung kelancaran administrasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pendidikan..
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
program ini diarahkan pada perluasan akses dan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, serta peningkatan partisipasi pendidikan
- 3) PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM
Meningkatkan relevansi dan kualitas kurikulum pendidikan sesuai kebutuhan local
- 4) PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
program ini diarahkan pada Meningkatkan kualitas dan profesionalitas guru serta tenaga kependidikan di semua jenjang.
- 5) PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN
Meningkatkan kepatuhan dan tata kelola lembaga pendidikan sesuai standar nasional pendidikan.
- 6) PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA
Melestarikan dan mengembangkan bahasa serta sastra daerah dan nasional dalam sistem pendidikan.

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Mendukung kelancaran administrasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan urusan Kesehatan.
- 2) PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan bagi masyarakat.
- 3) PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Meningkatkan kompetensi dan distribusi tenaga kesehatan secara merata dan berkelanjutan.

- 4) PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Menjamin ketersediaan, keamanan, dan mutu obat, alat kesehatan serta pengawasan makanan-minuman.
- 5) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Meningkatkan kesadaran, peran aktif, dan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan.

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Mendukung kelancaran administrasi, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan urusan Penataan Ruang.
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Meningkatkan konservasi dan pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dan terintegrasi.
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
Meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan layak.
- 4) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
Meningkatkan kualitas lingkungan dengan pengelolaan air limbah yang baik dan berkelanjutan.
- 5) PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Mengurangi risiko genangan dan banjir melalui sistem drainase yang terencana dan berfungsi baik
- 6) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Meningkatkan tertib bangunan yang aman, layak, dan sesuai dengan ketentuan teknis.
- 7) PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Mewujudkan lingkungan permukiman yang tertib, sehat, dan berkelanjutan.
- 8) PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
- 9) PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi lokal.
- 10) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Mewujudkan tata ruang yang terencana, harmonis, dan berdaya saing untuk pembangunan daerah
- 11) PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN
Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana permukiman.

4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administratif dalam urusan perumahan dan permukiman.

2) PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

3) PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Mewujudkan kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan ramah lingkungan serta berkelanjutan.

4) PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Mengurangi dan menata kawasan kumuh melalui peningkatan infrastruktur dasar dan penataan lingkungan.

5) PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Menyediakan dan meningkatkan kualitas sarana dasar (jalan, drainase, air bersih, listrik) di kawasan permukiman baru dan lama.

5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administratif dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum

2) PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat melalui penguatan ketenteraman wilayah dan penegakan perda.

3) PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Meningkatkan kapasitas daerah dalam mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana secara terpadu.

4) PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Meningkatkan respons cepat dan efektif dalam penanganan kebakaran serta bencana non-kebakaran.

6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administratif dalam urusan Sosial

2) PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Meningkatkan partisipasi dan kemandirian kelompok rentan, miskin, dan marginal dalam pembangunan.

3) PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Memulihkan kondisi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial agar berfungsi kembali secara sosial.

4) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Menyediakan perlindungan dan jaminan dasar bagi masyarakat miskin dan rentan.

5) **PROGRAM PENANGANAN BENCANA**

Meningkatkan upaya tanggap darurat dan pemulihan pasca-bencana secara efisien dan terkoordinasi.

6) **PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**

Menjaga dan merawat tempat penghormatan terhadap jasa pahlawan secara berkelanjutan dan representatif.

7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1) **PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**

Menyusun data, analisis dan strategi pengembangan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja.

2) **PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**

Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja lokal melalui pelatihan berbasis kompetensi.

3) **PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**

Meningkatkan penyaluran tenaga kerja ke sektor formal dan informal secara tepat dan berkelanjutan.

4) **PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Meningkatkan harmonisasi hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha melalui kelembagaan yang kuat.

8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1) **PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Meningkatkan kesetaraan gender dalam seluruh aspek pembangunan dan pengambilan keputusan publik.

2) **PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**

Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan memberikan layanan perlindungan yang responsif gender.

3) **PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**

Menyediakan data terpilah dan sistem informasi untuk mendukung kebijakan ramah gender dan anak.

4) **PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**

Menjamin pemenuhan hak dasar anak dalam pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.

5) **PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**

Memberikan perlindungan bagi anak dalam situasi khusus seperti bencana, konflik, atau kekerasan.

9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

1) **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administratif dalam urusan Pangan

- 2) PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
Meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal untuk ketersediaan dan kemandirian pangan daerah.
- 3) PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
Mendorong konsumsi pangan beragam, bergizi, dan berimbang serta meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.
- 4) PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
Mengurangi risiko kelaparan dan gizi buruk pada kelompok rentan melalui intervensi cepat dan tepat.
- 5) PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
Menjamin keamanan pangan dari hulu ke hilir demi kesehatan masyarakat dan kepastian hukum.

10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

- 1) PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Menyelesaikan konflik agraria secara adil, partisipatif, dan sesuai ketentuan hukum.
- 2) PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Menjamin kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur.
- 3) PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
Menata ulang kepemilikan tanah untuk pemerataan akses lahan dan keadilan sosial.
- 4) PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Meningkatkan efektivitas pemanfaatan ruang melalui pengendalian dan penertiban penggunaan tanah.

11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis dan administratif dalam urusan lingkungan hidup
- 2) PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Menyusun dokumen perencanaan lingkungan untuk mendukung pembangunan berwawasan lingkungan.
- 3) PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Mengurangi pencemaran dan degradasi lingkungan akibat aktivitas manusia dan industri.

- 4) PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Melestarikan flora, fauna dan ekosistem lokal sebagai aset penting keberlanjutan daerah.
- 5) PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Menekan dampak negatif bahan berbahaya melalui pengelolaan limbah B3 yang aman dan terkendali.
- 6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan hidup melalui pengawasan efektif.
- 7) PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
Mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal dan hak MHA dalam kebijakan perlindungan lingkungan.
- 8) PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan.
- 9) PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Memberikan insentif dan pengakuan atas peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan.
- 10) PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Menyediakan saluran aduan dan tindak lanjut cepat terhadap pelanggaran lingkungan hidup.
- 11) PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Mewujudkan sistem pengelolaan sampah terpadu dari sumber hingga akhir yang ramah lingkungan.

12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Meningkatkan akurasi dan cakupan data kependudukan melalui pelayanan administrasi yang cepat dan mudah dijangkau.
- 3) PROGRAM PENCATATAN SIPIL
Memastikan pemenuhan hak identitas hukum bagi seluruh warga melalui layanan pencatatan kelahiran, kematian, pernikahan, dan perceraian.
- 4) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan publik berbasis data kependudukan.
- 5) PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
Menyediakan data profil kependudukan yang lengkap dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan.

13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENATAAN DESA
Menguatkan tata kelola desa melalui penataan wilayah dan kelembagaan desa yang lebih baik.
- 3) PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
Mendorong kolaborasi antar desa dalam pengelolaan potensi dan pembangunan berbasis kawasan.
- 4) PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan kapasitas penyelenggaraan administrasi desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.
- 5) PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
Meningkatkan peran serta kelembagaan lokal dalam pembangunan dan pelestarian nilai budaya lokal.

14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk melalui penyuluhan dan pengaturan persebaran penduduk.
- 3) PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Menyediakan layanan KB yang berkualitas, adil dan merata untuk menciptakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Meningkatkan ketahanan keluarga melalui edukasi, ekonomi keluarga dan penguatan fungsi keluarga.

15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Meningkatkan keamanan dan kelancaran lalu lintas serta pelayanan transportasi publik yang andal dan terintegrasi.
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
Mengembangkan moda transportasi air dan dermaga penyeberangan untuk mendukung konektivitas wilayah dan pariwisata.

16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
Menyediakan akses informasi yang transparan dan membangun komunikasi publik dua arah antara pemerintah dan masyarakat.
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Mengembangkan aplikasi digital untuk mendukung pelayanan publik dan efisiensi tata kelola pemerintahan.

17. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
Memastikan koperasi berjalan sesuai prinsip tata kelola yang sehat melalui pembinaan dan pengawasan berkala.
- 3) PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI
Menilai dan memetakan kondisi koperasi simpan pinjam agar tetap sehat dan berkelanjutan.
- 4) PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi dalam pengelolaan usaha dan manajemen kelembagaan.
- 5) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
Melindungi koperasi dari praktek usaha yang merugikan serta memperkuat perannya dalam ekonomi lokal.
- 6) PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)
Memperluas akses UMKM terhadap pembiayaan, pasar, teknologi, serta mendorong penguatan kelembagaan usaha.
- 7) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
Mendorong inovasi, digitalisasi dan pengembangan produk lokal untuk meningkatkan daya saing UMKM.

18. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Memberikan dukungan administratif, penguatan koordinasi lintas sektor, dan sarana operasional untuk kelancaran penyelenggaraan urusan penanaman modal.
- 2) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
Meningkatkan daya tarik investasi melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, dan penyediaan infrastruktur pendukung.
- 3) PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
Meningkatkan minat investor dengan menyebarluaskan potensi unggulan daerah melalui promosi investasi yang terarah, digital, dan kolaboratif.
- 4) PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
Menyediakan layanan perizinan dan non-perizinan yang cepat, transparan, dan terintegrasi melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
- 5) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Memastikan pelaksanaan investasi berjalan sesuai izin dan komitmen melalui pengawasan, evaluasi, serta fasilitasi penyelesaian kendala.
- 6) PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Mengembangkan sistem data dan informasi investasi yang akurat dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan, promosi, dan pengambilan kebijakan investasi.

19. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- 1) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
Meningkatkan potensi, partisipasi, dan daya saing pemuda dalam pembangunan melalui pendidikan karakter, kewirausahaan, dan inovasi.
- 2) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
Meningkatkan pembinaan atlet dan penyediaan sarana-prasarana olahraga untuk membangun prestasi dan kesehatan masyarakat.
- 3) PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
Mendorong pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi muda melalui gerakan pramuka.

20. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Menyediakan data sektoral yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis data.

21. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Menjamin keamanan informasi dan komunikasi pemerintahan melalui penguatan sistem persandian.

22. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

- 1) PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Mengembangkan potensi budaya lokal sebagai identitas daerah dan sumber kekuatan sosial serta ekonomi masyarakat.
- 2) PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
Melestarikan dan mengelola situs, benda, dan warisan budaya daerah sebagai aset sejarah dan daya tarik wisata.

23. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN
Meningkatkan literasi masyarakat melalui penguatan layanan perpustakaan dan pengembangan koleksi yang relevan dan inklusif.

24. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Meningkatkan tertib administrasi dan penyelamatan dokumen pemerintahan melalui pengelolaan arsip dinamis dan statis.
- 2) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Menjaga keutuhan dan keberlanjutan arsip penting sebagai memori kolektif dan alat bukti hukum.

25. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 1) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
Meningkatkan produktivitas perikanan tangkap yang ramah lingkungan untuk kesejahteraan nelayan.
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
Mendorong pengembangan budidaya ikan air tawar dan air payau yang efisien dan berkelanjutan.
- 3) PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
Menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengawasan terhadap praktik eksploitasi yang merusak.

26. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
Meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui penataan, revitalisasi, dan penyediaan infrastruktur penunjang.
- 3) PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
Memperluas jangkauan promosi pariwisata melalui strategi digital, kolaborasi, dan partisipasi masyarakat.
- 4) PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL.
Mendukung pelaku ekonomi kreatif dalam melindungi karya dan produk lokal serta mengakses pasar lebih luas.
- 5) PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
Meningkatkan kapasitas SDM pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif melalui pelatihan, sertifikasi, dan inkubasi usaha.

27. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
Meningkatkan efisiensi dan produktivitas petani melalui penyediaan alat dan sarana pertanian modern.
- 3) PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
Meningkatkan akses dan kelancaran produksi pertanian melalui pembangunan irigasi, jalan usaha tani, dan gudang penyimpanan.
- 4) PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
Menjaga kesehatan hewan ternak dan mencegah zoonosis untuk mendukung ketahanan pangan hewani.
- 5) PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
Meningkatkan ketahanan sektor pertanian terhadap bencana alam dan serangan organisme pengganggu tanaman.
- 6) PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Meningkatkan kapasitas petani dan penyuluh dalam menerapkan teknologi dan inovasi pertanian.

28. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

- 1) PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
Mempermudah proses perizinan usaha dan meningkatkan kepastian hukum dalam kegiatan usaha.
- 2) PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
Memperluas jaringan distribusi barang dan memperkuat pasar rakyat serta logistik lokal.
- 3) PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga barang pokok melalui intervensi pasar dan pengawasan.
- 4) PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
Mendorong pelaku usaha lokal untuk menembus pasar internasional dengan fasilitasi dan promosi ekspor.
- 5) PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
Melindungi konsumen melalui pengawasan mutu barang dan penerapan standarisasi
- 6) PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Meningkatkan konsumsi produk lokal untuk mendukung UMKM dan kemandirian ekonomi daerah.

29. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

- 1) PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Mendorong pertumbuhan industri berbasis sumber daya lokal melalui zonasi dan fasilitasi kawasan industri.
- 2) PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
Meningkatkan kepatuhan dan pengawasan usaha industri terhadap standar teknis dan lingkungan.
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Menyediakan data industri yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar kebijakan pembangunan industri daerah.

30. SEKRETARIAT DAERAH

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Menyusun kebijakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan serta pelayanan dasar masyarakat.
- 3) PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Mengarahkan kebijakan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

31. SEKRETARIAT DPRD

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Memfasilitasi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD secara efektif dan akuntabel.

32. PERENCANAAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Memastikan kualitas perencanaan dan efektivitas pengendalian serta evaluasi pembangunan yang berbasis kinerja.
- 3) PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Mengharmonisasikan perencanaan lintas sektor dan jenjang pemerintahan.

33. KEUANGAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- 3) PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Menata dan mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan dan dukungan pelayanan publik.
- 4) PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatkan potensi dan intensifikasi sumber pendapatan daerah secara adil dan berkelanjutan.

34. KEPEGAWAIAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
Meningkatkan profesionalisme ASN melalui sistem manajemen SDM yang terintegrasi dan berbasis kompetensi.
- 3) PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Meningkatkan kompetensi ASN melalui pelatihan teknis dan manajerial untuk mendukung pelayanan publik

35. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

- 1) PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Menghasilkan rekomendasi inovatif dan berbasis data untuk perumusan kebijakan daerah.
- 2) PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Menyusun kajian pembangunan berbasis potensi lokal dan permasalahan nyata di lapangan.

36. INSPEKTORAT DAERAH

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyimpangan.
- 3) PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Meningkatkan kualitas kebijakan daerah melalui penguatan peran analisis kebijakan dan pendampingan teknis.

37. KECAMATAN

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Mewujudkan pemerintahan yang adaptif, melayani, dan partisipatif melalui reformasi birokrasi.
- 3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penguatan kapasitas kelembagaan lokal.
- 4) PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Menjaga stabilitas daerah melalui sinergi aparat keamanan dan masyarakat.
- 5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Mengatur pelaksanaan tugas umum pemerintahan yang tidak termasuk dalam urusan konkuren.
- 6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa melalui pembinaan dan pengawasan terpadu.

38. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- 1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- 2) PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
Membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat melalui pendidikan dan pembinaan ideologi.
- 3) PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
Meningkatkan pemahaman politik yang sehat dan beretika di kalangan masyarakat dan pemuda.
- 4) PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
Meningkatkan peran serta ormas secara konstruktif dalam pembangunan dan menjaga stabilitas sosial.
- 5) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
Membangun daya tahan masyarakat terhadap pengaruh globalisasi melalui penguatan nilai ekonomi, sosial, dan budaya lokal.
- 6) PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
Mencegah potensi konflik sosial dan meningkatkan respons penanganannya secara cepat dan inklusif.

Tabel 4. 1.Program Perangkat Daerah Tahun 2026 - 2030

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					340.472.408.000,00		345.572.760.000,00		353.474.351.986,00		364.479.001.970,00		379.399.002.972,00	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					270.346.183.000,00		274.127.694.000,00		278.471.556.000,00		284.892.273.000,00		294.891.385.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	68,50	79,75	81,80	270.346.183.000,00	83,80	274.127.694.000,00	85,80	278.471.556.000,00	87,80	284.892.273.000,00	89,80	294.891.385.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					67.126.225.000,00		68.270.066.000,00		71.652.795.986,00		76.061.728.970,00		80.807.617.972,00	
Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Angka Kesiapan Sekolah (%)	47,6	49,00	49,98	67.126.225.000,00	50,91	68.270.066.000,00	51,79	71.652.795.986,00	52,67	76.061.728.970,00	53,53	80.807.617.972,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Cakupan Penerima KIP (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor Literasi Membaca SD (Angka)	63,91	66,41	68,91		71,41		73,91		76,41		78,91		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor Literasi Membaca SMP (Angka)	70,45	71,55	72,65		73,75		74,85		75,95		77,05		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Skor Numerasi SD (Angka)	58,16	61,06	63,96		66,86		69,76		72,66		75,56		
	Skor Numerasi SMP (Angka)	64,31	65,81	67,31		68,81		70,31		71,81		73,31		
	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-	66,77	69,81	72,85		75,89		78,93		81,97		84,94		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (%)													menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar (%)	99,15	99,49	99,83		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (%)	1,42	2,32	3,22		4,12		5,02		5,92		6,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya pendidikan budaya daerah di satuan pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	0	0	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					2.400.000.000,00		2.500.000.000,00		2.600.000.000,00		2.700.000.000,00		2.800.000.000,00	
Meningkatnya kualitas dan Pemerataan pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru SD (Indeks)	0,8	0,56	0,62	2.400.000.000,00	0,68	2.500.000.000,00	0,74	2.600.000.000,00	0,8	2.700.000.000,00	0,83	2.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Indeks Distribusi Guru SMP (Indeks)	0,69	0,71	0,72		0,73		0,74		0,75		0,77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan. (Persentase)	73,76	73,50	75,19		76,88		78,57		80,26		81,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas dan distribusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	100	100	100	200.000.000,00	100	225.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					200.000.000,00		225.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		300.000.000,00	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Muatan Lokal Bahasa Daerah dan Ekstra Kulikuler Kesenian (%)	0	0	0	200.000.000,00	50	225.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					234.456.261.000,00		239.019.741.000,00		248.352.993.000,00		257.957.397.000,00		271.170.183.000,00	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					131.692.973.000,00		135.822.091.000,00		140.444.069.000,00		147.088.487.000,00		147.088.487.000,00	
Meningkatnya Akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	70,25	76,30	78,60	131.692.973.000,00	80,40	135.822.091.000,00	82,10	140.444.069.000,00	83,10	147.088.487.000,00	85,00	147.088.487.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					100.472.288.000,00		101.071.650.000,00		105.733.924.000,00		109.642.910.000,00		122.941.696.000,00	
Terwujudnya Layanan Kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	92	92,63	100.472.288.000,00	92,92	101.071.650.000,00	93,16	105.733.924.000,00	93,36	109.642.910.000,00	93,54	122.941.696.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	96,28	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%) (%)	99,74	99,80	99,85		99,90		99,95		99,95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis (%)	0	36	40		50		60		70		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Balita (Orang)	9	9	8		8		7		7		7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Jumlah Kematian Ibu (Orang)	3	3	3		3		3		3		3		
	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	70	75	77		79		81		84		86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna (%)	10	10	10		10		45		45		45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard (%)	52	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat (%)	65	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Presentase lanjut usia yang mandiri (%)	-	50	55		60		65		70		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun (%)	-	1,2	1,2		1,2		1,2		1,2		1,2		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun (Persentase)	-	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun (%)	-	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	89,88	89,90	89,92		89,93		89,94		89,95		89,96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	layanan kesehatan (%)													menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Bidang Kesehatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	-	-	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan (%)	81,99	83,59	85,19		86,79		88,39		89,99		90,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					465.000.000,00		400.000.000,00		500.000.000,00		551.000.000,00		465.000.000,00	
Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. (%)	0	0	0	465.000.000,00	0	400.000.000,00	5,3	500.000.000,00	5,3	551.000.000,00	5,3	465.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi (%)	0,45	0,484	0,490		0,497		0,503		0,509		0,515		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI,					576.000.000,00		176.000.000,00		125.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN														
Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan (%)	0	100	100	576.000.000,00	100	176.000.000,00	100	125.000.000,00	100	75.000.000,00	100	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase sarana IRTTP yang memenuhi ketentuan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					1.250.000.000,00		1.550.000.000,00		1.550.000.000,00		600.000.000,00		600.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pola Hidup Sehat Masyarakat	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8	1.250.000.000,00	79,7	1.550.000.000,00	81,6	1.550.000.000,00	83,1	600.000.000,00	84,7	600.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8		79,7		81,6		83,1		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8		79,7		81,6		83,1		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)													menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8		79,7		81,6		83,1		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8		79,7		81,6		83,1		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8		79,7		81,6		83,1		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8		79,7		81,6		83,1		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8		79,7		81,6		83,1		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	74,7	76,3	77,8		79,7		81,6		83,1		84,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					46.672.760.640,00		57.479.654.000,00		72.594.231.000,00		103.726.833.000,00		120.479.574.000,00	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.297.467.000,00		12.814.514.000,00		13.557.665.000,00		16.579.021.000,00		15.576.995.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	72,00	70,50	72,50	13.297.467.000,00	74,50	12.814.514.000,00	76,50	13.557.665.000,00	78,50	16.579.021.000,00	80,50	15.576.995.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					5.904.493.640,00		7.709.395.000,00		10.254.737.000,00		14.465.331.000,00		15.681.295.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan irigasi	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi (Ha)	7.171	180	100	5.904.493.640,00	200	7.709.395.000,00	300	10.254.737.000,00	400	14.465.331.000,00	500	15.681.295.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Tingkat Layanan Irigasi (%)	49,09	50,37	51,08		52,50		54,63		57,48		61,03		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					3.090.000.000,00		3.259.950.000,00		3.439.248.000,00		4.439.247.000,00		4.727.799.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum (%)	75,98	77,09	78,14	3.090.000.000,00	79,15	3.259.950.000,00	80,12	3.439.248.000,00	81,06	4.439.247.000,00	81,95	4.727.799.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					4.585.000.000,00		4.837.175.000,00		3.439.248.000,00		4.439.248.000,00		4.727.799.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (%)	80,37	81,50	82,51	4.585.000.000,00	83,48	4.837.175.000,00	84,42	3.439.248.000,00	85,31	4.439.248.000,00	86,17	4.727.799.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					800.000.000,00		950.650.000,00		1.126.363.000,00		2.554.823.000,00		2.720.887.000,00	
Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam	50,1	50,17	50,34	800.000.000,00	50,51	950.650.000,00	50,67	1.126.363.000,00	50,84	2.554.823.000,00	51,01	2.720.887.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kondisi Baik (Persentase)													Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					0,00		0,00		400.000.000,00		0,00		0,00	
Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana permukiman di kawasan strategis	Jumlah sarana prasarana permukiman yang disediakan dalam kawasan strategis (Unit)	-	0	0	0,00	0	0,00	1	400.000.000,00	0	0,00	0	0,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.072.510.000,00		849.513.000,00		1.115.194.000,00		2.820.645.000,00		3.031.703.000,00	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (%)	72,06	100	100	1.072.510.000,00	100	849.513.000,00	100	1.115.194.000,00	100	2.820.645.000,00	100	3.031.703.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					346.290.000,00		437.314.000,00		478.226.000,00		1.445.209.000,00		1.539.149.000,00	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	16	20	24	346.290.000,00	28	437.314.000,00	32	478.226.000,00	36	1.445.209.000,00	40	1.539.149.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					16.477.000.000,00		25.199.143.000,00		36.131.027.000,00		54.178.482.000,00		69.493.416.000,00	
Meningkatnya kualitas jalan kabupaten	Penanganan Jalan Kabupaten (Km)	437,07	4,71	4	16.477.000.000,00	6	25.199.143.000,00	9	36.131.027.000,00	11	54.178.482.000,00	14	69.493.416.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Tingkat Kemantapan Jalan (Persentase)	58,58	59,21	59,45		59,95		60,86		62,03		63,61		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					400.000.000,00		422.000.000,00		445.210.000,00		474.148.000,00		504.968.000,00	
Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (Persentase)	17,1	17,1	23,8	400.000.000,00	29,2	422.000.000,00	36,1	445.210.000,00	43,3	474.148.000,00	50,8	504.968.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					700.000.000,00		1.000.000.000,00		2.207.313.000,00		2.330.679.000,00		2.475.563.000,00	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Tingkat Pengawasan Penataan Ruang (%)	100	100	100	700.000.000,00	100	1.000.000.000,00	100	2.207.313.000,00	100	2.330.679.000,00	100	2.475.563.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					5.124.464.000,00		8.316.065.000,00		8.073.096.000,00		10.712.566.000,00		12.736.483.000,00	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.039.464.000,00		3.446.065.000,00		3.673.096.000,00		3.717.566.000,00		3.996.483.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	68,25	79,75	81,80	3.039.464.000,00	83,80	3.446.065.000,00	85,80	3.673.096.000,00	87,80	3.717.566.000,00	89,80	3.996.483.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					100.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00	
Terpenuhinya rumah layak bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	100	600.000.000,00	100	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					860.000.000,00		2.120.000.000,00		1.750.000.000,00		2.700.000.000,00		3.390.000.000,00	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	9,06	9,49	9,71	860.000.000,00	10,27	2.120.000.000,00	10,70	1.750.000.000,00	11,34	2.700.000.000,00	12,29	3.390.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					450.000.000,00		900.000.000,00		900.000.000,00		1.425.000.000,00		1.700.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perumahan rakyat	Persentase Rumah Layak Huni (%)	84,66	85,12	85,54	450.000.000,00	85,97	900.000.000,00	86,38	900.000.000,00	86,80	1.425.000.000,00	87,23	1.700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					675.000.000,00		1.250.000.000,00		1.050.000.000,00		2.270.000.000,00		2.950.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penyediaan PSU perumahan	Persentase rumah yang dilengkapi PSU (%)	61,33	62,40	63,50	675.000.000,00	64,60	1.250.000.000,00	65,70	1.050.000.000,00	66,90	2.270.000.000,00	68,10	2.950.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.665.718.000,00		16.321.732.000,00		16.561.826.000,00		16.085.009.000,00		17.763.055.000,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.586.728.000,00		13.768.396.000,00		13.969.303.000,00		13.217.537.000,00		14.107.513.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	67,75	69,50	71,60	8.790.837.000,00	73,70	9.863.106.000,00	75,80	10.023.903.000,00	77,90	8.986.226.000,00	80,00	9.149.838.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	73,50	72,96	75,00	3.795.891.000,00	77,00	3.905.290.000,00	79,00	3.945.400.000,00	81,00	4.231.311.000,00	83,00	4.957.675.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.200.000.000,00		1.200.000.000,00		1.300.000.000,00		1.400.000.000,00		1.800.000.000,00	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Penanganan Gangguan ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Pembentukan Satlinmas (%)	0	100	100	1.200.000.000,00	100	1.200.000.000,00	100	1.300.000.000,00	100	1.400.000.000,00	100	1.800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					378.990.000,00		853.336.000,00		692.523.000,00		767.472.000,00		1.055.542.000,00	
Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	15,42	100	100	175.720.000,00	100	295.000.000,00	100	217.120.000,00	100	252.000.000,00	100	382.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Evakuasi Korban Bencana	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (%)	100	100	100	103.270.000,00	100	318.336.000,00	100	225.403.000,00	100	245.472.000,00	100	383.542.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	100	100	100	100.000.000,00	100	240.000.000,00	100	250.000.000,00	100	270.000.000,00	100	290.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					500.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	19,14	19	18	500.000.000,00	17	500.000.000,00	16,5	600.000.000,00	16	700.000.000,00	15	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					3.790.845.000,00		4.341.673.000,00		4.383.138.000,00		4.909.252.000,00		6.444.029.000,00	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.190.845.000,00		3.389.073.000,00		3.422.138.000,00		3.632.326.000,00		4.208.029.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	69,75	71,50	73,50	3.190.845.000,00	75,50	3.389.073.000,00	77,50	3.422.138.000,00	79,50	3.632.326.000,00	81,50	4.208.029.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					143.000.000,00		183.000.000,00		185.000.000,00		249.000.000,00		460.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas PSKS dalam memberikan pelayanan sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina dan berpartisipasi dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial (%)	100	100	100	143.000.000,00	100	183.000.000,00	100	185.000.000,00	100	249.000.000,00	100	460.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					200.000.000,00		322.600.000,00		324.500.000,00		435.993.000,00		780.000.000,00	
Meningkatnya Penanganan Masalah Kesejahteraan sosial	Persentase PPKS yang tertangani (%)	7,54	8,82	8,56	200.000.000,00	8,83	322.600.000,00	9,10	324.500.000,00	9,37	435.993.000,00	9,70	780.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					70.000.000,00		177.000.000,00		180.000.000,00		225.000.000,00		428.800.000,00	
Meningkatnya validitas Data Kesejahteraan Sosial	Persentase verifikasi Data Kesejahteraan Sosial (%)	100	100	100	70.000.000,00	100	177.000.000,00	100	180.000.000,00	100	225.000.000,00	100	428.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					160.000.000,00		245.000.000,00		246.000.000,00		320.933.000,00		511.200.000,00	
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sosial dasar korban bencana	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	100	100	100	160.000.000,00	100	245.000.000,00	100	246.000.000,00	100	320.933.000,00	100	511.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN					27.000.000,00		25.000.000,00		25.500.000,00		46.000.000,00		56.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TAMAN MAKAM PAHLAWAN														
Meningkatnya pengelolaan makam pahlawan	Cakupan Layanan Taman Makam Pahlawan (Persentase)	100	100	100	27.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.500.000,00	100	46.000.000,00	100	56.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.737.986.000,00		1.935.000.000,00		1.981.579.000,00		2.132.000.000,00		2.265.000.000,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					10.000.000,00		10.000.000,00		6.296.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya penerapan rencana tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	75	75	75	10.000.000,00	75	10.000.000,00	80	6.296.000,00	80	10.000.000,00	85	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					115.746.000,00		160.000.000,00		200.000.000,00		280.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi (%)	5,43	6,31	7,17	115.746.000,00	8,02	160.000.000,00	8,87	200.000.000,00	9,70	280.000.000,00	10,53	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Tenaga Kerja)	735,23	746,22	748,66		751,02		752,94		755,29		759,90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		12.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota (%)	100	100	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	12.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					1.602.240.000,00		1.755.000.000,00		1.765.283.000,00		1.830.000.000,00		1.890.000.000,00	
Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	33,88	33,88	36,55	1.602.240.000,00	38,60	1.755.000.000,00	40,38	1.765.283.000,00	42,48	1.830.000.000,00	45,37	1.890.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	91,30	91,30	91,30		91,30		95,65		95,65		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					275.000.000,00		380.000.000,00		383.800.000,00		471.000.000,00		570.000.000,00	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		156.000.000,00		160.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas dan Efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	0,065	0,075	0,085	100.000.000,00	0,090	150.000.000,00	0,095	150.000.000,00	0,100	156.000.000,00	0,105	160.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					50.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk)	23,60	23,49	23,39	50.000.000,00	23,28	65.000.000,00	23,18	65.000.000,00	23,08	70.000.000,00	22,97	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					25.000.000,00		30.000.000,00		32.500.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan,	-	-	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	32.500.000,00	100	45.000.000,00	100	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Evaluasi dan/atau Penyusunan (Persentase)													Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					25.000.000,00		30.000.000,00		31.300.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten (%)	100	100	100	25.000.000,00	100	30.000.000,00	100	31.300.000,00	100	45.000.000,00	100	75.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					75.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		155.000.000,00		185.000.000,00	
Menurunnya Kekerasan terhadap Anak	Rasio kekerasan terhadap anak (per 100.000 penduduk)	47,63	42,68	37,77	75.000.000,00	32,90	105.000.000,00	28,07	105.000.000,00	23,29	155.000.000,00	18,55	185.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					3.519.726.000,00		3.584.247.000,00		3.595.524.000,00		3.885.572.000,00		4.021.407.000,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.459.726.000,00		3.504.247.000,00		3.505.524.000,00		3.730.572.000,00		3.761.407.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	71,50	79,75	81,80	3.459.726.000,00	83,80	3.504.247.000,00	85,80	3.505.524.000,00	87,80	3.730.572.000,00	89,80	3.761.407.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					45.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		110.000.000,00		200.000.000,00	
Meningkatnya diversifikasi pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	85,80	86,00	86,00	45.000.000,00	86,50	55.000.000,00	87,00	60.000.000,00	87,50	110.000.000,00	88,00	200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					10.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		50.000.000,00	
Meningkatnya penanganan daerah rawan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2,87	2,87	2,46	10.000.000,00	2,46	20.000.000,00	2,05	25.000.000,00	2,05	35.000.000,00	1,64	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	14,28	20	26	5.000.000,00	32	5.000.000,00	38	5.000.000,00	44	10.000.000,00	50	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					1.786.785.360,00		1.967.500.000,00		2.035.875.000,00		2.105.167.000,00		2.225.426.000,00	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					40.000.000,00		42.000.000,00		44.100.000,00		46.305.000,00		48.620.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi (%)	100	100	100	40.000.000,00	100	42.000.000,00	100	44.100.000,00	100	46.305.000,00	100	48.620.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					1.543.450.000,00		1.663.000.000,00		1.716.150.000,00		1.769.456.000,00		1.872.930.000,00	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	100	100	100	1.543.450.000,00	100	1.663.000.000,00	100	1.716.150.000,00	100	1.769.456.000,00	100	1.872.930.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					50.000.000,00		52.500.000,00		55.125.000,00		57.881.000,00		60.775.000,00	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Obyek	Persentase Ketersediaan Tanah Obyek Landreform	100	100	100	50.000.000,00	100	52.500.000,00	100	55.125.000,00	100	57.881.000,00	100	60.775.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Reforma Agraria (TORA)	(TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal Kelebihan dari Tanah Maksimum dan Tanah Absentee (%)													Bidang Pertanahan
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					153.335.360,00		210.000.000,00		220.500.000,00		231.525.000,00		243.101.000,00	
Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah (Persentase)	33	44	62	153.335.360,00	78	210.000.000,00	93	220.500.000,00	97	231.525.000,00	100	243.101.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					5.953.950.000,00		6.098.783.000,00		6.214.464.000,00		6.926.008.000,00		6.643.438.000,00	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.686.950.000,00		4.865.783.000,00		4.760.964.000,00		5.436.008.000,00		5.015.336.750,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	68,25	73,50	75,50	4.686.950.000,00	77,50	4.865.783.000,00	79,50	4.760.964.000,00	81,50	5.436.008.000,00	83,50	5.015.336.750,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					170.000.000,00		80.000.000,00		220.500.000,00		180.000.000,00		238.101.250,00	
Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	70	75	100	170.000.000,00	100	80.000.000,00	100	220.500.000,00	100	180.000.000,00	100	238.101.250,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					122.000.000,00		139.000.000,00		156.000.000,00		173.000.000,00		190.000.000,00	
Menurunnya pencemaran lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	54,62	73,45	73,65	122.000.000,00	73,85	139.000.000,00	74,05	156.000.000,00	74,25	173.000.000,00	74,45	190.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Dinas/Badan yang
	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	64,05	72,66	72,73		72,79		72,86		72,93		73,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	96,17	81,69	81,89		82,09		82,29		82,49		82,69		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					70.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		115.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Luas RTH keanekaragaman hayati (Ha)	0	0	4	70.000.000,00	6	90.000.000,00	8	100.000.000,00	10	105.000.000,00	12	115.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					60.000.000,00		65.000.000,00		70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	20	20	25	60.000.000,00	30	65.000.000,00	40	70.000.000,00	50	75.000.000,00	60	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Meningkatnya ketaatan persetujuan lingkungan hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	100	100	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)													
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	40	50	60	80.000.000,00	70	80.000.000,00	80	80.000.000,00	90	80.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	10	20	30	60.000.000,00	40	70.000.000,00	50	80.000.000,00	60	90.000.000,00	70	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	100	100	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					495.000.000,00		489.000.000,00		517.000.000,00		547.000.000,00		575.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (poin)	54,33	56,43	67,66	495.000.000,00	75,00	489.000.000,00	85,50	517.000.000,00	87,33	547.000.000,00	92,50	575.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Timbulan sampah terdaur ulang (%)	1,50	1,75	2,00		2,25		2,50		2,75		3,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah ((%))	3,00	3,50	3,98		4,59		5,29		6,09		7,02		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					3.681.261.000,00		3.754.994.000,00		3.743.423.000,00		4.005.563.000,00		4.343.427.000,00	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.441.261.000,00		3.474.994.000,00		3.423.423.000,00		3.645.563.000,00		3.943.427.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,50	73,75	75,80	3.441.261.000,00	77,80	3.474.994.000,00	79,80	3.423.423.000,00	81,80	3.645.563.000,00	83,80	3.943.427.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan pendaftaran dan pendataan penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (Persentase)	38,41	40,41	42,41	50.000.000,00	44,41	60.000.000,00	46,41	70.000.000,00	48,41	80.000.000,00	50,41	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase layanan pendaftaran penduduk secara online (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas	10	11	12		13		14		15		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP (Persentase)													Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan pencatatan sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun (%)	98,74	98,75	98,80	50.000.000,00	98,85	60.000.000,00	98,90	70.000.000,00	98,95	80.000.000,00	99,00	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal (Persentase)	99,64	99,65	99,66		99,67		99,68		99,69		99,70		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase layanan pencatatan sipil secara online (%)	-	-	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai (Persentase)	71,42	72,00	73,00		74,00		75,00		76,00		77,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi	69,86	70,00	71,00		72,00		73,00		74,00		75,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	penduduk yang menikah (Persentase)													Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan	Pemanfaatan data kependudukan (%)	0	46	48	70.000.000,00	51	80.000.000,00	53	90.000.000,00	55	100.000.000,00	58	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	
Terselenggaranya pengelolaan profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	100	100	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					7.612.618.000,00		8.132.463.000,00		8.231.498.000,00		9.249.162.000,00		11.010.096.000,00	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.402.878.000,00		3.531.228.000,00		3.585.422.000,00		3.958.072.000,00		4.115.092.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	68,00	77,50	79,50	3.402.878.000,00	81,50	3.531.228.000,00	83,50	3.585.422.000,00	85,50	3.958.072.000,00	87,50	4.115.092.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					15.000.000,00		18.700.000,00		18.700.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Perdesaan	Tingkat Fasilitasi Sarana Prasarana Desa (%)	100	100	100	15.000.000,00	100	18.700.000,00	100	18.700.000,00	100	25.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					30.000.000,00		33.000.000,00		35.000.000,00		80.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	30	100	100	30.000.000,00	100	33.000.000,00	100	35.000.000,00	100	80.000.000,00	100	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					3.614.740.000,00		3.764.535.000,00		3.794.376.000,00		4.016.090.000,00		5.190.004.000,00	
Meningkatnya Pembinaan Pemerintah Desa	Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa (Persentase)	100	100	100	3.614.740.000,00	100	3.764.535.000,00	100	3.794.376.000,00	100	4.016.090.000,00	100	5.190.004.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					550.000.000,00		785.000.000,00		798.000.000,00		1.170.000.000,00		1.540.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	30	50	100	550.000.000,00	100	785.000.000,00	100	798.000.000,00	100	1.170.000.000,00	100	1.540.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	30	50	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG					8.534.353.000,00		8.887.511.000,00		9.217.501.000,00		9.774.758.000,00		10.702.845.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA														
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.451.665.610,00		3.481.111.000,00		3.513.501.000,00		3.581.358.000,00		3.787.501.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	67,00	80,00	82,00	3.451.665.610,00	84,00	3.481.111.000,00	86,00	3.513.501.000,00	88,00	3.581.358.000,00	90,00	3.787.501.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					350.787.390,00		303.000.000,00		303.000.000,00		308.000.000,00		404.444.000,00	
Meningkatnya kualitas data pengendalian penduduk	Cakupan Data Pengendalian Kependudukan (%)	50	50	75	350.787.390,00	100	303.000.000,00	100	303.000.000,00	100	308.000.000,00	100	404.444.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					2.901.400.000,00		3.052.400.000,00		3.163.000.000,00		3.502.400.000,00		3.788.400.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan program keluarga berencana	Persentase KB Pasca Persalinan (KBPP) (%)	50,8	79	79,5	2.901.400.000,00	80	3.052.400.000,00	80,5	3.163.000.000,00	81	3.502.400.000,00	81,5	3.788.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	20,84	20,54	20,12		19,72		19,33		18,94		18,66		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	36,40	57,83	58,98		60,16		61,36		62,59		63,82		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					1.830.500.000,00		2.051.000.000,00		2.238.000.000,00		2.383.000.000,00		2.722.500.000,00	
Menurunnya Keluarga berisiko Stunting	Persentase Keluarga Berisiko Stunting (%)	25,26	22,5	18,5	800.000.000,00	15,8	866.000.000,00	13,7	940.000.000,00	10,8	980.000.000,00	8	1.200.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	71,58	72,08	72,58	1.030.500.000,00	73,08	1.185.000.000,00	73,58	1.298.000.000,00	74,08	1.403.000.000,00	74,58	1.522.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	85,10	85,4	85,7		86		86,3		86,6		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					12.152.629.000,00		12.556.590.000,00		12.560.093.000,00		13.223.151.000,00		13.899.882.000,00	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.495.629.000,00		4.686.629.000,00		4.693.629.000,00		4.995.629.000,00		5.222.629.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	72,50	74,31	76,30	4.495.629.000,00	78,30	4.686.629.000,00	80,30	4.693.629.000,00	82,30	4.995.629.000,00	84,30	5.222.629.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					7.645.000.000,00		7.854.961.000,00		7.846.464.000,00		8.197.522.000,00		8.637.253.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas transportasi darat	Rasio Konektivitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Indeks)	0,89	0,89	0,89	7.645.000.000,00	0,89	7.854.961.000,00	0,89	7.846.464.000,00	0,93	8.197.522.000,00	0,93	8.637.253.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas (per 100.000 penduduk)	85,618	84,227	82,849		81,484		80,132		78,793		77,466		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
	V/C ratio di jalan Kabupaten (Angka)	-	0.44-0.21	0.44-0.21		0.44-0.21		0.44-0.21		0.44-0.21		0.44-0.21		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN					12.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya kualitas transportasi ASDP	Rasio konektivitas angkutan sungai, danau, dan penyeberangan (Indeks)	1	1	1	12.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	30.000.000,00	1	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					5.601.238.000,00		5.823.835.000,00		5.806.868.000,00		6.030.346.000,00		6.344.277.000,00	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.319.438.000,00		2.412.035.000,00		2.395.068.000,00		2.548.546.000,00		2.712.477.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	63,50	69,00	71,20	2.319.438.000,00	73,40	2.412.035.000,00	75,60	2.395.068.000,00	77,80	2.548.546.000,00	80,00	2.712.477.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					200.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda	70,20	70,25	70,30	200.000.000,00	70,35	300.000.000,00	70,40	300.000.000,00	70,45	300.000.000,00	70,50	350.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi (%)													
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					3.081.800.000,00		3.111.800.000,00		3.111.800.000,00		3.181.800.000,00		3.281.800.000,00	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi (%)	100	100	100	3.081.800.000,00	100	3.111.800.000,00	100	3.111.800.000,00	100	3.181.800.000,00	100	3.281.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.193.687.110,00		5.275.010.000,00		5.345.813.000,00		5.474.722.000,00		5.879.496.012,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.124.075.490,00		5.184.747.490,00		5.260.813.000,00		5.307.722.000,00		5.461.496.012,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	72,00	79,50	81,50	5.124.075.490,00	83,50	5.184.747.490,00	85,50	5.260.813.000,00	87,50	5.307.722.000,00	89,50	5.461.496.012,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten (%)	49	51	41	5.000.000,00	48	2.000.000,00	52	5.000.000,00	56	5.000.000,00	61	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					5.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya penilaian kesehatan koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi (%)	50	44	56	5.000.000,00	69	2.000.000,00	75	3.000.000,00	81	3.000.000,00	88	4.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					16.111.620,00		35.262.510,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten (%)	10,17	10,17	25,42	16.111.620,00	92,54	35.262.510,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					4.500.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		24.000.000,00		29.000.000,00	
Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	0	0	1,69	4.500.000,00	3,39	12.000.000,00	5,08	12.000.000,00	6,78	24.000.000,00	8,47	29.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					9.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan usaha mikro	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (Persentase)	0	0	1,00	9.000.000,00	2,00	9.000.000,00	2,99	10.000.000,00	3,99	10.000.000,00	4,99	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	13,81	13,91	14,39	30.000.000,00	14,88	30.000.000,00	15,37	30.000.000,00	15,85	100.000.000,00	16,34	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.026.313.000,00		4.153.059.000,00		4.110.000.000,00		4.281.867.000,00		4.585.009.000,00	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.900.313.000,00		3.968.059.000,00		3.965.000.000,00		4.056.867.000,00		4.269.009.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	67,50	73,25	75,30	3.900.313.000,00	77,30	3.968.059.000,00	79,30	3.965.000.000,00	81,30	4.056.867.000,00	83,30	4.269.009.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					48.000.000,00		10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan investasi	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	26,39	29,54	32,51	48.000.000,00	35,02	10.000.000,00	37,19	20.000.000,00	39,11	20.000.000,00	40,82	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					25.000.000,00		80.000.000,00		35.000.000,00		100.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya promosi investasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	47,16	100	100	25.000.000,00	100	80.000.000,00	100	35.000.000,00	100	100.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					48.000.000,00		50.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	92,34	92,34	92,47	48.000.000,00	92,59	50.000.000,00	92,72	45.000.000,00	92,84	60.000.000,00	92,97	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase izin yang diterbitkan sesuai SOP (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase ketersediaan SOP pelayanan perizinan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Penanaman Modal Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
	Persentase layanan perizinan yang dilakukan secara elektronik (%)	79,31	79,31	79,31		82,76		86,20		89,66		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					3.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya kepatuhan berusaha	Persentase Penanganan pengaduan perizinan (%)	100	100	100	3.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					2.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		36.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	100	100	100	2.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	100	36.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					3.550.000.000,00		4.150.000.000,00		4.750.000.000,00		5.350.000.000,00		5.950.000.000,00	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					250.000.000,00		300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat pemuda partisipasi dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	10	10,25	10,5	250.000.000,00	10,75	300.000.000,00	11	350.000.000,00	11,25	400.000.000,00	11,5	450.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		4.000.000.000,00		4.500.000.000,00		5.000.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi pemuda dalam olahraga	Peningkatan Prestasi Olahraga (Indeks)	-	0,20	0,20	3.000.000.000,00	0,25	3.500.000.000,00	0,30	4.000.000.000,00	0,40	4.500.000.000,00	0,40	5.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					300.000.000,00		350.000.000,00		400.000.000,00		450.000.000,00		500.000.000,00	
Meningkatnya kualitas daya saing kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	10	12	14	300.000.000,00	16	350.000.000,00	18	400.000.000,00	20	450.000.000,00	22	500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					50.000.000,00		50.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik daerah	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD (Persentase)	97,70	100	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	70.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya Keamanan Informasi Pemerintah	Tingkat keamanan informasi pemerintah (%)	40	80	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		900.000.000,00		1.400.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					150.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		675.000.000,00		1.175.000.000,00	
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	50	56	63	150.000.000,00	68	325.000.000,00	75	325.000.000,00	81	675.000.000,00	87	1.175.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					100.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00	
Meningkatnya pelestarian warisan budaya daerah	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	0	0.79- 0.79	2.38- 3.17	100.000.000,00	3.17- 3.97	175.000.000,00	3.97- 4.76	175.000.000,00	4.76- 5.55	225.000.000,00	5.55- 6.35	225.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
	Persentase Warisan Budaya Tak-Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	0	0	0,016		0,024		0,024		0,032		0,032		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.032.860.000,00		4.187.453.000,00		4.263.645.000,00		4.563.644.000,00		4.732.723.000,00	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.419.744.000,00		3.540.615.000,00		3.581.230.000,00		3.836.872.000,00		3.958.710.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	64,00	71,50	73,50	3.419.744.000,00	75,50	3.540.615.000,00	77,50	3.581.230.000,00	79,50	3.836.872.000,00	81,50	3.958.710.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					613.116.000,00		646.838.000,00		682.415.000,00		726.772.000,00		774.013.000,00	
Meningkatnya Kualitas Layanan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat (Nilai)	56,42	58,62	60,55	613.116.000,00	63,08	646.838.000,00	65,28	682.415.000,00	67,60	726.772.000,00	72,50	774.013.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	-	76,60	76,60		78,84		81,13		83,49		88,40		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					89.000.000,00		202.660.000,00		197.250.000,00		257.500.000,00		392.255.000,00	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					70.000.000,00		123.250.000,00		118.250.000,00		172.500.000,00		260.255.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Arsip	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP (%)	53,94	54,26	54,75	70.000.000,00	55,37	123.250.000,00	56,41	118.250.000,00	56,78	172.500.000,00	57,66	260.255.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					19.000.000,00		79.410.000,00		79.000.000,00		85.000.000,00		132.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan dan Penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	-	47,56	52,00	19.000.000,00	56,44	79.410.000,00	60,89	79.000.000,00	72,00	85.000.000,00	77,78	132.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		95.000.000,00		200.000.000,00	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					14.000.000,00		14.000.000,00		19.000.000,00		30.000.000,00		70.000.000,00	
Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	592,70	639,98	653,45	14.000.000,00	686,13	14.000.000,00	720,43	19.000.000,00	756,46	30.000.000,00	794,28	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					16.000.000,00		21.000.000,00		26.000.000,00		65.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya Produksi Perikanan budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	1.526,88	1746,20	1.683,38	16.000.000,00	1.767,55	21.000.000,00	1.855,93	26.000.000,00	1.948,73	65.000.000,00	2.046,16	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					4.425.513.000,00		5.599.191.000,00		5.633.544.000,00		8.148.585.000,00		10.664.330.000,00	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.675.513.000,00		4.099.191.000,00		4.133.544.000,00		5.148.585.000,00		6.164.330.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	70,50	73,50	75,50	3.675.513.000,00	77,50	4.099.191.000,00	79,50	4.133.544.000,00	81,50	5.148.585.000,00	83,50	6.164.330.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-59,00	17,47	10,00	250.000.000,00	13,64	500.000.000,00	16,00	500.000.000,00	17,24	1.000.000.000,00	17,65	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					250.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		1.000.000.000,00		1.500.000.000,00	
Meningkatnya pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	20,00	20,00	20,00	250.000.000,00	23,00	500.000.000,00	25,00	500.000.000,00	27,00	1.000.000.000,00	30,00	1.500.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Tingkat hunian akomodasi (%)	22,98	23,00	23,00		24,00		24,00		25,00		25,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					150.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		500.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif yang memiliki HKI (Pelaku Usaha)	10	10	12	150.000.000,00	15	300.000.000,00	19	300.000.000,00	24	500.000.000,00	30	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					100.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		500.000.000,00		700.000.000,00	
Meningkatnya Pengembangan SDM Kepariwisataan	Persentase sumber daya manusia pelaku pariwisata yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	42,86	69,64	74,14	100.000.000,00	75,21	200.000.000,00	76,19	200.000.000,00	77,61	500.000.000,00	78,87	700.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					12.719.789.000,00		15.431.272.000,00		15.064.806.000,00		20.705.177.000,00		22.849.381.000,00	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					11.417.196.000,00		11.614.572.000,00		11.780.786.000,00		12.508.351.029,00		13.321.327.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	75,50	76,25	78,30	11.417.196.000,00	80,30	11.614.572.000,00	82,30	11.780.786.000,00	84,30	12.508.351.029,00	86,30	13.321.327.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					306.000.000,00		1.863.085.000,00		1.571.600.000,00		4.973.858.971,00		5.847.500.000,00	
Meningkatnya ketersediaan sarana pertanian	Peningkatan produksi tanaman pangan (%)	-1,90	1,22	0,59	306.000.000,00	0,61	1.863.085.000,00	1,16	1.571.600.000,00	1,17	4.973.858.971,00	1,49	5.847.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan produksi tanaman hortikultura (%)	-8,64	1,77	0,74		0,84		0,93		0,95		0,96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan Produksi Perkebunan (%)	-1,24	-1,92	0,01		0,03		0,04		0,05		0,06		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Peningkatan produksi daging (%)	-23,60	0,27	0,10		0,12		0,14		0,16		0,19		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					535.604.000,00		1.120.208.000,00		770.175.000,00		1.720.602.000,00		1.897.569.000,00	
Meningkatnya ketersediaan prasarana pertanian	Luas lahan tidur yang dimanfaatkan (Ha)	-	-	-	535.604.000,00	-	1.120.208.000,00	4	770.175.000,00	8	1.720.602.000,00	-	1.897.569.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik (%)	27,24	32,66	33,43		34,43		35,30		37,11		37,94		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					90.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		260.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan pencegahan penyakit hewan/ternak	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-4,35	-4,29	-3,96	90.000.000,00	-3,85	200.000.000,00	-3,43	220.000.000,00	-2,96	260.000.000,00	-2,44	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					150.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		440.000.000,00		321.000.000,00	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan serangan OPT tanaman pertanian	Persentase Penanganan Serangan OPT (%)	95,54	100	100	150.000.000,00	100	250.000.000,00	100	275.000.000,00	100	440.000.000,00	100	321.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					220.989.000,00		383.407.000,00		447.245.000,00		802.365.000,00		1.161.985.000,00	
Meningkatnya kapasitas SDM penyuluh pertanian dan pemberdayaan petani	Persentase kelembagaan kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	65,60	71,98	72,04	220.989.000,00	73,11	383.407.000,00	74,63	447.245.000,00	75,20	802.365.000,00	75,30	1.161.985.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					105.538.890,00		246.000.000,00		228.603.000,00		792.854.000,00		1.892.818.988,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya ketaatan berusaha bidang perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	49,67	58,06	66,45	5.000.000,00	74,84	10.000.000,00	83,22	10.000.000,00	91,61	15.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					19.538.890,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		379.390.400,00	
Meningkatnya nilai tambah perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan	17,86	17,90	18,01	19.538.890,00	18,12	25.000.000,00	18,23	25.000.000,00	18,34	50.000.000,00	18,50	379.390.400,00	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	terhadap PDRB (Persentase)													menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					36.000.000,00		71.000.000,00		61.000.000,00		71.000.000,00		101.000.000,00	
Meningkatnya stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	2,39	2,26	2,12	36.000.000,00	2,08	71.000.000,00	2,03	61.000.000,00	2,02	71.000.000,00	2,00	101.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	12,07	13,41	14,67	40.000.000,00	15,97	40.000.000,00	17,12	40.000.000,00	18,37	40.000.000,00	19,55	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					5.000.000,00		100.000.000,00		92.603.000,00		616.854.000,00		1.357.428.588,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	5.000.000,00	100	100.000.000,00	100	92.603.000,00	100	616.854.000,00	100	1.357.428.588,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					31.603.000,00		68.603.000,00		68.603.000,00		127.000.000,00		127.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					4.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya daya saing industri	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,55	11,56	11,57	4.000.000,00	11,58	25.000.000,00	11,61	25.000.000,00	11,63	65.000.000,00	11,67	65.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0,00		16.000.000,00		16.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pengendalian izin usaha industri	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	0,00	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					27.603.000,00		27.603.000,00		27.603.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sistem informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	100	100	100	27.603.000,00	100	27.603.000,00	100	27.603.000,00	100	32.000.000,00	100	32.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					36.040.084.000,00		38.610.074.000,00		37.298.324.000,00		38.989.895.000,00		55.908.849.000,00	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.305.084.000,00		34.875.074.000,00		33.563.324.000,00		34.649.895.000,00		50.863.849.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	70,50	88,00	88,40	32.305.084.000,00	88,80	34.875.074.000,00	89,20	33.563.324.000,00	89,60	34.649.895.000,00	90,00	50.863.849.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase instansi pemerintah dengan skor Sistem Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ? B (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase kinerja pelayanan kedinasan Kepala Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Realisasi Penyediaan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.000.000.000,00		3.500.000.000,00		4.000.000.000,00	
Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Bidang	Capaian Kebijakan Bidang	-	100	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.000.000.000,00	100	3.500.000.000,00	100	4.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Kualitas Produk Hukum Yang Dihasilkan	Kesejahteraan Rakyat (%)													Bidang Sekretariat Daerah
	Nilai E-LPPD (Nilai)	2,94	2,97	3,00		3,10		3,20		3,30		3,41		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Persentase Produk Hukum yang Dihasilkan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					735.000.000,00		735.000.000,00		735.000.000,00		840.000.000,00		1.045.000.000,00	
Meningkatnya koordinasi kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	Capaian Kebijakan Bidang Perekonomian (%)	-	100	100	735.000.000,00	100	735.000.000,00	100	735.000.000,00	100	840.000.000,00	100	1.045.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Capaian Sasaran Strategis Daerah (%)	-	90-100	90-100		90-100		90-100		90-100		90-100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Tingkat Kematangan UKPBJ (Angka)	3	4	5		6		7		8		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					35.310.359.000,00		36.448.650.000,00		34.695.755.000,00		36.543.689.000,00		42.592.469.000,00	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.249.835.161,00		22.384.843.902,00		22.490.501.276,00		22.497.640.652,00		22.908.095.286,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	67,50	68,00	70,40	22.249.835.161,00	72,80	22.384.843.902,00	75,20	22.490.501.276,00	77,60	22.497.640.652,00	80,00	22.908.095.286,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					13.060.523.839,00		14.063.806.098,00		12.205.253.724,00		14.046.048.348,00		19.684.373.714,00	
Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Tingkat Fasilitasi Pembahasan Anggaran (%)	100	100	100	13.060.523.839,00	100	14.063.806.098,00	100	12.205.253.724,00	100	14.046.048.348,00	100	19.684.373.714,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
	Tingkat Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					5.228.456.000,00		5.583.151.000,00		5.564.812.000,00		5.903.457.000,00		6.258.106.000,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.672.656.000,00		4.900.999.100,00		4.932.660.100,00		5.003.305.100,00		5.132.306.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	64,25	72,96	75,00	4.672.656.000,00	77,00	4.900.999.100,00	79,00	4.932.660.100,00	81,00	5.003.305.100,00	83,00	5.132.306.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					275.800.000,00		322.151.900,00		272.151.900,00		343.151.900,00		475.800.000,00	
Meningkatnya kualitas penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100	275.800.000,00	100	322.151.900,00	100	272.151.900,00	100	343.151.900,00	100	475.800.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					280.000.000,00		360.000.000,00		360.000.000,00		557.000.000,00		650.000.000,00	
Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan	100	100	100	280.000.000,00	100	360.000.000,00	100	360.000.000,00	100	557.000.000,00	100	650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Kewilayahan (Persentase) Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.02 - KEUANGAN					294.870.219.000,00		305.334.252.000,00		310.096.776.000,00		315.579.266.000,00		321.784.435.000,00	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.378.371.679,00		15.202.828.679,00		15.914.134.679,00		16.677.455.679,00		17.250.949.679,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	70,50	80,00	82,00	6.941.679.000,00	84,00	9.596.500.000,00	86,00	10.208.500.000,00	88,00	10.711.000.000,00	90,00	10.952.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	74,25	78,75	80,80	5.436.692.679,00	82,80	5.606.328.679,00	84,80	5.705.634.679,00	86,80	5.966.455.679,00	88,80	6.298.449.679,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					281.209.590.000,00		288.673.566.000,00		292.691.584.000,00		297.289.553.000,00		302.762.428.000,00	
Meningkatnya kualitas penyusunan anggaran yang tepat waktu	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	31,84	34,36	33,81	1.250.000.000,00	32,85	1.489.500.000,00	31,89	1.500.000.000,00	30,93	1.513.000.000,00	30,00	1.524.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	32,74	27,60	30,08		32,56		35,04		37,52		40,00		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penyusunan dokumen rencana anggaran tepat waktu (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya Tata Kelola Perbendaharaan	Tingkat ketersediaaan juknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan (%)	100	100	100	279.574.590.000,00	100	286.676.566.000,00	100	290.651.584.000,00	100	295.204.053.000,00	100	300.633.428.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase penyusunan pertanggungjawaban APBD tepat waktu (%)	100	100	100	385.000.000,00	100	507.500.000,00	100	540.000.000,00	100	572.500.000,00	100	605.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					700.000.000,00		850.000.000,00		900.000.000,00		950.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Manajemen Aset (Kategori)	4	4	4	700.000.000,00	4	850.000.000,00	4	900.000.000,00	4	950.000.000,00	4	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					582.257.321,00		607.857.321,00		591.057.321,00		662.257.321,00		771.057.321,00	
Meningkatnya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD (%)	-10,41	-9,95	-9,60	582.257.321,00	-8,00	607.857.321,00	-6,10	591.057.321,00	-3,78	662.257.321,00	-0,79	771.057.321,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase peningkatan pajak daerah lainnya (%)	-0,05	0,19	0,21		0,22		0,24		0,26		0,29		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase peningkatan PBB dan BPHTB (%)	-0,122	0,130	0,247		0,322		0,344		0,391		0,431		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase peningkatan	17,77	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	penerimaan retribusi daerah (%) Persentase Peningkatan Wajib Pajak Daerah (%)	0,89	1,19	1,47		1,83		2,27		2,79		3,39		Bidang Keuangan Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.03 - KEPEGAWAIAN					4.388.624.000,00		4.534.067.000,00		4.469.186.000,00		4.704.995.000,00		6.100.507.000,00	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.835.624.000,00		3.981.067.000,00		3.916.186.000,00		4.151.995.000,00		4.360.507.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	76,50	82,25	83,80	3.835.624.000,00	85,40	3.981.067.000,00	86,90	3.916.186.000,00	88,50	4.151.995.000,00	90,00	4.360.507.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					553.000.000,00		553.000.000,00		553.000.000,00		553.000.000,00		1.740.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Manajemen ASN	NSPK ASN (Nilai) Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	Baik 93,96	Baik 99,04	Baik 100	343.000.000,00	Baik 100	343.000.000,00	Baik 100	343.000.000,00	Baik 100	343.000.000,00	Baik 100	1.150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
Meningkatnya Pengembangan SDM ASN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi PNS (%)	19,90	20,25	20,60	210.000.000,00	20,95	210.000.000,00	21,30	210.000.000,00	21,65	210.000.000,00	22,00	590.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Tingkat Pemenuhan Jabatan Struktural (%)	77,58	79,96	82		84		86		88		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		57.000.000,00	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		57.000.000,00	
Meningkatnya Pengembangan Sumber Daya	Persentase Pemenuhan	19,90	20,25	20,60	50.000.000,00	20,95	50.000.000,00	21,30	50.000.000,00	21,65	50.000.000,00	22,00	57.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Manusia Aparatur Sipil Negara	Pengembangan Kompetensi PNS (%)													Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					80.000.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		130.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					80.000.000,00		100.000.000,00		80.000.000,00		100.000.000,00		130.000.000,00	
Meningkatnya pengembangan inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	39,74	41	41	80.000.000,00	42	100.000.000,00	43	80.000.000,00	44	100.000.000,00	45	130.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.734.747.000,00		9.821.015.000,00		9.730.544.000,00		10.953.359.000,00		11.960.485.000,00	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.663.487.476,00		8.113.015.000,00		8.022.544.000,00		8.768.359.000,00		9.319.485.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	75,75	79	81	7.663.487.476,00	83	8.113.015.000,00	85	8.022.544.000,00	87	8.768.359.000,00	89	9.319.485.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					959.402.060,00		1.509.000.000,00		1.509.000.000,00		1.944.000.000,00		2.337.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	83,20	84,40	84,60	959.402.060,00	84,80	1.509.000.000,00	85,10	1.509.000.000,00	85,40	1.944.000.000,00	85,80	2.337.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					111.857.464,00		199.000.000,00		199.000.000,00		241.000.000,00		304.000.000,00	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) (Nilai)	3	3	3	111.857.464,00	3	199.000.000,00	3	199.000.000,00	4	241.000.000,00	4	304.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
	Manajemen Risiko Indeks (Level)	2	2	3		3		3		4		4		Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
														menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					46.199.240.000,00		49.968.539.000,00		49.877.584.000,00		51.085.546.000,00		53.158.045.000,00	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					38.985.604.000,00		41.554.272.000,00		41.462.026.000,00		42.371.459.000,00		43.803.274.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	64,5	79,75	81,80	2.560.311.000,00	83,80	2.684.384.000,00	85,80	2.680.913.000,00	87,80	2.738.269.000,00	89,80	2.822.664.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,5	74,75	76,80	6.172.436.000,00	78,80	6.506.342.000,00	80,80	6.540.754.000,00	82,80	6.682.702.000,00	84,80	6.783.216.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,5	70,50	72,50	2.036.950.000,00	74,50	2.176.114.000,00	76,50	2.167.894.000,00	78,50	2.201.961.000,00	80,50	2.289.343.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	62,75	74,50	76,50	1.807.044.000,00	78,50	1.953.246.000,00	80,50	1.934.485.000,00	82,50	1.973.194.000,00	84,50	2.049.591.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	63	78,25	80,30	1.978.571.000,00	82,30	2.092.875.000,00	84,30	2.100.386.000,00	86,30	2.148.312.000,00	88,30	2.229.162.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	69,75	73,50	75,50	3.126.440.000,00	77,50	3.327.290.000,00	79,50	3.329.092.000,00	81,50	3.401.067.000,00	83,50	3.526.536.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	67,75	77,25	79,30	1.708.704.000,00	81,30	1.877.427.000,00	83,30	1.851.425.000,00	85,30	1.904.804.000,00	87,30	1.984.672.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	61	64,50	67,60	1.724.294.000,00	70,70	1.828.003.000,00	73,80	1.800.288.000,00	76,90	1.854.826.000,00	80,00	1.949.899.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	64	78,50	80,50	2.002.405.000,00	82,50	2.158.098.000,00	84,50	2.152.664.000,00	86,50	2.223.177.000,00	88,50	2.284.405.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	59,75	74,50	76,50	1.843.864.000,00	78,50	1.951.136.000,00	80,50	1.942.028.000,00	82,50	1.972.512.000,00	84,50	2.056.016.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	59	77,75	79,80	3.268.461.000,00	81,80	3.441.422.000,00	83,80	3.461.631.000,00	85,80	3.519.305.000,00	87,80	3.645.131.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	58,5	79,75	81,80	2.085.029.000,00	83,80	2.254.458.000,00	85,80	2.202.340.000,00	87,80	2.250.685.000,00	89,80	2.330.702.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,25	79,75	81,80	2.505.180.000,00	83,80	2.643.302.000,00	85,80	2.637.490.000,00	87,80	2.693.756.000,00	89,80	2.766.512.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	64	79,75	81,80	2.124.202.000,00	83,80	2.295.650.000,00	85,80	2.308.275.000,00	87,80	2.359.986.000,00	89,80	2.439.993.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	63,5	68,51	70,80	1.746.189.000,00	73,10	1.904.373.000,00	75,40	1.881.858.000,00	77,70	1.925.516.000,00	80,00	2.016.417.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	65,25	70,06	72,10	2.295.524.000,00	74,10	2.460.152.000,00	76,10	2.470.503.000,00	78,10	2.521.387.000,00	80,10	2.629.015.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					494.440.000,00		866.369.000,00		836.430.000,00		929.997.000,00		1.115.507.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	20.000.000,00	100	58.000.000,00	100	51.000.000,00	100	56.000.000,00	100	66.640.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	20.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	40.000.000,00	100	80.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
kewenangan yang dilimpahkan KDH Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	26.000.000,00	100	72.000.000,00	100	62.000.000,00	100	70.000.000,00	100	81.000.000,00	Bidang Kecamatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	30.500.000,00	100	56.000.000,00	100	47.000.000,00	100	55.000.000,00	100	62.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	67.000.000,00	100	99.500.000,00	100	87.000.000,00	100	99.000.000,00	100	120.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	49.000.000,00	100	66.000.000,00	100	66.000.000,00	100	73.905.000,00	100	84.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	31.000.000,00	100	49.000.000,00	100	54.000.000,00	100	59.000.000,00	100	67.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	14.000.000,00	100	41.000.000,00	100	48.000.000,00	100	49.553.000,00	100	57.386.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	16.500.000,00	100	39.000.000,00	100	36.000.000,00	100	40.000.000,00	100	50.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	24.040.000,00	100	51.000.000,00	100	57.000.000,00	100	63.000.000,00	100	73.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	25.100.000,00	100	41.069.000,00	100	42.100.000,00	100	43.566.000,00	100	48.566.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	26.000.000,00	100	37.000.000,00	100	48.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	47.000.000,00	100	72.500.000,00	100	75.500.000,00	100	79.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	42.300.000,00	100	59.000.000,00	100	47.000.000,00	100	56.000.000,00	100	73.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	31.000.000,00	100	41.300.000,00	100	45.430.000,00	100	49.973.000,00	100	55.915.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan KDH	Kesesuaian layanan dengan SOP (%)	0	0	100	25.000.000,00	100	44.000.000,00	100	30.400.000,00	100	36.000.000,00	100	37.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					5.528.509.000,00		5.778.093.000,00		5.813.816.000,00		5.868.575.000,00		6.038.051.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	415.000.000,00	100	431.000.000,00	100	434.000.000,00	100	438.000.000,00	100	449.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	2.420.000.000,00	100	2.420.000.000,00	100	2.420.000.000,00	100	2.420.000.000,00	100	2.460.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	21.000.000,00	100	52.000.000,00	100	49.000.000,00	100	60.000.000,00	100	70.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan	0	100	100	33.393.000,00	100	71.342.000,00	100	80.845.000,00	100	90.885.000,00	100	102.643.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Lembaga Kemasyarakatan (%) Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100	100	412.000.000,00	100	437.000.000,00	100	437.000.000,00	100	438.500.000,00	100	446.700.000,00	Bidang Kecamatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	432.140.000,00	100	449.000.000,00	100	449.000.000,00	100	449.000.000,00	100	452.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	100	100	100	21.000.000,00	100	31.200.000,00	100	34.200.000,00	100	36.600.000,00	100	43.400.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	17.050.000,00	100	43.500.000,00	100	45.700.000,00	100	48.500.000,00	100	52.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	12.925.000,00	100	24.000.000,00	100	25.000.000,00	100	24.500.000,00	100	47.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	11.000.000,00	100	30.855.000,00	100	34.855.000,00	100	38.855.000,00	100	42.855.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	1.225.500.000,00	100	1.245.000.000,00	100	1.241.000.000,00	100	1.242.000.000,00	100	1.246.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	23.000.000,00	100	23.000.000,00	100	33.000.000,00	100	39.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	422.000.000,00	100	429.000.000,00	100	429.500.000,00	100	430.000.000,00	100	438.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	22.600.000,00	100	31.000.000,00	100	33.000.000,00	100	38.000.000,00	100	47.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	18.901.000,00	100	25.196.000,00	100	27.716.000,00	100	30.735.000,00	100	33.753.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (%)	0	100	100	21.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	100	44.000.000,00	100	47.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					55.635.000,00		116.022.000,00		120.132.000,00		145.656.000,00		172.152.000,00	
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	0,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	100	13.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	3.000.000,00	100	10.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
ketertiban di wilayah kecamatan Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	0,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	8.000.000,00	100	10.000.000,00	Bidang Kecamatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	2.000.000,00	100	3.000.000,00	100	3.000.000,00	100	4.000.000,00	100	7.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	4.300.000,00	100	10.300.000,00	100	10.600.000,00	100	11.000.000,00	100	14.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	2.000.000,00	100	9.000.000,00	100	9.500.000,00	100	10.426.000,00	100	10.626.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	2.000.000,00	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.500.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	5.000.000,00	100	7.028.000,00	100	7.493.000,00	100	7.988.000,00	100	8.515.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	4.335.000,00	100	6.494.000,00	100	6.319.000,00	100	8.910.000,00	100	10.910.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	500.000,00	100	1.000.000,00	100	1.500.000,00	100	2.000.000,00	100	3.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	2.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	100	6.500.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	2.500.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	100	10.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	3.000.000,00	100	5.200.000,00	100	5.720.000,00	100	7.832.000,00	100	9.101.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Tingkat Penanganan Gangguan Trantibum Kecamatan (%)	0	100	100	6.000.000,00	100	19.000.000,00	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					933.952.000,00		1.319.149.000,00		1.305.225.000,00		1.396.984.000,00		1.604.456.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	39.200.000,00	100	69.200.000,00	100	74.320.000,00	100	82.200.000,00	100	104.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	89.200.000,00	100	77.179.000,00	100	79.000.000,00	100	83.000.000,00	100	87.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	46.200.000,00	100	50.200.000,00	100	53.200.000,00	100	57.200.000,00	100	62.200.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	19.200.000,00	100	73.000.000,00	100	66.000.000,00	100	72.000.000,00	100	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	116.372.000,00	100	134.905.000,00	100	134.105.000,00	100	141.000.000,00	100	157.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	0	100	55.200.000,00	100	64.200.000,00	100	67.200.000,00	100	68.200.000,00	100	82.700.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan	Tingkat Penyelenggaraan	0	100	100	18.000.000,00	100	44.000.000,00	100	45.000.000,00	100	45.500.000,00	100	50.800.000,00	Dinas/Badan yang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Urusan Pemerintahan Umum (%)													menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	43.340.000,00	100	70.000.000,00	100	66.000.000,00	100	59.500.000,00	100	80.140.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	42.200.000,00	100	79.177.000,00	100	65.287.000,00	100	84.157.000,00	100	97.165.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	100.140.000,00	100	131.538.000,00	100	118.538.000,00	100	138.527.000,00	100	146.527.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	74.000.000,00	100	114.000.000,00	100	134.000.000,00	100	134.000.000,00	100	143.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	66.000.000,00	100	109.000.000,00	100	109.500.000,00	100	121.000.000,00	100	150.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	89.200.000,00	100	136.000.000,00	100	121.000.000,00	100	129.000.000,00	100	155.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	57.500.000,00	100	74.750.000,00	100	79.875.000,00	100	85.500.000,00	100	92.724.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum di kecamatan	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)	0	100	100	43.200.000,00	100	57.000.000,00	100	57.200.000,00	100	61.200.000,00	100	71.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					201.100.000,00		334.634.000,00		339.955.000,00		372.875.000,00		424.605.000,00	
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	17.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	Bidang Kecamatan Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	10.000.000,00	100	16.000.000,00	100	17.000.000,00	100	17.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	18.000.000,00	100	23.864.000,00	100	25.000.000,00	100	28.500.000,00	100	33.173.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	10	20.000.000,00	100	35.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	2.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	24.000.000,00	100	31.000.000,00	100	32.000.000,00	100	34.500.000,00	100	42.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	10.500.000,00	100	30.000.000,00	100	32.000.000,00	100	32.000.000,00	100	33.550.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	16.800.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	5.000.000,00	100	17.000.000,00	100	19.000.000,00	100	21.000.000,00	100	23.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	10.000.000,00	100	20.320.000,00	100	20.320.000,00	100	25.437.000,00	100	27.437.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	14.000.000,00	100	15.000.000,00	100	16.000.000,00	100	18.000.000,00	100	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	5.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	10.000.000,00	100	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	2.300.000,00	100	4.600.000,00	100	4.600.000,00	100	5.000.000,00	100	6.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	16.500.000,00	100	21.850.000,00	100	24.035.000,00	100	26.438.000,00	100	29.445.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Meningkatnya pembinaan desa	Tingkat Pembinaan Desa (%)	0	0	100	20.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					3.783.875.000,00		3.811.915.000,00		28.991.325.000,00		29.121.317.000,00		4.401.902.000,00	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.497.075.000,00		2.681.915.000,00		2.851.325.000,00		2.971.317.000,00		3.231.902.000,00	
Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	69,75	76,00	78,00	2.497.075.000,00	80,00	2.681.915.000,00	82,00	2.851.325.000,00	84,00	2.971.317.000,00	86,00	3.231.902.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase masyarakat yang menerima Penguatan nilai-nilai Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (%)	6,60	9,38	12,05	100.000.000,00	14,48	100.000.000,00	16,80	100.000.000,00	19,03	100.000.000,00	21,17	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					1.006.800.000,00		800.000.000,00		25.800.000.000,00		25.800.000.000,00		800.000.000,00	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	53,09	53,09	53,09	1.006.800.000,00	53,23	800.000.000,00	53,29	25.800.000.000,00	53,36	25.800.000.000,00	53,43	800.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Ormas dan LSM yang aktif	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	50,00	51,54	59,35	100.000.000,00	65,00	100.000.000,00	69,27	100.000.000,00	72,61	100.000.000,00	75,29	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00	
Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Cakupan Diseminasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya (%)	100	100	100	30.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	50.000.000,00	100	60.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI					50.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL														
Menurunnya Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial yang ditangani (%)	100	100	100	50.000.000,00	100	80.000.000,00	100	90.000.000,00	100	100.000.000,00	100	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1,165,247,911,000.00		1,218,352,459,000.00		1,278,361,830,986.00		1,359,510,658,970.00		1,431,162,935,972.00	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan.

I. Indikator Kinerja Utama.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029. IKU disusun dengan memperhatikan arah pembangunan nasional, target pembangunan Provinsi Sumatera Utara, serta kondisi, potensi, dan permasalahan daerah.

IKU menjadi tolok ukur strategis yang bersifat outcome oriented, sehingga mampu menggambarkan sejauh mana kinerja Pemerintah Kabupaten Toba dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penyusunan IKU ini memperhatikan prinsip SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) sehingga dapat diukur, realistis, serta relevan dengan sasaran pembangunan daerah.

Secara umum, IKU RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 diarahkan pada beberapa indikator, yaitu:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia mengukur capaian pembangunan dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Peningkatan IPM menunjukkan perbaikan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh. Target kenaikan dari 79,15 pada tahun 2026 menjadi 80,85 pada tahun 2030 mencerminkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pendapatan masyarakat. Dengan IPM yang terus meningkat, diharapkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Toba akan semakin baik dan berdaya saing.

2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)

Prevalensi stunting adalah persentase balita (anak usia 0–59 bulan) yang mengalami gangguan pertumbuhan ditandai dengan tinggi badan menurut umur (TB/U) berada di bawah standar pertumbuhan WHO (< -2 SD). Anak yang tergolong pendek dan sangat pendek dikategorikan mengalami stunting. Indikator ini mencerminkan kondisi gizi kronis yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi, infeksi berulang, serta pola pengasuhan yang tidak optimal, terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Indikator ini digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berkualitas.

Stunting merupakan masalah serius yang berdampak jangka panjang terhadap kualitas generasi masa depan, karena dapat menurunkan kemampuan kognitif, prestasi belajar, produktivitas ekonomi, serta meningkatkan risiko penyakit degeneratif di masa dewasa.

Bagi Kabupaten Toba, penurunan prevalensi stunting menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan manusia, karena keberhasilan mengatasi stunting mencerminkan sinergi lintas sektor — antara kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, air bersih, dan sanitasi. Penurunan angka stunting juga menjadi bagian dari target nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.

3. Rasio permasalahan sosial (per 100.000 penduduk)

Penurunan permasalahan sosial merupakan salah satu sasaran strategis pembangunan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, inklusif, dan berkeadilan sosial. Permasalahan sosial yang meliputi kemiskinan ekstrem, anak terlantar, penyandang disabilitas, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, korban kekerasan, serta kelompok rentan lainnya, apabila tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan, berpotensi menghambat kualitas pembangunan manusia dan stabilitas sosial daerah.

Upaya pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang terintegrasi, peningkatan ketepatan sasaran program bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas, serta peningkatan akses kelompok rentan terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Selain itu, sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah desa, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor kunci dalam penanganan permasalahan sosial secara komprehensif.

Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Rasio Permasalahan Sosial per 100.000 penduduk, yang mencerminkan tingkat prevalensi permasalahan sosial di daerah. Penurunan rasio tersebut menunjukkan meningkatnya efektivitas kebijakan dan program penanganan sosial, sekaligus menjadi indikator membaiknya kondisi sosial dan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

4. Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur menggambarkan tingkat ketersediaan, kualitas, dan keterjangkauan sarana serta prasarana dasar yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Peningkatan indeks ini menunjukkan semakin baiknya kondisi infrastruktur seperti jalan, jembatan, air bersih, serta fasilitas publik lainnya. Target peningkatan dari 0,5114 pada tahun 2026 menjadi 0,557 pada tahun 2030 menunjukkan adanya upaya berkelanjutan pemerintah Dalam mempercepat pembangunan infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah ukuran rata-rata nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi di daerah dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah penduduk. Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan target dari Rp 51,8 juta per tahun pada 2026 menjadi Rp 63,5 juta per tahun pada 2030 menunjukkan adanya harapan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, serta peningkatan daya beli masyarakat. Hal ini juga menandakan keberhasilan program pembangunan ekonomi daerah yang didukung oleh sektor unggulan.

6. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan perbandingan kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba pada tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan peranan sektor primer dalam menopang struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur besarnya peran sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dalam membentuk nilai tambah ekonomi daerah serta sebagai dasar untuk menilai efektivitas kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam di Kabupaten Toba.

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan salah satu sektor utama dan penyerap tenaga kerja terbesar di Kabupaten Toba, yang memiliki kontribusi penting terhadap ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan hidup.

Peningkatan rasio sektor ini menunjukkan kuatnya fondasi ekonomi daerah berbasis sumber daya alam dan masyarakat perdesaan. Namun, arah kebijakan perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kontribusi kuantitatif, tetapi juga peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan keberlanjutan sektor tersebut.

Dengan demikian, indikator ini berfungsi untuk memantau transformasi ekonomi daerah menuju pertanian modern, lestari, dan berdaya saing.

7. Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman

Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman merupakan perbandingan kontribusi sektor akomodasi, makanan, dan minuman terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba pada tahun tertentu. Indikator ini menggambarkan besarnya peranan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam struktur perekonomian daerah.

Pengukuran indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sektor akomodasi, makanan, dan minuman berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, serta menilai efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor unggulan berbasis pariwisata dan pelayanan.

Sektor akomodasi, makanan, dan minuman merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten Toba yang memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan pariwisata Danau Toba, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja.

Peningkatan rasio sektor ini menunjukkan tumbuhnya aktivitas ekonomi berbasis jasa dan pariwisata yang berdaya saing, serta meningkatnya kontribusi ekonomi lokal terhadap kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam upaya diversifikasi ekonomi daerah dan penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal.

8. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan menunjukkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Penurunan indikator ini merupakan bukti keberhasilan pembangunan ekonomi yang inklusif. Target penurunan dari 7,63% pada tahun 2026 menjadi 6,6% pada tahun 2030 menggambarkan adanya program pengentasan kemiskinan yang lebih terarah melalui peningkatan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, bantuan sosial yang tepat sasaran, serta penguatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan

9. Rasio Gini

Rasio Gini merupakan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Nilai Rasio Gini berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai 0 menunjukkan pemerataan sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama), sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna (pendapatan hanya dimiliki oleh satu kelompok kecil). Dengan demikian, semakin kecil nilai Rasio Gini, semakin merata distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Toba.

Indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Rasio Gini menjadi alat penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya diukur dari besarnya nilai PDRB, tetapi juga dari pemerataan hasil pembangunan. Rasio Gini mencerminkan keseimbangan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah.

Bagi Kabupaten Toba, pengendalian ketimpangan pendapatan penting untuk menjaga stabilitas sosial dan memperkuat fondasi ekonomi daerah berbasis partisipasi masyarakat. Penurunan Rasio Gini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan.

10. Cakupan Penerima Bantuan Sosial

Cakupan Penerima Bantuan Sosial merupakan persentase jumlah penduduk atau rumah tangga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial dari pemerintah dibandingkan dengan total penduduk atau rumah tangga miskin

yang berhak menerima bantuan. Indikator ini mencerminkan tingkat keterjangkauan dan efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi beban masyarakat miskin serta menanggulangi kerentanan sosial di Kabupaten Toba. Pengukuran indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program bantuan sosial daerah mampu menjangkau kelompok sasaran yang tepat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Bantuan sosial merupakan instrumen penting dalam kebijakan perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, dan melindungi masyarakat dari risiko sosial. Tingginya cakupan penerima bantuan sosial menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyalurkan program bantuan secara tepat sasaran dan berkeadilan.

Bagi Kabupaten Toba, peningkatan cakupan penerima bantuan sosial yang akurat akan membantu memperkuat jaring pengaman sosial, mendukung pembangunan inklusif, dan memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan.

11. Rasio PAD terhadap APBD

Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator kemandirian fiskal daerah. Semakin tinggi rasio ini, semakin besar kontribusi PAD terhadap keseluruhan APBD, yang berarti daerah semakin mampu membiayai pembangunan tanpa ketergantungan yang tinggi pada transfer pusat. Target kenaikan dari 12,78% pada tahun 2026 menjadi 15,24% pada tahun 2030 mencerminkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, peningkatan kepatuhan pajak, serta pengelolaan aset daerah yang lebih optimal.

12. Indeks Pelayanan Publik.

Indeks Pelayanan Publik merupakan ukuran tingkat kinerja penyelenggaraan pelayanan publik oleh perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mencerminkan kualitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima. Indeks ini mengacu pada hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) atau instansi berwenang lainnya.

13. Indeks Keamanan dan Ketertiban

Indeks Keamanan dan Ketertiban merupakan ukuran tingkat kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Kabupaten Toba, yang mencerminkan situasi sosial yang aman, tenteram, dan terkendali dari potensi gangguan seperti tindak kriminal, konflik sosial, maupun pelanggaran ketertiban umum. Indeks ini menggambarkan sejauh mana masyarakat merasa aman serta terlindungi dalam menjalankan aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungannya.

Pengukuran indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah bersama aparat keamanan dan masyarakat dalam menciptakan stabilitas keamanan serta ketertiban di daerah, sebagai prasyarat penting bagi terlaksananya pembangunan daerah yang berkelanjutan dan kondusif.

Kondisi keamanan dan ketertiban merupakan faktor fundamental dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Lingkungan yang aman dan tertib akan mendorong investasi, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup warga. Oleh karena itu, peningkatan Indeks Keamanan dan Ketertiban menjadi indikator strategis bagi terwujudnya Kabupaten Toba yang damai, produktif, dan berdaya saing.

14. Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana merupakan ukuran komposit yang menggambarkan tingkat risiko suatu wilayah terhadap potensi bencana, yang dihitung berdasarkan kombinasi dari ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity) dalam menghadapi bencana. Nilai indeks ini menunjukkan tingkat kemungkinan terjadinya korban, kerugian, dan kerusakan akibat bencana alam maupun non-alam di Kabupaten Toba.

Indeks ini disusun berdasarkan metodologi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan skala nilai 0–100, di mana semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin tinggi tingkat risiko bencana suatu daerah.

Indikator ini digunakan untuk menilai tingkat risiko kebencanaan di daerah serta efektivitas upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hasil pengukuran menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan daerah yang tanggap, adaptif, dan berketahanan terhadap bencana.

Kabupaten Toba memiliki potensi risiko bencana yang cukup beragam, seperti banjir, longsor, kekeringan, gempa bumi, dan kebakaran hutan/lahan. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana menjadi bagian penting dalam perencanaan pembangunan daerah untuk meminimalkan dampak terhadap masyarakat dan infrastruktur.

Peningkatan nilai kapasitas dan penurunan kerentanan masyarakat akan berkontribusi terhadap penurunan indeks risiko bencana secara keseluruhan. Indeks Risiko Bencana juga merupakan salah satu indikator dalam penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang berorientasi pada ketahanan dan keberlanjutan pembangunan (resilience building).

15. Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD)

Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD) merupakan ukuran komposit yang menggambarkan capaian pembangunan kebudayaan di daerah, yang mencakup dimensi perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. IPKD disusun untuk menilai efektivitas kebijakan

pemerintah daerah dalam memajukan kebudayaan sebagai bagian integral dari pembangunan manusia dan peradaban daerah.

IPKD mencerminkan sejauh mana Kabupaten Toba berhasil mempertahankan identitas budaya lokal, memperkuat ekosistem kebudayaan, serta mengembangkan potensi budaya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Kebudayaan merupakan jiwa dan jati diri masyarakat yang menjadi dasar bagi pembangunan berkelanjutan. Melalui IPKD, pemerintah daerah dapat menilai sejauh mana upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Bagi Kabupaten Toba, yang kaya akan nilai-nilai adat, tradisi, bahasa, seni, dan kearifan lokal Batak, pembangunan kebudayaan bukan hanya menjaga warisan leluhur, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi kreatif, pariwisata, dan kohesi sosial.

Tabel 4. 2. Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)
1.	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	78.74	79.15	79.57	79.99	80.42	80.85
2.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	21.46	19.31	17.64	16.25	15.13	14.13
3.	Rasio permasalahan sosial (per 100.000 penduduk)	3,449	3,432	3,416	3,399	3,383	3,366
4.	Indeks Infrastruktur (Indeks)	0.5061	0.5114	0.5202	0.5298	0.5419	0.557
5.	PDRB Per Kapita (Rp. Juta Per Tahun)	49.5	51.8	54.3	57	60	63.5
6.	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	30.7	30.71	30.72	30.73	30.74	30.75
7.	Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman (%)	2.56	2.58	2.6	2.62	2.65	2.68
8.	Tingkat Kemiskinan ((%))	7.87	7.63	7.38	7.13	6.87	6.6
9.	Rasio Gini (Indeks)	0.344	0.34	0.336	0.332	0.328	0.324
10.	Cakupan Penerima Bantuan Sosial (%)	100	100	100	100	100	100
11.	Rasio PAD Terhadap APBD (%)	12.41	12.78	13.42	14.08	14.57	15.24
12.	Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	4.01	4.1	4.15	4.25	4.4	4.51
13.	Indeks Keamanan dan Ketertiban (Indeks)	0.999	0.999	1	1	1	1
14.	Indeks Risiko Bencana (Indeks)	107.2	107.15	106.5	104	101.5	99
15.	Indeks Pembangunan Kebudayaan Daerah (IPKD) (Indeks)	37.31	38.24	45.37	52.48	53.36	54.32

Sumber : https://sipd-ri.kemendagri.go.id/rpjmd/69813d7e7009d5d20adcf03141f4ed5a7e7e43c9/?m=daerah_rpjmd_d_final_laporan

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Risiko Bencana	Indeks	107,2	107,2	107,15	106,5	104	101,5	99	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Kapasitas Air Baku	m3/detik	14,82	14,825	14,83	14,835	14,84	14,845	14,85	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Lingkungan Hidup
3	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	128	122	117	112	107	102	98	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	78,44	78,74	79,15	79,57	79,99	80,42	80,85	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tenaga Kerja, Koperasi UKM, Industri, Pertanian
2	PDRB Per Kapita	Rp. Juta Per Tahun	47,45	49,5	51,8	54,3	57	60	63,5	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tenaga Kerja,

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
										Penanaman Modal, Koperasi UKM, Industri, Pariwisata, dan Pertanian
3	Tingkat Kemiskinan	(%)	8,07	7,87	7,63	7,38	7,13	6,87	6,6	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi UKM, dan Pertanian
4	Rasio Gini	Indeks	0,348	0,344	0,34	0,336	0,332	0,328	0,324	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sosial, Tenaga Kerja, Koperasi UKM, dan Pertanian
5	Prevalensi Stunting pada Balita (pendek dan sangat pendek)	%	27,1	21,46	19,31	17,64	16,25	15,13	14,13	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
										Ruang, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
6	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	0,43	0,43	0,431	0,432	0,433	0,434	0,435	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Koperasi UKM, dan Pertanian
7	Tingkat Inflasi	%	2,7	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	1.5-2.5	Sekretariat Daerah
8	TPAK Perempuan	%	77,05	77,1	77,15	77,2	77,25	77,3	77,35	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja, Perlindungan Anak dan Perempuan, Koperasi UKM, dan Industri
9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	0	0	0	1,08	2,16	3,21	4,26	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Sosial dan Tenaga Kerja
10	Pertumbuhan ekonomi	%	4,84	4.90-5.00	5.00-5.15	5.15-5.25	5.25-5.35	5.35-5.50	5.50-5.65	Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tenaga Kerja, Penanaman Modal, Koperasi UKM, Industri,

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
										Pariwisata, dan Pertanian
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja, Koperasi UKM, dan Industri
12	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	21,5	21,34	21,22	21,12	21,05	20,99	20,93	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Industri
13	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,33	84,53	84,73	84,93	85,13	85,33	85,53	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan, dan Pertanian
14	Proporsi jumlah usaha kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten	%	80,74	80,31	79,88	79,45	79,02	78,59	78,16	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Koperasi UKM
15	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kabupaten	%	13,88	13,88	13,89	13,9	13,91	13,92	13,93	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Koperasi UKM
16	Persentase Desa Mandiri	%	0	0,87	1,73	2,6	3,46	4,33	5,19	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemberdayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
										Masyarakat Desa, Koperasi UKM, Pertanian, dan Kecamatan
17	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	58.8:58.8	59.3:60	60.3:61	61.3:62	62.4:63	63.4:64	64.4:65	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan, Kesehatan, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
18	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,394	0,393	0,392	0,391	0,39	0,389	0,388	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidkan, Kesehatan, Tenaga kerja, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
19	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	379	500	520	540	560	580	600	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pariwisata, dan Satpol PP
20	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Orang	850.928	900.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.150.000	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pariwisata, dan Satpol PP

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
21	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	(%)	33,88	33,88	36,55	38,6	40,38	42,48	45,37	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	30,69	30,7	30,71	30,72	30,73	30,74	30,75	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Koperasi UKM, dan Pertanian
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	82,57	82,67	82,77	82,87	82,97	83,07	83,17	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja, Koperasi UKM, dan Industri
3	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,62	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,7	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja, Koperasi UKM, Perdagangan, dan Industri
4	Return on Asset BUMD	%	0	0	0	0	0	0,01	0,02	Sekretariat Daerah
5	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	8,23	8,86	9,3	9,73	10,16	10,58	11	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Koperasi UKM, Industri, dan Pertanian

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
6	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	5,36	5,38	5,39	5,4	5,4	5,41	5,42	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan, Koperasi UKM, dan Perdagangan
7	Indeks Adopsi TIK	Indeks	0	4,42	4,44	4,46	4,48	4,5	4,52	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika
8	Indeks Kapabilitas Inovasi	Indeks	3,43	3,45	3,47	3,49	3,51	3,53	3,55	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Tenaga Kerja, Pariwisata, Pertanian, Industri, dan Penelitian dan Pengembangan
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	56,03	58,31	60,71	63,9	66,95	70,23	74,12	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perpustakaan
10	Persentase Warisan Budaya Tak-Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	%	0	0	0,016	0,024	0,024	0,032	0,032	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kebudayaan
11	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	11,55	11,56	11,57	11,58	11,61	11,63	11,67	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Industri
12	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi	%	0	0.79-0.79	2.38-3.17	3.17-3.97	3.97-4.76	4.76-5.55	5.55-6.35	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
13	Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman	%	2,55	2,56	2,58	2,6	2,62	2,65	2,68	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pariwisata, dan Satpol PP
14	Jumlah Kerjasama Daerah	Kerja Sama	0	0	1	2	2	2	3	Sekretariat Daerah
15	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Muatan Lokal Bahasa Daerah dan Ekstra Kulikuler Kesenian	%	0	0	0	50	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
16	Angka Kesiapan Sekolah	%	47,6	49	49,98	50,91	51,79	52,67	53,53	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,93	71.95-72.05	72.12-72.22	72.30-72.40	72.47-72.57	72.65-72.75	72.82-72.92	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup
18	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,43	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61	Sekretariat Daerah, Inspektorat, Satpol PP, Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
										Ruang, Tenaga Kerja, Pangan, Pertanahan, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komunikasi dan Informatika, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Koperasi UKM, Perdagangan, Pariwisata, Pertanian, Industri, dan Penelitian dan Pengembangan
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,81	4,01	4,1	4,15	4,25	4,4	4,51	Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kominfo, Pendidikan, Kesehatan, Penanaman Modal, dan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,97	67	70	73	76	79	82	Seluruh Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
3	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,6	13,67	13,72	13,78	13,84	13,91	13,98	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
4	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	(tahun)	10,77	10,8	10,82	10,89	10,96	11,03	11,11	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
5	Hasil Evaluasi SAKIP	Nilai	60,04	63,5	67,1	70,8	74,5	78,1	82,25	Seluruh Perangkat Daerah
6	Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,17	96,18	96,19	96,2	96,21	96,22	96,23	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	(%)	3	3	7	15	20	25	30	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup
8	Persentase Capaian Aksi HAM	%	65,5	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
9	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 7-15 Tahun yang Bersekolah	%	-	70	71	72	73	74	75	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan, dan Sosial
10	Indeks Penilaian Integritas	Indeks	72,09	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah, Inspektorat Daerah, Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika
11	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	7,72	6,91	6,1	5,29	4,48	3,67	2,86	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pangan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
12	Indeks Kualitas Air	Indeks	61,1	61,2	61,3	61,45	61,6	61,7	61,8	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup
13	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	53,1	76,6	77	78	79	80	81	Sekretariat Daerah
14	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,95	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,45	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Komunikasi dan Informatika
15	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Wajar Tanpa Pengecualian	Seluruh Perangkat Daerah
16	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
17	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	99,74	99,8	99,85	99,9	99,95	99,95	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
18	Persentase Rumah Layak Huni	%	84,66	85,12	85,54	85,97	86,38	86,8	87,23	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Timbulan sampah terdaur ulang	%	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup
20	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi	%	80,37	81,5	82,51	83,48	84,42	85,31	86,17	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
21	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum	%	75,98	77,09	78,14	79,15	80,12	81,06	81,95	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
22	Usia Harapan Hidup	(tahun)	74,54	74,89	75,19	75,49	75,79	76,1	76,41	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
23	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	100	100	100	100	100	100	100	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
24	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	91	92	92,63	92,92	93,16	93,36	93,54	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Kesehatan
25	Literasi Membaca SD	%	63,91	66,41	68,91	71,41	73,91	76,41	78,91	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
26	Literasi Membaca SMP	%	70,45	71,55	72,65	73,75	74,85	75,95	77,05	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
27	Numerasi SD	%	58,16	61,06	63,96	66,86	69,76	72,66	75,56	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
28	Numerasi SMP	%	64,31	65,81	67,31	68,81	70,31	71,81	73,31	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Pendidikan
29	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,08	65,09	65,1	65,11	65,12	65,13	65,14	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
30	Penurunan intensitas emisi GRK	TON CO2 EQ	0	137.330,04	150.042,36	163.926,41	179.095,20	195.667,63	213.773,58	Perangkat Daerah yang membidangi Urusan Lingkungan Hidup, Industri, dan Pertanian
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
AA	1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									
1	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	0	0	0	100	100	100	100	
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,42	2,32	3,22	4,12	5,02	5,92	6,82	
3	Skor Literasi Membaca SMP	Angka	70,45	71,55	72,65	73,75	74,85	75,95	77,05	
4	Skor Numerasi SD	Angka	58,16	61,06	63,96	66,86	69,76	72,66	75,56	
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	99,15	99,49	99,83	100	100	100	100	
6	Skor Literasi Membaca SD	Angka	63,91	66,41	68,91	71,41	73,91	76,41	78,91	
7	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	66,77	69,81	72,85	75,89	78,93	81,97	84,94	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
8	Skor Numerasi SMP	Angka	64,31	65,81	67,31	68,81	70,31	71,81	73,31	
AB	1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN									
1	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	74,7	76,3	77,8	79,7	81,6	83,1	84,7	
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	10	10	10	10	45	45	45	
3	Presentase lanjut usia yang mandiri	%	-	50	55	60	65	70	75	
4	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	%	52	100	100	100	100	100	100	
5	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	%	-	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	23,4	
6	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0	36	40	50	60	70	80	
7	Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	-	12,4	11,4	10,4	9,4	8,4	7,4	
8	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar.	%	0	0	0	0	5,3	5,3	5,3	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
10	Persentase fasilitasi pelayanan kesehatan sesuai standar	%	70	75	77	79	81	84	86	
11	Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	0	100	100	100	100	100	100	
12	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	%	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	
13	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	0,45	0,484	0,49	0,497	0,503	0,509	0,515	
14	Jumlah Kematian Ibu	Orang	3	3	3	3	3	3	3	
15	Tingkat Kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	%	89,88	89,9	89,92	89,93	89,94	89,95	89,96	
16	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	0	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	0	100	100	100	100	100	100	
19	Jumlah Kematian Balita	Orang	9	9	8	8	7	7	7	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
20	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	100	100	100	100	100	100	100	
21	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	
AC	1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
1	Tingkat Kemantapan Jalan	Persentase	58,58	59,21	59,45	59,95	60,86	62,03	63,61	
2	Tingkat Layanan Irigasi	%	49,09	50,37	51,08	52,5	54,63	57,48	61,03	
3	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Persentase	17,1	17,1	23,8	29,2	36,1	43,3	50,8	
4	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Rasio Kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung	%	72,06	100	100	100	100	100	100	
AD	1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani	%	9,06	9,49	9,71	10,27	10,7	11,34	12,29	
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	relokasi program pemerintah kabupaten/kota									
3	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase rumah yang dilengkapi PSU	%	61,33	62,4	63,5	64,6	65,7	66,9	68,1	
AE	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	19,14	19	18	17	16,5	16	15	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	15,42	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Pembentukan Satlinmas	%	0	100	100	100	100	100	100	
AF	1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Persentase PPKS yang tertangani	%	7,54	8,82	8,56	8,83	9,1	9,37	9,7	
2	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AG	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
1	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	91,3	91,3	91,3	91,3	95,65	95,65	100	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	%	5,43	6,31	7,17	8,02	8,87	9,7	10,53	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	735,23	746,22	748,66	751,02	752,94	755,29	759,9	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	75	75	75	75	80	80	85	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
AH	2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instasi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	0,065	0,075	0,085	0,09	0,095	0,1	0,105	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO	per 100.000 penduduk	23,6	23,49	23,39	23,28	23,18	23,08	22,97	
AI	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN									
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	0,008	0,029	0,037	0,044	0,051	0,057	0,064	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	2,87	2,87	2,46	2,46	2,05	2,05	1,64	
AJ	2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN									
1	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah	Persentase	33	44	62	78	93	97	100	
2	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
AK	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
1	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota									
AL	2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
1	Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	Persentase	69,86	70	71	72	73	74	75	
2	Pemanfaatan data kependudukan	%	0	46	48	51	53	55	58	
3	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	98,74	98,75	98,8	98,85	98,9	98,95	99	
4	Persentase penduduk yang menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	Persentase	10	11	12	13	14	15	16	
5	Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	Persentase	99,64	99,65	99,66	99,67	99,68	99,69	99,7	
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persentase	38,41	40,41	42,41	44,41	46,41	48,41	50,41	
7	Persentase penduduk yang memiliki akta cerai bagi penduduk yang bercerai	Persentase	71,42	72	73	74	75	76	77	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
8	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
AM	2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	4,4	4-3.6	3.6-3.1	3.1-2.9	2.9-2.7	2.7-2.5	2.5-2.4	
2	Total Fertility Rate (TFR).	Orang	2,54	2,5	2,44	2,4	2,36	2,3	2,27	
3	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	85,1	85,4	85,7	86	86,3	86,6	87	
4	Indeks Lansia Berdaya	Indeks	71,58	72,08	72,58	73,08	73,58	74,08	74,58	
AN	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
1	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	70,2	70,25	70,3	70,35	70,4	70,45	70,5	
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	0	0	0	0	0	0	0	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
AO	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH									
1	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	%	13,81	13,91	14,39	14,88	15,37	15,85	16,34	
2	Persentase koperasi yang berkualitas	%	0	0	1,69	3,39	5,08	6,78	8,47	
AP	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
1	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	10	12	14	16	18	20	22	
AQ	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
1	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persentase	97,7	100	100	100	100	100	100	
AR	2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN									
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	56,42	58,62	60,55	63,08	65,28	67,6	72,5	
AS	2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									
1	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP	%	53,94	54,26	54,75	55,37	56,41	56,78	57,66	
2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase	-	47,56	52	56,44	60,89	72	77,78	
AT	3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN									
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	2.119,58	2.336,18	2.336,83	2.453,68	2.576,36	2.705,19	2.840,44	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.526,88	1746,2	1.683,38	1.767,55	1.855,93	1.948,73	2.046,16	
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	592,7	639,98	653,45	686,13	720,43	756,46	794,28	
AU	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									
1	Tingkat hunian akomodasi	%	22,98	23	23	24	24	25	25	
AV	3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-1,9	1,22	0,59	0,61	1,16	1,17	1,49	
2	Peningkatan produksi tanaman hortikultura	%	-8,64	1,77	0,74	0,84	0,93	0,95	0,96	
3	Peningkatan produksi daging	%	-23,6	0,27	0,1	0,12	0,14	0,16	0,19	
4	Persentase prasarana pertanian dalam kondisi baik	%	27,24	32,66	33,43	34,43	35,3	37,11	37,94	
AW	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN									
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	49,67	58,06	66,45	74,84	83,22	91,61	100	
2	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	12,07	13,41	14,67	15,97	17,12	18,37	19,55	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
AX	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN									
1	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100	100	100	100	100	
AY	4.01 - SEKRETARIAT DAERAH									
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Angka	3	4	5	6	7	8	9	
AZ	5.02 - KEUANGAN									
1	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	-10,41	-9,95	-9,6	-8	-6,1	-3,78	-0,79	
2	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	7,82	7,3	7	6,5	6	5,5	5	
3	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	4,57	4,37	4,27	4,17	4,07	3,97	3,87	
4	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persentase	31,84	34,36	33,81	32,85	31,89	30,93	30	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persentase	32,74	27,6	30,08	32,56	35,04	37,52	40	
6	Manajemen Aset	Kategori	4	4	4	4	4	4	4	
AA	6.01 - INSPEKTORAT DAERAH									

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Penanggungjawab
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Nilai	2	3	3	3	4	4	4	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP)	Nilai	3	3	3	3	3	4	4	
3	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Persentase	83,2	84,4	84,6	84,8	85,1	85,4	85,8	
4	Manajemen Risiko Indeks	Level	2	2	3	3	3	4	4	

Tabel 4. 4. INDIKATOR KINERJA STANDART PELAYANAN MINIMAL (SPM) TAHUN 2025 - 2029

Bidang SPM	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
SPM Bidang Kesehatan							
Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bidang SPM	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SPM Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum							
Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar						

Bidang SPM	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SPM Bidang Pendidikan							
Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Dasar	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Pendidikan Kesetaraan	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman							

Bidang SPM	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
SPM Bidang Sosial							
Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/ kota	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Bidang SPM	Indikator	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis terlantar di luar panti	Persentase penerima layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 4.5. INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN KABUPATEN TOBA TAHUN 2025 – 2030

NO	Indikator Utama Pembangunan	Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
I	Kesehatan Masyarakat yang Berkualitas							
1	Kesehatan Ibu dan Anak							
a	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,54	74,89	75,19	75,49	75,79	76,1	76,41
b	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	128	122	117	112	107	102	98
c	Prevalensi Stunting pada Balita (%)	27,1	21,46	19,31	17,64	16,25	15,13	14,13
2	Penanganan tuberkulosis:							
a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100	100	100	100	100	100
b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	92	92,63	92,92	93,16	93,36	93,54
3	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,74	99,8	99,85	99,9	99,95	99,95	100
II	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Secara Merata							
4	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
a	Literasi Membaca SD (%)	63.91	66.41	68.91	71.41	73.91	76.41	78.91
b	Numerasi SD (%)	58.16	61.06	63.96	66.86	69.76	72.66	75.56
c	Literasi Membaca SMP (%)	70.45	71.55	72.65	73.75	74.85	75.95	77.05
d	Numerasi SMP (%)	64.31	65.81	67.31	68.81	70.31	71.81	73.31
e	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Atas 15 Tahun (tahun)	10,77	10,8	10,82	10,89	10,96	11,03	11,11
f	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.6	13.67	13.72	13.78	13.84	13.91	13.98
III	Perlindungan Sosial Kelompok Masyarakat Rentan							
7	Tingkat Kemiskinan (%)	8.07	7,87	7,63	7,38	7,13	6,87	6,6
8	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)	33.88	33.88	36.55	38,6	40,38	42,48	45,37
9	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	0	0	0	1,08	2,16	3,21	4,26
IV	Ekonomi yang Produktif							

NO	Indikator Utama Pembangunan		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	10	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	30,69	30,7	30,71	30,72	30,73	30,74	30,75
	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,55	11,56	11,57	11,58	11,61	11,63	11,67
	12	Pengembangan Pariwisata:							
	a	Rasio PDRB Sektor Akomodasi, Makanan dan Minuman (%)	2,55	2,56	2,58	2,6	2,62	2,65	2,68
	b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (hotel berbintang, orang)	379	500	520	540	560	580	600
	13	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah:							
	a	Proporsi jumlah usaha kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten (%)	80,74	80,31	79,88	79,45	79,02	78,59	78,16
	b	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada Level Kabupaten (%)	13,88	13,88	13,89	13,90	13,91	13,92	13,93
	14	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,43	0,43	0,431	0,432	0,433	0,434	0,435
	15	Return on Asset BUMD (%)	0	0	0	0	0	0,01	0,02
	16	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03
	17	TPAK Perempuan (%)	77,05	77,1	77,15	77,2	77,25	77,3	77,35
	18	Indeks Kapabilitas Inovasi (indeks)	3,43	3,45	3,47	3,49	3,51	3,53	3,55
V		Ekonomi yang Berkelanjutan							
	19	Indeks Kualitas Lahan (indeks)	65,08	65,09	65,1	65,11	65,12	65,13	65,14
	20	Indeks Kualitas Air (indeks)	61,1	61,2	61,3	61,45	61,6	61,7	61,8
VI		TIK Berkembang Menuju Masyarakat Informasi							
	21	Indeks Adopsi TIK (indeks)	0	4,42	4,44	4,46	4,48	4,5	4,52
VII		Perekonomian Berdaya Saing							
	22	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,5	21,34	21,22	21,12	21,05	20,99	20,93
VIII		Perkotaan dan Perdesaan yang Produktif							
	23	Persentase Rumah Layak Huni (%)	84,66	85,12	85,54	85,97	86,38	86,8	87,23
	24	Persentase Desa Mandiri (%)	0	0,87	1,73	2,6	3,46	4,33	5,19
IX		Tata Kelola yang Responsif dan Berintegritas							
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	2,95	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,45

NO	Indikator Utama Pembangunan		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	26	Indeks Pelayanan Publik	3,81	4,01	4,1	4,15	4,25	4,4	4,51
	27	Indeks Penilaian Integritas (indeks)	72,09	100	100	100	100	100	100
X		Terjaganya Ketertiban Umum							
	28	Persentase Penegakan Peraturan Daerah	100	100	100	100	100	100	100
	29	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65,5	100	100	100	100	100	100
XII		Kemandirian Keuangan Daerah							
	30	Rasio Pajak Terhadap PDRB (%)	0,62	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,70
	31	Tingkat Inflasi (%)	2,7	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5
XIII		Ketangguhan Diplomasi Daerah							
	32	Jumlah Kerjasama Daerah (kerja sama)	0	0	1	2	2	2	3
XIV		Masyarakat Berbudaya Tinggi							
	33	Angka Kesiapan Sekolah (%)	47,6	49	49,98	50,91	51,79	52,67	53,53
	34	Persentase Satuan Pendidikan yang Mempunyai Guru yang Mengajar Muatan Lokal Bahasa Daerah dan Ekskul Kesenian (%)	0	0	0	50	100	100	100
	35	Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Usia 7-15 Tahun yang Bersekolah (%)	-	70	71	72	73	74	75
	36	Persentase Benda, Bangunan, Struktur, dan Situs Cagar Budaya yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	0	0,79-0,79	2,38-3,17	3,17-3,97	3,97-4,76	4,76-5,55	5,55-6,35
	37	Persentase Warisan Budaya Tak-Benda yang Telah Ditetapkan Terhadap Total Registrasi (%)	0	0	0,016	0,024	0,024	0,032	0,032
	38	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (indeks)	56,03	58,31	60,71	63,9	66,95	70,23	74,12
XV		Keluarga Berkualitas dan Kesenjangan Gender							
	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,28	59,7	61,1	62,4	63,6	64,8	65,9
	40	Indeks Ketimpangan Gender (indeks)	0,394	0,393	0,392	0,391	0,39	0,389	0,388
XVI		Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup							
	41	Kualitas Lingkungan Hidup:							
	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	71,93	71,95-72,05	72,12-72,22	72,30-72,40	72,47-72,57	72,65-72,75	72,82-72,92
	b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi (%)	80,37	81,5	82,51	83,48	84,42	85,31	86,17

NO	Indikator Utama Pembangunan		Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	c	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3
XVII		Ketahanan Air dan Pangan yang Kuat							
	42	Ketahanan Pangan:							
	a	Skor Pola Pangan Harapan (%)	85.80	86.00	86.00	86.50	87.00	87.50	88.00
	b	Indeks Ketahanan Pangan (indeks)	84.33	84.53	84,73	84,93	85,13	85,33	85,53
	43	Ketahanan Air:							
	a	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	14,82	14,825	14,83	14,835	14,84	14,845	14,85
	b	Akses Rumah Tangga terhadap Air Minum (%)	75,98	77,09	78,14	79,15	80,12	81,06	81,95
XVIII		Tangguh Menghadapi Bencana dan Perubahan Iklim							
	44	Indeks Risiko Bencana (indeks)	107,2	107,2	107,15	106,5	104,00	101,5	99,00
	45	Indeks Kualitas Udara (indeks)	96,17	96,18	96,19	96,20	96,21	96,22	96,23

Tabel 4.6. **Penyelarasan Indikator Emas (IE) RPJMN dengan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2029 Dan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029.**

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASLINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASLINE	TARGET 2025-2030		RPJMD KABUPATEN TOBA	BASLINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2030	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 1	TRANSFORMASI				TRANSFORMASI				TRANSFORMASI							
	SOSIAL				SOSIAL				SOSIAL							
TUJUAN PEMBANGUNAN	Kesehatan untuk Semua				Kesehatan untuk Semua				Kesehatan untuk Semua							
1																
1	Usia Harapan Hidup (tahun)	72,13 (2023)	74,43	75,4	Usia Harapan Hidup (tahun)	73,9	73,73	74,7	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,54	74,89	75,19	75,49	75,79	76,1	76,41
2.a	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	189 (2020)	122	77	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)		146	83,6	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	128	122	117	112	107	102	98
2.b	Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	21,5 (2023)	18,8	14,2	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	22	21-20	12-Nov	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,1	21,46	19,31	17,64	16,25	15,13	14,13
3.a	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	387 (2023)	329	190	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	71,8	90	90	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100	100	100	100	100	100
3.b					Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	85	90	90	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	92	92,63	92,92	93,16	93,36	93,54
4	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	98,42	98,6	99	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	93,61	98,6	99,08	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	99,74	99,8	99,85	99,9	99,95	99,95	100
TUJUAN PEMBANGUNAN 2	Pendidikan				Pendidikan				Pendidikan							
	Berkualitas yang Merata				Berkualitas yang Merata				Berkualitas yang Merata							
	Rata-rata Nilai PISA				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
5.a.1	a-I Membaca	359 -2022	396	409	i. Literasi Membaca	N/A	6,06-12,12	32,21-35,21	i. Literasi Membaca SD	63,91	66,41	68,91	71,41	73,91	76,41	78,91
	a-ii Matematika	366 -2022	404	416	ii. Numerasi	N/A	0,00-3,03	7,5-10,68	ii. Numerasi SD	58,16	61,06	63,96	66,86	69,76	72,66	75,56
	a-iii Sains	383 -2022	416	426												
					b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				b) Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:							
5.b	Rata-rata nilai asesmen nasional															
	b-i Literasi Membaca	60,89 (2023)	62,89	66,89	i. Literasi Membaca	N/A	35,99-38,49	42,92-45,42	i. Literasi Membaca SMP	70,45	71,55	72,65	73,75	74,85	75,95	77,05
	b-ii Numerasi	51,36 (2023)	54,36	59,86	ii. Numerasi	N/A	33,70-36,2	38,70-41,2	ii. Numerasi SMP	64,31	65,81	67,31	68,81	70,31	71,81	73,31
5.c	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,22	9,33	9,82	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,93	10,3 -10,33	10,96- 10,97	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,77	10,8	10,82	10,89	10,96	11,03	11,11
5.d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,21	13,32	13,58	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,49	13,61 -13,63	13,92-13,94	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,6	13,67	13,72	13,78	13,84	13,91	13,98
6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	31,45-2023	33,94	38,04	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	N/A	11,12	11,16-11,44	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	-	-	-	-	-	-	-

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASLINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASLINE	TARGET 2025-2030		RPJMD KABUPATEN TOBA	BASLINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2030	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
7	Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	66,3-2023	66,78	67,66	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	N/A	71,1	77,69	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	-	-	-	-	-	-	-
TUJUAN PEMBANGUNAN 3	Perlindungan Sosial yang Adaptif															
					Perlindungan Sosial yang Adaptif				Perlindungan Sosial yang Adaptif							
8	Tingkat Kemiskinan (%)	9,03	7,0-8,0	4,5-5,0	Tingkat Kemiskinan (%)	7,19	6,69-7,17	2,50-3,50	Tingkat Kemiskinan (%)	8,07	7,87	7,63	7,38	7,13	6,87	6,6
9	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	29,77 (semester I)	32,15	43,92	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	N/A	29,27	42,88	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	33,88	33,88	36,55	38,6	40,38	42,48	45,37
10	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	9,07 (2023)	10	12	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)		27	28	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	-	-	-	-	-	-	-
MISI 2	TRANSFORMASI				TRANSFORMASI				TRANSFORMASI							
	EKONOMI				EKONOMI				EKONOMI							
TUJUAN PEMBANGUNAN 4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi				Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi							
11.a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	18,67-2023	20,8	21,9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	18,36	19,00-19,5	20,76-21,37	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	11,55	11,56	11,57	11,58	11,61	11,63	11,67
11.b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	1,3-2023	2,2	3,46					Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	30,69	30,77	30,85	30,93	30,99	31,07	31,15
12.a	Rasio PDB Pariwisata (%)	3,6 (2022)	4,50-4,6	4,90-5	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,21	2,42	2,79	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,55	2,56	2,58	2,6	2,62	2,65	2,68
12.b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	14-2023	19-22,1	32,0-39,4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	142,71	300-350	445	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (orang)	379	500	520	540	560	580	600
13	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	6,77-2023	7,3-7,9	8,0-8,4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	N/A	5,45	5,7	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)							
14.a	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)	3,06	3,1	3,3	a.i. Proporsi jumlah UKM non pertanian pada Level Provinsi (%)		10,66-10,81	10,71-10,86	a.i. Proporsi jumlah UKM non pertanian pada Level Kabupaten (%)	80,74	80,31	79,88	79,45	79,02	78,59	78,16
					a.ii. Proporsi jumlah industri kecil menengah pada level provinsi (%)		5,04		a.ii. Proporsi jumlah industri kecil menengah pada level Kabupaten (%)	13,88	13,88	13,89	13,90	13,91	13,92	13,93
14.b	Rasio kewirausahaan (%)	3,08	3,1	3,6	Rasio Kewirausahaan	N/A	3,63	4,15	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	0,43	0,43	0,431	0,432	0,433	0,434	0,435
14.c	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)	1,07-2021	1,1	1,2	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	N/A	0,79	0,81	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)							
14.d	Return on Aset (ROA) BUMN (%)	3,14-2023	3,21	3,42	ROA BUMD	N/A	1,24	2,12	ROA BUMD (%)	0	0	0	0	0	0,01	0,02
15.a	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,50-5	4,00-4,71	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,6	5,27-5,56	4,62-5,11	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,09	1,08	1,07	1,06	1,05	1,04	1,03
15.b	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	23,96	35	46	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	N/A	43	51,88	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)							
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,42	56,30-58,8	56,70-60,89	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	58,54	59,29-61,67	59,53-64,42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	77,05	77,1	77,15	77,2	77,25	77,3	77,35
17.a	Pengeluaran IPTEK dan Inovasi (% PDB)	0,28-2020	0,3	0,45	Indeks Inovasi Daerah	59,93	57,50-60,01	63,45-63,76	Indeks Inovasi Daerah	39,74	40	41	42	43	44	45
17.b	Peringkat Indeks Inovasi Global (peringkat)	54	53	49												

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASLINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASLINE	TARGET 2025-2030		RPJMD KABUPATEN TOBA	BASLINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2030	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
TUJUAN PEMBANGUNAN 5	Penerapan Ekonomi Hijau				Penerapan Ekonomi Hijau				Penerapan Ekonomi Hijau							
18.a	Indeks Ekonomi Hijau	60,08 (2023)	68,34	77,2	Indeks Ekonomi Hijau	N/A	51,12	51,19	Indeks Ekonomi Hijau							
18.b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	13,2-2023	20	23	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	N/A	18,42	22,1	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)							
TUJUAN PEMBANGUNAN 6	Transformasi Digital				Transformasi Digital				Transformasi Digital							
19	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	45 (2023)	43	40	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	N/A	6	7,08	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-
									Indeks Adopsi TIK (indeks)	0	4,42	4,44	4,46	4,48	4,5	4,52
TUJUAN PEMBANGUNAN 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				Integrasi Ekonomi Domestik dan Global				Integrasi Ekonomi Domestik dan Global							
20	Biaya Logistik (% PDB)	14,29-2022	13,52	12,5	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	N/A	10,1	9,38	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi							
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,3-2023	29,4	29,9	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	28,65	29,7	29,95	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	21,5	21,34	21,22	21,12	21,05	20,99	20,93
22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	21,7(2023)	21,7	22,6	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	12,56	16,45-16,54	17,30-17,62	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)							
					a) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap	72,75	75	93	a) Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap							
TUJUAN PEMBANGUNAN 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi				Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi							
	Proporsi kontribusi PDRB wilayah	44,13			Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan				Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan							
23.a	metropolitan	-2023	44,35	45,6		N/A	2,26	2,34								
	terhadap nasional (%)				terhadap Nasional (%)				terhadap Nasional (%)							
	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)				Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)				Persentase Rumah Layak Huni (%)	84,66	85,12	85,54	85,97	86,38	86,8	87,23
23.b		65,25	67	74		73,47	74,36	82,34								
	Persentase Desa Mandiri (%)				Persentase Desa Mandiri (%)				Persentase Desa Mandiri (%)							
23.c		22,85	23,29	25,79		3,1	8,44	9,03		0	0,87	1,73	2,6	3,46	4,33	5,19
	TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA				TRANSFORMASI TATA KELOLA							
MISI 3																
TUJUAN PEMBANGUNAN 9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif				Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif							
24	Indeks Materi Hukum	0,6 (2023)	0,51	0,55	Indeks Reformasi Hukum	N/A	70	71,8	Indeks Reformasi Hukum	53,1	76,6	77	78	79	80	81
25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,79 (2023)	3	2,00 (b)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	N/A	3,45	3,76	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (indeks)	2,95	3,15	3,2	3,25	3,3	3,35	3,45
26	Indeks Pelayanan Publik	3,78 (2023)	3,68 (a)	3,8	Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,57	3,71	Indeks Pelayanan Publik	3,81	4,01	4,1	4,15	4,25	4,4	4,51
27.a	Indeks Integritas Nasional	70,97 (2023)	74,52	77,57	Indeks Integritas Nasional	N/A	66,78	70,19	Indeks Integritas Nasional							
27.b	Indeks PersepsiKorupsi	34 (2023)	38	43,7												

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASLINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASLINE	TARGET 2025-2030		RPJMD KABUPATEN TOBA	BASLINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2030	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
MISI 4	SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN				SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA				SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA							
	INDONESIA															
	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi				Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial				Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial							
TUJUAN PEMBANGUNAN 10	Substansial															
28	Indeks Pembangunan Hukum	0,68 -2023	0,69	0,73	a) Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	N/A	70	76,84	a) Persentase Penegakan Peraturan Daerah (%)	100	100	100	100	100	100	100
					b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	N/A	60	72	b) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM (%)	65,5	100	100	100	100	100	100
29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	62,8 -2020	67,5	68,5	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	N/A	58,5	62,7	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	-	-	-	-	-	-	-
30	Indeks Demokrasi Indonesia	79,51 - 2023	81,69- 85,23	83,42- 86,96	Indeks Demokrasi Indonesia	N/A	82,58-85,83	87,89-91,14	Indeks Demokrasi Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
TUJUAN PEMBANGUNAN 11	Stabilitas Ekonomi Makro				Stabilitas Ekonomi Makro				Stabilitas Ekonomi Makro							
31	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	10,07	10,24	11,52- 15	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	N/A	1,37	1,6	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,62	0,64	0,65	0,67	0,68	0,69	0,70
32	Tingkat Inflasi (%)	1,57	2,5 ±1	2,5 ±1	Tingkat Inflasi (%)	2,12	1,75-3,75	1,45-3,45	Tingkat Inflasi (%)	2,7	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5	1,5-2,5
33.a	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB(%)	40,5-2023	43	50,9	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	N/A	28,77	34,95	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB							
33.b	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,3 (2023)	8	11,2	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	N/A	0,13	0,14	Aset Dana Pensiun/PDB (%)							
33.c	AsetAsuransi/PDB (%)	9,0 (2023)	9,1	10,5	-				-							
33.d	Nilai Transaksi Saham/PDB (%)	16-2023	19,8	23,9	Nilai Transaksi Saham Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	N/A	8.103.064,03	10.861.874,06	Nilai Transaksi Saham Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan							
33.e	Total Kredit/PDB(%)	33,9-2023	37,8	46,8	Total Kredit/PDRB(%)	N/A	25,7	32,65	Total Kredit/PDRB (%)							
34	Inklusi Keuangan (%)	88,7 -2023	91	93	Inklusi Keuangan (%)	N/A	97,52	97,95	Inklusi Keuangan (%)							
TUJUAN PEMBANGUNAN 12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar				Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar				Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar							
	Kawasan															
35	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	15,7	16	20	Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersaudara (Sister Province)		20	22	Jumlah Kerja Sama Provinsi Kembar/Bersaudara (Sister Province)	na	0	1	2	2	2	3
36	Asia Power Index (Military Capability)	65,6	65,7	66,1	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah		82	92	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	-	-	-	-	-	-	-
	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI				KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI							
MISI 5	EKOLOGI															
TUJUAN PEMBANGUNAN 13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan				Beragama Maslahat dan Berkebudayaan				Beragama Maslahat dan Berkebudayaan							
	Maju															
37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	57,13- 2023	58,39	60,7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	N/A	55,44-55,48	58,13-58,2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	--	37,31	38,24	45,37	52,48	53,36	54,32

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASLINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASLINE	TARGET 2025-2030		RPJMD KABUPATEN TOBA	BASLINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2030	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	76,77	78,25	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,88	81,17-81,2	83,09	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	--	-	-	-	-	-	-
TUJUAN PEMBANGUNAN 14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif				Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif							
39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	69,51 (2023)	72,89	75,55	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	71,04	71,7	71,04	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	58,28	59,7	61,1	62,4	63,6	64,8	65,9
40.a	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,447 (2023)	0,43	0,394	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,407	0,398	0,407	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	60,6	62,92	66,48	69,48	72,08	74,38	76,43
TUJUAN PEMBANGUNAN 15	Lingkungan Hidup Berkualitas				Lingkungan Hidup Berkualitas				Lingkungan Hidup Berkualitas							
41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,35 (2020)	0,44	0,55	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	N/A	0,562	0,585	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah							
42.a.i.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,67 (2023)c	78,53	79,49	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,96	77,2	78,04	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,93	71,95- 72,05	72,12- 72,22	72,30- 72,40	72,47- 72,57	72,65- 72,75	72,82- 72,92
42.a.ii.	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,59 (2023)	72,02	72,77					Indeks Kualitas Air (Indeks)	61,1	61,2	61,3	61,45	61,6	61,7	61,8
42.a.iii.	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61,79	77,97	78,19					Indeks Kualitas Lahan (indeks)	65,08	65,09	65,1	65,11	65,12	65,13	65,14
42.a.iv.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	78,84	81,02	81,22												
42.b	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	10,21 (2023)	12,5	30	RT dengan Akses Sanitasi Aman	85,73	10	16	RT dengan Akses Sanitasi (%)	80,37	81,5	82,51	83,48	84,42	85,31	86,17
42.c.1	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	15 (13	24 (16	38 (20	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)				Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	3	3	7	15	20	25	30
		terdaur ulang) (2022)	terdaur ulang)	terdaur ulang)		N/A	16	30,4								
42.c.2					Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	N/A	33	100	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)							
TUJUAN PEMBANGUNAN 16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan				Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan							
43.i.1	Indeks Ketahanan Energi	6,64	6,77	6,95	Konsumsi listrik per kapita	N/A	850	1.368,40	Konsumsi listrik per kapita							
43.i.2	-				Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	N/A	170,57	135,3	Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)							
43.ii.	Prevalensi ketidakcukupan pangan (%) / Indeks Ketahanan Pangan	71,2 (a)	73,2	82	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,54	7,35	3,91	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	7,72	6,91	6,1	5,29	4,48	3,67	2,86
43.iii.1	Kapasitas Tampung Air (m3/kapita)	59,59	59,31	63,54	Kapasitas Air Baku (m3/detik)		0,64		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	14,82	14,825	14,83	14,835	14,84	14,845	14,85
43.iii.2	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	24 (2020)	39,2	51,36	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	N/A	40,95	55,41	Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	76,63	77,73	78,76	79,75	80,7	81,62	82,5
					Indeks Kinerja Sistem Irigasi		57,47		Tingkat Layanan Irigasi (%)	49,09	50,37	51,08	52,5	54,63	57,48	61,03
TUJUAN PEMBANGUNAN 17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim				Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim							
44	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung	0,14 -2022	0,137	0,135	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	139,84	157,53	148,3475	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	107,2	107,2	107,15	106,5	104	101,5	99

MISI/ TUJUAN PEMBANGUNAN	RPJM NASIONAL	BASELINE	TARGET		RPJMD PROVINSI	BASELINE	TARGET 2025-2030		RPJMD KABUPATEN TOBA	BASELINE	TARGET 2025-2030					
	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2029	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2030	TAHUN 2025-2045	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)															
45.a	Persentase Penurunan Emisi GRK Kumulatif (%)	17,2-2023	18,37	21,12	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	N/A	10,06	13,49	Persentase Penurunan Emisi GRK (Kumulatif)	137330,04 (30,59%)	137.330,14 (30,59%)	155.908,00 (30,89%)	178.085,24 (31%)	203.714,72 (31,29%)	229.023,22 (31,59%)	257.822,23 (31,89%)
45.b	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)	23,48-2023	26,67	30,11	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)	N/A	19,04	26,65	Persentase Penurunan Emisi GRK (Tahunan)							

Tabel 4. 7 **DUKUNGAN PROGRAM TERHADAP PHTC PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2025 – 2030**

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
Menyusun Kajian Akademis/Konsultan Pendidikan Tentang Bersekolah Gratis • 33 Kabupaten/Kota	Pelaksanaan program ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Provsu, sementara kabupaten/kota berperan dalam menyiapkan: - basis data penerima - mengelola operasional sekolah - mengawasi implementasi agar tepat sasaran	Pengeloaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Dasar	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	200.000.000	203.619.010	215.312.600	228.096.000
Pelaksanaan Kegiatan PUBG • Zona Kepulauan Nias			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000	200.000.000	203.619.010	215.312.600	228.096.000
Pelaksanaan Kegiatan PUBG • Zona Kepulauan Nias dan Pantai Barat			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	100.000.000	100.000.000	101.809.505	107.656.300	114.039.397
Pelaksanaan Kegiatan PUBG • Kepulauan Nias, Pantai Barat, dan dataran tinggi									
Pelaksanaan Kegiatan PUBG • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur									
Pelaksanaan Kegiatan PUBG • Kepulauan Nias, Pantai Barat, Dataran tinggi, dan Pantai Timur									
Melakukan Launching UHC Penyusunan regulasi MoU 33 Kabupaten/Kota dimulai Oktober 2025 • 33 Kabupaten/Kota	Dukungan anggaran Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 80% dan setiap tahun akan berkurang sebesar 2,5% Verifikasi dan Validasi Data Peserta : - Memastikan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) akurat untuk sasaran PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat kabupaten/ Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	20.541.351.600,00	22.595.486.760,00	24.855.035.436,00	27.340.538.979,00	30.074.592.876,00
- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan									

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota	- Melakukan pemutakhiran data PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. secara berkala melalui Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. - Menghapus data ganda atau peserta yang tidak memenuhi kriteria. - Menyinkronkan basis data peserta PBI JKN Pusat dan PBI JKN Daerah. dengan provinsi dan BPJS Kesehatan								
- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota									
- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota									
- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota									
- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health (verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota									
- Melakukan peningkatan kepesertaan JKN, dengan capaian 98,6% penduduk Sumatera Utara - Integrasi dengan Sumut e-Health									

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
(verifikasi online dan data pasien otomatis) • 33 Kabupaten/Kota									
Identifikasi lokasi sentra cabai; sosialisasi teknologi Solar Dry Dome (SDD) pelatihan awal pengolahan cabai kering Pembangunan SDD 10 unit •Deli serdang •Batubara •Karo •Serdang Bedagai •Langkat dan •Simalungun	- Memperkuat sistem informasi harga dan produksi di tingkat petani - Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD								
- Melakukan uji coba produksi cabai kering & bubuk - pendampingan koperasi/UMKM - Pembangunan unit Solar Dry Dome 15 unit •Tapanuli Utara • Humbang Hasundutan	- Dukungan terhadap Uji Coba Produksi cabe kering dan bubuk - Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD								
- Implementasi Skala Produksi & Digitalisasi - Pembangunan SDD 17 unit •Dairi •Mandailing Natal	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD								
- Perluasan Kabupaten & Skema Pembiayaan UMKM - Pembangunan SDD 20 Unit •Toba •Nias Selatan	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian 2. Pengelolaan Sumber daya genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme	1.1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 1.2 Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih 1.3 Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batan 1.4 Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi 2.1 Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	(1.1) 0 (1.2) 18.000.000 (1.3) 58.000.000 (1.4) 25.000.000	(1.1) 150.000.000 (1.2) 25.000.000 (1.3) 128.000.000 (1.4) 35.000.000 (2.1) 909.085.000	(1.1) 170.000.000 (1.2) 30.000.000 (1.3) 160.000.000 (1.4) 45.000.000 (2.1) 550.399.856	(1.1) 220.000.000 (1.2) 50.000.000 (1.3) 220.000.000 (1.4) 150.000.000 (2.1) 1.188.858.971	(1.1) 250.000.000 (1.2) 60.000.000 (1.3) 250.000.000 (1.4) 138.000.000 (2.1) 1.636.500.000

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
			kewenangan Kab/Kota						
- Ekspansi Ekspor & Sertifikasi Global - Pembangunan SDD 25 Unit • Tapanuli Selatan • Samosir	- Verifikasi lapangan bersama kelompok tani - Melakukan dukungan terhadap sosialisasi SDD								
Evaluasi Final & Perumusan Kebijakan Keberlanjutan di Tahun 2030									
`	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	2.16.03. Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Pengembangan dan pengujian platform digital layanan, Integrasi dengan data kependudukan & sistem informasi lainnya, dan Pelatihan SDMinternal • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota	2.16.03. Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0034 Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	2.16.03. Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	2.581.800.000	2.581.800.000	2.581.800.000	2.611.800.000	2.711.800.000
Peluncuran resmi layanan digital tahap pertama, Integrasi lintas instansi, Peningkatan kapasitas jaringan & infrastruktur • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet di Kabupaten/Kota	2.16.03. Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0036 Penyediaan Akses Internet	2.581.800.000	2.581.800.000	2.581.800.000	2.611.800.000	2.711.800.000
Optimalisasi user experience,	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan	2.16.03. Program pengelolaan	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-	2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem • 33 Kabupaten/Kota	SDM di Kabupaten/Kota	aplikasi informatika	government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah					
Optimalisasi user experience, Penyempurnaan kebijakan, regulasi, dan SOP, Pelaksanaan audit mutu dan keamanan sistem • 33 Kabupaten/Kota	Kesiapan Infrastruktur Internet, Kesiapan SDM di Kabupaten/Kota	2.16.03. Program pengelolaan aplikasi informatika	2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.0037 Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	0	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan •Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidempuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Asahan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Simalungun, Kab. Karo, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Utara Kab. Serdang Bedagai, Kab. Toba, Kab. Dairi Kawasan Afirmasi : Kab. Nias Utara, Kab. Nias, Kab. Nias Barat, Kota Gunungsitoli Target	Kabupaten/kota yang menjadi lokasi proyek akan terlibat aktif dalam koordinasi lapangan, penyediaan data lokal, dan dukungan administratif. Dalam rangka penyiapan dukungan RC.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana , Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana,sarana, Kawasan Pertanian	125.000.000,00	84.000.000,00	90.000.000.000,00	432.000.000,00	-

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
pembangunan tahun ini mencakup 103,23 km jalan dan 245,5 meter jembatan									
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	240.000.000,00	264000000	290400000		
Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Medan, Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Deli Serdang, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Padangsidempuan, Kota Sibolga, Kab. Karo, Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Labuhanbatu Utara, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Langkat, Kab. Toba, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Humbang Hasundutan Kawasan Afirmasi : Kab. Nias Selatan, kab. Nias Barat, Kab. Nias Utara,		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana,sarana, Kawasan Pertanian	125.000.000,00	84.000.000,00	90.000.000.000,00	432.000.000,00	-

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
target: jalan 187,95 km jembatan 231,10 m.									
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	240.000.000,00	264000000	290400000		
Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidempuan Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Padang Lawas, Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Toba, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Simalungun, Kab. Langkat, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Mandailing Natal, Kab. Pakpak Bharat serta target: jalan 120,10 km & jembatan 666,65 m		Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana,sarana, Kawasan Pertanian	125.000.000,00	84.000.000,00	90.000.000.000,00	432.000.000,00			
		Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	240.000.000,00	264000000	290400000		
Progress pelaksanaan lelang									

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Pertumbuhan : Kota Padangsidempuan, Kawasan Komoditas Unggulan: Kab. Asahan, Kab. Labuhanbatu, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Nias Utara Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Toba, serta target: jalan 105,60 km & jembatan 367,30 m									
Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan • Kawasan Komoditas Unggulan:Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Nias Utara, Kab. Asahan serta target: jalan 50,60 km & jembatan 122,30 m									
Progress pelaksanaan lelang dan Melakukan Uji									

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
mutu struktur, kualitas material, dan uji kelayakan fungsi jalan/jembatan Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi : •Kab.Asahan serta target: jalan 43 km & jembatan 98,50 m									
Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi Pelaksanaan awal di 4 DI prioritas (Serdang Bedagai dan Asahan) dengan target 1.857 Ha.	- Dukungan Kabupaten/Kota dalam pengelolaan jaringan irigasi tersier - sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan BUMDes untuk pemeliharaan jaringan irigasi - Pembangunan embung, sumur bor, dan pompanisasi untuk sumber air cadangan. - Digitalisasi sistem irigasi (smart irrigation) berbasis sensor dan aplikasi. - Pemberdayaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) untuk pengelolaan irigasi. - Integrasi dengan program ketahanan pangan daerah.								
Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi target 6.776 Ha. •Batubara, Padang Lawas Utara, P.Siantar, Simalungun									
Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi dengan target 3.175 Ha •Padang Lawas, langkat, Madina, Serdang Bedagai									
Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi •Toba, Madina, Dairi, Deli Serdang		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang dibangun, Direhabilitasi dan di Pelihara	200.000.000,00	350.000.000,00	356.000.000,00	645.000.000.000,00	1.000.000.000,00
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			31.500.000,00		

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
			(Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
Rehabilitasi dan optimalisasi jaringan irigasi •Simalungun, Deli Serdang, Padang Lawas									
-									
- Membentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Simalungun, Kab. Batubara, Kab. Labuhan batu Utara, Kab. Samosir, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Mandailing Natal, Kab. Nias Utara, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Tapanuli Tengah, Kota Pematang Siantar dan Kota Padang Sidempuan	Bupati/Walikota: 1. Pendataan dan Validasi Calon Penerima (BNBA = by name by addres) 2. SK Kumuh yang dikeluarkan Bupati atau Wali Kota terkait wewenang Provinsi untuk luasan 10 – 15 Ha 3. SK Pokja Penanganan Kawasan Kumuh pada kabupaten/Kota Dinas yang Membidangi Perumahan Rakyat (di Kab/Kota): Pelaksana teknis utama di lapangan. Bertanggung jawab atas pendataan, verifikasi, penyaluran bantuan, pendampingan, monitoring, dan pelaporan langsung dari lokasi perbaikan. Dinas PUPR Kabupaten/Kota: Memberikan bantuan teknis konstruksi, menyusun RAB, dan memberikan supervisi teknis kepada								

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
- Menentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Toba, Kab. Langkat, Kab. Nias Selatan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Serdang Bedagai, Kab. Padang Lawas dan Kab. Padang Lawas Utara	pelaksana di lapangan. Dinas Sosial Kabupaten/Kota: Membantu dalam pembaruan dan verifikasi data kemiskinan di tingkat lokal. Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan: Ujung tombak identifikasi awal calon penerima, sosialisasi langsung kepada masyarakat, memfasilitasi gotong royong, dan membantu monitoring di lapangan.	Program Kawasan Permukiman	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	150.000.000,00				
- Menentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi									

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
dampak program dan penataan lingkungan									
Kab. Mandailing Natal, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Tengah, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Labuhanbatu, Kab. Simalungun, Kab. Dairi, Kab. Samosir, Nias dan Nias Selatan									
- Kab. - Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan									
Nias, Kab. Karo, Kab. Langkat, Kab. Nias Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Pematang Siantar, Kab. Serdang Bedagai, Kota Medan, Labuhanbatu dan Labuhanbatu Utara									
- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya									

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
- Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kota Binjai, Kota Padangsidimpuan, Kab. Batu Bara, Kab. Simalungun, Kota Tebing Tinggi, Humbang Hasundutan dan Kab. Toba									
- Menbentuk Tim Pelaksana, Anggaran Biaya - Survey Lokasi di setiap Kab/Kota - Membuat Nota Kesepahaman/Nota kerjasama dengan mitra terkait (REI dan Bank Sumut, dll) - Penyediaan data dan/atau informasi statistika MBR dan ASN Pemerintah Daerah - Pembangunan Fisik setiap Tahun - Mengevaluasi									

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
dampak program dan penataan lingkungan •Kab. Asahan, Kota Tanjung Balai, Kab. Nias Selatan, Kab. Nias, Kota Gunungsitoli, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi									
Penandatanganan Nota Kesepahaman, penetapan SK Tim, penyusunan panduan teknis pelaksanaan dan Sosialisasi program PRESTICE di 8 kab/kota	1. Penyediaan fasilitator, pembiayaan dan penyusunan data pendukung, serta integrasi dengan program perlindungan sosial lainnya di daerah.	4.01.02 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	244.823.000	244.823.000	244.823.000	285.610.000	321.311.000
Pelaksanaan awal PRESTICE di 15 kabupaten/kota, Pelatihan mediator tingkat kabupaten/kota dan pemutakhiran strategi tahun berikutnya, monev pelaksanaan kegiatan •15 Kabupaten/Kota (Padang Lawas Utara, Kab. Dairi, Kab. Simalungun, Kab. Asahan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Tapanuli Tengah)	2. Pelaksanaan pelatihan mediator dilakukan sembari pemberian bantuan bantuan hukum 3. Replikasi Satgas Kabupaten/Kota 4. Pembangunan Posko Pengaduan	4.01.02 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	244.823.000	244.823.000	244.823.000	285.610.000	321.311.000

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
Ekspansi pelaksanaan ke 20 kabupaten/kota, Pelatihan mediator gelombang kedua, monev pelaksanaan kegiatan •20 Kab/Kota (Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Karo, Kab. Serdang Bedagai, Kota Tebing Tinggi, Kab. Batu Bara, Kota Pematang Siantar, Kab. Padang Lawas Utara, Kab. Dairi, Kab. Simalungun)		4.01.02 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	244.823.000	244.823.000	244.823.000	285.610.000	321.311.000
Perluasan wilayah ke 25 kabupaten/kota, Sosialisasi publik dan pelatihan mediator gelombang III, monev pelaksanaan kegiatan •25 Kabupaten/Kota (Kab. Asahan, Kab. Pakpak Bharat, Kab. Labuhan Batu Utara, Kab. Humbang Hasundutan, Kab. Samosir, Kab. Toba, Kab. Labuhan Batu, Kab. Tapanuli Utara, Kota Tanjung Balai, Kota Sibolga, Kab. Labuhanbatu Selatan, Kab. Tapanuli Tengah,		4.01.02 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002 Fasilitasi Bantuan Hukum	244.823.000	244.823.000	244.823.000	285.610.000	321.311.000

RENCANA AKSI DAN LOKASI PELAKSANAAN	DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU				
					2026	2027	2028	2029	2030
Kab. Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Kab. Nias Utara, Kab. Nias Barat, Kab. Nias, Kab. Nias Selatan, Kota Gunungsitoli, Kab. Mandailing Natal, Kab. Padang Lawas, Kota Medan, Kab. Deli Serdang, Kab. Langkat, Kab. Karo)									
33 Kabupaten Kota		4.01.02 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	244.823.000	244.823.000	244.823.000	285.610.000	321.311.000
33 Kabupaten Kota		4.01.02 Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	4.01.02.2.03 Fasilitas dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.0002 Fasilitas Bantuan Hukum	244.823.000	244.823.000	244.823.000	285.610.000	321.311.000

Tabel 4. 8 **DUKUNGAN KABUPATEN TOBA TERHADAP PRIORITAS NASIONAL**

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Perumahan dan Pemukiman													Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Koordinator)	Dinas PKP (OPD yang mengampu Perumahan)	APBN, BUMN, SWASTA
	- Pembangunan 3 Juta Rumah			TARGETING / PENERIMA MANFAAT												
				- Utilisasi data makro (Susenas) dan data mikro (Regsosek) untuk mengembangkan housing queue atau antrian perumahan												
				PROGRAMMING												
				- Memastikan keterpaduan program perumahan dengan penyediaan infrastruktur dasar permukiman yaitu air minum, air limbah, persamoahan, jalan dan drainase lingkungan, listrik, dan sistem transportasi publik	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		350.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	1.225.000.000,00	1.400.000.000,00			
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		1.200.000.000,00	1.266.000.000,00	1.335.630.000,00	1.409.089.650,00	1.486.589.580,75			
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit pengolahan setempat		4.260.000.000,00	4.495.925.000,00	3.080.935.500,00	4.045.766.322,00	4.332.760.468,00			
					PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan		400.000.000,00	475.325.589,00	563.181.978,00	1.571.206.758,00	1.673.335.304,00			
					PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		10.000.000.000,00	13.750.000.000,00	21.582.500.000,00	35.773.732.876,71	39.351.106.164,38			
				- Pemanfaatan lahan yang belum dioptimalisasi												
				STANDAR KEANDALAN BANGUNAN												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA								KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA	
					PROGAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029				2030
				- Mempersiapkan regulasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk penerbitan PBG dan SLF												
				KESESUAIAN DENGAN TATA RUANG												
				- Memanfaatkan tools tata ruang untuk pengembangan perumahan ke depan dan pengendalian pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang		150.000.000,00	160.000.000,00	170.000.000,00	180.000.000,00	190.000.000,00			
2	Makan Bergizi Gratis (MBG)													Badan Gizi Nasional (Koordinator)	Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dins Pendidikan, Dinas Kesehatan	APBN, SWASTA
	- Program Makan Bergizi			Kesehatan												
				- Pengukuran antropometri (tinggi badan, lingkar lengan atas)												
				- Sertifikasi hygiene dan sanitasi satuan pelayanan												
				- Inspeksi Kesehatan lingkungan di tingkat satuan pelayanan												
				- Pemeriksaan kualitas sumbe air bersih												
				Pendidikan												
				- Penyediaan Infrastruktur sanitasi, air bersih, fasilitas transit, penyaluran makanan												
				- Penyelarasan waktu pemberian makanan pada siswa dan santri												
				- Renovasi dapur (satuan pendidikan yang menjadi SP)												
				- Pelatihan tenaga pendidik untuk penyelenggaraan MBG												
				- Pelibatan orang siswa dalam perilaku hidup sehat dan pemberian makan bergizi												
				- Penguatan peran kantin sehat												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA								KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA	
					PROGAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029				2030
				Pangan dan Pertanian												
				- Penjaminan ketersediaan stok dan keragaman bahan pangan local yang memenuhi standar mutu giz												
				- Penjaminan keamanan bahan pangan segar												
				- Pengawasan keamananmakanan(uji keamananpangan)												
				Infrastruktur Dasar												
				-Konektivitas	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Rekonstruksi Jalan		10.000.000.000,00	13.750.000.000,00	21.582.500.000,00	35.773.732.876,71	39.351.106.164,38			
				- Telekomunikas												
				- Listrik dan bahan bakar												
				- Pengelolaan limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Unit pengolahan setempat		4.260.000.000,00	4.495.925.000,00	3.080.935.500,00	4.045.766.322,00	4.332.760.468,00			
				Satuan Pelayanan												
				- Penyediaan/pembangunan SP												
				- Penyediaan infrastruktur sanitasi dan air bersih untuk SP												
				Pemberdayaan Masyarakat, Petani, dan Peternak Lokal												
				- Pemberdayaan dan korporatisasi petani, peternak, dan nelayan												
				- Pembinaan dan peningkatan kapasitas BUMDES, UMKM, dan koperasi												
				terkait pembiayaan, kemampuan manajemen, pengolahan logistik bahan pangan, pengadaan barang/jasa												
				sebagai penyedia komoditas dan pengelola program												
				Ketersediaan Data												
				1- Sumber data penerima MBG (sekolah, madrasah, pesantren, Posyandu)												
3	Pembangunan Manusia dan Kebudayaan															

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA								KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA	
					PROGAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029				2030
	- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas			Update data kondisi satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan									Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Koordinator)	Dinas Pendidikan	APBN, APBD	
	- Pembangunan dan Penyelenggaraan sekolah Unggul			Dukungan penyediaan lahan bagi sekolah unggul (pada daerah yang sesuai dengan kriteria lokasi prioritas)									Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi	Dinas Pendidikan	APBN, APBD	
	- Pembangunan Rumah sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten / Kota			Pembangunan RS Lengkap Berkualitas dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Daerah Sulit Akses									Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBN, APBN (DAK)	
				- Menyiapkan ketersediaan infrastruktur dan SDM Kesehatan												
				- Menyiapkan anggaran untuk operasional layanan kesehatan												
				Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis												
				- Menyusun dan menetapkan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan dan tata kelola Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja												
				- Membina fasilitas kesehatan tingkat pertama (Puskesmas dan Labkesmas) untuk pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis di wilayahnya, termasuk												
				Penyediaan BMHP												
				Penyediaan SPAPendukung												
				Penyediaan dan peningkatan kapasitas SDM Kesehatan												
				- Mengoordinasikan pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilayah kerja												
				- Menyusun rekomendasi tindak lanjut terhadap temuan dalam pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis pada wilavah kerja												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA								KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA	
					PROGAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029				2030
	- Program Penuntasan TBC			Penuntasan Kasus TBC									Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	APBN (Rupiah Murni), APBN (PHLN) APBN (DAK), lainnya	
				- Menyediakan dan meningkatkan kemampuan SDM untuk mencapai target penuntasanTBC												
				- Melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan masyarakat;												
				- Memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;												
				- Memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan												
				- Mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya;												
				- Menyusun dan menetapkankebijakan kepala daerah untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai												
				- Mengoordinasikan pelaksanaan penanggulangan TBC di daerah;												
				- Menyediakan pendanaan penanggulangan TBC dari beberapa sumber												
4	Swasembada Pangan															
	- Ketahanan Pangan melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat												Kementerian Kehutanan (Koordinator)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	APBN, APBD, Swasta	
	- Layanan Irigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional			- Memastikan status lahan (kepemilikan lahan) yang akan diintervensi									Kementerian Pekerjaan Umum	Dinas PUPR	APBN, KPBU	
				- Memastikan ketersediaan petani dan pemberdayaan penyuluh pertanian												
				- Memberikan dukungan atas pembangunan/rehabilitasi daerah irigasi di kewenangan provinsi/kab/kota												

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				- Komitmen keberlanjutan pengelolaan												
	- Peningkatan Produksi Daging, Sapi, dan Susu Sapi			1. Pengembangan Wilayah Berbasis Komoditas Unggulan, Identifikasi daerah dengan potensi pengembangan sapi potong yang strategis serta fokus pada pengembangan wilayah tersebutdengan memberikan dukungan yang terarah.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	188.319.300,00	-	300.000.000,00	300.000.000,00	709.000.000,00	885.000.000,00	Kementerian Pertanian, Swasta	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Swasta, BUMN, APBN, APBD, Lainnya, KPBU
			2. Peningkatan Kualitas Bibit, penyediaan akses inseminasi buatan (IB) untuk meningkatkan kualitas genetik sapi potong, penyediaan bibit unggul melalui program pemuliaan yang terarah dan pelatihan bagi peternak dalam penerapan IB dan Manajemen perkembangbiakan.													
			3. peningktan kualitas pakan, pengembangan pakan ternak berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan sapi potong, penyediaan akses informasi dan teknologi pengolahan pakan ternak.													
			4. Pengembangan Infrastruktur, penguatan kelembagaan peternak, dukungan biaya, penerapan teknologi tepat guna dan pengembangan pasar.													
5	Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital															
	- Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu													Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Koordinator)	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBN, APBD
	- Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5000) Seluruh Wilayah Indonesia													Badan Informasi Geospasial	Dinas Komunikasi dan Informatika	APBN (PHLN), APBN

NO	PROYEK STRATEGIS NASIONAL	LOKUS	TAHUN PELAKSANAAN	DUKUNGAN DAERAH	DUKUNGAN KABUPATEN / KOTA									KEMENTERIAN / LEMBAGA (KOORDINATOR)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	SUMBER DANA
					PROGAM	KEGIATAN	SUBKEGIATAN	PAGU								
								2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	- Program Pengembangan Industri Dirgantara: Pengembangan N219 Amfibi												Kementerian Pertahanan dan PT Dirgantara Indonesia		BUMN, APBN	
6	Pengembanagan KEK Sei Mangkei															
	- BUPP Kek Sei Mangkei, Hilirisasi, Industrialisasi, Transformsi Digital															
7	Bioethanol (Berbasis Tebu)												Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Swasembada Energi			
8	Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa dan Rumpu ^t Laut															
	- Hilirisasi, Industrialisasi, Transformasi Digital															

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 merupakan dokumen operasional pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, yang menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Toba. Dokumen ini menjabarkan secara terukur visi dan misi Kepala Daerah **“Toba Mantap 2029” Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya** ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta pendekatan atas-bawah (top-down) dan bawah-atas (bottom-up), yang mengintegrasikan aspirasi masyarakat, pemangku kepentingan, dan pemimpin daerah dengan analisis teknis dan arah kebijakan pembangunan nasional maupun provinsi. Pendekatan ini memastikan bahwa perencanaan yang dihasilkan tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga aplikatif dan relevan dengan kondisi daerah. Selain sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan, RPJMD ini merupakan wujud akuntabilitas proses perencanaan pemerintah daerah kepada masyarakat, mencerminkan keterbukaan, transparansi, dan pertanggungjawaban atas arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dengan ditetapkannya RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh unsur pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dapat bersinergi untuk mewujudkan kemajuan daerah, peningkatan kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan pembangunan demi masa depan Kabupaten Toba yang lebih baik.

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 merupakan panduan strategis bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah, yang meliputi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta berbagai pihak terkait lainnya. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa implementasi RPJMD berjalan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, konsisten dengan regulasi yang berlaku, serta dapat menghasilkan capaian yang terukur dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.

1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi perencanaan dan pendanaan merupakan prinsip utama dalam pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029. Setiap program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang dirumuskan dalam dokumen ini harus selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, serta terintegrasi secara vertikal dengan perencanaan pembangunan nasional dan provinsi, dan secara horizontal dengan dokumen perencanaan perangkat daerah.

Konsistensi ini diwujudkan melalui keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, sehingga alokasi sumber daya keuangan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran pembangunan. Proses perencanaan tahunan, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga penganggaran dalam APBD, harus mengacu pada kerangka pendanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian, setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah daerah memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian indikator kinerja yang terukur.

Penerapan prinsip konsistensi perencanaan dan pendanaan juga dimaksudkan untuk meminimalkan program atau kegiatan yang tidak mendukung prioritas pembangunan, mencegah tumpang tindih anggaran, dan memastikan bahwa pembiayaan pembangunan bersifat efektif, efisien, serta berkelanjutan.

1. Dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah, Bupati Toba dibantu oleh Perangkat Daerah yang mengurus urusan perencanaan;
2. Seluruh Perangkat Daerah (PD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba agar melaksanakan program-program dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
3. Setiap Perangkat Daerah, baik yang berbentuk Badan, Dinas, Bagian, Kecamatan dan Perangkat Daerah lainnya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
4. Penjabaran lebih lanjut RPJMD Tahun 2025-2029 untuk setiap tahunnya harus dilakukan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029;
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Toba harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, dan Musrenbang Kabupaten;
6. RKPD Kabupaten Toba harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja PD (Renja-PD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja;
7. Dalam hubungannya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kabupaten Toba merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) terutama sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, serta penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara;
8. Renja-PD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran PD (RKA-PD);
9. Dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, setiap Perangkat Daerah perlu mengupayakan pengaturan peran stakeholders dalam mendukung pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 ini, dan melakukan sosialisasi baik kepada seluruh

komponen aparat yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Toba, instansi terkait maupun masyarakat luas;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen yang menjabarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dicapai selama tahun 2025-2029.

2. Partispasi masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam penyusunan, pelaksanaan, hingga evaluasi RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029. Keterlibatan aktif masyarakat menjamin bahwa arah kebijakan pembangunan daerah benar-benar mencerminkan kebutuhan, aspirasi, dan potensi yang dimiliki oleh seluruh lapisan warga. Proses partisipatif ini dilaksanakan melalui berbagai mekanisme, antara lain forum konsultasi publik, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan, penjangkaran aspirasi oleh DPRD, hingga pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas akses masyarakat dalam memberikan masukan. Dengan demikian, perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat top-down (dari pemerintah ke masyarakat), tetapi juga bottom-up (dari masyarakat ke pemerintah), sehingga menghasilkan kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Keterlibatan masyarakat juga menjadi instrumen kontrol sosial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses pembangunan. Masyarakat memiliki peran sebagai mitra sekaligus pengawas pelaksanaan program, baik melalui organisasi kemasyarakatan, kelompok kepentingan, maupun partisipasi individu. Melalui partisipasi yang bermakna, diharapkan tercipta rasa memiliki terhadap program pembangunan, yang pada akhirnya mendorong keberlanjutan dan keberhasilan pencapaian visi “Toba Mantap: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya”.

3. Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal merupakan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029. Kapasitas ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber pendapatan, mengelola belanja secara efisien, serta memanfaatkan pembiayaan secara tepat guna untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah. Penguatan kapasitas fiskal dilakukan melalui strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbasis pada potensi lokal, perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah, pengembangan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. Selain itu, pengelolaan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dilakukan secara cermat untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas pembangunan daerah.

Peningkatan kapasitas fiskal juga memerlukan efisiensi belanja, dengan mengutamakan alokasi anggaran pada program prioritas yang memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disiplin anggaran, transparansi pengelolaan keuangan, serta penerapan prinsip value for money menjadi prinsip utama dalam mengelola kapasitas fiskal daerah. Dengan kapasitas fiskal yang kuat dan dikelola secara profesional, Kabupaten Toba diharapkan mampu mendukung pembiayaan pembangunan secara berkelanjutan, meminimalkan ketergantungan pada pendanaan eksternal, serta mempercepat terwujudnya “Toba Mantap: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya”.

4. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi pembangunan merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa seluruh pelaksanaan RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 berjalan sesuai dengan visi, misi, sasaran, serta target yang telah ditetapkan. Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme pemantauan dan pengawasan secara berkesinambungan terhadap proses pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, sehingga setiap penyimpangan dapat segera diidentifikasi dan diperbaiki.

Pelaksanaan pengendalian dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Toba melalui koordinasi lintas perangkat daerah, dengan mengacu pada rencana kerja tahunan, pagu indikatif, dan indikator kinerja yang telah disepakati. Setiap perangkat daerah bertanggung jawab memastikan capaian kinerja sesuai target, baik dari sisi keluaran (output) maupun hasil (outcome).

Evaluasi pembangunan dilaksanakan secara periodik, baik dalam bentuk evaluasi tahunan, evaluasi tengah periode, maupun evaluasi akhir periode RPJMD. Proses evaluasi ini mengukur efektivitas, efisiensi, dan relevansi program/kegiatan, serta tingkat pencapaian indikator kinerja utama daerah. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan kebijakan, penyesuaian program, maupun perubahan strategi dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan.

Pengendalian dan evaluasi pembangunan juga menjadi bentuk akuntabilitas publik, di mana hasilnya disampaikan kepada DPRD dan masyarakat secara transparan. Dengan demikian, masyarakat dapat menilai kinerja pemerintah daerah secara objektif, sementara pemerintah dapat menjadikan hasil evaluasi sebagai masukan berharga dalam siklus perencanaan pembangunan selanjutnya.

Dengan sistem pengendalian dan evaluasi yang kuat, RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan adaptif, sehingga setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

- a. Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD;
- b. Perangkat Daerah yang mengurus urusan perencanaan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing Pimpinan PD sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. Kepala PD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan PD periode sebelumnya;
- d. Perangkat Daerah yang mengurus urusan perencanaan menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c);
- e. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf (d) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
 - (1) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaiannya dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya;
 - (2) Dengan mempertimbangkan berbagai hal yang diluar kendali Pemerintah Kabupaten Toba dan diperkirakan dapat menghambat pelaksanaan RPJMD, maka berbagai strategi, arah kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan kepada DPRD Kabupaten Toba untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

5. Mekanisme Perubahan

Pelaksanaan perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam penyusunan dokumen awal, atau apabila terjadi perubahan mendasar yang memerlukan penyesuaian tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, maupun program prioritas. Perubahan dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mengatur bahwa perubahan dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

1. **Terjadi perubahan yang mendasar** seperti kebijakan nasional, peraturan perundang-undangan, dan hasil evaluasi pelaksanaan periode sebelumnya.
2. **Terjadi pergeseran prioritas pembangunan** akibat dinamika sosial, ekonomi, politik, atau bencana alam yang mempengaruhi capaian target.
3. **Adanya hasil evaluasi** yang menunjukkan perlunya penyesuaian target dan indikator kinerja.

Proses mekanisme perubahan dilaksanakan melalui tahapan:

- **Identifikasi dan analisis perubahan** oleh perangkat daerah terkait berdasarkan data dan evaluasi kinerja.

- **Pembahasan teknis lintas perangkat daerah** untuk sinkronisasi dan harmonisasi perubahan tujuan, sasaran, dan program.
- **Konsultasi publik dan pemangku kepentingan** untuk memastikan aspirasi dan masukan masyarakat terakomodasi.
- **Penyusunan dokumen perubahan** yang memuat penyesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, dan program prioritas.
- **Pembahasan bersama DPRD** untuk memperoleh persetujuan melalui mekanisme penetapan peraturan daerah atau keputusan kepala daerah sesuai kewenangan.

Dengan mekanisme ini, diharapkan perubahan dokumen perencanaan tetap menjaga kesinambungan pembangunan daerah, adaptif terhadap perubahan, dan mampu menjawab kebutuhan serta tantangan baru yang dihadapi.

5.2. PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

Pembiayaan pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 diarahkan untuk menjamin ketersediaan sumber dana yang memadai, berkelanjutan, dan efisien guna mendukung pencapaian visi “Toba Mantap, Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunannya.”

Pendekatan pembiayaan dilakukan dengan prinsip konsistensi, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, yang memastikan keselarasan antara target pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Pembiayaan tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah (PAD) dan transfer dari pemerintah pusat, tetapi juga mengoptimalkan sumber pembiayaan kreatif melalui kemitraan publik-swasta, pemanfaatan aset daerah, serta dukungan pendanaan dari lembaga keuangan dan hibah.

Kebijakan pembiayaan akan difokuskan pada:

- 1) Prioritas pada program strategis daerah, terutama yang berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi hasil (result-based financing), sehingga setiap rupiah anggaran dapat memberikan manfaat nyata.
- 3) Penguatan kapasitas fiskal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, serta optimalisasi pengelolaan aset.
- 4) Peningkatan disiplin anggaran dengan memastikan belanja pembangunan sesuai dengan kemampuan riil keuangan daerah dan tidak membebani fiskal di masa depan.
- 5) Pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif yang sah dan transparan untuk mempercepat pencapaian target pembangunan.

Dengan penerapan kaidah pembiayaan yang terencana, terukur, dan akuntabel, diharapkan proses pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, menjaga keberlanjutan fiskal, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Toba.

5.3. KESIMPULAN

RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dokumen RPJMD menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah serta indikator kinerja dan program prioritas selama kurun waktu 5 tahun yang menjawab tantangan permasalahan serta isu-isu strategis daerah sehingga dapat dicapai visi yang telah dirumuskan.

RPJMD ini memuat analisis kondisi daerah, identifikasi isu strategis, prioritas pembangunan, kerangka pendanaan, serta kaidah pelaksanaan yang meliputi konsistensi perencanaan dan pendanaan, partisipasi masyarakat, kapasitas fiskal, pembiayaan pembangunan, serta pengendalian dan evaluasi pembangunan. Keseluruhan proses penyusunan didasarkan pada prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas, sehingga dapat menjadi instrumen yang mampu mengarahkan pembangunan daerah secara tepat sasaran.

Dengan tersusunnya RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh perangkat daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dapat bersinergi untuk mewujudkan pembangunan yang merata, berkelanjutan, dan berdaya saing, sehingga Kabupaten Toba dapat berkembang menjadi daerah yang Maju daerah nya, sejahtera rakyatnya dan berkelanjutan pembangunannya.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi, misi dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 ini menjadi tanggungjawab bersama diantara Pemerintah, Stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Toba.

BUPATI TOBA,

Cap/Dto

EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

SALINAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n SEKRETARIS DAERAH KAB. TOBA
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
B. Kepala Bagian Hukum


LUKMAN JANTI SIAGIAN, SH, MH
NIP. 19750804 200502 1 002

TOBA MANTAP 2029

**MAJUDAERAHNYA, SEJAHTERA
RAKYATNYA, BERKELANJUTAN
PEMBANGUNANNYA**



KABUPATEN
KARYO
BUPATI TOBA SA